

TUGAS AKHIR

SKRIPSI

**MANAJEMEN LAHAN PADA PERMUKIMAN
NELAYAN SEBAGAI PENGENDALIAN
KAWASAN KUMUH DI
DESA TABANIO, KECAMATAN TAKISUNG
KABUPATEN TANAH LAUT
KALIMANTAN SELATAN**

**Disusun Oleh
GHESTIAR KHARISMA KUSUMO
NIM. 1724047**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

2022



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Jln. Bendungan Sigura – Gura No. 2, Malang – Jawa Timur
Telp / Fax : (0341)567154

LEMBAR PENGESAHAN

Manajemen Lahan Pada Permukiman Nelayan Sebagai Pengendalian
Kawasan Kumuh Wilayah Pesisir di Desa Tabanio Kecamatan Takisung,
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Skripsi dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Sidang Skripsi Jenjang
Strata Satu (S-1)

Pada Hari : Rabu
Tanggal : 06 Juli 2022

Diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota


Disusun Oleh :
Ghestiar Kharisma Kusumo
17.24.047

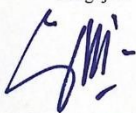
Disahkan oleh :

Penguji I

Penguji II

Penguji III


Arief Setiawan, ST., MT


Ir. Titik Poerwati, MT


Mohammad Reza, ST., MURP

Mengetahui
Ketua

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota




Agung Watiaksono., ST., MT

NIP. 1039600292



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Jln. Bendungan Sigura – Gura No. 2, Malang – Jawa Timur
Telp / Fax : (0341)567154

PERSETUJUAN SKRIPSI

Manajemen Lahan Pada Permukiman Nelayan Sebagai Pengendalian
Kawasan Kumuh Wilayah Pesisir di Desa Tabanio Kecamatan Takisung,
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota S-1 Institut
Teknologi Nasional Malang

Disusun Oleh :
Ghestiar Kharisma Kusumo
17.24.047

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agung Witiaksono, S.T., MT

Maria C. Endrawati, ST., MIUEM



Mengetahui,
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Agung Witiaksono, S.T., MT
NIP. Y. 1039600292



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Jln. Bendungan Sigura – Gura No. 2, Malang – Jawa Timur
Telp / Fax : (0341)567154

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ghestiar Kharisma Kusumo
NIM : 17.24.047
Hari / Tanggal : Rabu, 06 Juli 2022
Judul Skripsi : Manajemen Lahan Pada Permukiman
Nelayan Sebagai Pengendalian Kawasan
Kumuh Wilayah Pesisir di Desa Tabanio
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar – benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini adalah jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, September 2022
Yang Membuat Pernyataan



Ghestiar Kharisma Kusumo
NIM : 17.24.047



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Jln. Bendungan Sigura – Gura No. 2, Malang – Jawa Timur
Telp / Fax : (0341)567154

LEMBAR PERBAIKAN

Dalam Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota :

Nama : Ghestiar Kharisma Kusumo
NIM : 17.24.047
Hari / Tanggal : Rabu, 06 Juli 2022
Judul Skripsi : Manajemen Lahan Pada Permukiman
Nelayan Sebagai Pengendalian Kawasan
Kumuh Wilayah Pesisir di Desa Tabanio
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan

Terdapat kekurangan yang meliputi :

1. Hasil akhir belum terlihat
2. Analisa untuk manajemen lahan
3. Hasil survey dimasukkan ke bab IV
4. Abstrak dan kata pengantar di perbaiki

Malang, September 2022
Penguji I

Arief Setiawan, ST., MT



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Jln. Bendungan Sigura – Gura No. 2, Malang – Jawa Timur
Telp / Fax : (0341)567154

LEMBAR PERBAIKAN

Dalam Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota :

Nama : Ghestiar Kharisma Kusumo
NIM : 17.24.047
Hari / Tanggal : Rabu, 06 Juli 2022
Judul Skripsi : Manajemen Lahan Pada Permukiman
Nelayan Sebagai Pengendalian Kawasan
Kumuh Wilayah Pesisir di Desa Tabanio
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan

Terdapat kekurangan yang meliputi :

1. Rumusan masalah, sasaran dan lingkup materi
2. Tujuan bukan kalimat tanya
3. Variable untuk manajemen lahan
4. Daftar pustaka
5. Redaksional dan format halaman

Malang, September 2022
Penguji II

Ir. Titik Poerwati, MT



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Jln. Bendungan Sigura – Gura No. 2, Malang – Jawa Timur
Telp / Fax : (0341)567154

LEMBAR PERBAIKAN

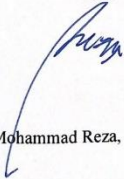
Dalam Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota :

Nama : Ghestiar Kharisma Kusumo
NIM : 17.24.047
Hari / Tanggal : Rabu, 06 Juli 2022
Judul Skripsi : Manajemen Lahan Pada Permukiman
Nelayan Sebagai Pengendalian Kawasan
Kumuh Wilayah Pesisir di Desa Tabanio
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan

Terdapat kekurangan yang meliputi :

1. Manajemen definisinya dan implementasinya tidak kelihatan
2. Aspek legalitas di pola manajemen land pooling dan land readjustment perlu di tegaskan
3. Konsekuensi dari konsep manajemen lahan yang digunakan
4. Langkah-langkah apa dari manajemen yang dikerjakan berdasarkan potensi kawasan penelitian (pariwisata dan perikanan)

Malang, 18 Februari 2022
Penguji III


Mohammad Reza, ST., MURP

**MANAJEMEN LAHAN PADA PERMUKIMAN NELAYAN
SEBAGAI PENGENDALIAN KAWASAN KUMUH DI
DESA TABANIO, KECAMATAN TAKISUNG
KABUPATEN TANAH LAUT
KALIMANTAN SELATAN**

ABSTRAK

Menurut Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/657.KUM/2020 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Tanah laut menyatakan bahwa Desa Tabanio termasuk dalam penetapan kawasan kumuh, serta menurut dari wawancara dengan kepala Desa Tabanio, bapak Madiansyah menyebutkan bahwa permukiman kumuh yang terdapat di Desa Tabanio tersebar di Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09, Rt 10.

Ada tiga metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan menggunakan metode analisa data deskriptif untuk mengetahui karakteristik permukiman kumuh, yang kedua menggunakan metode analisa skoring untuk mengetahui tingkat kekumuhan dan metode yang ketiga menggunakan analisa deskriptif dengan analisa kemampuan lahan untuk merumuskan analisa manajemen lahan, dimana dari analisa karakteristik dan tingkat kekumuhan dapat merumuskan manajemen lahan yang cocok untuk digunakan di wilayah penelitian. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan ada 4 Rt yang memiliki karakteristik kumuh kualitas bangunan, kumuh drainase lingkungan, kumuh pelayanan air bersih, kumuh sarana persampahan dan kumuh proteksi kebakaran, sedangkan di wilayah penelitian untuk tingkat kekumuhan terbagi menjadi dua yaitu tingkat kekumuhan sedang dan tingkat kekumuhan ringan, dimana Rt 04 termasuk kedalam tingkat kekumuhan sedang dan untuk Rt 07, Rt 08, Rt 09 dan Rt 10 termasuk kedalam tingkat kekumuhan ringan, untuk manajemen lahan yang digunakan pada wilayah penelitian yaitu land readjustment untuk Rt 04, relokasi juga diterapkan di Rt 04 dikarenakan ada 7 unit rumah yang berada disempadan sungai dan tidak mempunyai kejelasan atas hak bidang tanah yang ditempati, sedangkan untuk Rt 07 dan Rt 08 juga menggunakan land readjustment untuk arahan manajemen lahannya, untuk konsep penangan permukiman kumuh yaitu dengan rehabilitasi bangunan, penambahan SPAM unit baru, pembangunan PSP baru dan pembangunan pengamanan kebakaran sederhana sedangkan untuk Rt 09 dan Rt 10 arahan manajemen lahan yang digunakan yaitu land Pooling, untuk konsep penangan yang digunakan yaitu pembangunan SPAM unit baru, pembangunan sistem drainase baru, pembangunan PSP baru dan pembangunan pengamanan kebakaran sederhana

Kata Kunci : Manajemen Lahan, Permukiman Kumuh, Penggunaan Lahan

LAND MANAGEMENT IN FISHERMEN'S SETTLEMENT AS A CONTROL OF TABANIO VILLAGE, TAKISUNG DISTRICT, TANAH LAUT REGENCY SOUTH KALIMANTAN

ABSTRACT

The problem of slum settlements in coastal areas is a measure of a low quality of life, one of which can be seen from the physical form of settlements. Slum settlements are identical with the lack of facilities, facilities and infrastructure and can be categorized as uninhabitable houses. According to the Decree of the Regent of Tanah Laut Number 188.45/657.KUM/2020 concerning the Determination of Slums in Tanah Laut Regency, it is stated that Tabanio Village is included in the determination of slum areas, and according to an interview with the head of Tabanio Village, Mr. Madiansyah stated that the slum settlements in Tabanio Village spread over Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09, Rt 10.

There are three methods used in this research, namely using descriptive data analysis method to determine the characteristics of slum settlements, the second using scoring analysis method to determine the level of slums and the method used. The third is using descriptive analysis with land capability analysis to formulate land management analysis, where from the analysis of the characteristics and level of slums can formulate land management that is suitable for use in the research area. Based on the results of the analysis conducted, there are 4 RTs that have the characteristics of building quality slums, environmental drainage slums, clean water service slums, waste facilities slums and fire protection slums, while in the research area the slum level is divided into two, namely moderate slum level and mild slum level, where Rt 04 is included in the moderate slum level and for Rt 07, Rt 08, Rt 09 and Rt 10 is included in the light slum level, for land management used in the research area, namely land readjustment for Rt 04, relocation is also applied in Rt 04 because there are 7 housing units located along the riverbank and do not have clarity on the rights to the occupied land parcels, while for Rt 07 and Rt 08 also use land readjustment for land management direction, for the concept of handling slum settlements, namely by building rehabilitation, adding new SPAM units, construction of new PSP and development of security simple roots while for Rt 09 and Rt 10 the land management direction used is land pooling, for the handling concept used is the construction of a new SPAM unit, construction of a new drainage system, construction of new PSP and construction of simple fire protection

Keywords: Land Management, Slums, Land Use

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat serta karunianya sehingga praktikan dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tugas Akhir yang membahas tentang “Manajemen Lahan Pada Permukiman Nelayan Sebagai Pengendalian Kawasan Kumuh Wilayah Pesisir di Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan”.

Desa Tabanio sebagai salah satu desa yang terdapat di kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dimana mayoritas masyarakat Desa Tabanio merupakan nelayan dikarenakan Desa Tabanio terdapat di pinggir pantai, serta dari 22 Rt yang terdapat di Desa Tabanio ada 5 Rt yang termasuk kedalam Kawasan permukiman dimana disebutkan pada SK kumuh tahun 2020. Untuk mengetahui arahan manajemen lahan yang digunakan untuk pengendalian permukiman kumuh yang pertama dilakukan yaitu dengan mengetahui karakteristik permukiman kumuh di wilayah penelitian, setelah itu mengetahui tingkat kekumuhan di wilayah penelitian. Setelah mengetahui karakteristik permukiman kumuh dan mengetahui tingkat kekumuhan yang ada di wilayah penelitian selanjutnya dilakukan perumusan arahan manajemen lahan yang cocok untuk pengendalian permukiman kumuh di wilayah penelitian yang berada di Desa Tabanio

Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti seminar proposal dalam menyelesaikan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang, dalam proses penyusunannya dan pengerjaan laporan ini tak lepas dari dukungan, bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu praktikan ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kehendak penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat dan juga terhindar dari hal yang tidak mampu penulis atasi.
2. Bapak Dr. Agung Witjaksono, ST.,MTP selaku Pembimbing I penyusunan tugas akhir.
3. Ibu Maria C. Enderwanti., ST., MIUEM selaku Pembimbing II penyusunan tugas akhir.
4. Bapak, ibu dan keluarga yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti.
5. Seluruh individu yang telah membantu memberi masukan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan laporan tugas akhir.

Penyusunan laporan tugas akhir ini disusun dengan baik, tetapi masih banyak kekurangan didalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu saran dan masukan yang bisa membuat laporan ini menjadi sempurna sangat berguna untuk peneliti. Demikian apa yang dapat disampaikan semoga laporan ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi pembaca serta peneliti sendiri.

Malang, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR PETA.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Sasaran	3
1.3.1 Tujuan	3
1.3.2 Sasaran	3
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.4.1 Ruang Lingkup Materi	4
3.1.1 Ruang Lingkup Lokasi	4
1.5 Keluaran dan Manfaat	5
1.5.1 Keluaran Penelitian	5
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Kerangka Pikir.....	6
1.7 Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Wilayah Pesisir.....	13
2.1.1 Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir	14
2.1.2 Masalah Lingkungan Hidup Pesisir	15
2.2 Permukiman.....	16
2.2.1 Permukiman Nelayan	16
2.2.2 Prasarana Permukiman Nelayan	18
2.2.3 Pola Permukiman Nelayan	20
2.2.4 Permasalahan Permukiman Nelayan.....	21
2.2.5 Permukiman Kumuh.....	22
2.3 Manajemen Lahan.....	27
2.3.1 Konsolidasi Lahan	28
2.3.2 Land Readjustment	29
2.3.3 Land Pooling.....	31

2.3.4 Relokasi Permukiman.....	31
2.4 Penggunaan Lahan	32
2.5 Kajian Terdahulu.....	32
2.6 Landasan Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	43
3.3.1 Jenis Data.....	43
3.3.2 Sumber Data	44
3.4 Metode Analisis Data.....	44
3.4.1 Analisa Karakteristik Permukiman Kumuh di Permukiman Nelayan Desa Tabanio	44
3.4.2 Analisis Penentuan Aspek dan Tingkat Kekumuhan	44
3.4.3 Analisa Perumusan Manajemen Lahan untuk Pengendalian Kawasan Permukiman kumuh di Desa Tabanio.....	51
3.5 Populasi dan Sampel	60
3.5.1 Populasi.....	60
3.5.2 Sampel.....	61
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	62
4.1 Gambaran Umum	62
4.1.1 Gambaran Umum Geografis Desa Tabanio.....	62
4.1.2 Gambaran Umum Kondisi Sosial	63
4.1.3 Gambaran Umum Permukiman Kumuh Desa Tabanio.....	64
4.1.4 Gambaran Umum Kondisi Sosial Keluarga Prasejahtera Permukiman Kumuh Desa Tabanio	65
4.2 Identifikasi Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung	73
4.2.1 Persebaran bangunan di kawasan permukiman kumuh Desa Tabanio ..	73
4.2.2 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman Kumuh Desa Tabanio	73
4.2.3 Keteraturan Bangunan.....	90
4.2.4 Kondisi Masyarakat Permukiman Permukiman Kumuh di Wilayah Penelitian.....	90
4.2.5 Karakteristik Sarana dan Prasarana	92
4.2.6 Kepemilikan Lahan	101
4.2.5 Kondisi Mitigasi Bencana di Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Tabanio	101
BAB V ANALISA	102

5.1 Analisis Identifikasi Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung	102
5.1.1 Penilaian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung.....	102
5.1.2 Hasil Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh	107
5.2 Analisis Identifikasi Tingkat Kekumuhan di Permukiman Nelayan di Wilayah Penelitian	121
5.2.1 Klasifikasi Tingkat Kekumuhan	121
5.2.3 Tipologi Permukiman Kumuh.....	129
5.3 Analisis Manajemen Lahan Untuk Pengendalian Kawasan Kumuh di Desa Tabanio.....	132
5.3.1 Analisis Kemampuan Lahan Pada Wilayah Pesisir Desa Tabanio	132
5.3.2 Analisis Manajemen Penggunaan Lahan Pada Permukiman Sebagai Pengendalian Kawasan Kumuh Desa Tabanio.....	147
BAB VI PENUTUP.....	178
6.1 Kesimpulan.....	178
6.2 Rekomendasi	180
DAFTAR PUSTAKA	181

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Variabel Penelitian	36
Tabel 2. 2 Definisi Operasional	39
Tabel 3. 1 Aspek Kondisi Bangunan	45
Tabel 3. 2 Aspek Kondisi Jalan Lingkungan.....	46
Tabel 3. 3 Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum.....	46
Tabel 3. 4 Aspek Indikator Kondisi Drainase Lingkungan.....	47
Tabel 3. 5 Aspek Indikator Kondisi Air Limbah.....	48
Tabel 3. 6 Aspek Indikator Kondisi Pengelolaan Sampah.....	49
Tabel 3. 7 Aspek Indikator Proteksi Kebakaran.....	50
Tabel 3. 8 Pembobotan SKL Morfologi	53
Tabel 3. 9 Pembobotan SKL Kestabilan Lereng	54
Tabel 3. 10 Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi.....	55
Tabel 3. 11 Pembobotan SKL Ketersediaan Air	56
Tabel 3. 12 Pembobotan SKL Kerentanan Bencana	56
Tabel 3. 13 Pembobotan SKL Drainase.....	57
Tabel 3. 14 Pembobotan SKL Pembuangan Limbah	57
Tabel 3. 15 Pembobotan SKL Terhadap Erosi	58
Tabel 3. 16 Pembobotan SKL Kemudahan di Kerjakan	58
Tabel 3. 17 Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan.....	60
Tabel 4. 1 Topografi Desa Tabanio	62
Tabel 4. 2 Jenis Tanah Desa Tabanio	63
Tabel 4. 3 Kemiringan Lereng Desa Tabanio.....	63
Tabel 4. 4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Desa Tabanio	64
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis	64
Tabel 4. 6 Luas Permukiman Kumuh di Desa Tabanio	65
Tabel 4. 7 Jumlah Keluarga Prasejahtera di Desa Tabanio.....	65
Tabel 4. 8 Persebaran Bangunan Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh	73
Tabel 4. 9 Kualitas Bangunan	75
Tabel 4. 10 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding di Desa Tabanio	75
Tabel 4. 11 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai di Desa Tabanio	76
Tabel 4. 12 Kepadatan Bangunan Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Tabanio.....	77
Tabel 4. 13 Keteraturan Bangunan	90
Tabel 4. 14 Kepadatan Penduduk	91
Tabel 4. 15 Proyeksi Penduduk Setiap RT	91

Tabel 4. 16 Persebaran Fasilitas di Permukiman Kumuh di Wilayah Penelitian	92
Tabel 4. 17 Kondisi Jaringan Jalan	95
Tabel 4. 18 Kepemilikan Lahan	101
Tabel 5. 1 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh.....	102
Tabel 5. 2 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh	
Ketidakteraturan Bangunan.....	109
Tabel 5. 3 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Kepadatan Bangunan	109
Tabel 5. 4 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Kualitas Bangunan	109
Tabel 5. 5 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Cakupan Pelayanan Jalan	111
Tabel 5. 6 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	111
Tabel 5. 7 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Penyediaan Air Bersih.....	113
Tabel 5. 8 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air.....	113
Tabel 5. 9 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Ketidakterediaan Drainase	113
Tabel 5. 10 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Kualitas Konstruksi Drainase	115
Tabel 5. 11 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Sistem Pengelolaan Air Limbah	115
Tabel 5. 12 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah	115
Tabel 5. 13 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Prasarana dan Sarana Persampahan.....	118
Tabel 5. 14 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Sistem Pengelolaan Persampahan.....	118
Tabel 5. 15 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran.....	119
Tabel 5. 16 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran.....	119
Tabel 5. 17 Hasil Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Desa Tabanio.....	120
Tabel 5. 18 Tingkat Kekumuhan dan Rentang Nilai.....	121
Tabel 5. 19 Penilaian Tingkat Kekumuhan Desa Tabanio RT 04	123
Tabel 5. 20 Penilaian Tingkat Kekumuhan Desa Tabanio RT 07	124

Tabel 5. 21	Penilaian Tingkat Kekumuhan Desa Tabanio RT 08	125
Tabel 5. 22	Penilaian Tingkat Kekumuhan Desa Tabanio RT 09	126
Tabel 5. 23	Penilaian Tingkat Kekumuhan Desa Tabanio RT 10	127
Tabel 5. 24	Hasil Penilaian Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh Desa Tabanio.....	129
Tabel 5. 25	Tipologi Permukiman Kumuh.....	130
Tabel 5. 26	Satuan Kemampuan Lahan Morfologi	132
Tabel 5. 27	Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan	133
Tabel 5. 28	Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng	133
Tabel 5. 29	Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air	137
Tabel 5. 30	Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi	138
Tabel 5. 31	Satuan Kemampuan Lahan Limbah	143
Tabel 5. 32	Klasifikasi Kemampuan Lahan Desa Tabanio.....	143
Tabel 5. 33	Rencana Pola Ruang di Desa Tabanio	148
Tabel 5. 34	Rumusan Manajemen Lahan di Desa Tabanio	151
Tabel 5. 35	Arahan Manajemen lahan permukiman kumuh Desa Tabanio	155
Tabel 5. 36	Arahan Konsep Penanganan Permukiman kumuh Rt 04.....	158
Tabel 5. 37	Arahan Konsep Penanganan Permukiman kumuh Rt 07.....	159
Tabel 5. 38	Arahan Konsep Penanganan Permukiman kumuh Rt 08.....	159
Tabel 5. 39	Arahan Konsep Penanganan Permukiman kumuh Rt 09.....	164
Tabel 5. 40	Arahan Konsep Penanganan Permukiman kumuh Rt 10.....	164

DAFTAR PETA

Peta 1. 1 Administrasi Kabupaten Tanah Laut	8
Peta 1. 2 Kecamatan Takisung	9
Peta 1. 3 Administrasi Kecamatan Takisung	10
Peta 1. 4 Desa Tabanio	11
Peta 4. 1 Topografi Desa Tabanio.....	66
Peta 4. 2 Jenis Tanah	67
Peta 4. 3 Kemiringan Lereng.....	68
Peta 4. 4 Penggunaan Lahan Desa Tabanio	69
Peta 4. 5 Pembagian Dusun Desa Tabanio	70
Peta 4. 6 Pembagian RT Desa Tabanio.....	71
Peta 4. 7 Batas Wilayah Penelitian	72
Peta 4. 8 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding	78
Peta 4. 9 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding (RT 04)	79
Peta 4. 10 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding (RT 07)	80
Peta 4. 11 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding (RT 08)	81
Peta 4. 12 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding (RT 09)	82
Peta 4. 13 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding (RT 10)	83
Peta 4. 14 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai	84
Peta 4. 15 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai (RT 04)	85
Peta 4. 16 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai (RT 07)	86
Peta 4. 17 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai (RT 08)	87
Peta 4. 18 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai (RT 09)	88
Peta 4. 19 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai (RT 10)	89
Peta 4. 20 Fasilitas Sarana Pendidikan	98
Peta 4. 21 Fasilitas Sarana Peribadatan	99
Peta 4. 22 Kondisi Jaringan Jalan Berdasarkan Perkerasannya	100
Peta 5. 1 Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh Desa Tabanio	128
Peta 5. 2 Tipologi Permukiman Kumuh di Wilayah Penelitian	131
Peta 5. 3 Satuan Kemampuan Lahan Morfologi.....	134
Peta 5. 4 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng	135
Peta 5. 5 Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan	136
Peta 5. 6 Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air.....	139
Peta 5. 7 Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi	140
Peta 5. 8 Satuan Kemampuan Lahan Drainase	141
Peta 5. 9 Peta Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi	142
Peta 5. 10 Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah	144
Peta 5. 11 Peta Satuan Kemampuan Lahan Rawan Bencana	145
Peta 5. 12 Kemampuan Lahan Desa Tabanio	146

Peta 5. 13 Pola Ruang Desa Tabanio	149
Peta 5. 14 Arahan Manajemen Lahan Permukiman Kumuh Desa Tabanio	156
Peta 5. 15 Fasilitas Umum Pada Rt 04, Rt 07 dan Rt 08 Sebelum Land Readjustment.....	161
Peta 5. 16 Fasilitas Umum Rt 04, Rt 07 dan Rt 08 Sesudah Land Readjustment.....	162
Peta 5. 17 Fasilitas Umum Pada Rt 09 dan Rt 10 Sebelum Land Pooling .	166
Peta 5. 18 Fasilitas Umum Pada Rt 09 dan Rt 10 Sesudah Land Pooling ..	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir	12
Gambar 4. 1 Rumah Permanen	74
Gambar 4. 2 Rumah Non Permanen	74
Gambar 4. 3 Kondisi Fisik Material Dinding Bangunan	76
Gambar 4. 4 Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Lantai.....	76
Gambar 4. 5 Kondisi Fisik Bangunan berdasarkan jarak antar bangunan....	77
Gambar 4. 6 Fasilitas Pendidikan SDN 1 Tabanio dan SDN 2 Tabanio	93
Gambar 4. 7 Kondisi Fasilitas Peribadatan.....	94
Gambar 4. 8 Kondisi Sarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Pembantu	94
Gambar 4. 9 Kondisi Fasilitas Perjas Pasar di Desa Tabanio	95
Gambar 4. 10 Kondisi Fasilitas Tempat Pembuangan Sementara	97
Gambar 4. 1 Rumah Permanen	74
Gambar 4. 2 Rumah Non Permanen	74
Gambar 4. 3 Kondisi Fisik Material Dinding Bangunan	76
Gambar 4. 4 Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Lantai	76
Gambar 4. 5 Kondisi Fisik Bangunan berdasarkan jarak antar bangunan	77
Gambar 4. 6 Fasilitas Pendidikan SDN 1 Tabanio dan SDN 2 Tabanio	93
Gambar 4. 7 Kondisi Fasilitas Peribadatan	94
Gambar 4. 8 Kondisi Sarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Pembantu	94
Gambar 4. 9 Kondisi Fasilitas Perjas Pasar di Desa Tabanio	95
Gambar 4. 10 Kondisi Fasilitas Tempat Pembuangan Sementara	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir telah didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas kabupaten/kota ke arah pedalaman menurut (UU NO.27 tahun 2007), dan memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi dan masyarakat di daerah pesisir mayoritas merupakan nelayan, serta aktivitas perikanan seperti penangkapan dan budidaya banyak terpusat di wilayah pesisir.

Sebagai kawasan dengan tingkat pemanfaatan lahan yang cukup tinggi kawasan pesisir menghadapi berbagai dampak negative akibat aktivitas manusia maupun akibat bencana alam. Aktivitas manusia yang dimaksud biasanya beberapa macam, yaitu permukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata(bahari), transportasi laut, pertambangan dan energi. Dimana semua aktivitas tersebut sangat memerlukan lahan, bentuk penggunaan lahan suatu wilayah atau kawasan terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Oleh karena itu meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas di suatu tempat menjadi pemicu meningkatnya laju pertumbuhan penggunaan lahan.

Masalah permukiman kumuh di kawasan pesisir menjadi ukuran tingkat kualitas hidup yang rendah yang salah satunya dapat dilihat dari bentuk fisik permukiman. Permukiman kumuh identik dengan minimnya fasilitas, sarana dan prasarana serta dapat dikategorikan dalam rumah tidak layak huni.

Di Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang memiliki wilayah pesisir di provinsi Kalimantan selatan, akan tetapi di kabupaten Tanah laut penggunaan lahan di wilayah pesisir masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan dengan penggunaan lahan wilayah pesisir, Kabupaten Tanah Laut mempunyai 15% wilayah pantai yaitu sepanjang 200 km. Dengan wilayah pantai yang luas sangat ideal untuk dijadikan industri perikanan laut dan pembangunan pelabuhan berstandar internasional (RPJPD tahun 2005-2025). Dengan dukungan potensi geografis Kabupaten Tanah Laut membuat prospek pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sangat besar. Apalagi aktivitas penangkapan ikan laut di Kalimantan Selatan hanya dilakukan di tiga kabupaten yang salah satunya Kabupaten Tanah Laut. Peluang terbukanya pasar untuk berbagai produk industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan maupun pariwisata yang besar dengan didukung dengan adanya rencana pelabuhan samudera. Selain potensi perikanan tangkap, potensi pengembangan perikanan budidaya Kabupaten Tanah Laut

termasuk dalam kategori besar. khususnya di Desa Tabanio merupakan wilayah pesisir yang cukup padat penduduk dengan mayoritas penduduk disana merupakan nelayan serta dari tahun ke tahun data permukiman di daerah tersebut makin padat dengan penduduk. Berdasarkan hasil studi kawasan kumuh di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013, kawasan permukiman kumuh di kabupaten Tanah Laut tersebar hanya pada 8 kecamatan (tersebar dalam 1 kelurahan dan 11 desa) yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Luas permukiman kumuh di Kabupaten Tanah Laut meliputi kawasan seluas 510,01 Ha atau 0,14% dari luas Kabupaten Tanah Laut yang seluas 363.135 Hektar. Kawasan kumuh prioritas di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Masterplan kawasan kumuh Kabupaten Tanah Laut tahun 2012 menyatakan bahwa kawasan kumuh nelayan, meliputi kawasan kumuh yang berada pada wilayah pesisir pantai yaitu; Kawasan Batakan, Tabanio, Kintap, Swarangan dan Takisung. Menurut Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/657.KUM/2020 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Tanah Laut menyatakan bahwa Desa Tabanio termasuk dalam penetapan kawasan kumuh yang memiliki luasan perumahan kumuh dan permukiman sebesar 14,8 Ha, serta menurut dari wawancara dengan kepala Desa Tabanio, bapak Madiansyah menyebutkan bahwa permukiman kumuh yang terdapat di Desa Tabanio tersebar di RT 04, RT 07, RT 08, RT 09, RT 10. Desa Tabanio juga memiliki perekonomian yang tergolong masih sangat rendah serta penggunaan lahan yang masih tidak sesuai dengan aturannya. Upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam UU NO. 1 Tahun 2011 salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan peremajaan yang melibatkan komponen lahan pada konsep penanganannya. Maka dari itu perlunya penelitian manajemen lahan sebagai pengendali kawasan kumuh wilayah pesisir khususnya pada kawasan permukiman nelayan di Desa Tabanio, kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.

1.2 Rumusan Masalah

Kondisi Desa Tabanio memiliki potensi sumberdaya berupa perikanan dan pariwisata. Dimana di Desa Tabanio sendiri mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan jumlah penduduk di wilayah tersebut dari tahun ke tahun semakin meningkat dan akan menimbulkan kepadatan di wilayah tersebut. Pada kondisi ini akan mempengaruhi kepadatan fasilitas dan kepentingan akan terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga akan membuat semua aktifitas yang akan berpengaruh pada penggunaan lahan. Dimana Desa Tabanio menurut SK kumuh Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 menyatakan bahwa Desa Tabanio termasuk dalam kawasan permukiman kumuh. Dimana pengaturan permukiman nelayan masih bersifat umum dalam artian pengaturan yang dilakukan cenderung sama dengan permukiman di wilayah non pesisir serta sangat masih kurangnya di wilayah infrastruktur pendukung permukiman yang sesuai dengan standart. Penyebab utama terjadinya kawasan kumuh pada

wilayah pesisir khususnya pada kawasan permukiman nelayan adalah belum adanya manajemen penggunaan lahan pada permukiman nelayan yang berorientasi pada kajian fisik alami wilayah pesisir.

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mengetahui karakteristik kumuh permukiman nelayan di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung.
2. Bagaimana tingkat kekumuhan kawasan kumuh di permukiman nelayan Desa Tabanio, Kecamatan Takisung.
3. Bagaimana manajemen lahan sebagai pengendalian kawasan kumuh wilayah pesisir pada kawasan permukiman nelayan di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang terdapat dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Penggunaan Lahan Pada Permukiman Nelayan Sebagai Pengendalian Kawasan Kumuh Di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut” dapat dilihat pada sub bab dibawah ini.

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui karakteristik permukiman kumuh serta mengetahui tingkat kekumuhan dan mengetahui konsep manajemen lahan di permukiman nelayan untuk pengendalian kawasan kumuh di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuat sasaran secara struktural untuk terwujudnya tujuan diatas. Sasaran dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1.3.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas maka sasaran yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Karakteristik permukiman kumuh di permukiman nelayan Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengidentifikasi tingkat kekumuhan di permukiman nelayan Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.
3. Merumuskan manajemen lahan untuk pengendalian kawasan kumuh wilayah pesisir di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan suatu batas dalam membahas penelitian, ruang lingkup dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup materi dan ruang lingkup lokasi. Penjelasan terkait dengan ruang lingkup materi dan ruang lingkup lokasi sebagai berikut.

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini membahas mengenai batasan – batasan teori yang digunakan dalam penelitian merupakan kondisi fisik alami pada wilayah pesisir yang mempunyai kemampuan lahan untuk permukiman nelayan serta merumuskan manajemen permukiman nelayan sebagai pengendalian kawasan kumuh wilayah pesisir di desa Tabanio, kecamatan Takisung. Adapun lingkup materinya sebagai berikut

- 1 Mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di permukiman nelayan Desa Tabanio. Aspek yang dikaji dalam hal ini yaitu terkait dengan kondisi eksisting agar mengetahui faktor penyebab kekumuhan yang berada dipermukiman nelayan. Aspek yang dikaji yaitu aspek fisik dan lingkungan, seperti kondisi bangunan serta kondisi sarana dan prasarana.
- 2 Mengidentifikasi tingkat kekumuhan di permukiman nelayan di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung. Aspek yang dikaji yaitu kondisi fasilitas jaringan sarana dan prasarana, kondisi fisik dan tata bangunan, meliputi kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kualitas drainase, kondisi pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran.
- 3 Merumuskan manajemen lahan pada kawasan permukiman nelayan untuk pengendalian kawasan kumuh wilayah pesisir di Desa Tabanio. Aspek yang dikaji dalam hal ini yaitu terkait dengan konsep – konsep manajemen lahan yang cocok dengan wilayah penelitian sehingga dapat mengendalikan kawasan kumuh di permukiman nelayan daerah pesisir.

3.1.1 Ruang Lingkup Lokasi

Lingkup Wilayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah di wilayah pesisir kabupaten Tanah Laut yang berada di Desa Tabanio dimana desa tersebut merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pesisir dan memiliki potensi perikanan yang cukup menunjang sehingga kondisi di desa tersebut cukup padat penduduk. Secara geografis, Desa Tabanio mempunyai luas wilayah 4.313 Ha dan terletak di kawasan pesisir Kecamatan Takisung dan disebelah barat, berdasarkan wawancara dan observasi awal lingkup wilayah penelitian di Desa Tabanio berada di 5 RT dari 22 RT yang terdapat di Desa Tabanio yaitu berada di RT 04,07,08,09 & 10. Kabupaten Tanah Laut. Batas – batas wilayah administrasi adalah Sebelah Utara : Desa Sungai Bakau dan Desa Raden, Sebelah Timur : Desa Tungkaran, Desa Ujung Batu dan Desa Panjaratan, Sebelah Selatan : Desa Pagatan Besar, Sebelah Barat : Laut Jawa

1.5 Keluaran dan Manfaat

1.5.1 Keluaran Penelitian

Pada sub bab keluaran penelitian ini memuat tujuan yang akan dicapai dengan menerapkan pada sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sasaran yang akan menjadi keluaran dari penelitian ini yaitu:

- 1 Teridentifikasinya kondisi penggunaan lahan pada kawasan permukiman nelayan di desa Tabanio, Kecamatan Takisung berdasarkan tingkat kemampuan lahan untuk permukiman nelayan sehingga dapat mengetahui penyebab terjadinya kawasan kumuh pada wilayah pesisir di desa Tabanio, kecamatan Takisung.
- 2 Teridentifikasinya Manajemen penggunaan lahan untuk pengendalian kawasan kumuh wilayah pesisir di desa Tabanio, Kecamatan Takisung. Kabupaten Tanah Laut, agar dapat mengendalikan permukiman nelayan dari kondisi kekumuhan

1.5.2 Manfaat Penelitian

Hasil yang akan dihasilkan dari penelitaian ini bermanfaat bagi pihak pemerintah kabupaten Tanah Laut, pihak pendidikan dan untuk Program studi PWK ITN Malang.

1. Pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Manfaat dari penelitian ini bagi pihak pemerintah kabupaten Tanah Laut sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah dalam hal ini manajemen penggunaan lahan pada permukiman nelayan dalam pengendalian kawasan kumuh. Adapun manfaat penelitian bagi pihak pemerintah yaitu

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan bagi kebijakan dan alternative penanganan masalah pada kawasan permukiman nelayan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan untuk dinas yang terkait dengan hasil dari penelitian sebagai acuan untuk acuan manajemen penggunaan lahan kawasan permukiman daerah pesisir.

2. Pihak Pendidikan

Bagi pihak pendidikan, dapat menjadikan sebagai bahan pustaka dan menambah wawasan terhadap teori di bidang perencanaan wilayah dan kota, dimana dalam penelitian ini lebih focus pada pembahasan mengenai bagaimana menentukan manajemen penggunaan lahan di wilayah pesisir terutama di permukiman nelayan sebagai pengendalian kawasan kumuh sesuai teori penggunaan lahan dan permukiman kumuh yang terdahulu.

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Pihak Peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri dari disusunnya penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melatih peneliti untuk menerapkan ilmu dan metode-metode yang digunakan untuk melakukan penyusunan penelitian yang pernah didapatkan selama masa perkuliahan dengan kasus manajemen penggunaan lahan permukiman.
- b. Memberi masukan kepada pemerintah setempat terkait dengan beberapa analisis yang telah dihasilkan pada penyusunan penelitian ini.

1.6 Kerangka Pikir

Dalam Penelitian tentang Manajemen Penggunaan Lahan Pada Permukiman Nelayan Sebagai Pengendalian Kawasan Kumuh di Wilayah Pesisir di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, adapun kerangka pikir dalam penyusunan penelitian dapat dilihat pada gambar bagan sebagai berikut.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksud yaitu untuk membahas mengenai garis besar dari bab yang akan dibahas didalamnya. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini dijelaskan rinci sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah dari penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, sasaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian, ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup mater penelitian, keluaran yang diharapkan dalam penelitian dan manfaat dari penelitian, serta sistematika pembahasan dari penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi mengenai penjabaran dari kajian literature mengenai dasar-dasar teori dan referensi yang berkaitan dengan materi penelitian. serta pada akhir bab akan dirumuskan variable yang akan digunakan dalam penelitian.

Berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian. Metode tersebut meliputi pengumpulan data dan analisis data.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian meliputi pengumpulan data, metode analisis data dan metode pengambilan sampel.

BAB IV GAMBARAN UMUM

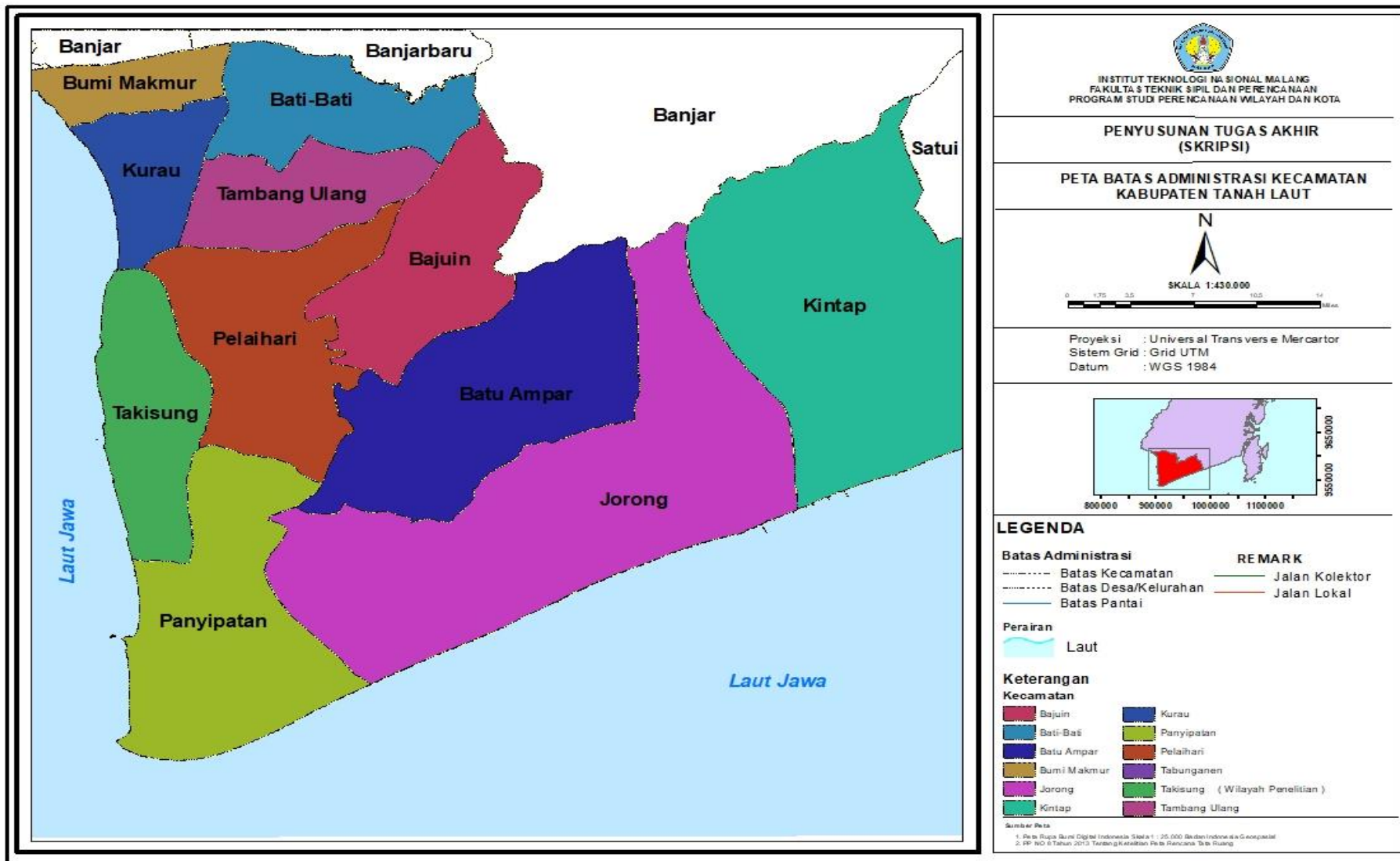
Bab ini berisikan tentang gambaran umum yang menjelaskan kondisi wilayah penelitian.

BAB V ANALISA

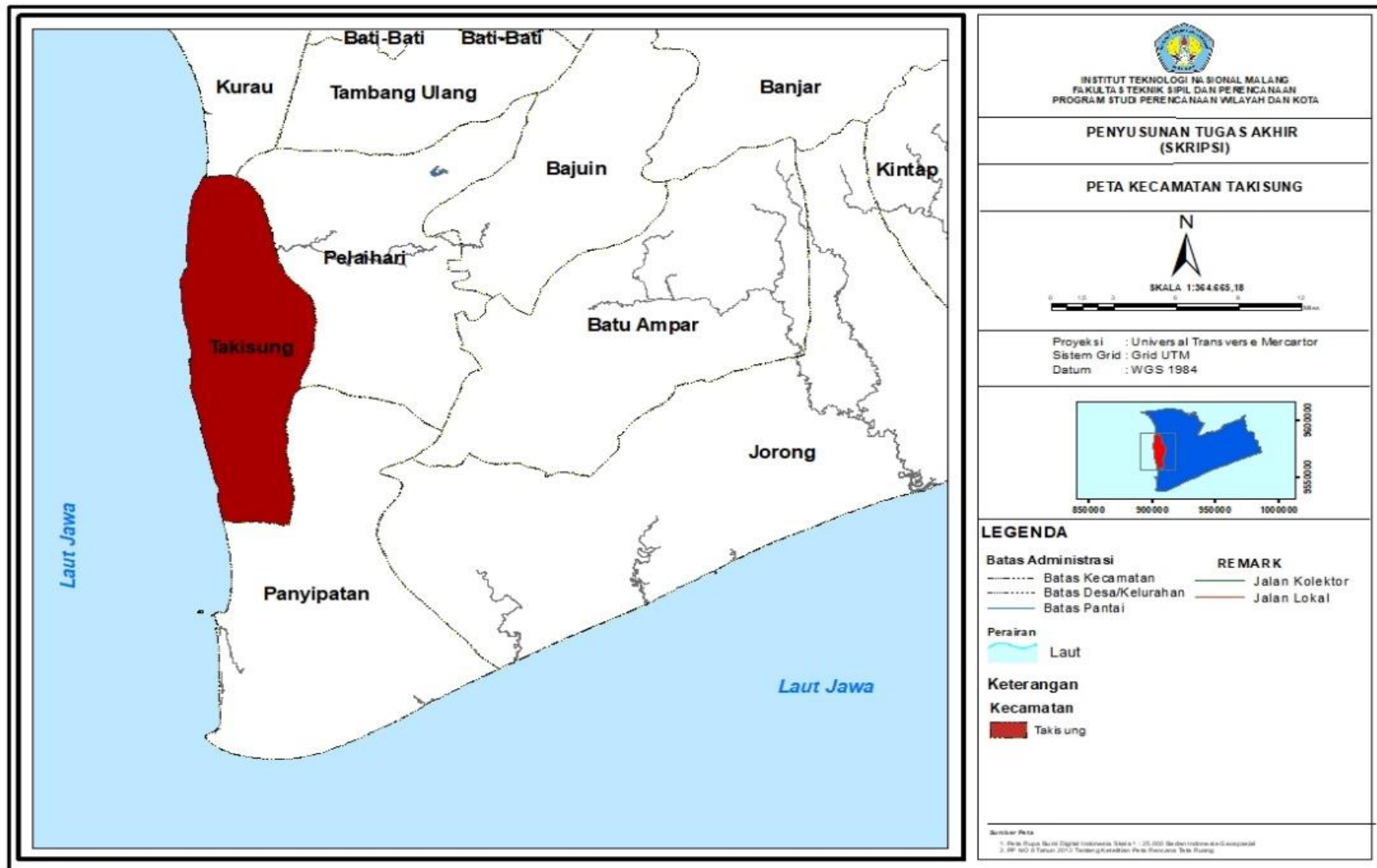
Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil kumpulan data dan Analisa mengenai penelitian tersebut.


BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.




Peta 1. 1 Administrasi Kabupaten Tanah Laut



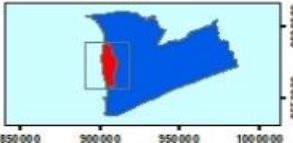

 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
 PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

**PENYUSUNAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)**

PETA KECAMATAN TAKISUNG


 SKALA 1:364.665,18


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid UTM
 Datum : WGS 1984




LEGENDA

Batas Administrasi	REMARK
----- Batas Kecamatan	— Jalan Kolektor
----- Batas Desa/Kelurahan	— Jalan Lokal
----- Batas Pantai	

Perairan

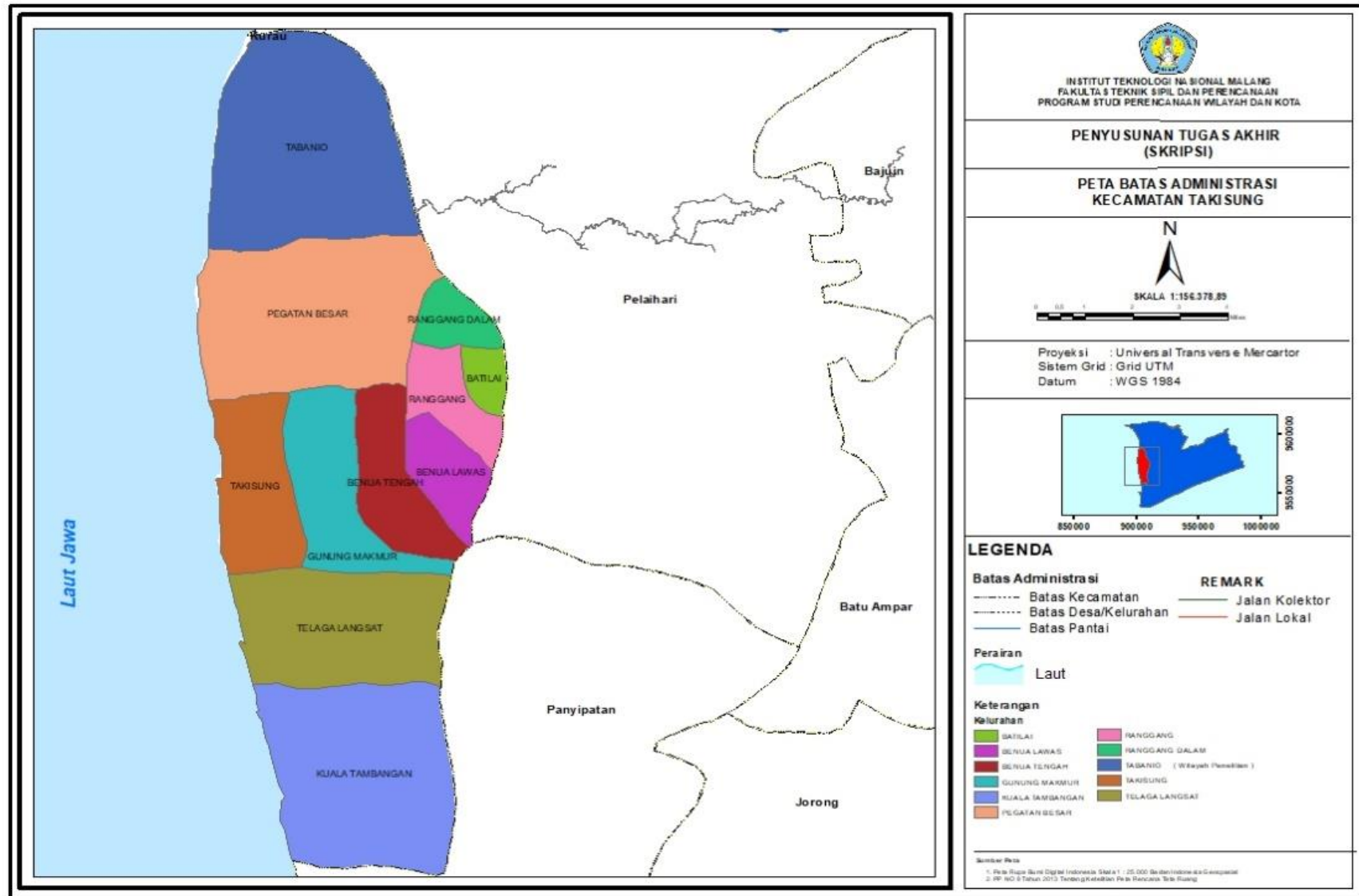
 Laut

Keterangan Kecamatan

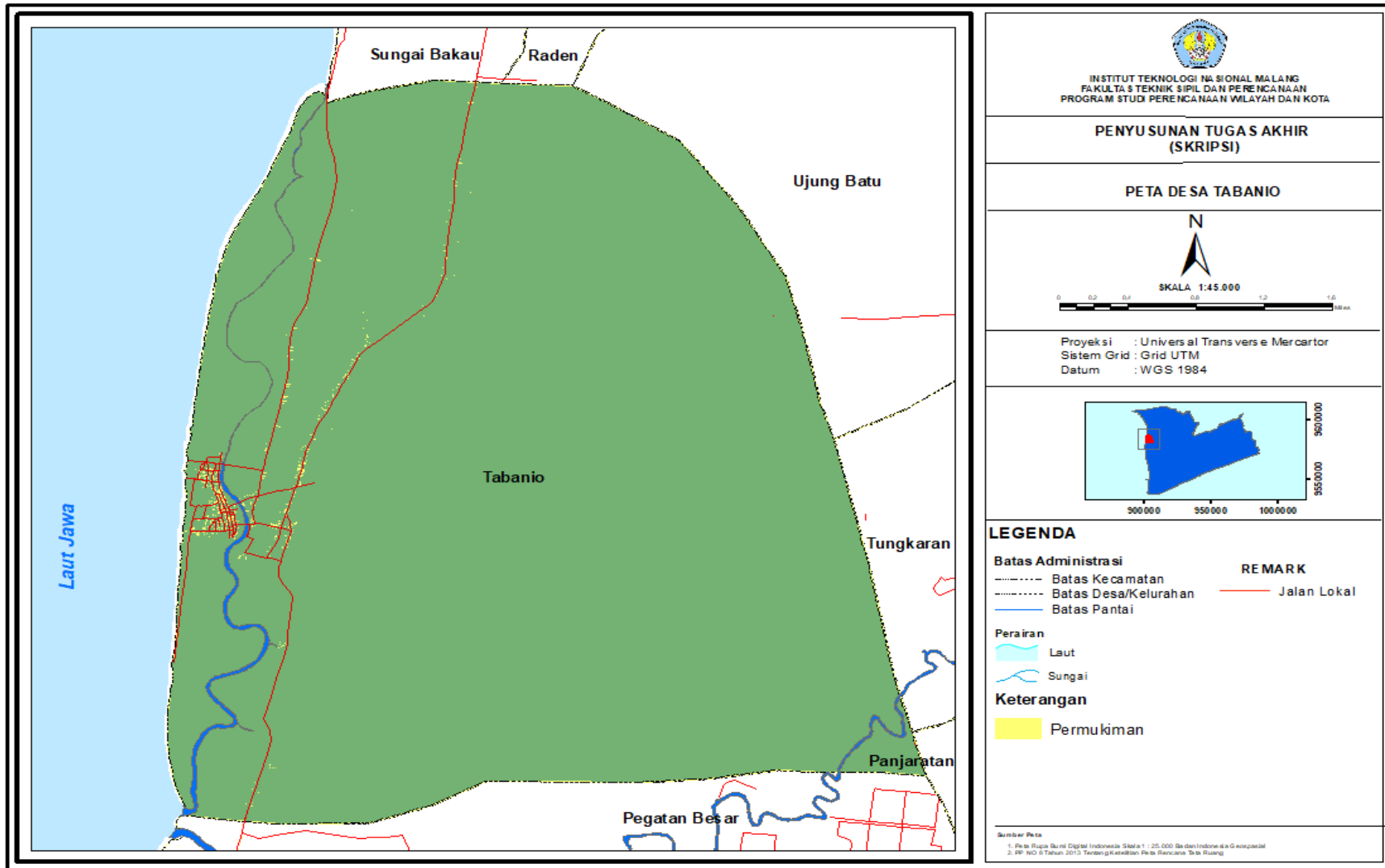
 Takisung

Berkas Peta
1. Peta Rupa Bumi Digital Indonesia Skala 1 : 25.000 Berbasis Sistem Koordinat Geospasial
2. RUPA BUMI © Tahun 2012, Terbiting Kantor Pusat Perencanaan Kota Malang

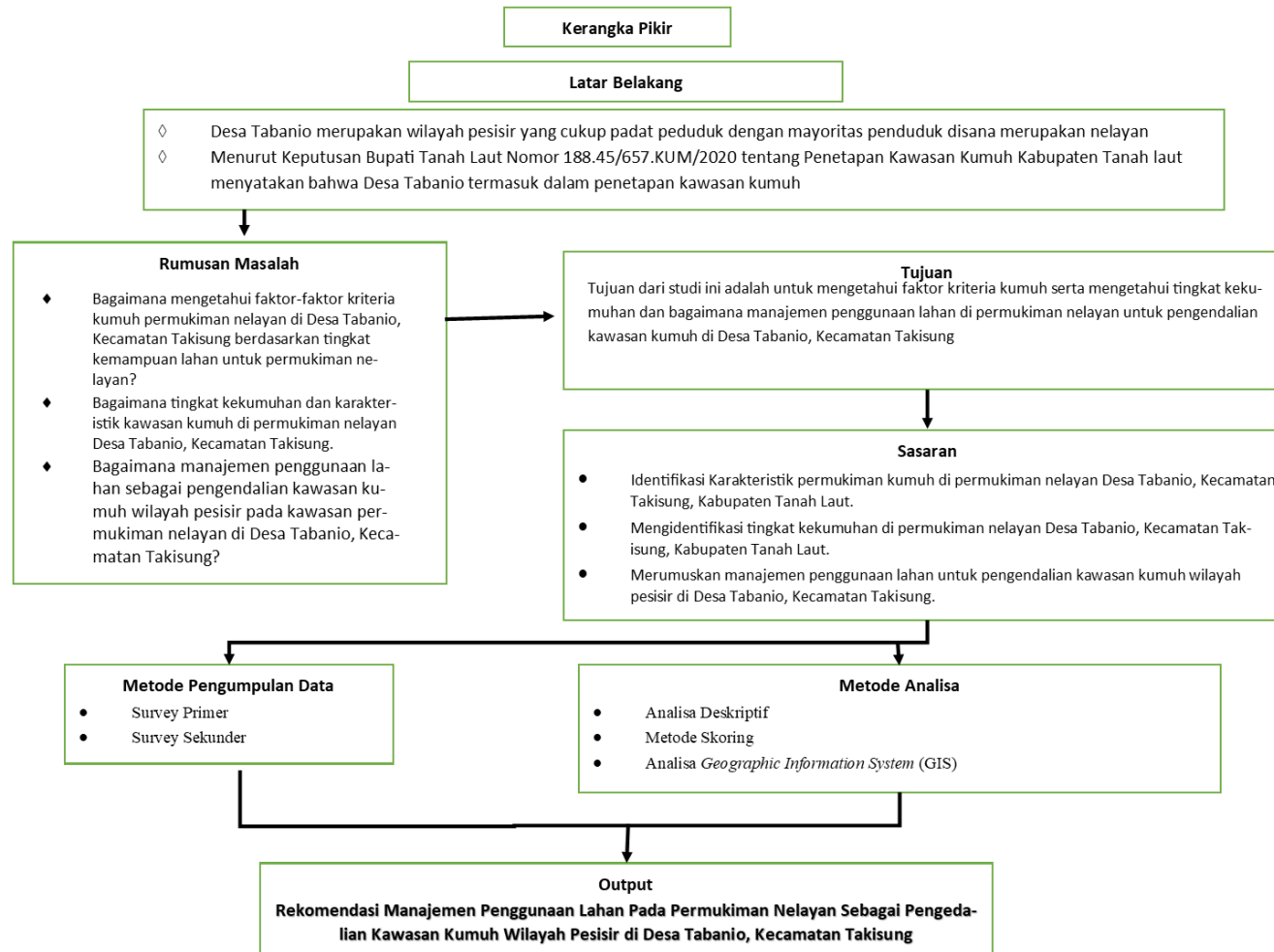
Peta 1. 2 Kecamatan Takisung



Peta 1.3 Administrasi Kecamatan Takisung



Peta 1. 4 Desa Tabanio



Gambar 1. 1 Kerangka Pikir

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Wilayah Pesisir

Undang – Undang Nomor 27 tahun 2007, menyebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan menurut Departemen Kelautan dan Perikanan dalam Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil mengurai lebih jelas bahwa, wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat – sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh prose alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Maka dari itu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan pada wilayah pesisir maka perlu adanya pengendalian wilayah pesisir.

Ekosistem wilayah pesisir dan lautan dipandang dari dimensi ekologis memiliki fungsi/peran pokok bagi kehidupan umat manusia yaitu, sebagai penyedia sumberdaya alam sebagaimana dinyatakan diatas, penerima limbah, penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan manusia (*life support services*), penyedia jasa-jasa kenyamanan (*amenity services*) (Asyawati & Lely, 2014).

Kawasan permukiman pesisir ditandai dengan aktivitas kolektif sebagai nelayan. Aktivitas ini dijadikan identitas permukiman dan diimplementasikan dalam pemanfaatan ruang baik ruang secara personal dalam satu hunian, maupun ruang communal disepanjang pesisir dalam kawasan permukiman. Kawasan pesisir menjadi ruang komunal yang sangat penting, menjadi ruang pemersatu dengan interaksi social, interaksi ekonomi dan budaya, Menurut Egam (2016)

Batas wilayah pesisir bagi perencanaan penataan ruang pesisir dan laut dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu ke arah darat dan ke arah laut. Dengan berpedoman pada kriteria ekologi, administrasi dan perencanaan.

1. Batas kawasan pesisir dalam konteks penataan ruang
 - a. Batas laut untuk Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi 12 mil, RTR Kabupaten / Kota 4 mil dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 4 mil.
 - b. Batas kearah darat untuk wilayah pengaturan merupakan desa pantai dan untuk pengamatan wilayah DAS atau regional.

- c. RTR Pesisir dan Pulau – pulau Kecil tidak terpisahkan dengan RTR daratan / perlu sinkronisasi.
2. Batasan pesisir ke arah darat
 - a. Ekologis, kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses – proses kelautan. Seperti : pasang surut, instruksi air laut, arus, gelombang, dan lain – lain.
 - b. Administrasi, batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter (2 km, 20 km dan seterusnya dari garis pantai).
 - c. Perencanaan sangat tergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengendalian suatu wilayah pesisir. Seperti : pencemaran, erosi, dan sidementasi (batas sumber dampak yang terjadi akibat pembangunan dan aktifitas manusia yang mempengaruhi lingkungan pesisir).
 3. Batasan pesisir ke arah laut
 - a. Ekologis, kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses alamiah yang terjadi didaratan (aliran air sungai / run-off), aliran air tanah, dampak pencemaran, dan polusi akibat kegiatan manusia di daratan, serta kawasan laut yang masih menjadi bagian dari paparan benua (Continental Shelf).
 - b. Administrasi, 4 mil, 12 mil dan 200 mil (ZEE) dari garis pantai ke arah laut.
 - c. Perencanaan, sangat tergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengendalian suatu wilayah pesisir, seperti pengaruh pencemaran, dan sedimentasi dari daratan serta adanya pengaruh dari proses dan atribut ekologi mangrove.

2.1.1 Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir

Ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir ini terdiri dari ekosistem yang bersifat alami dan bersifat buatan. Ekosistem yang bersifat alami, antara lain terumbu karang, hutan mangrove, esturia dan delta, sedangkan ekosistem yang bersifat buatan antara lain tambak dan sawah pasang surut. Ekosistem di kawasan pesisir menyediakan berbagai sumber daya alam, baik sebagai sumber daya alam buatan yang terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. (Ramli, 2018)

Sumber daya alam utama di kawasan pesisir meliputi hutan mangrove, padang lamun dan trumbu karang beserta ekosistemnya. Ketiga ekosistem ini menyediakan jasa lingkungan yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Sedangkan sumber daya perikanan, rumput laut, energy dan mineral serta jasa lingkungan dan pariwisata dapat dimanfaatkan menjadi sumber penghidupan bagi penduduk. Namun demikian hasil yang diperoleh dari upaya pemanfaatan maupun pengembangan sumber daya alam dan

ekosistem ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dalam prospektif perilaku manusia sebagai pengelola sumber daya.

2.1.2 Masalah Lingkungan Hidup Pesisir

Daerah pesisir saat ini dan masa mendatang menjadi pusat pertumbuhan baru dan tumpukan pengembangan sumber daya alam bagi keberlanjutan pembangunan. Ada tiga hal yang menjadi faktor pendorong sehingga pesisir menjadi pilihan pembangunan dan sumber daya alam, pertama, penduduk Indonesia yang terus berkembang telah menimbulkan beban terhadap sumber daya alam di darata, kedua, Indonesia sebagai negara kepulauan, secara geografis memiliki panjang garis pesisir lebih kurang 81.000 kilometer dan luas lautan 5,8 juta kilometer persegi dengan kekeayaan sumber daya alam baik yang terbaru maupun tak terbaru, termasuk jasa – jasa lingkungan dan ketiga, pertumbuhan penduduk yang mendesak tersedianya area permukiman pesisir. Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai yang berpotensi ekonomi terbesar didunia, 75% wilayah terdiri atas laut dan perairan pantai dan sekitar 3,1 juta km² merupakan laut territorial dan 2,7 juta km² berupa zone ekonomi eksklusif(Ramli,2018).

Permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian wilayah pesisir dan laut, khususnya di Indonesia yaitu pemanfaatan ganda, pemanfaatan tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia dan pencemara wilayah pesisir.

1. Pemanfaatan Ganda

Konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan. Sementara itu, batas kegiatan perlu ditentukan. Dengan demikian pertentangan antar kegiatan dalam jangka panjang dapat dihindari atau diperkecil. Salah satu contoh penggunaan wilayah untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, rekreasi, permukiman, lokasi industry dan juga sebagai tempat pembuangan sampah dan air limbah.

2. Pemanfaatan Tak Seimbang

Masalah penting dalam pemanfaatan dan pengembangan wilayah pesisir di Indonesia adalah ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya tersebut, ditinjau dari sudut penyebarannya dalam tata ruang nasional. Hal ini merupakan akibat dari ketimpangan pola penyebaran penduduk semula disebabkan oleh perbedaan keunggulan komparatif keadaan sumber daya wilayah pesisir Indonesia.

3. Pengaruh Kegiatan Manusia

Permukiman disekitar pesisir menghasilkan pola-pola penggunaan lahan dan air yang khas, yang berkembang sejalan dengan tekanan dan tingkat pemanfaatan, sesuai dengan keadaan lingkungan wilayah pesisir tertentu. Usaha-usaha budidaya ikan, penangkapan ikan, pembuatan garam, eksploitasi hutan rawa,

pembuatan perahu, perdagangan dan industry, merupakan dasar bagi tata ekonomi masyarakat pedesaan wilayah pesisir. Tekanan penduduk yang besar seiring mengakibatkan rusaknya lingkungan, pencemaran perairan oleh sisa-sisa rumah tangga, meluasnya proses erosi, kesehatan masyarakat yang memburuk dan terganggunya ketertiban dan keamanan umum.

2.2 Permukiman

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman, permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat, Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni dan Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

2.2.1 Permukiman Nelayan

Menurut. Khadija (2010) arti kata Nelayan terbagi dalam dua pengertian nelayan yaitu:

1. Nelayan Sebagai Subyek/Orang; merupakan sekelompok masyarakat manusia yang memiliki kemampuan serta sumber kehidupan disekitar pesisir pantai.
2. Nelayan sebagai predikat/pekerjaan; suatu sumber penghasilan masyarakat yang berkaitan erat dengan sektor perikanan dan perairan (laut dan sungai).

Pengertian permukiman nelayan menurut Suhardi 1993;18 mengatakan bahwa, permukiman nelayan adalah lingkungan permukiman dimana masyarakat yang bermukim mempunyai mata pencaharian utama sebagai nelayan. Umumnya perkampungan nelayan bertempat tinggal dipesisir pantai, atau dekat pinggir sungai dimana terdapat pertemuan antara sungai dan laut (muara), kecenderungan bermukim dekat sungai atau sekitar pesisir pantai, karena mendekati laut agar memudahkan dari tempat tinggal mereka menuju laut dimana perahu mereka berada. Permukiman nelayan umumnya terbangun secara spontan dan sering kali dinilai secara umum sebagai permukiman masyarakat miskin. Berbagai berita di media massa cenderung menempatkan nelayan sebagai kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Secara umum permukiman nelayan dapat

digambarkan sebagai suatu permukiman yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Sedangkan pekerjaan nelayan itu sendiri adalah pekerjaan yang memiliki ciri utama adalah mencari ikan di perairan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan, perumahan kawasan nelayan untuk selanjutnya disebut kawasan nelayan adalah perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan.

Pada perkembangannya kampung-kampung nelayan berkembang semakin padat dan tidak tertib karena pertumbuhan penduduk alami dan urbanisasi. Kriteria fisik lingkungan kawasan permukiman nelayan sebagai berikut: (Depertemen Pekerjaan Umum).

1. Tidak berada pada daerah rawan bencana
2. Tidak berada pada wilayah sempadan pantai dan sungai
3. Kelerengan: 0 – 25 %
4. Orientasi horizontal garis pantai: > 600
5. Kemiringan dasar pantai: terjal – sedang
6. Kemiringan dataran pantai: bergelombang – berbukit
7. Tekstur dasar perairan pantai: kerikil – pasir
8. Kekuatan tanah daratan pantai: tinggi
9. Tinggi ombak signifikan: kecil
10. Fluktuasi pasang surut dan arus laut: kecil
11. Tidak berada pada kawasan lindung
12. Tidak terletak pada kawasan budidaya penyangga, seperti kawasan mangrove

Ciri khas yang melekat pada permukiman nelayan adalah rumah – rumah non atau semi permanen, dindingnya terbuat dari papan atau geribik (bambu) serta atapnya dari seng. Pada umumnya rumah – rumah nelayan berupa rumah panggung dan seluruh bahan bakunya berupa kayu. Model rumah panggung tersebut dibuat untuk menghindari banjir. ciri dari permukiman nelayan terlihat pada pola perletakan tiap massa bangunan yang berhubungan langsung dengan tempat produksinya, yaitu perairan atau laut dan kebutuhan aktivitasnya (menurut Indah dkk. 2014).

Karakteristik konstruksi hunian nelayan yaitu terdiri dari tiang, lantai, dinding dana tap, menggunakan jenis system bongkar pasang (knock down). Pada dinding rumah menggunakan material kayu, bambu dan seng. Sedangkan material penutup atap sebagian besar menggunakan material seng. Bangunan umumnya digunakan para nelayan dalam membangun rumah sebagai berikut:

1. **Rumah Panggung Tinggi**
Rumah panggung tinggi menggunakan kayu yang tahan air seperti kayu galam, atau kayu ulin untuk pondasinya seperti yang banyak dijumpai di Kalimantan dan Sulawesi. Bahan dinding menggunakan bilik bambu atau papan, dan rangka atap menggunakan kayu atau bambu, dan penutup atap rumbia.
2. **Rumah Nelayan Daratan**
Rumah nelayan daratan menggunakan pondasi setempat pada rumah tapak dan rumah panggung pendek (tatapakan), rangka dinding menggunakan kayu dan beton praktis; penutup dinding menggunakan bilik, papan, setengah tembok, dan tembok; rangka atap menggunakan kayu, dan penutup atap menggunakan genteng atau atap daun kelapa.

Ciri lain masyarakat pesisir adalah dalam cara mengelola sumberdaya yang masih menggunakan cara tradisional, bersifat lokal dan struktur masyarakat serta aktivitasnya secara sederhana. Meski pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan yang sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional, Menurut Fama (2016). Begitu pula sumber daya manusia di bidang perikanan yang memiliki kualitas rendah menyebabkan rendahnya produktivitas, yang berakibat pada rendahnya pendapatan, dan kemiskinan nelayan menurut Nugraha (2014)

2.2.2 Prasarana Permukiman Nelayan

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman, seperti: Jaringan air bersih dan air limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan dan jaringan jalan.

- Jaringan Air Bersih, untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada suatu kawasan permukiman maka adapun kriterianya adalah sebagai berikut :
 - a. Pengambilan air baku diutamakan dari air permukaan;
 - b. Kebutuhan air rata – rata 100 liter/orang/hari;
 - c. Kapasitas minimum sambungan rumah 60 liter/orang/hari dan sambungan kran umum 30 liter/orang/hari.
- Jaringan Air Limbah / air kotor, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Buangan air kotor sistem setempat harus menjamin tidak akan menimbulkan polusi air tanah;
 - b. Jarak sumur resapan, septik tank dengan sumur minimum 10 meter;

- c. Bagi permukiman padat, dibuat septik tank secara kolektif atau sistem jaringan tertutup
 - d. Bagi lokasi yang sudah ada sistem jaringan utama agar terintegrasi dengan sistem jaringan yang ada;
 - e. Buangan dengan sistem tidak setempat, IPLT ditetapkan minimal 50 meter dari tepi pantai dan pengolahan IPLT harus terus berfungsi agar buangan yang dilepas di perairan pantai tidak merusak lingkungan.
- Jaringan Drainase, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Harus memperhatikan pasang surut air laut;
 - b. Kofesien pengaliran air permukaan tidak lebih daari 25 %;
 - c. Pada lereng atau tanah yang peka terhadap erosi harus ada rekayasa teknis sehingga kekeruhan drainase tidak mencapai 50 ppm Si.O2;
 - d. Saluran drainase dibangun dengan sistem polder (bendung dan pompa);
 - e. Harus dibuat sumur – sumur resapan untuk meningkatkan recharge air tanah, terutama pada tanah yang stabil dan memiliki daya serap tinggi;
 - f. Harus dibuat kanal – kanal drainase yang bermuara ke laut.
 - Jaringan Persampahan, pengendalian sumber sampah permukiman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Sediakan wadah sampah minimal 2 buah per rumah untuk wadah sampah organik dan anorganik;
 - b. Tempatkan wadah sampah anorganik di halaman bangunan; c. Pilah sampah sesuai jenis sampah. Sampah organik dan anorganik masukan langsung ke masing-masing wadahnya;
 - d. Pasang minimal 2 buah alat pengomposan rumah tangga pada setiap bangunan yang lahannya mencukupi
 - e. masukan sampah organik dapur ke dalam alat pengomposan rumah tangga individual atau komunal;
 - f. Tempatkan wadah sampah organik dan anorganik di halaman bangunan bagi sistem pengomposan skala lingkungan.
 - Jaringan Jalan, proporsi jalan pada lingkungan perumahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:
 - a. Pada daerah kemudahan tingkat I, jalan lingkungan II dan III sebesar 80 %, jalan lingkungan I 15 %, dan jalan poros lingkungan 5 %.

- b. Pada daerah kemudahan tingkat II, jalan lingkungan II dan III sebesar 60 %, jalan lingkungan I 30 %, dan jalan poros lingkungan 10 %.
- c. Pada daerah kemudahan tingkat III, jalan lingkungan II dan III sebesar 40 %, jalan lingkungan I 40 %, dan jalan poros lingkungan 20 %.

2.2.3 Pola Permukiman Nelayan

Menurut pendapat K.Wardiyatmoko (2006 : 150) Pola persebaran permukiman desa sangat di pengaruhi oleh keadaan tanah, tata air, topografi, serta ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di desa tertentu. Ada tiga pola hunian desa dalam hubungannya dengan bentang alamnya, yaitu sebagai berikut: Pola Terpusat merupakan pola permukiman penduduk di mana rumah-rumah yang di bangun memusat pada satu titik. Pola terpusat umumnya di temukan pada kawasan permukiman di desa-desa yang terletak di kawasan pegunungan, Pola ini biasanya di bangun oleh penduduk yang masih satu keturunan. Pola Tersebar merupakan Pola permukiman yang terdapat di daerah dataran tinggi atau daerah gunung api dan daerah-daerah yang kurang subur. Pada pola tersebar, rumahrumah penduduk di bangun di kawasan luas dan bertanah kering yang menyebar dan sedikit renggang satu sama lain. Pola tersebar umumnya di temukan pada kawasan luas yang bertanah kering. Pola ini dapat terbentuk karena penduduk mencoba untuk bermukim di dekat suatu sumber air, terutama air tanah, sehingga rumah di bangun pada titik-titik yang memiliki sumber air bagus. Pola ini persebarannya biasa penduduk membangun rumah di kawasankawasan yang dapat menunjang kegiatan kesehariannya, terutama kegiatan yang menunjang ekonomi mereka. Oleh karena beragamnya pencaharian masyarakat, maka permukiman-permukiman penduduk di Indonesia tersebar pada kawasan-kawasan tertentu. Pola Memanjang merupakan pola permukiman penduduk yang di katakan memanjang bila rumah-rumah yang di bangun membentuk pola berderet-deret hingga panjang. Pola memanjang umumnya di temukan pada kawasan permukiman yang berada di tepi sungai, jalan raya, atau garis pantai. Pola ini dapat tebentuk karena kondisi lahan di kawasan tersebut memang menuntut adanya pola ini. Seperti kita ketahui, sungai, jalan, maupun garis pantai memanjang dari satu titik tertentu ke titik lainnya, sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut membangun rumah rumah mereka ddengan menyesuaikan diri pada keadaan tersebut.

Menurut Mulyati (1995) permukiman merupakan sekelompok rumah yang terorganisasi dalam suatu sistem sosial budaya dan religius yang tercermin pada fisik lingkungannya. Pada umumnya pola permukiman akan mengikuti sistem sosial budaya yang dilandasi oleh pola aktivitas manusia. Pola permukiman kampung nelayan biasanya akan mengikuti garis pantai (linear) dengan kondisi cenderung bersifat homogen, tertutup dan

mengembangkan tradisi tertentu sehingga memiliki ciri khas permukiman. Pola permukiman berdasarkan sifat komunitasnya menurut Kostof (1983) dalam penelitian Wardi, dkk (2014), yaitu:

- A. Sub Kelompok Komunitas
Pola permukiman tipe ini berbentuk cluster, terdiri dari beberapa unit atau kelompok unit hunian, memusat pada ruang-ruang penting, seperti penjemuran, ruang terbuka umum, masjid dan sebagainya
- B. Face to Face
Pola permukiman tipe ini berbentuk linear, antara unit-unit hunian sepanjang permukiman dan secara linear terdapat perletakan pusat aktivitas yaitu tambatan perahu atau dermaga, ruang penjemuran, pasar dan sebagainya.

Sedangkan dalam penelitian Kurniawan dkk (2002), menyebutkan bahwa model pengembangan permukiman nelayan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- a. kondisi fisik kawasan dan luasan pantai
- b. fungsi kawasan
- c. orientasi kegiatan ekonomi masyarakat
- d. daya tampung kawasan
- e. ketersediaan lahan permukiman

Ciri dari permukiman kampung nelayan terlihat pada pola perletakan tiap massa bangunan yang berhubungan langsung dengan tempat produksinya, yaitu perairan atau laut dan kebutuhan aktivitasnya.

2.2.4 Permasalahan Permukiman Nelayan

Pengembangan perumahan dan permukiman wilayah pesisir bagian yang penting dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pesisir. Wilayah pesisir memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan ekonomi bangsa. Aktivitas perekonomian di wilayah pesisir sangat dominan dan diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduk, masih banyak permukiman penduduk yang ada di wilayah pesisir memiliki kondisi yang tidak tertata dengan baik, kesehatan lingkungan kurang baik dan tidak layak huni. Usaha pemenuhan kebutuhan rumah sebagian terhambat oleh rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat dan tingginya biaya pembangunan rumah. Bagi yang berpenghasilan rendah tempat tinggal merupakan masalah besar, hal ini disebabkan oleh kesanggupan ekonomi dan pendidikan mereka yang rendah, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk memenuhi tempat tinggal yang layak dengan usaha sendiri (Pinem, 2010).

Permukiman merupakan totalitas lingkungan yang terbentuk oleh 5 (lima) unsur utama yaitu Doxiadis (dalam *Ekatarji, Yunus, & Rahardjo,*

2016). Pertama, alam (nature), lingkungan biotik maupun abiotik permukiman akan sangat ditentukan oleh adanya alam, baik sebagai lingkungan hidup maupun sebagai sumber daya. Kedua, manusia (antropos), permukiman dipengaruhi oleh dinamika dan kinerja manusia. Ketiga, masyarakat (society), hakikatnya dibentuk karena adanya manusia sebagai kelompok masyarakat, aspek-aspek dalam masyarakat yang memengaruhi permukiman antara lain kepadatan komposisi penduduk, stratifikasi sosial, struktur budaya, perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan hukum. Keempat, ruang kehidupan (shell) ruang kehidupan menyangkut berbagai unsur dimana manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat melaksanakan kehidupannya. Kelima, jaringan (network) yang menunjang kehidupan (jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, telekomunikasi, listrik). Kualitas permukiman dari suatu permukiman memiliki makna erat kaitannya dengan kondisi dari suatu permukiman yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan penghuninya dalam memanfaatkan permukiman tersebut. Kualitas permukiman mencakup mengenai kondisi bangunan rumah, lingkungan rumah dan manusia di dalamnya (Mayasari & Ritohardoyo, 2012).

2.2.5 Permukiman Kumuh

Menurut Menurut Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan kehidupan penghuninya.

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP) sedangkan rumah yang tidak layak huni merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni (No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimula Perumahan Swadaya).

2.2.5.1 Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut Komarudin (1999) menjelaskan tentang kumuh atau slum dalam konteks yang lebih luas, yaitu lingkungan kumuh, yang didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi sekedar tempat istirahat dan melindungi diri dari panas, dingin, dan hujan; lingkungan dan tata permukiman tidak teratur; bangunan sementara; acak-acakan tanpa perencanaan; prasarana kurang; fasilitas sosial kurang; mata pencaharian penghuni tidak tetap dan usaha non formal; tanah bukan milik penghuni; pendidikan rendah; penghuni sering tidak tercatat sebagai warga setempat; rawan timbulnya penyakit, kebakaran, dan banjir.

Menurut hasil penelitian Suparlan (2000), ciri-ciri dari pemukiman kumuh dapat terlihat dari berbagai sisi sebagai berikut:

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batasbatas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - a) Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b) Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - c) Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya lapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh

dilakukan dengan pertimbangan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status kepemilikan tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, social, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Berikut merupakan kriteria yang dimaksudkan yaitu:

- Vitalitas Non Ekonomi
Kriteria Vitalitas Non Ekonomi merupakan penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi.
- Vitalitas Ekonomi Kawasan
Kriteria vitalitas ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan kota tanpa kumuh. sebagaimana menjadi komitmen dalam Hari Habitat Internasional.
- Status Kepemilikan Tanah
Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaanya.
- Keadaan Prasarana dan Sarana
Kriteria kondisi prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh.

2.2.5.2 Indikator Permukiman Kumuh

Menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur pada suatu lokasi, permasalahan kekumuhan dilakukan berdasarkan pertimbangan pengertian perumahan kumuh dan permukiman kumuh, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan secara nasional berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut (Permen PUPR No 14 Tahun 2018).

- a. Kondisi Bangunan
 - Ketidakaturan Bangunan
Ketidakaturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada permukiman tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona
 - Tingkat Kepadatan Bangunan yang Tinggi
Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang

- Kualitas Bangunan
Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- b. Kondisi Jalan Lingkungan
 - Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman
 - kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- c. Penyediaan Air Bersih
 - Akses air bersih tidak tersedia.
- d. Drainase Lingkungan
 - Drainase lingkungan tidak tersedia
 - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan.
 - Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- e. Pengelolaan air limbah
 - System pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
 - Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- f. Pengelolaan persampahan
 - Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
 - System pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- g. Proteksi Kebakaran
 - Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia
 - Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

2.2.5.3 Tingkat Kekumuhan

Identifikasi kondisi dan tingkat kekumuhan merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukan permasalahan kondisi bangunan serta sarana dan prasarana pendukungnya. Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi (Direktorat Pengembangan kawasan Permukiman, 2016)

- a. Tingkat Permukiman Kumuh Tinggi, merupakan tingkat dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 76% - 100%
- b. Tingkat Permukiman Kumuh Sedang, merupakan tingkat dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 51% - 75%
- c. Tingkat Permukiman Kumuh Rendah, merupakan tingkat dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 26% - 50%

- d. Tingkat Permukiman Bukan Kumuh, merupakan tingkat dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 0% - 25%

2.2.5.4 Tipologi Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.

- a. Permukiman Kumuh di atas air
- b. Permukiman Kumuh di Tepi air
- c. Permukiman Kumuh di dataran rendah
- d. Permukiman Kumuh di perbukitan
- e. Permukiman Kumuh di daerah rawan bencana

2.2.5.6 Manajemen Permukiman

Pengertian Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu sedangkan pengertian dari Permukiman sendiri yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen permukiman adalah mengatur pemanfaatan lingkungan hunian agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dimana manajemen permukiman ini sangat erat dengan kegiatan penataan ruang. Dalam penataan ruang mencakup 3 (tiga) proses dalam melakukan manajemen permukiman yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning)
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian pemanfaatan (Controlling).

Manajemen permukiman dapat dibedakan menjadi 2 (dua) objek manajemen, yaitu manajemen permukiman lama dan manajemen permukiman baru. Manajemen permukiman lama dilakukan terhadap objek yang sudah terbangun, sedangkan manajemen permukiman baru dilakukan terhadap objek yang akan dibangun. Masing – masing menggunakan cara yang berbeda karena masalah dan sumber permasalahannya pun berbeda. Manajemen permukiman lama mempunyai masalah utama adanya permukiman kumuh. Permukiman kumuh menunjukkan keadaan permukiman padat yang tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan prasarana yang memadai, terutama jalan dan saluran pembuangan air limbah. Adanya bangunan – bangunan fisik yang padat menyebabkan penataan permukiman tidak mudah. Selanjutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah menghambat dalam upaya perbaikan rumah dan penyediaan fasilitas lingkungan. Oleh karena itu, program penataan permukiman kumuh harus didukung oleh masyarakat setempat dengan prinsip pemberdayaan rakyat.

Ada tiga program yang bias diterapkan untuk mengatasi masalah permukiman kumuh secara umum

1. Program Konsolidasi lahan
2. Program Perbaikan Kampung
3. Program Pembangunan rumah susun

Manajemen permukiman baru mempunyai dua cara bagi masyarakat, yaitu pembangunan rumah secara individu dan pembangunan rumah secara massal. Dimana pembangunan rumah oleh masyarakat secara individu dengan cara pemadatan jumlah bangunan pada daerah yang sudah terbangun dan mengembangkan daerah baru untuk permukiman. Sedangkan untuk penyediaan permukiman baru secara massal dilakukan dengan pembangunan permukiman yang dilakukan oleh pengembang perumahan dan Penyediaan lingkungan siap bangun (Lisiba) dan kaveling siap bangun (Kasiba).

2.3 Manajemen Lahan

Manajemen lahan merupakan proses pemanfaatan sumber daya lahan di kota maupun di desa. Sumber daya lahan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya pertanian, hutan, sumber daya air, ekowisata, dan permukiman. Berbagai aspek biasa menjadi pertimbangan dalam mengelola lahan. Pengendalian lahan harus memperhatikan hak atas lahan, yang terdiri atas hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengendalian, serta Manajemen lahan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif dalam memanajemen lahan itu sendiri. (Nanang Fattah, 2004) oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan lahan merupakan lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukung terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. (Baskara,2012). Jenis manajemen lahan ada 3 yaitu

1. Pengadaan : Penyediaan lahan untuk suatu kepentingan umum
2. Pemanfaatan : Memperoleh penggunaan lahan terbaik dari nilai tertinggi bagi masyarakat banyak
3. Pengendalian : mengarahkan kegiatan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang di tetapkan

Sehingga manajemen lahan merupakan suatu sistem untuk mengelola, mengendalikan dan mengawasi penggunaan lahan perkotaan dan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat, dengan termanajemennya lahan

maka akan menghasilkan pola dan bentuk kota yang bagus dan indah. Ada lima landasan manajemen lahan yaitu

- Bundels of right (hak atas lahan). Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hubadan dengan lahan, dan perubahan hukum mengenai lahan
- Police Power (kewenangan pengaturan dan pengendalian). Kewenangan untuk mengatur, mengawasi, mengendalikan dan menghuni lahan
- Eminent Dominan (Penguasaan tertinggi atas lahan). Kewenangan tindakan mengambil alih atau pencabutan hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya.
- Taxation (pajak atas lahan). Kewenangan melakukan beban atau pungutan yang dilandasi kewenangan hukum terhadap perorangan atau pemilik lahan untuk mengutip atau mengumpulkan uang demi tujuan masyarakat
- Spending Power. Kewenangan membelanjakan dana public untuk kepentingan umum.

Lahan dipengaruhi oleh berbagai aktifitas flora, fauna dan manusia, baik dimasa lalu, maupun masa sekarang. Ada beberapa konsep manajemen lahan yang sering digunakan untuk penanganan permukiman kumuh dengan cara menggunakan mekanisme penyediaan tanah inovatif seperti konsolidasi lahan, land readjustmen, land pooling dan relocation (Pemindahan menuju lokasi baru)

2.3.1 Konsolidasi Lahan

Konsolidasi Tanah/lahan adalah suatu model pembangunan yang berkaitan dengan masalah kebijakan pengendalian tanah untuk kepentingan jalan dan prasarana umum lainnya, yang merupakan salah satu unsur dalam pembangunan tersebut (Yuriwin, 2010). Program konsolidasi tanah yang dilaksanakan di Indonesia merupakan fenomena diperlukannya penyelesaian bijaksana dari pengambil kebijakan sebagai upaya penataan ruang yang meminimalkan potensi konflik.

Konsep konsolidasi tanah perkotaan menurut Oloan Sitorus (2008) adalah merupakan kebijakan pertanahan di wilayah perkotaan (urban) dan pinggiran kota (urban fringe) mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat. Pengertian lain juga mengatakan bahwa konsolidasi tanah adalah suatu model pembangunan yang mengatur semua bentuk tanah yang semula terpecah-pecah dan dengan bentuk yang tidak teratur menjadi tanah-tanah yang bentuknya dan tata letaknya teratur (Setiawan, 2008). Pengertian dan konsep Konsolidasi Tanah (KT)

sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991, tentang Konsolidasi Tanah, dan yang menjadi dasar pelaksanaan konsolidasi tanah di Indonesia hingga saat ini adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

. Kapling ini dijual dengan prasarana dan sarana yang sudah dilengkapi. Model konsolidasi lahan terdapat 3 jenis yaitu :

- Model pengumpulan bidang-bidang tanah yang berserakan adalah model konsolidasi yang populer dilakukan di Eropa dan Amerika. Konsolidasi ini adalah untuk individu yang memiliki tanah banyak dan letaknya tidak teratur (berserakan dimana-mana) maka dilakukan konsolidasi model ini agar tanah yang dimiliki menjadi satu dan efisien dalam pengelolaannya.
- Model konsolidasi tanah subdivision atau pengkaplingan tanah. Model ini adalah penyatuan tanah kosong dan kemudian direncanakan untuk menjadi rencana tapak. Rencana tapak tersebut harus disetujui dari pemerintah daerah. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah, tanah tersebut akan dikapling dan dijual. Kapling ini dijual dengan prasarana dan sarana yang sudah lengkap.

2.3.2 Land Readjustment

Land Readjustmen merupakan salah satu penataan lahan yang berbasis pada peningkatan nilai lahan itu sendiri. Maksudnya adalah lahan yang semula kurang di optimalkan, kemudian diadakan penataan terhadap lahan tersebut agar dapat lebih bermanfaat. Lebih singkatnya Yomralioglu (1993) menjelaskan Land Readjustmen sebagai proses reformasi lahan karena mengubah lokasi asli dari paket tanah dan penggunaan lahan di dalam area tersebut, dimana tujuan yang ingin dicapai adalah mengalokasikan kembali lahan perkotaan yang tidak teratur untuk penggunaan fasilitas publik maupun permukiman yang sesuai dengan rencana ruang kota. Bentuk land readjustmen merupakan model manajemen lahan yang telah banyak dipraktikkan di berbagai negara (Doebele, Hong dan Needham dalam Hong dan Brain, 2012), dimana land readjustmen menekankan kepada integrasi dalam ekonomi perkotaan, perencanaan kota, hukum dan pemerintah dengan melakukan manajemen lahan sebagai strategi pembangunan kota lebih komperhensif. Prinsip dasarnya adalah mengatur pemilik tanah untuk bertindak kolektif

dalam bekerjasama dengan pemerintah kota atau swasta untuk mengumpulkan lahan mereka sebagai bentuk pembangunan Kembali (Hong dan Brain, 2012).

Penataan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penataan lahannya saja, melainkan beserta manajemen, aktivitas dan bangunan yang berada di atas lahan itu. Land readjustment dapat dikelola secara bersama-sama atau dikelola secara sepihak oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah. Land readjustmen awalnya dilakukan terhadap lahan pertanian, namun seiring perkembangan konsep ini dapat di terapkan dalam beberapa kasus terkait perkembangan permukiman perkotaan (World Bank Group,2017). Metode yang digunakan land readjustment ini adalah menata kembali batas-batas peruntukan lahan berdasarkan arahan zonasi dalam rencana tata ruang. Kemudian, dengan menyesuaikan batas-batas kepemilikan lahan tanah, maka dapat diperoleh lahan yang dapat dikontribusikan untuk ruang public atau prasarana kepentingan umum lainnya. Maka dari itu prinsip dasar metode ini adalah reploting, reshuffle dan contribution, dimana reploting merupakan pengukuran batas luas lahan, penilaian lokasi serta aspek eksternalitasnya, penerapan standar dan model perencanaan, proporsi peruntukan lahan, serta arahan untuk penyediaan ruang public, sedangkan untuk reshuffle sendiri merupakan realokasi batas-batas kepemilikan dan bentuk persil berdasarkan perubahan nilai lahan secara berkeadilan. Perubahan nilai lahan ini disesuaikan dengan jenis-jenis peruntukan dalam pemanfaatan ruang, berdasarkan kondisi awal sebelum pelaksanaan program dan contribution (Kontribusi lahan) ketentuan dalam penentuan kontribusi pembagian lahan didasari atas 30% dari total lahan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan ruang publik lainnya. 10% dari total lahan digunakan untuk lahan cadangan yang nantinya bermanfaat untuk mengganti biaya relokasi sementara, rekonstruksi dan legalisasi. 60% dari total lahan dikembalikan kepada pemilik lahan. Lahan kontribusi diperoleh dari tanah masyarakat, dan bila menggunakan metode land readjustment, maka 40% lahan tersebut dapat diperoleh melalui teknik replotting dan reshuffle. Adapun syarat penanganan menggunakan metode land readjustmen ini yaitu :

- Tingkat pemilikan/penghunian secara sah (mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas,
- Tingkat kekumuhannya sedang, dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar
- Minimnya prasarana dan sarana di wilayah tersebut
- Lahan sesuai dengan peruntukannya

Dari pelaksanaan Land Readjustment dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik bangunan/ lahan terkait legalitas hak kepemilikan

lahan mereka (Turk dan Altes, 2009). Namun hasil yang demikian akan sulit diimplementasikan Ketika partisipasi masyarakat tidak dilibatkan dan diintegritas dalam perencanaan kota, serta keterbatasan dalam menyelesaikan persoalan kepemilikan lahan yang ada (Hong dan Brain, 2012).

2.3.3 Land Pooling

Land Pooling merupakan metode dimana kepemilikan tanah yang tersebar dan tidak beraturan dikumpulkan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur utama lainnya dengan kemudian dibagi menjadi plot yang baru, pada bentuk land pooling prinsipnya adalah penggabungan lahan sebagai bentuk penyediaan lahan untuk infrastruktur lingkungan perkotaan (Whalen, 2006). Pada model land pooling disebutkan World Bank Group (2015) setiap pemilik lahan secara resmi mengalihkan atau menyerahkan hak kepemilikan tanahnya kepada pemerintah setempat setelah proses pembangunan kembali. Dalam bentuk land pooling disebutkan (Whalen, 2006 dan Oli, 2003) pemilik lahan umumnya memberikan sekitar 30% dari jumlah keseluruhan kepemilikan lahannya kepada penyediaan ruang untuk jalan, taman dan ruang publik lainnya serta lahan cadangan. Dari jumlah tersebut, pada akhirnya pemilik lahan akan diberikan kembali 12-30% bagian tanah yang lebih kecil dengan bentuk geometris baru yang beraturan. Sedangkan Puspasari, dkk (2015) menjelaskan dalam LP prinsipnya adalah menggabungkan bidang tanah yang sempit ke dalam 1 (satu) area bidang tanah untuk menjadi 1 (satu) bangunan bertingkat bersama sehingga kepemilikan lahan merupakan milik bersama dengan bukti sertifikat strata title (hak kepemilikan bersama atas satuan rumah susun atau kompleks bangunan yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi serta hak bersama atas ruang publik). Persyaratan untuk penanganan menggunakan metode land pooling yaitu :

- Tingkat pemilikan/penghunian secara sah (mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi dengan luasan yang cukup
- Tata letak bangunan tidak berpola
- Minim dengan sarana dan prasarana
- Tersedianya lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar.

2.3.4 Relokasi Permukiman

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1996) relokasi diartikan sebagai pemindahan tempat atau pemindahab dari suatu lokasi ke lokasi lain. Jika dikaitkan dalam konteks perumahan dan permukiman relokasi dapat diartikan pemindahan suatu lokasi permukiman kelokasi permukiman yang baru. Menurut Hudohusodo relokasi dilakukan terhadap permukiman dimana

lokasi permukiman tersebut tidak diperuntukkan bagi perumahan atau lokasi permukiman yang rawan terhadap bencana atau bahkan yang terkena bencana. Relokasi atau *resettlement* merupakan salah satu alternative untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di permukiman kumu, status lahannya tidak legal (illegal) atau bermukim di lingkungan yang rawan bencana untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru.

2.4 Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dijelaskan bahwa Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengendalian tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa lahan merupakan suatu bentang alam sebagai modal utama kegiatan, sebagai tempat dimana seluruh makhluk hidup berada dan melangsungkan kehidupannya dengan memanfaatkan lahan itu sendiri. Sedangkan pemanfaatan lahan adalah suatu usaha memanfaatkan lahan dari waktu ke waktu untuk memperoleh hasil (Soetarno, 2003:18).

Pemanfaatan lahan mempunyai beberapa jenis. Secara garis besar, lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun terdiri dari dari perumahan, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran. Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas kota (kuburan, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam). Untuk mengetahui penggunaan lahan di suatu, wilayah, maka perlu diketahui komponen - komponen penggunaan lahannya. Berdasarkan jenis pengguna lahan dan aktivitas yang dilakukan di atas lahan tersebut, maka dapat diketahui komponen-komponen pembentuk guna lahan (Chapin dan Kaiser, 1979)

2.5 Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan.

1. Yurmansah, Mussadun, EVALUASI PROSES KONSOLIDASI TANAH KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BANTARAN SUNGAI KURAU KLASSTER 1 DESA KURAU BERDASARKAN PRESEPSI MASYARAKAT, yang mendeskripsikan tentang penerapan konsep konsolidasi lahan sebagai model manajemen lahan dalam upaya peanganan kawasan permukiman kumuh di Bangka Tengah. Bertempat di Desa Kurau Kecamatan Koba terdapat permukiman nelayan yang tumbuh pada bantaran sungai. Menggunakan metode campuran (mix method)
2. Amirul Ardi, Dian Rahmawati, ARAHAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN KEDUNGCOWEK SURABAYA MENGGUNAKAN KONSEP LAND READJUSTMENT, mendeskripsikan bagaimana menentukan scenario penataan permukiman kumuh menggunakan metode land readjustment yang diharapkan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat Kedungcowek. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan purposive sampling. Variable yang digunakan prasarana jalan, drainase, sanitasi, air bersih, persampahan, sarana penunjang permukiman nelayan, kepadatan bangunan, kondisi bangunan, status kepemilikan lahan.
3. Asep Hariyanto, yang berjudul STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG SEHAT (Studi Kasus: Kota Pangkalpinang) menjelaskan tentang perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan factor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera maka dari itu perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana dan berkesinambungan. Variable yang digunakan prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan. Menggunakan metode statistic deskriptif.
4. Marselly Dwiputri, Nurjannah Hamdani, Bambang Perkasa Alam, ANALISIS TINGKAT KEKUMUHAN PADA LOKASI PERMUKIMAN DI PERKOTAAN (Studi Kasus Kampung Rawa Badung, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur), menjelaskan tentang Kampung Rawa Badung merupakan salah satu kawasan permukiman yang bukan hanya memiliki pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan kepadatan penduduk yang tinggi. Tetapi juga memiliki kondisi sarana dan prasarana permukiman yang tidak memadai sehingga terindikasi merupakan kawasan kumuh karena dipengaruhi factor lingkungan, terutama lingkungan tempat tinggal.

Metode yang digunakan yaitu skoring dan SWOT. Variable yang dipakai yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran dan tata guna lahan.

5. Raisya Nursyahbani, Bitta Pigawati, KAJIAN KARAKTERISTIK KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG (Studi Kasus : Kampung Gandekan Semarang) menelaskan tentang karakteristik kawasan pemukiman kumuh di kampung Gandekan Semarang dimana dari karakteristik penghuninya adalah merupakan warga campuran antara pribumi dengan etnis Tionghoa yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan ekonomi yang masih rendah, dari karakteristik huniannya sebagian besar masih tergolong jenis hunian yang belum layak huni, dari karakteristik sarana prasarana terutama untuk kepentingan privat masih belum memadai. Adapun hasil dari analisis tingkat kekumuhannya, Kampung Gandekan memiliki kategori yang terbagi menjadi dua jenis tipologi tingkat kekumuhan yakni tingkat kumuh sedang dan tingkat kumuh rendah Variabel yang digunakan kualitas bangunan, prasarana dan sarana jalan, air bersih, persampahan, air limbah, penduduk, drinase, status kepemilikan lahan. Metode yang digunakan yaitu skoring.

2.6 Landasan Penelitian

Landasan penelitian diperlukan agar penelitian mempunyai dasar yang kuat. Pada awal penelitian ini dilakukan, peneliti ingin menganalisis karakteristik permukiman, tingkat kekumuhan permukiman, mengetahui kemampuan lahan di Desa Tabanio lebih tepatnya di wilayah penelitian. Untuk mencapai tujuan yang di inginkan maka peneliti membaginya berdasarkan tahapan yang dalam hal ini merupakan sasaran yang sudah dibuat oleh peneliti.

Pemanfaatan lahan mempunyai Ada beberapa jenis pemanfaatan lahan. Secara garis besar, lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun terdiri dari dari perumahan, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran. Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas kota (kuburan, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam). Untuk mengetahui penggunaan lahan di suatu, wilayah, maka perlu diketahui komponen - komponen penggunaan lahannya. Berdasarkan jenis pengguna lahan dan aktivitas yang dilakukan di atas lahan

tersebut, maka dapat diketahui komponen-komponen pembentuk guna lahan (Chapin dan Kaiser, 1979).

Permukiman nelayan adalah merupakan lingkungan tempat tinggal dengan sarana dan prasarana dasar yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki akses dan keterkaitan erat antara penduduk permukiman nelayan dengan kawasan perairan sebagai tempat mereka mencari nafkah, meskipun demikian sebagian dari mereka masih terkait dengan dataran. (Umbaran, 2003)

Permukiman kumuh didefinisikan sebagai berikut: Lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha), kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah, jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya di bawah standar, sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan, hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar perundang-undangan yang berlaku. Menurut Khomarudin 1997: 83112 (dalam Eny Endang Surtiani 2006). Permasalahan kekumuhan dilakukan berdasarkan pertimbangan pengertian perumahan kumuh dan permukiman kumuh, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan secara nasional berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut (Permen PUPR No 14 Tahun 2018).

- Kondisi Bangunan
- Kondisi Jalan Lingkungan
- Kondisi Drainase
- Penyediaan Air Minum
- Pengelolaan Air Limbah
- Pengelolaan Persampahan
- Proteksi Kebakaran

Manajemen Lahan merupakan suatu sistem untuk mengelola, mengendalikan dan mengawasi penggunaan lahan perkotaan dan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat, dengan termanajemennya lahan maka akan menghasilkan pola dan bentuk kota yang bagus dan indah. Bagian dari bentang alam (landskap), mencakup lingkungan fisik topografi/relief, tanah, iklim, hidrologi, vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Lahan dipengaruhi oleh berbagai aktifitas flora, fauna dan manusia, baik dimasa lalu, maupun masa sekarang. (Baskara,2012). Ada beberapa konsep manajemen lahan yang sering digunakan untuk penanganan permukiman kumuh dengan cara menggunakan mekanisme penyediaan tanah inovatif seperti konsolidasi lahan, land readjustmen, land pooling dan relocation (Pemindahan menuju lokasi baru) Konsolidasi Lahan (*Land Consolidation*), Konsolidasi lahan adalah bentuk

kegiatan mengenai pengendalian tata guna lahan dengan cara pengaturan kembali penggunaan lahan dan penguasaan bidang-bidang tanah. Sasaran dari konsolidasi lahan itu sendiri adalah penataan kembali penggunaan dan penguasaan tanah pada suatu kawasan yang kondisinya dinilai kurang memenuhi syarat untuk menjadi kawasan yang lebih baik (Indra,2012), Land Readjustment merupakan salah satu penataan lahan yang berbasis pada peningkatan nilai lahan itu sendiri. Maksudnya adalah lahan yang semula kurang di optimalkan, kemudian diadakan penataan terhadap lahan tersebut agar dapat lebih bermanfaat. Metode yang digunakan land readjustment ini adalah menata kembali batas-batas peruntukan lahan berdasarkan arahan zonasi dalam rencana tata ruang. Kemudian, dengan menyesuaikan batas-bats kepemilikan lahan tanah, maka dapat diperoleh lahan yang dapat dikontribusikan untuk ruang public atau prasarana kepentingan umum lainnya.

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh onformasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2009:38).

Tabel 2. 1 Variabel Penelitian

No	Sumber	Indikator Dalam Teori	Variabel Penelitian
Sasaran 1: Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Di Permukiman Nelayan Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.			
1	Komarudin (1999)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fisik & Lingkungan 2. Sosial 3. Ekonomi 	Kondisi Fisik & Lingkungan: Kualitas Tanah, Kepemilikan Lahan, Kualitas Bangunan, Kepadatan Bangunan, Pertambahan Bangunan Kumuh, Jarak Antar Bangunan. Kondisi Sarana & prasarana : Jaringan jalan lingkungan, jaringan drainase, jaringan air minum,

No	Sumber	Indikator Dalam Teori	Variabel Penelitian
			jaringan persampahan, kualitas air minum Kondisi Sosial Masyarakat : Kepadatan Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Kegiatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan. Kondisi Ekonomi Masyarakat ; Pola mata Pencaharian, tingkat pendapatan penduduk.
Sasaran 2: Mengidentifikasi Tingkat Kekumuhan Di Permukiman Nelayan Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.			
1	Permen PUPR No 14 2018	1. Kondisi Bangunan 2. Kondisi Jalan Lingkungan 3. Kondisi Penyediaan Air Minum 4. Kondisi Drainase Lingkungan 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan 7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Bangunan : Ketidakteraturan Bangunan, Tingkat Kepadatan Bangunan, Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan Jalan Lingkungan : Cakupan Pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan Penyediaan Air minum: Ketidaktersediaan akses aman air minum, tidak tepenuhinya kebutuhan air minum

No	Sumber	Indikator Dalam Teori	Variabel Penelitian
			<p>Drainase Lingkungan: Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, kualitas konstruksi drainase</p> <p>Pengelolaan Air Limbah: prasarana air limbah, sarana air limbah</p> <p>Pengelolaan Persampahan: Prasarana pengelolaan persampahan, sarana pengelolaan persampahan, system pengelolaan persampahan</p> <p>Proteksi Kebakaran: Prasarana proteksi kebakaran, sarana proteksi kebakaran</p>
Sasaran 3 : Merumuskan Manajemen Penggunaan Lahan Untuk Pengendalian Kawasan Kumuh Wilayah Pesisir Di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung.			
1	UU No 1 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. kepadatan bangunan 2. kualitas bangunan 3. sarana 4. prasarana 5. social 	<p>Permukiman: Karakteristik Permukiman, Kondisi Permukiman, Sarana dan</p>
2	Whalen (2006)	<ol style="list-style-type: none"> 1. sarana dan infrastruktur 2. lahan tersebar tidak beraturan 	<p>Prasarana</p> <p>Lahan: Status Kepemilikan lahan, Kesesuaian</p>
3	(World Bank Group,2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana 2. Prasarana 3. Nilai Lahan 	<p>Peruntukan, bentuk lahan</p>

No	Sumber	Indikator Dalam Teori	Variabel Penelitian
		4. Kepemilikan lahan 5. Penataan Permukiman	Penggunaan Lahan : Kemampuan Lahan, Kondisi Pemanfaatan Lahan, Luas Pemanfaatan lahan

Sumber: Hasil Sintesa Pustaka 2021

Berdasarkan Tabel Penelitian diatas didapatkan variable amatan untuk sasaran pertama dalam penelitian Identifikasi kondisi penggunaan lahan eksisting pada kawasan permukiman nelayan di desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut untuk mengetahui kondisi karakteristik wilayah pesisir dan penggunaan lahan untuk mengetahui hasil dari sasaran 1 (satu).

Variabel amatan untuk sasaran 2 (dua) yaitu mengetahui tingkat kekumuhan di permukiman nelayan Desa Tabanio lebih tepatnya di wilayah penelitian. Sedangkan untuk sasaran 3(tiga) yaitu merumuskan Merumuskan manajemen penggunaan lahan untuk pengendalian kawasan kumuh wilayah pesisir di desa Tabanio, Kecamatan Takisung yang menggunakan variabel permukiman, lahan dan kemampuan lahan untuk mengetahui kesesuaian lahan di wilayah penelitian.

Definisi Operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi). Konsep dapat diamati atau diobservasi ini penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. Sehingga adapun definisi operasional dari masing-masing variabel yang telah diteliti sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Definisi Operasional

No	Variabel Yang diteliti	Sub Variabel	Definisi Operasional
Sasaran 1: Identifikasi Karakteristik permukiman kumuh di permukiman nelayan Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.			
1	Kondisi Fisik & Lingkungan	Kualitas Tanah,	Mengetahui kondisi fisik & lingkungan dari suatu kawasan
		Kepemilikan Lahan	
		Kualitas Bangunan	

No	Variabel Yang diteliti	Sub Variabel	Definisi Operasional
		Kepadatan Bangunan	
		Pertambahan Bangunan	
		Jarak Antar Bangunan	
2	Kondisi Sarana & Prasarana	Jaringan jalan lingkungan,	Kondisi sarana dan prasarana merupakan kondisi dimana sarana dan prasarana di suatu wilayah sudah cukup memadai atau belum memadai untuk wilayah tersebut
		jaringan drainase	
		jaringan air minum	
		jaringan persampahan	
		kualitas air minum	
3	Kondisi Sosial Masyarakat	Kepadatan Penduduk,	Kondisi Sosial Masyarakat merupakan suatu kondisi yang menggambarkan status sosial masyarakat di suatu wilayah
		Pertumbuhan Penduduk	
		Kegiatan Masyarakat	
		Tingkat Pendidikan	
4	Kondisi Ekonomi Masyarakat	Pola mata Pencaharian,	Kondisi Ekonomi Masyarakat merupakan suatu kondisi untuk mengetahui perekonomian suatu wilayah melalui mata pencaharian masyarakat dan tingkat pendapatannya.
		tingkat pendapatan penduduk	
Sasaran 2: Mengidentifikasi tingkat kekumuhan di permukiman nelayan Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut			
1	Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan,	Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang mempunyai fungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau kegiatan lainnya.
		Tingkat Kepadatan Bangunan	
		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	
2	Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan jalan lingkungan	Jalan lingkungan merupakan jalan yang

No	Variabel Yang diteliti	Sub Variabel	Definisi Operasional
		kualitas permukaan jalan lingkungan	menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan.
3	Penyediaan Air Bersih:	Pelayanan Air Bersih	Pelayanan air bersih merupakan penyediaan akses air bersih di suatu wilayah dimana sudah terpenuhi atau belum untuk kebutuhan air minum
4	Drainase Lingkungan:	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, kualitas konstruksi drainase	Drainase lingkungan merupakan kondisi dan kualitas daricdrainase untuk mengalirkan air
5	Pengelolaan Air Limbah:	prasarana air limbah sarana air limbah	Pengelolaan air limbah merupakan kondisi sarana dan prasarana dalam mengelola air limbah di suatu wilayah
6	Pengelolaan Persampahan:	Prasarana pengelolaan persampahan, sarana pengelolaan persampahan system pengelolaan persampahan	Pengelolaan Pesampahan merupakan sarana dan prasarana dalam mengelola limbah sampah serta menentukan system pengelolaan sampah yang cocok dalam mengelola limbah sampah.
7	Proteksi Kebakaran:	Prasarana proteksi kebakaran, sarana proteksi kebakaran	Proteksi Kebakaran merupakan saran dan prasana dalam mencegah bencana kebakaran di suatu tempat.
Sasaran 3 : Merumuskan manajemen penggunaan lahan untuk pengendalian kawasan kumuh wilayah pesisir di desa Tabanio, Kecamatan Takisung.			
1	Permukiman	Karakteristik Permukiman	Melakukan pengendalian

No	Variabel Yang diteliti	Sub Variabel	Definisi Operasional
		Kondisi Permukiman	permukiman kumuh dengan mengetahui karakteristik dan kondisi permukiman, serta sarana dan prasaran
		Sarana dan Prasarana Kawasan tingkat kekumuhan Kawasan Bangunan tidak teratur	
2	Lahan	Status Kepemilikan Lahan	Status legalitas lahan permukiman dan kesesuaian kegiatan berdasarkan rencana zonasi peruntukan
		Kesesuaian Peruntukan lahan tersebar tidak beraturan	
3	Penggunaan Lahan	Kemampuan Lahan	Merumuskan kondisi pemanfaatan lahan dan luas pemanfaatan lahan agar dapat mensinkronisasikan dengan kemampuan lahan
		Kondisi Pemanfaatan Lahan	
		Luas Pemanfaatan lahan	

Sumber: Hasil Sintesa Pustaka 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif, dimana pengertian dari penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono,2005). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang ada.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teknik observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke wilayah penelitian agar mengetahui kondisi penggunaan lahan dan kondisi permukiman nelayan
2. Teknik wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi langsung dari sumbernya seperti data masalah pada kawasan permukiman nelayan di desa Tabanio, kecamatan Takisung.
3. Teknik dekomentasi adalah gunanya untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi data dokumen Rencana Tata Ruang (RDTR, RTRK, dan CAP), peraturan –peraturan, foto – foto, buku – buku yang relevan dengan penelitian yang diambil.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan mengkategorikan karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata – katayang menunjukkan kondisi fisik wilayah (topografi, geologi, bencana alam), penggunaan lahan, kebijakan yang berlaku di wilayah penelitian da studi fisik/ lingkungan yang ada atau pernah dilakukan pada kawasan permukiman nelayan desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.
- b. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka yang menunjukkan luas wilayah, klimatologi data hidrologi, jumlah penduduk.

3.3.2 Sumber Data

Berdasarkan sumber data dapat dibagi menjadi atas 2 yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pengamatan langsung ke lapangan dan mendapatkan data kondisi penggunaan lahan dan kondisi kawasan permukiman nelayan di desa Tabanio, Kecamatan Takisung.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi dan lembaga yang terkait data di dinas Permukiman dan Tata Ruang (Geografi wilayah, pola pemanfaatan lahan, kebijakan pembangunan, sarana dan prasarana), Badan pertanahan Nasional (Topografi, geologi, klimatologi, hidrologi), Dinas perikanan dan kelautan (Karakteristik wilayah pesisir) Badan Pusat Statistik (Jumlah Penduduk), dan Kantor Desa Tabanio.

3.4 Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, berdasarkan pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun analisa-analisa yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan melakukan tiga analisa dimana terdiri dari analisa data deskriptif, analisa skoring, dan analisa kemampuan lahan.

3.4.1 Analisa Karakteristik Permukiman Kumuh di Permukiman Nelayan Desa Tabanio

Analisa yang akan dilakukan ini menggunakan analisa deskriptif dimana analisa ini untuk mendeskripsikan kondisi penggunaan lahan serta mengetahui faktor-faktor karakteristik kumuh dan memadukan antara studi literatur, data survey, dan standar yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data deskriptif atau statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh (Azwar, 1998). Umumnya hasil disajikan dalam bentuk persentase, proporsi, atau frekuensi yang divisualisasikan melalui grafik dan chart. Penyajian dengan cara tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi subjek menurut kategori-kategori nilai variabel.

3.4.2 Analisis Penentuan Aspek dan Tingkat Kekumuhan

Dalam mengidentifikasi wilayah permukiman kumuh, terdapat tujuh aspek beserta sub kriteria yang digunakan dalam penelitian ini serta analisis ini menggunakan metode skoring untuk pada setiap aspeknya. Berikut kriteria dengan skala penilaian yang berpengaruh terhadap identifikasi kawasan permukiman kumuh:

Tabel 3. 1 Aspek Kondisi Bangunan

Kriteria	Skala Penilaian	Parameter Penilaian
Ketidakteraturan Bangunan	Skor 5	76% - 100% Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	Skor 3	51% - 75 % Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	Skor 1	26% - 50% Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	Skor 0	0% - 25% Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
Tingkat Kepadatan Bangunan	Skor 5	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
	Skor 3	51% - 75 % bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
	Skor 1	26% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
	Skor 0	0% - 25% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
Kualitas Bangunan	Skor 5	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	Skor 3	51% - 75 % bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	Skor 1	26% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	Skor 0	0% - 25% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2018

Tabel 3. 2 Aspek Kondisi Jalan Lingkungan

Kriteria	Skala Penilaian	Parameter Penilaian
Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Skor 5	76% - 100% Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	Skor 3	51% - 75 % Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	Skor 1	26% - 50% Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	Skor 0	0% - 25% Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Skor 5	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	Skor 3	51% - 75 % area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	Skor 1	26% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	Skor 0	0% - 25% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2018

Tabel 3. 3 Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum

Kriteria	Skala Penilaian	Parameter Penilaian
Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	Skor 5	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	Skor 3	51% - 75 % populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Kriteria	Skala Penilaian	Parameter Penilaian
	Skor 1	26% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	Skor 0	0% - 25% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2018

Tabel 3. 4 Aspek Indikator Kondisi Drainase Lingkungan

Kriteria	Skala Penilaian	Parameter Penilaian
Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Skor 5	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	Skor 3	51% - 75 % area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	Skor 1	26% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	Skor 0	0% - 25% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
Ketidakterersediaan Drainase	Skor 5	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan
	Skor 3	51% - 75 % area tidak tersedia drainase lingkungan
	Skor 1	26% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan
	Skor 0	0% - 25% area tidak tersedia drainase lingkungan

Kriteria	Skala Penilaian	Parameter Penilaian
Kualitas Konstruksi Drainase	Skor 5	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	Skor 3	51% - 75 % area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	Skor 1	26% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	Skor 0	0% - 25% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2018

Tabel 3. 5 Aspek Indikator Kondisi Air Limbah

Kriteria	Skala Penilaian	Parameter Penilaian
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Skor 5	76% - 100% aarea memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	Skor 3	51% - 75 % area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	Skor 1	26% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	Skor 0	0% - 25% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standara Teknis	Skor 5	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

Kriteria	Skala Penilaian	Parameter Penilaian
	Skor 3	51% - 75 % area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
	Skor 1	26% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
	Skor 0	0% - 25% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2018

Tabel 3. 6 Aspek Indikator Kondisi Pengelolaan Sampah

Kriteria	Skala Penilaian	Parameter Penilaian
Prasarana Dan sarana Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	Skor 5	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	Skor 3	51% - 75 % area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	Skor 1	26% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Kriteria	Skala Penilaian	Parameter Penilaian
	Skor 0	0% - 25% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	Skor 5	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
	Skor 3	51% - 75 % area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
	Skor 1	26% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
	Skor 0	0% - 25% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2018

Tabel 3. 7 Aspek Indikator Proteksi Kebakaran

Kriteria	Skala Penilaian	Parameter Penilaian
Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Skor 5	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	Skor 3	51% - 75 % area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	Skor 1	26% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	Skor 0	0% - 25% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Skor 5	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	Skor 3	51% - 75 % area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Kriteria	Skala Penilaian	Parameter Penilaian
	Skor 1	26% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	Skor 0	0% - 25% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2018

Perhitungan Tingkat Kekumuhan merupakan berbagai macam perhitungan yang digunakan untuk melakukan skoring pada setiap indikator, sub kriteria hingga kelas klasifikasi untuk tingkat kekumuhan.

- a. Perhitungan total penilaian setiap indikator didekati dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Si = \frac{\sum Bi}{\sum P}$$

dimana:

Si = Total skor pada setiap indikator, Bi = Skor Sub Kriteria, P = Jumlah Sub Kriteria

- b. Perhitungan untuk klasifikasi kekumuhan dilakukan dengan rumus:
- N min = jumlah indikator x skor min
 N max = jumlah indikator x skor max
 Selang Interval = $\frac{N \max - N \min}{\text{Jumlah kelas}}$

Dengan menggunakan perhitungan rumus diatas sehingga didapatkan :

N min = 0, N max = 80, Selang Interval = 11

Sehingga didapatkan nilai klasifikasi untuk setiap kelas yakni :

- a. Bukan Kawasan Kumuh : < 16
 b. Kawasan Kumuh Ringan : 16 - 37
 c. Kawasan Kumuh Sedang : 38 - 59
 d. Kawasan Kumuh Berat : 60 - 80

3.4.3 Analisa Perumusan Manajemen Lahan untuk Pengendalian Kawasan Permukiman kumuh di Desa Tabanio

Dalam merumuskan arahan model manajemen lahan didapatkan melalui teknik analisis kemampuan lahan dan analisis deskriptif dimana kedua teknik analisis ini di gabungkan untuk menjadi suatu rumusan manajemen lahan pada wilayah penelitian. Pada analisis ini ditunjukkan untuk mendapatkan konsep manajemen lahan berdasarkan kemampuan lahan.

3.4.3.1 Analisa Kemampuan Lahan

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan lahan untuk dapat mendukung upaya pemanfaatan lahan. Analisis kemampuan lahan ini sekaligus untuk mengetahui faktor – faktor fisik lahan yang bersifat menghambat dan tidak menghambat dalam upaya pemanfaatan lahan, analisis kemampuan lahan ini digunakan untuk mengetahui kemampuan lahan yang terdapat di Desa Tabanio.

Analisis kemampuan lahan ini bermaksud untuk mengkaji tingkatan kemampuan lahan pada daerah studi berdasarkan aspek fisik dasar. Aspek dasar ini merupakan salah satu materi yang diperlukan dalam rencana pengembangan suatu kota, hal ini seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M.2007 tentang pedoman teknik analisis fisik dan lingkungan, ekonomi serta sosial budaya dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, sedangkan tahap analisis terdiri dari dua, yakni analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan serta data-data yang dibutuhkan dalam aspek analisis fisik dan lingkungan dalam analisis ini yaitu:

- a) Klimatologi
- b) Topografi
- c) Geologi
- d) Hidrologi
- e) Sumber Daya Mineral/ Bahan Galian
- f) Bencana Alam
- g) Penggunaan Lahan.

Aspek – aspek fisik kemampuan lahan tersebut dalam analisis ini dikenal dengan satuan kemampuan lahan (SKL). Informasi aspek – aspek fisik kemampuan lahan yang dimaksud tersebut dan dibutuhkan bagi pengembangan industri yaitu berupa

1. Satuan Kemampuan Lahan Morfologi
2. Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng
3. Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi
4. Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air
5. Satuan Kemampuan Lahan Kerentanan Bencana
6. Satuan Kemampuan Lahan Drainase
7. Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah
8. Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi
9. Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan di Kerjakan

Semua peta SKL yang telah selesai dikerjakan di beri skor dan di overlay sehingga akan menghasilkan peta kemampuan lahan kawasan tersebut.

A. Satuan Kemampuan Lahan Morfologi

Analisis Satuan Kemampuan Lahan Morfologi perlu adanya peta kemiringan, peta morfologi yang dilakukan overlay dengan menggunakan ArcGis agar dapat mengetahui kawasan yang termasuk dalam kriteria tersebut untuk mendapatkan hasil yang dijadikan sebagai kemampuan perumahan. Adapun kriterianya terdapat pada tabel dibawah ini,

Tabel 3. 8 Pembobotan SKL Morfologi

No	Peta Kemiringan (%)	Nilai	Peta Morfologi	Nilai	SKL Morfologi (Nilai)	Nilai
1	0-2	5	Dataran	5	Tinggi (9-10)	5
2	2-5	4	Landai	4	Cukup (7-8)	4
3	5-15	3	Perbukitan Sedang	3	Sedang (5-6)	3
4	15-40	2	Pegunungan/ Perbukitan Terjal	2	Kurang (3-4)	2
5	>40	1	Pegunungan/ Perbukitan Sangat Terjal	1	Rendah (1-2)	1

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

B. Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng

Analisis satuan kemampuan lereng ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lahan yang berkaitan dengan kestabilan dan kemudahan pengembangan lahan untuk kegiatan industry dan kegiatan lainnya. Pembobotan SKL Kestabilan Lereng terbagi menjadi 5 Kelas seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. 9 Pembobotan SKL Kestabilan Lereng

Ketinggian	Nilai	Kemiringan	Nilai	Morfologi	Nilai	SKL Kestabilan Lereng	Nilai
< 500	5	0 - 2 %	5	Dataran	5	Tinggi (14-15)	5
		2 - 5 %	4	Landai	4	Cukup (12-13)	4
500 -1500	4	5 -15 %	3	Perbukitan Sedang	3	Sedang (9-11)	3
1500 – 2500	3	15 - 40 %	2	Pegunungan/Perbukitan Terjal	2	Kurang (6-8)	2
		> 40 %	1	Pegunungan/Perbukitan Sangat Terjal	1	Rendah (4-5)	1

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

C. Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi

Analisis satuan kemampuan lahan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkatan kemampuan lahan dalam mendukung bangunan industri serta sarana dan prasarananya dalam menunjang pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri. Analisis satuan kemampuan lahan kestabilan pondasi hampir sama dengan analisis satuan kemampuan lahan kestabilan lereng, namun pada analisis SKL kestabilan pondasi pengaruh gempa diperhitungkan.

Tabel 3. 10 Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi

SKL Kestabilan Lereng						Jenis Tanah	Nilai	SKL Kestabilan Lereng	Nilai
Ketinggian	Nilai	Kemiringan	Nilai	Morfologi	Nilai				
< 500	5	0 - 2 %	5	Dataran	5	Alluvial	5	Tinggi (18-20)	5
		2 - 5 %	4	Landai	4	Latosol	4	Cukup (15-17)	4
500 -1500	4	5 -15 %	3	Perbukitan Sedang	3	Mediteran, Brown Forest	3	Sedang (11-14)	3
1500 – 2500	3	15 - 40 %	2	Pegunungan/Perbukitan Terjal	2	Podsol Merah Kuning	2	Kurang (8-10)	2
		> 40 %	1	Pegunungan/Perbukitan Sangat Terjal	1			Rendah (5-7)	1

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

D. Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air

Ketersediaan air pada suatu lahan merupakan hal yang sangat penting, mengingat fungsi air tanah sebagai sumber pasokan air bersih untuk berbagai kebutuhan, terutama di saat kemarau panjang dimana air permukaan tidak mencukupi.

Tabel 3. 11 Pembobotan SKL Ketersediaan Air

Peta DAS	Nilai	Peta Curah Hujan	Nilai	Peta Guna Lahan	Nilai	SKL Ketersediaan Air	Nilai
Baik merata	5	4000-4500 mm	5	Terbangun	2	Tinggi (11-12)	5
		3500-4000 mm	4			Cukup (9-10)	4
Baik tidak merata	4	3000-3500 mm	3	Non Terbangun	1	Sedang (7-8)	3
Setempat terbatas	3	2500-3000 mm	2			Kurang (5-6)	2

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007

E. Satuan Kemampuan Lahan Kerentanan Bencana

Analisis satuan kemampuan lahan kerentanan bencana ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lahan yang berhubungan dengan kemampuan lahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

Tabel 3. 12 Pembobotan SKL Kerentanan Bencana

Gerakan Tanah	Nilai	Rawan Gempa	Nilai	SKL Bencana Alam	Nilai
Tinggi	5	Zona Tinggi >0,4 g	5	Tinggi (10-9)	5
Menengah	4	Zona Sedang 0,3-0,4 g	4	Sedang (8-7)	4
Rendah	3	Zona Rendah 0,1-0,2	3	Rendah (5-6)	3
Sangat Rendah	2				

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007

F. Satuan Kemampuan Lahan Drainase

Analisis satuan kemampuan lahan drainase untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal ataupun meluas dapat dihindari SKL drainase berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik

bersifat lokal ataupun meluas dapat dihindari. Peta SKL ini merupakan *overlay* dari peta topografi, peta kemiringan lereng, dan peta curah hujan.

Tabel 3. 13 Pembobotan SKL Drainase

Peta Ketinggian	Nilai	Peta Kemiringan (%)	Nilai	Peta Curah Hujan	Nilai	SKL Drainase	Nilai
<500	5	0 - 2 %	5	2500-3000 mm	2	Tinggi (12-14)	3
		2 - 5 %	4	3000-3500 mm	3	Cukup (6-11)	2
500-1500	4	5 - 15 %	3	3500-4000 mm	4		
1500-2500	3	15 - 40 %	2	4000-4500 mm	5	Kurang (3-5)	1
		>40%	1				

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007

G. Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah

Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan limbah merupakan satuan untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair.

Tabel 3. 14 Pembobotan SKL Pembuangan Limbah

Ketinggian	Nilai	Kemiringan (%)	Nilai	Curah Hujan	Nilai	Guna Lahan	Nilai	SKL Pembuangan Limbah	Nilai
<500	5	0 - 2 %	5	2500-3000 mm	2	Non Terbangun	1	Tinggi (4-6)	5
		2 - 5 %	4	3000-3500 mm	3			Cukup (7-8)	4
500-1500	4	5 - 15 %	3	3500-4000 mm	4	Terbangun	2	Sedang (9-10)	3
1500-2500	3	15 - 40 %	2	4000-4500 mm	5			Kurang (11-12)	2
		>40%	1			Rendah (13-14)	1		

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007

H. Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi

Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi merupakan satuan untuk mengetahui tingkat keterkikisan tanah di wilayah atau kawasan perencanaan, mengetahui ketahanan lahan terhadap erosi, memperoleh gambaran batasan pada masing-masing tingkatan kemampuan terhadap erosi. Mengetahui daerah yang peka terhadap erosi dan perkiraan pengendapan hasil erosi tersebut pada bagian hilir. Ada beberapa peta yang dibutuhkan dalam analisis, peta permukaan, peta geologi, peta morfologi, peta kemiringan lereng. Data hidrologi dan klimatologi dan penggunaan lahan.

Tabel 3. 15 Pembobotan SKL Terhadap Erosi

Curah Hujan	Nilai	Jenis Tanah	Nilai	Morfologi	Nilai	Kemiringan	Nilai	SKL Erosi	Nilai
2500 - 3000	1	Podsol Merah Kuning	2	Perbukitan sangat terjal	1	0 - 2 %	5	Tinggi (7-10)	5
3000 - 3500	2	Mediteran, Brown Forest	3	perbukitan terjal	2	2 - 5 %	4	Cukup (11-15)	4
		Latosol	4			5 - 15 %	3	Kurang (16-20)	3
3500-4000	3	Alluvial	5	Perbukitan Sedang	3	15 - 40 %	2	Rendah (21-24)	2
						> 40 %	1		

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007

I. Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan di Kerjakan

SKL kemudahan dikerjakan berfungsi untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah dan/atau kawasan untuk digali / dimatangkan dalam proses pembangunan / pengembangan kawasan.

Tabel 3. 16 Pembobotan SKL Kemudahan di Kerjakan

Peta Ketinggian	Nilai	Peta Kemiringan (%)	Nilai	Jenis Tanah	Nilai	SKL Kemudahan Di Kerjakan	Nilai
		0 - 2 %	5	Alluvial	5	11-15 Tinggi	5

Peta Ketinggian	Nilai	Peta Kemiringan (%)	Nilai	Jenis Tanah	Nilai	SKL Kemudahan Di Kerjakan	Nilai
<500	5	2 - 5 %	4	Latosol	4	10-7Sedang	4
500-1500	4	5 - 15 %	3	Brown Forest, Mediteran	3	6-3Kurang	3
		15 - 40 %	2				
1500-2500	3	>40%	1	Podsol Merah Kuning	2	0-3Rendah	2

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007

Analisis kemampuan lahan Selanjutnya berdasarkan kesembilan Satuan Kemampuan Lahan yang dihasilkan diatas, maka dilakukan overlay untuk dihasilkan peta satuan kemampuan lahan wilayah penelitian. Dari analisis ini akan didapatkan penilaian terhadap potensi lahan yang nantinya akan menjadi acuan untuk menentukan pengendalian dan pemanfaatan lahan yang benar. Selain itu, analisis kemampuan lahan juga digunakan untuk mendukung proses dalam penyusunan perencanaan penggunaan lahan berbasis pengurangan risiko bencana. Keluaran dari analisis ini meliputi:Peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan,

- a. Kelas kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi kawasan,
- b. Potensi dan kendala fisik pengembangan lahan.

Analisa ini digunakan untuk mengetahui klasifikasi kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi kawasan, dan memperoleh gambaran potensi dan kendala masing – masing kelas kemampuan lahan dan sebagai dasar untuk penentuan arahan –arahan kesesuaian untuk pengembangan kawasan. Langkah –langkah yang ditempuh untuk melakukan analisis ini sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa satuan –satuan kemampuan lahan, untuk memperoleh gambaran tingkat pada masing – masing satuan kemampuan lahan.
- b. Tentukan nilai kemampuan setiap tingkatan pada masing –masing satuan kemampuan lahan dengan menggunakan skoring 5 untuk nilai tertinggi dan 1 untuk nilai terendah.

Tabel 3. 17 Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan

No	Satuan Kemampuan Lahan	Bobot
1	Morfologi	5
2	Kemudahan Untuk Dikerjakan	1
3	Ketersediaan Air	5
4	Untuk Drainase	5
5	Terhadap Bencana Alam	5
6	Kestabilan Pondasi	3
7	Kestabilan Lereng	5
8	Terhadap Erosi	3
9	Pembuangan Limbah	0

Sumber: Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

- c. Sumperimpose semua satuan lahan tersebut dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai kali bobot dari seluruh satuan kemampuan lahan dan satu peta, sehingga dapat memperoleh kisaran nilai yang menunjukkan kemampuan lahan untu permukiman nelayan.

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Jumlah Bobot Tertinggi} - \text{Jumlah Bobot Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

3.4.3.2 Analisis Deskriptif

Analisa ini dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi kemampuan lahan wilayah penelitian serta memadukan antara studi literatur, data survey, dan standar yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data deskriptif atau statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh (Azwar, 1998). Dari analisis ini juga menggabungkan hasil dari analisis kemampuan lahan dengan konsep manajemen agar dapat merumuskan manajemen penggunaan lahan yang cocok untuk dilakukan di wilayah penelitian

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemn-elemen sejenis yang menjadi objek penelitian, tetapi dapat dibedakan satu sama lain(Supranto, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah kondisi penggunaan lahan di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung. Pengertian kondisi penggunaan lahan yang

berada di wilayah penelitian adalah kondisi eksisting yang ada di wilayah penelitian.

3.5.2 Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang diteliti. Sedangkan sampling yaitu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh, artinya tidak mencakup seluruh objek tetapi hanya sebagian populasi saja, yaitu hanya mencakup sampel yang diambil dari populasi tersebut (Supranto, 2003). Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu, kondisi rumah – rumah, sarana dan prasarana yang ada di wilayah penelitian

BAB IV GAMBARAN UMUM

Untuk memberikan gambaran kondisi Desa Tabanio secara keseluruhan, maka pada bab ini akan membahas beberapa hal terkait dengan aspek fisik, lingkungan dan social kependudukan.

4.1 Gambaran Umum

Pembahasan terkait dengan gambaran umum memuat tentang aspek fisik dan aspek sosial yang berkorelasi langsung dengan variable dalam penelitian. Lebih jelas terkait penjelasan masing-masing aspek dapat dilihat pada uraian dibawah.

4.1.1 Gambaran Umum Geografis Desa Tabanio

Wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah kawasan permukiman di Desa Tabanio. Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dimana Desa Tabanio Sendiri terdiri atas 6 Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tangga (RT). Wilayah penelitian merupakan wilayah daratan seluas 82,1Ha dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sungai Bakau dan Desa Raden

Sebelah Timur : Desa Tungkaran, Desa Ujung Batu dan Desa Panjaratan

Sebelah Selatan : Desa Pagatan Besar

Sebelah Barat : Laut Jawa

Secara administrative Desa Tabanio terbagi menjadi 6 dusun dan 22 Rukun Tetangga. Penduduk di Desa Tabanio berjumlah 5.123 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.361.

4.1.1.1 Topografi

Topografi atau ketinggian Desa Tabanio di dominasi oleh kelas ketinggian 250-500 m dengan luas 3.978,19 ha, sedangkan luas ketinggian dengan luas terkecil adalah kelas ketinggian 0-250 m yang mempunyai luasan sebesar 314,34 ha yang terdapat di bagian pinggir pantai.

Tabel 4. 1 Topografi Desa Tabanio

No	Topografi	Luas Wilayah (Ha)
1	0-250	314,34
2	250-500	3978,19
Total		4292,52

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Tanah Laut,2016

4.1.1.2 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Desa Tabanio hanya terdapat dua jenis tanah yaitu Organosol Glei Humus dan Aluvial sedangkan tanah yang mendominasi yaitu tanah Aluvial dengan luas 3.899,01 ha atau 90,8% dari luas tanah Desa Tabanio, sedangkan untuk tanah Organosol Glei Humus hanya seluas 393,52 ha atau 9,2% dari total luas tanah di Desa Tabanio.

Tabel 4. 2 Jenis Tanah Desa Tabanio

No	Jenis Tanah	Luas Wilayah (Ha)
1	Organosol Glei Humus	393,52
2	Aluvial	3899,01
Total		4292,52

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Tanah Laut,2016

4.1.1.3 Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng di Desa Tabanio didominasi oleh daerah dataran dengan diselingi daerah yang cukup bergelombang hingga dataran berbukit. Daerah landai 0-2% dengan luasan 2.871,74 ha atau 66,91% dari luas wilayah Desa Tabanio dan landau dengan luasan 1.397,38 ha atau 24,46% dari luasan wilayah Desa Tabanio

Tabel 4. 3 Kemiringan Lereng Desa Tabanio

No	Kemiringan Lereng	Luas Wilayah (Ha)
1	0-2 %	2871,74
2	2-8 %	1397,38
3	8-15 %	22,43
4	15-40 %	0,71
Total		4292,26

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Tanah Laut,2016

4.1.2 Gambaran Umum Kondisi Sosial

Tingkat kepadatan penduduk dapat ditinjau dari jumlah penduduk dalam satuan luas hektar. Dalam penelitian ini, tingkat kepadatan penduduk, dapat diketahui dengan menggunakan jumlah penduduk dan luas permukiman yang ada pada kawasan penelitian. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan tingkat kepadatan penduduk biasa di kategorikan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu :

- Rendah : <150 Jiwa/Ha
- Sedang :151-200 Jiwa/Ha
- Tinggi :201-400 Jiwa/Ha
- Sangat Padat :>400 Jiwa/Ha

Tabel 4. 4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Desa Tabanio

Desa	2020	Luas Ha	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
Tabanio	5.123	2.545	2,01

Sumber: Profil Desa Tabanio, 2020

Berdasarkan pada tabel tersebut, bahwa Desa Tabanio termasuk dalam kategori rendah. Dimana Desa Tabanio mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2020 berjumlah 5.123 jiwa dan memiliki luas wilayah 2.545 Ha serta mempunyai kepadatan penduduk sekitar 2,01 jiwa/Ha. Berikut ini data gambaran umum jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio kelamin di Desa Tabanio.

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis

Desa	Laki-laki	Perempuan	Sex Ration
Tabanio	2564	2559	100,2

Sumber: Profil Desa Tabanio, 2020

Dari data rasio jenis kelamin tersebut dijelaskan bahwa untuk penduduk Desa Tabanio mayoritas penduduknya memiliki jenis kelamin laki-laki. Maka dapat berpengaruh pada meningkatnya angka produktifitas pekerja.

4.1.3 Gambaran Umum Permukiman Kumuh Desa Tabanio

Permukiman kumuh di Desa Tabanio mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan lahan permukiman semakin besar. Dengan luas 1,31 Ha dimana dijelaskan di Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 188.45/657.KUM/2020 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Tanah Laut bahwa Desa Tabanio termasuk dalam kawasan kumuh. Karakteristik permukiman kumuh pada kawasan ini sebagian masih berupa rumah panggung dan mempunyai konstruksi kayu, sarana dan prasarana persampahan belum mencukupi sebagian rumah tangga menimbun sampah, kualitas air bersih belum cukup memadai sebagian masyarakat harus membeli air saat kering dan sebagian lagi menggunakan sumur komunal. Karena Desa Tabanio dekat dengan sungai maka sering terdampak banjir saat musim hujan karena drainase belum terdapat di seluruh lingkungan permukiman.

Permukiman kumuh di Kecamatan Takisung terbagi atas 7 desa. Salah satunya terdapat di Desa Tabanio. Berikut luas permukiman kumuh yang berada di Desa Tabanio.

Tabel 4. 6 Luas Permukiman Kumuh di Desa Tabanio

Kecamatan	Desa Tabanio	Luas Kumuh (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Presentase Kumuh (%)
Takisung	Desa Tabanio	1,31	2.545	1,9

Sumber: SK Bupati Kab. Tanah laut 2020

Berdasarkan tabel diatas luas permukiman kumuh di Desa Tabanio mempunyai luas 1,31 Ha dimana luas wilayah Desa Tabanio sendiri memiliki luas sekitar 2.545 Ha, dimana tertera dalam SK Bupati Kabupaten Tanah Laut nomor 188.45/657.KUM/2020 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Tanah Laut bahwa Desa Tabanio mempunyai luas lokasi perumahan kumuh dan permukiman seluas 14,8 Ha dan luas kumuh verifikasinya 1,3 Ha dan lokasi permukiman kumuh yang berada di Desa Tabanio berada di RT 04, RT 07, RT 08, RT 09, dan RT 10. Dimana tertera juga dalam dokumen RDTR kecamatan Takisung bahawa Desa Tabanio termasuk kedalam kawasan kumuh nelayan.

4.1.4 Gambaran Umum Kondisi Sosial Keluarga Prasejahtera Permukiman Kumuh Desa Tabanio

Kondisi sosial terkait kesejahteraan penduduk di Desa Tabanio. Terlihat dari angka jumlah keluarga prasejahtera yang lumayan tinggi yaitu sebesar 1.331 Kepala keluarga yang terbagi menjadi beberapa kategori. Berikut merupakan jumlah keluarga prasejahtera yang berada pada permukiman kumuh di Desa Tabanio.

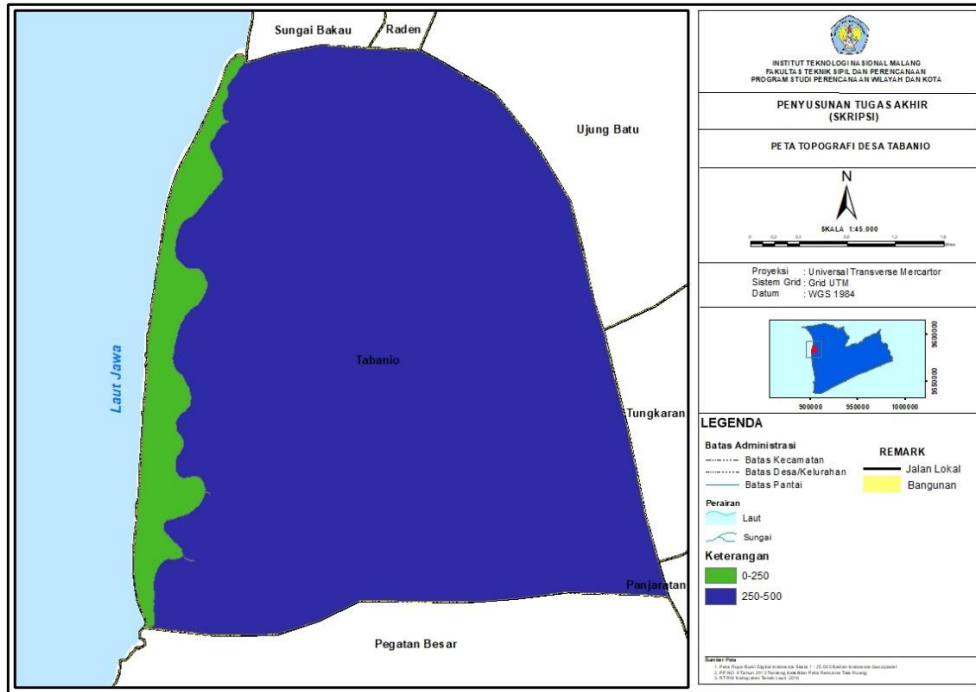
Tabel 4. 7 Jumlah Keluarga Prasejahtera di Desa Tabanio

No	Kategori	Jumlah
1	Jumlah keluarga prasejahtera	421 keluarga
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	706 keluarga
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	131 keluarga
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	73 keluarga
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	-
Total		1.331 keluarga

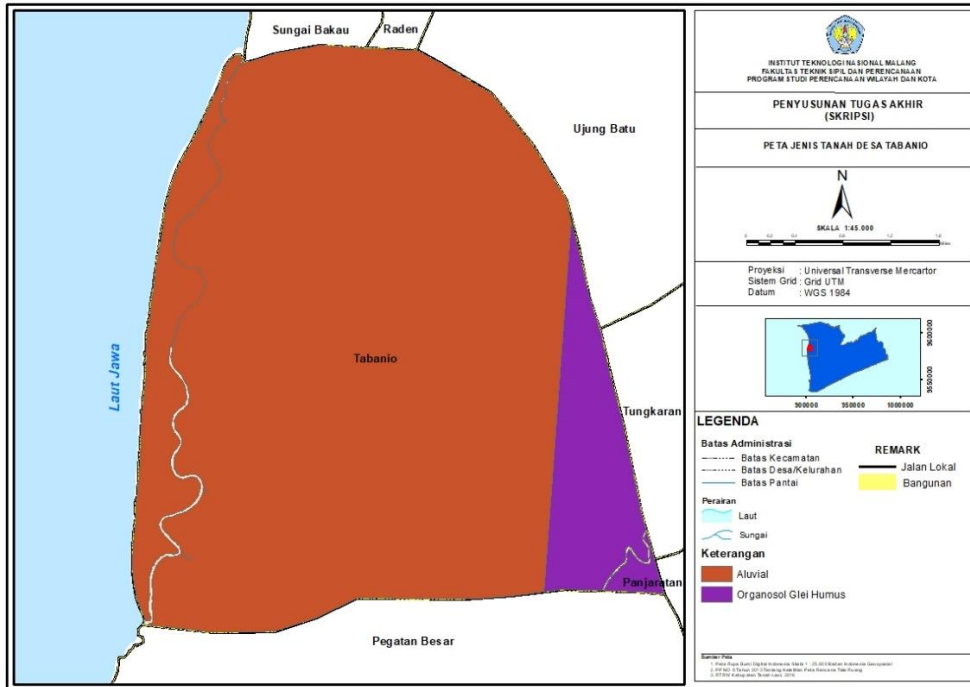
Sumber: Profil Desa Tabanio 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Desa Tabanio masih banyak yang tergolong keluarga sejahtera 1 dimana mempunyai jumlah 706 dan yang termasuk dalam golongan keluarga sejahtera 3 berjumlah 73 keluarga.

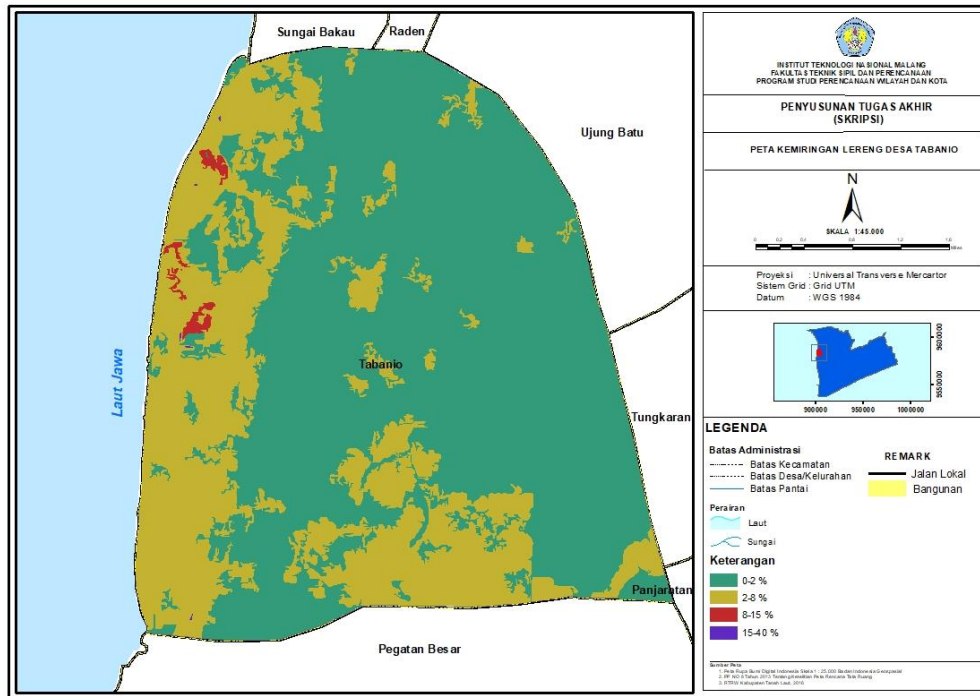
Peta 4.1 Topografi Desa Tabanio



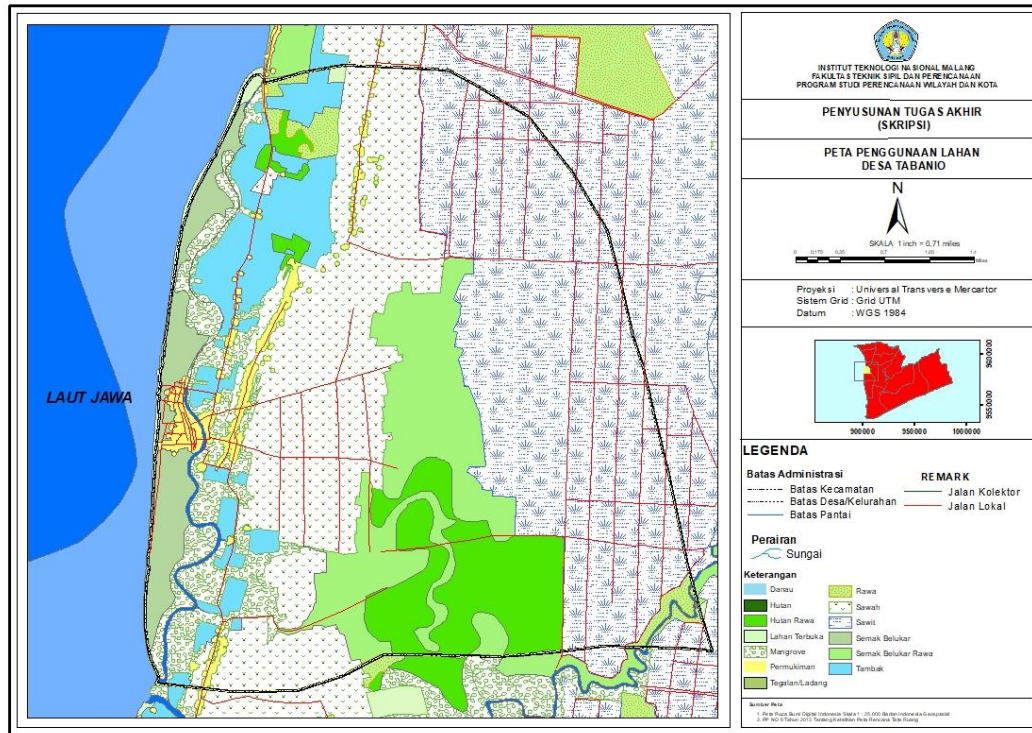
Peta 4. 2 Jenis Tanah



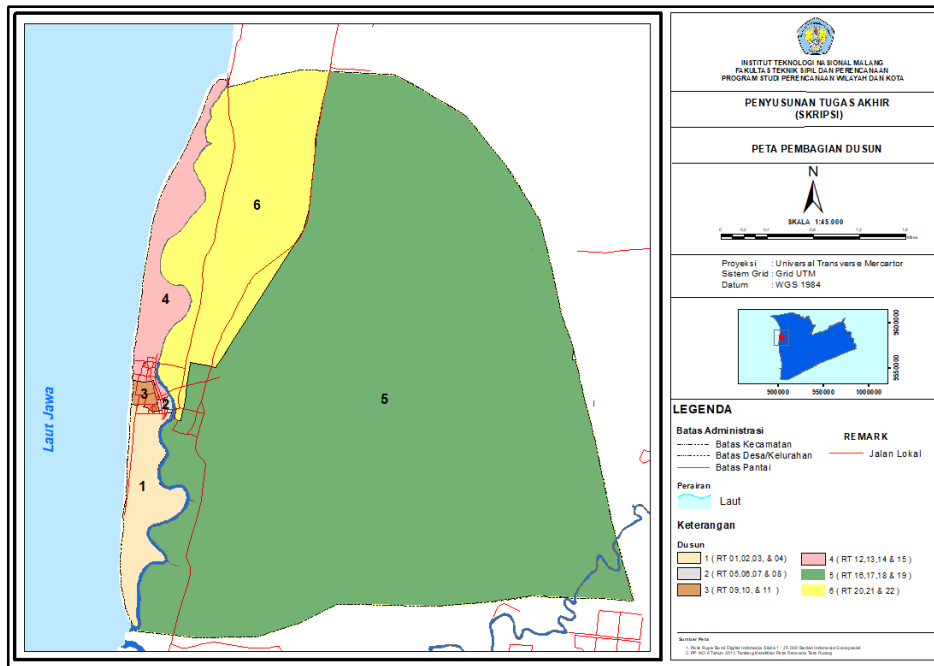
Peta 4. 3 Kemiringan Lereng



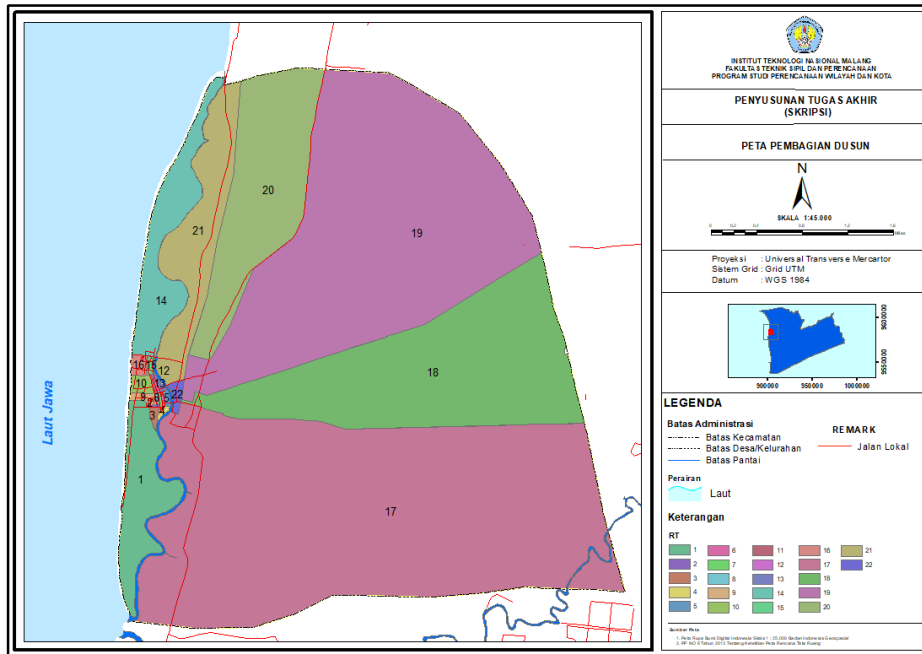
Peta 4.4 Penggunaan Lahan Desa Tabanio



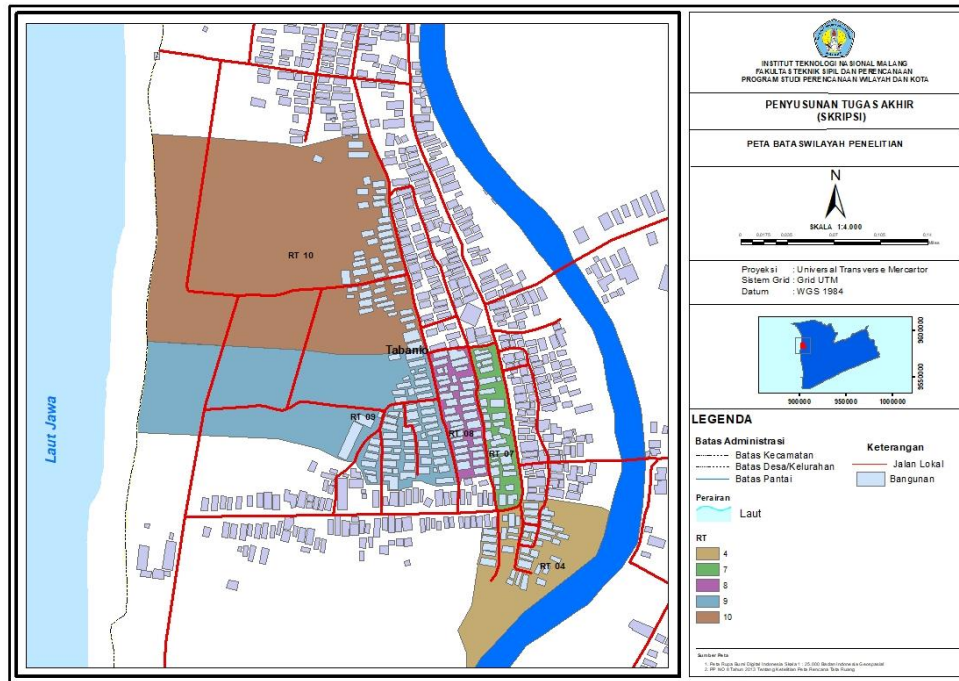
Peta 4. 5 Pembagian Dusun Desa Tabanio



Peta 4. 6 Pembagian RT Desa Tabanio



Peta 4.7 Batas Wilayah Penelitian



4.2 Identifikasi Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung

Pengidentifikasi ini dilakukan untuk mencari tahu karakteristik permukiman kumuh di Desa Tabanio beserta fungsi dasar, bentuk dan kondisi masyarakat dimana menggunakan analisis statistik deskriptif.

4.2.1 Persebaran bangunan di kawasan permukiman kumuh Desa Tabanio

Permukiman di Desa Tabanio terdapat 6 dusun dan 22 RT, dimana luas permukiman di Desa Tabanio sekitar 674 Ha dan menurut dari wawancara dengan kepala Desa Tabanio, bapak Madiansyah menyebutkan bahwa permukiman kumuh yang terdapat di Desa Tabanio tersebar di RT 04, RT 07, RT 08, RT 09, RT 10. Berikut permukiman kumuh yang berada di Desa Tabanio menurut kategori kumuh.

Tabel 4. 8 Persebaran Bangunan Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh

Lokasi Kumuh	Jumlah(Unit Rumah)
RT 04	38
RT 07	31
RT 08	37
RT 09	63
RT 10	50
Total	219

Sumber : Survei Primer 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di Desa Tabanio terdapat 5 RT yang tergolong dalam permukiman kumuh dimana tersebar di RT 04, RT07, RT08, RT 09 dan RT 10, dimana di wilayah RT 04 ada 38 unit rumah, RT 07 terdapat 31 unit rumah, RT 08 terdapat 37 unit rumah, RT 09 terdapat 63 unit rumah dan RT 10 terdapat 50 unit rumah.

4.2.2 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman Kumuh Desa Tabanio

Dari hasil identifikasi kawasan permukiman kumuh di Desa Tabanio tersebar pada 5 RT dengan kekumuhan kategori sedang. Karakteristik fisik bangunan yang berada di Desa Tabanio kebanyakan memiliki material dinding terbuat dari kayu dan memiliki material atap terbuat dari seng.

4.2.2.1 Kualitas Bangunan

Kualitas bangunan rumah dapat dilihat dari bahan struktur bangunan atap, dinding dan lantai beserta kondisinya. Sesuai dengan kondisi di lapangan, kualitas bangunan dibedakan menjadi 2 bagian yakni bangunan yang tergolong permanen dan non permanen. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan dilokasi penelitian, umumnya kualitas bangunan rumah tergolong dalam non permanen dimana 80%. Bangunan yang tergolong dalam permanen adalah bangunan yang kondisi memiliki bahan struktur bangunan atap berupa genteng atau seng, dinding dari plesteran semen atau bata dan lantai berbahan keramik atau semen dan dalam kondisi baik.



Gambar 4. 1 Rumah Permanen

Bangunan yang tergolong dalam non permanen adalah bangunan yang bahan atapnya dari sirap atau seng, dinding dari papan kayu, lantai berupa ubin kayu atau semen.



Gambar 4. 2 Rumah Non Permanen

Untuk lebih jelasnya terkait dengan kualitas bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

Tabel 4. 9 Kualitas Bangunan

RT	Permanen	Non Permanen
4	5	33
7	5	26
8	11	26
9	9	54
10	5	45
Total	35	184
Presentse	16%	84%

Sumber : Hasil Survei dan Rekapitan 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas dimana pada lokasi penelitian, umumnya kualitas bangunan tergolong dalam kategori non permanen dengan jumlah 184 unit atau 84%. Sedangkan bangunan yang tergolong dalam permanen di lokasi penelitian hanya 35 unit atau 16%.Wujud Bangunan yang digunakan pada dinding bangunan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 10 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding di Desa Tabanio

No	RT	Bata Merah	Semen/Plesteran	Triplek	Papan Kayu	Lainnya	Total
1	RT 04	2	3	0	26	7	38
2	RT 07	5	0	0	24	2	31
3	RT 08	9	2	0	26	0	37
4	RT 09	2	7	0	51	3	63
5	RT 10	0	5	0	45	0	50
Total		18	17	0	172	12	219

Sumber: Survei Primer, 2021

Dari segi material dinding bangunan yang digunakan masyarakat di Desa Tabanio mayoritas menggunakan bahan material kayu sebanyak 172 unit rumah yang tersebar di RT 04, 07, 08, 09,dan 10 menggunakan material dinding yang terbuat dari bahan kayu dan 18 unit rumah yang menggunakan bata merah serta 17 unit rumah yang menggunakan bahan material semen. Dan jenis kayu yang digunakan berasal dari kayu ulin yang memiliki ketahanan terhadap air.



Gambar 4. 3 Kondisi Fisik Material Dinding Bangunan

Sumber: Survei Primer, 2021

Karakteristik kualitas bangunan juga dinilai pada material bahan lantai yang digunakan. Untuk material lantai bangunan permukiman kumuh di Desa Tabanio dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 11 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai di Desa Tabanio

No	RT	Keramik	Batuan	Ubin Kayu	Tegel	Lainnya	Total
1	RT 04	5	0	33	0	0	38
2	RT 07	13	0	18	0	0	31
3	RT 08	9	0	26	0	2	37
4	RT 09	8	0	54	0	1	63
5	RT 10	11	0	38	0	1	50
Total		46	0	169	0	4	219

Sumber : Survei Primer, 2021

Dari hasil survei primer yang dilakukan mayoritas masyarakat Desa Tabanio menggunakan bahan material papan kayu dimana sebanyak 169 unit rumah yang menggunakan material lantai papan kayu dan 46 unit rumah yang menggunakan material lantai bangunan dari keramik.



Gambar 4. 4 Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Lantai

Sumber: Survei Primer, 2021

Berdasarkan penjalan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari tingkat kekuatan bangunan permukiman kumuh di Desa Tabanio didominasi oleh material konstruksi bangunan yang berasal dari papan kayu dan penggunaan atap bangunan berupa sirap atau seng serta lantai bangunan yang terbuat dari papan kayu.

4.2.2.3 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Kepadatan Bangunan

Permukiman di Desa Tabanio memiliki tingkat kepadatan yang sedang seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 12 Kepadatan Bangunan Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Tabanio

Lokasi Kumuh	Jumlah Bangunan	Luas wilayah Terbangun	Kepadatan Unit/Ha
RT 04	38	0,9	42
RT 07	31	0,6	52
RT 08	36	0,7	51
RT 09	53	1,4	45
RT 10	50	1,5	33

Sumber: Profil Desa Tabanio & Survei Primer 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kepadatan di Desa Tabanio pada RT 04,07,08,09 dan 10, kepadatan tertinggi berada di RT 07 dimana kepadatannya mencapai 52 Unit/Ha.

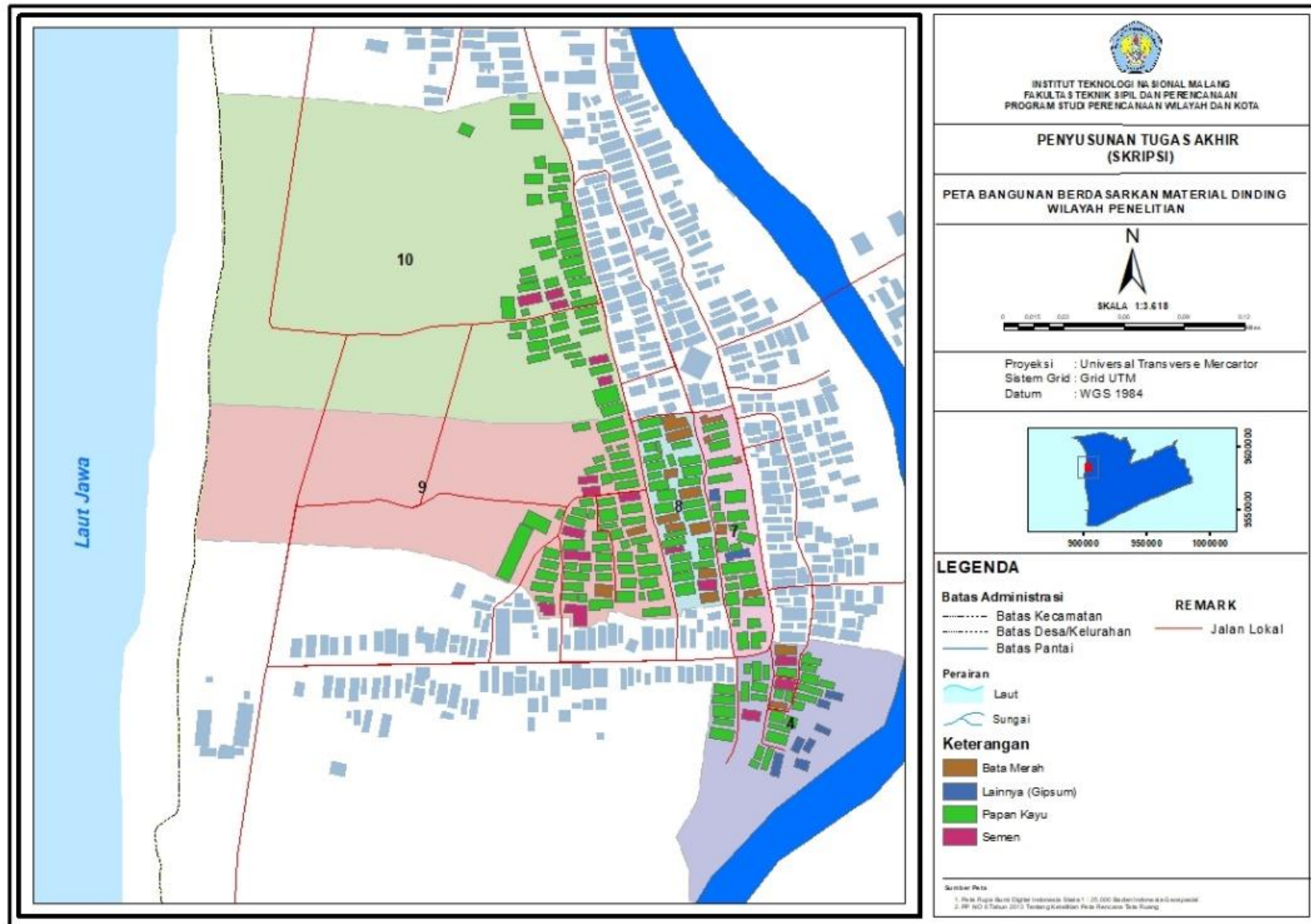
4.2.2.4 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Jarak Antar Bangunan

Karakteristik fisik bangunan pada permukiman kumuh di Desa Tabanio. Berdasarkan dari jarak antar bangunan dengan bangunan lainnya. Dimana jarak antar bangunan di Desa rata-rata memiliki jarak 1- 2 meter dan dapat dikategorikan cukup rapat sehigga memiliki kesan cukup padat pada kawasan permukiman di Desa Tabanio.



Gambar 4. 5 Kondisi Fisik Bangunan berdasarkan jarak antar bangunan

Sumber: Survei Primer, 2021



Peta 4. 8 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding



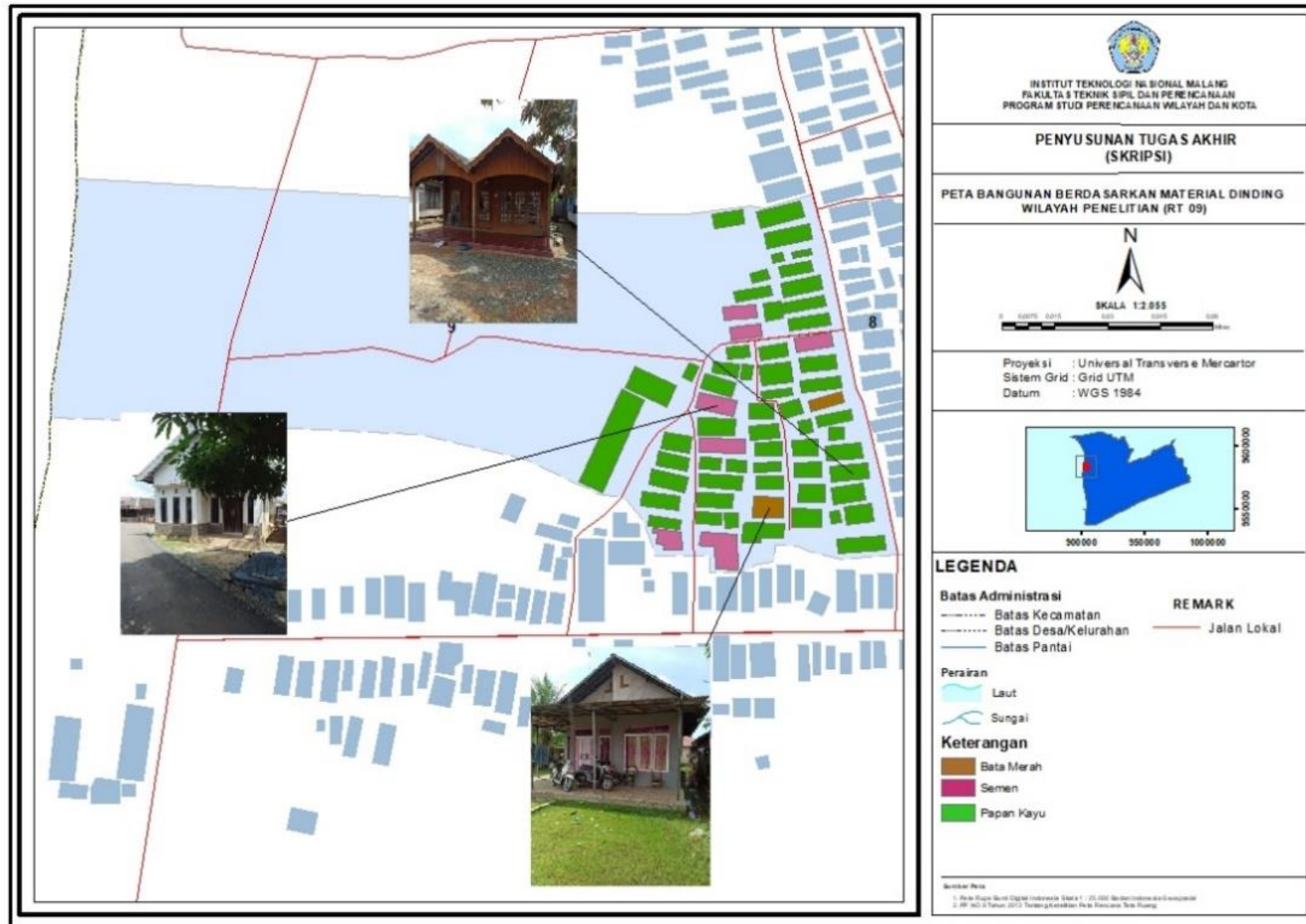
Peta 4. 9 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding (RT 04)



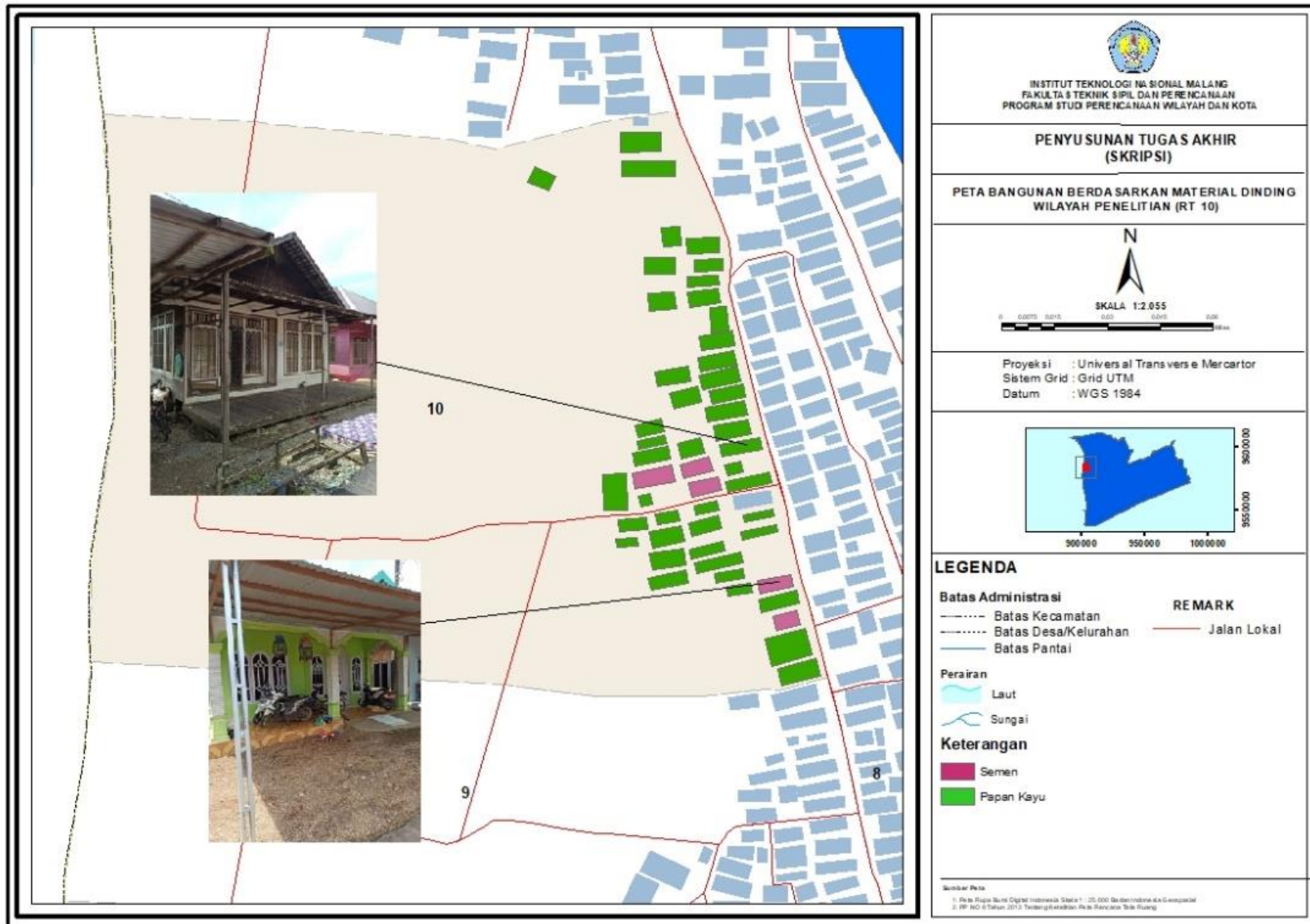
Peta 4. 10Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding (RT 07)



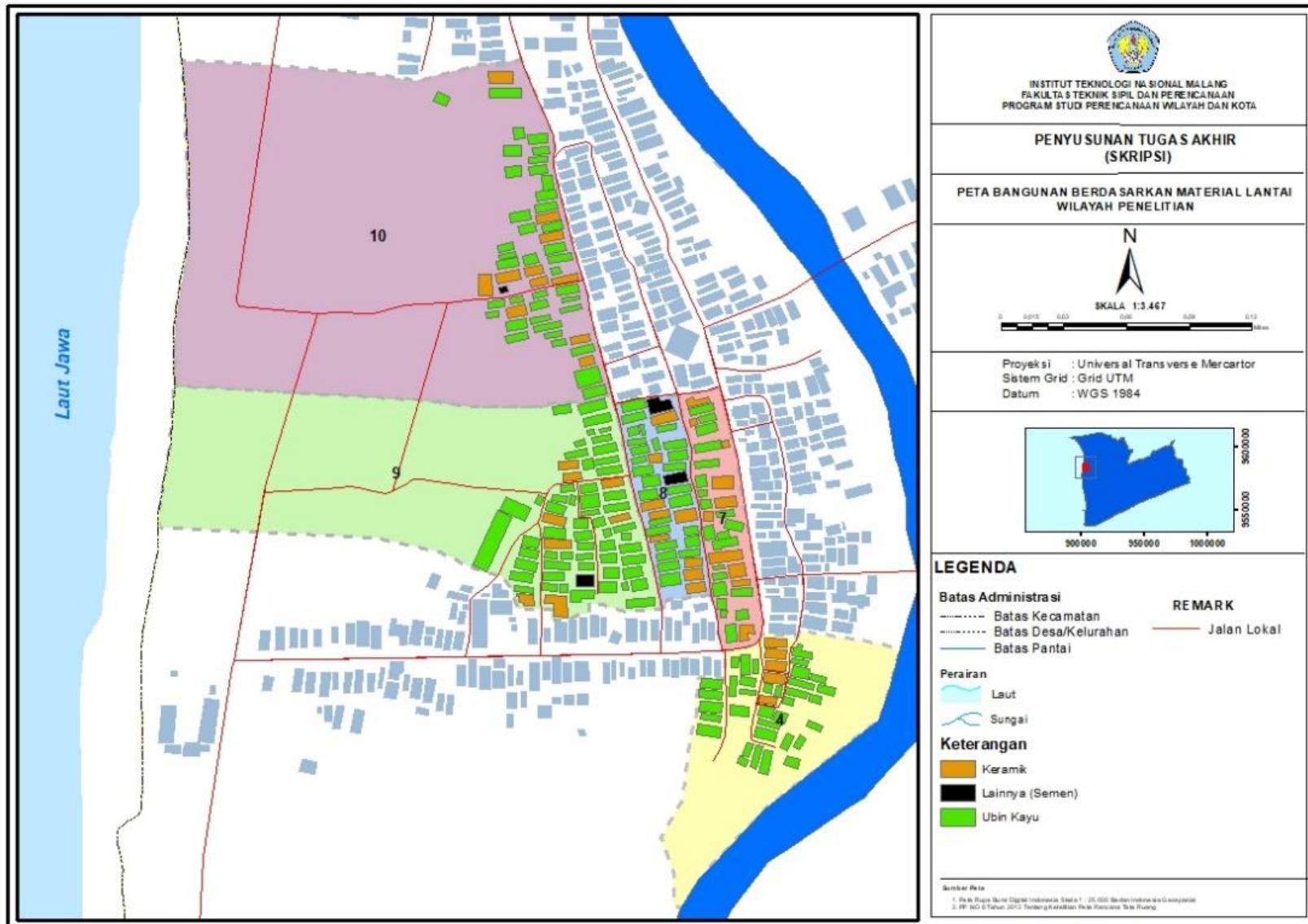
Peta 4. 11 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding (RT 08)



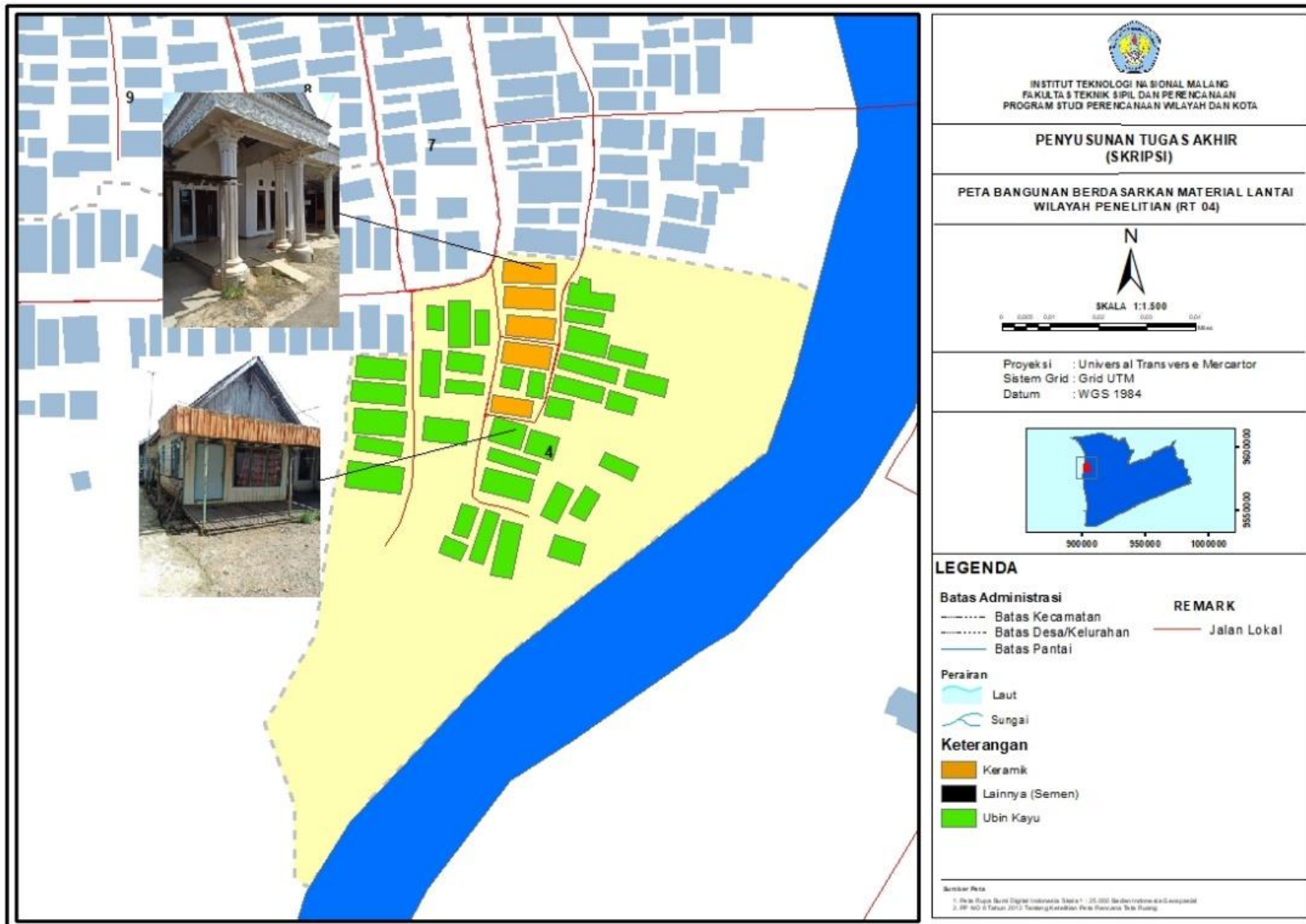
Peta 4. 12 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding (RT 09)



Peta 4. 13 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Dinding (RT 10)



Peta 4. 14 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai



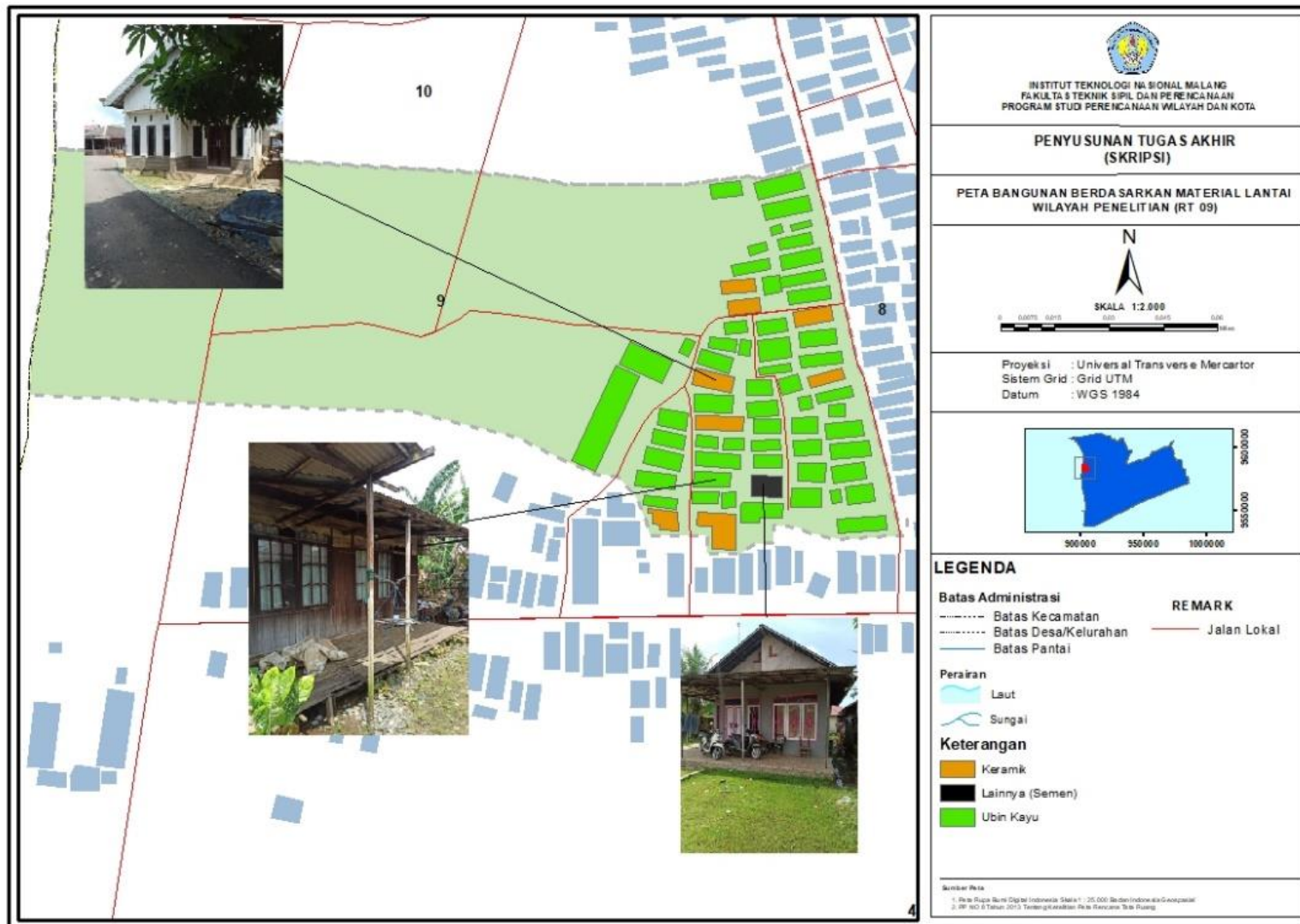
Peta 4. 15 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai (RT 04)



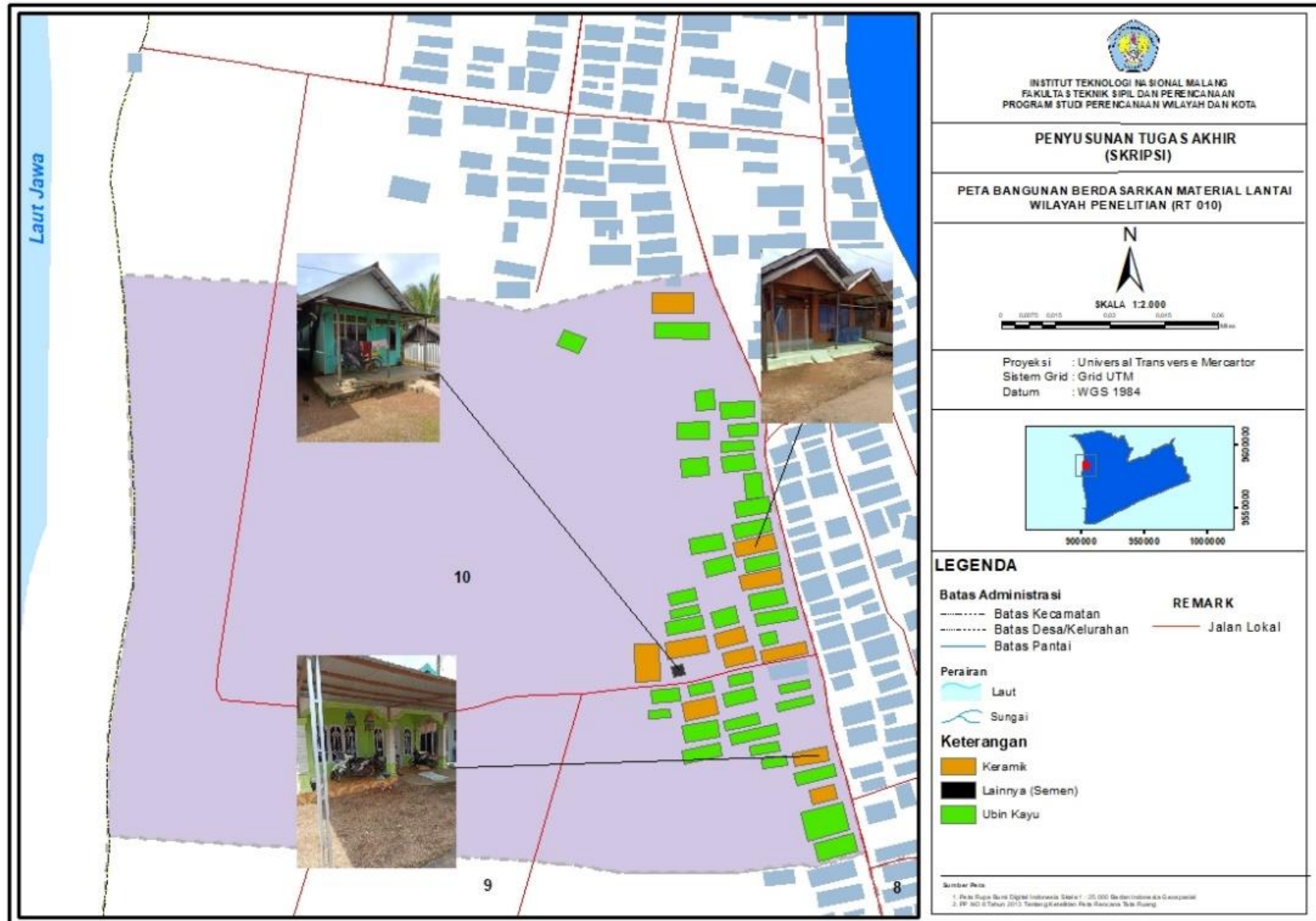
Peta 4. 16 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai (RT 07)



Peta 4. 17 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai (RT 08)



Peta 4. 18 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai (RT 09)



Peta 4. 19 Kondisi Bangunan Berdasarkan Material Lantai (RT 10)

4.2.3 Keteraturan Bangunan

Keteraturan bangunan dapat dilihat pada perumahan formal dimana orientasi umumnya menghaap jalan, ukuran bangunan dan lahan walaupun berbeda – beda tetapi memiliki pola tipe yang jelas. Lebih jelasnya terkait jumlah keteraturan bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4. 13 Keteraturan Bangunan

RT	Bangunan (Unit)		
	Teratur	Sempadan Sungai	Membelakangi jalan
4	31	7	0
7	31	0	0
8	37	0	0
9	63	0	0
10	50	0	0
Jumlah	212	7	0
Presentase	97%	3%	0%

Sumber : Survei Primer 2021

4.2.4 Kondisi Masyarakat Permukiman Permukiman Kumuh di Wilayah Penelitian

Kondisi masyarakat pada permukiman kumuh di Desa Tabanio, kecamatan Takisung dinilai dari kepadatan penduduk dan proyeksi penduduk. Terlebih pada wilayah penelitian yang terdapat pada RT 04,07,08,09 & 10.

4.2.4.1 Kondisi Sosial Masyarakat Berdasarkan Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk ditinjau berdasarkan jumlah penduduk dalam satuan luas hektar. Dalam penelitian ini tingkat kepadatan penduduk permukiman kumuh diidentifikasi dengan menggunakan populasi penduduk dan luas permukiman yang terdapat di masing-masing kecamatan. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, tingkat kepadatan penduduk dikategorikan ke dalam 4 klasifikasi sebagai berikut:

1. Rendah :<150 jiwa/Ha
2. Sedang :151 -200 jiwa/Ha
3. Tinggi :201 – 400 jiwa/Ha
4. Sangat Padat :>400 jiwa/Ha

Tingkat kepadatan penduduk pada setiap RT di Desa Tabanio dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 14 Kepadatan Penduduk

No	RT	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah Terbangun	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	Tingkat Kepadatan Penduduk
1	RT 04	174	1,8	97	Rendah
2	RT 07	135	0,6	225	Tinggi
3	RT 08	154	0,7	220	Tinggi
4	RT 09	199	4,5	44	Rendah
5	RT 10	193	7,5	26	Rendah

Sumber: Survey Primer 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa RT 07 dan RT 08 mempunyai kepadatan yang tinggi dimana RT 07 mempunyai kepadatan 225 jiwa/Ha dan RT 08 mempunyai kepadatan 220 jiwa/Ha.

4.2.4.2 Kondisi Sosial Masyarakat Berdasarkan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk ditinjau berdasarkan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang dinilai perhitungan berdasarkan pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk permukiman kumuh diidentifikasi dengan menggunakan populasi penduduk masing-masing RT di kawasan permukiman kumuh di Desa Tabanio.

Tabel 4. 15 Proyeksi Penduduk Setiap RT

No	RT	Jumlah Penduduk Tahun Akhir 2021	Jumlah Penduduk Menurut Proyeksi			
			2022	2023	2024	2025
1	4	161	169	178	186	196
2	7	135	142	149	156	164
3	8	154	159	164	170	176
4	9	199	206	213	221	229
5	10	193	201	209	217	226
Total		842	877	913	951	990

Sumber: Survey Primer 2021

Berdasarkan perhitungan proyeksi perhitungan pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Dengan persebaran laju pertumbuhan yang merata di seluruh RT kawasan permukiman kumuh di Desa Tabanio. Dapat dilihat dari tabel diatas RT pertumbuhan penduduk yang paling tinggi terdapat di RT 09 sebanyak 229 jiwa pada tahun 2025.

4.2.5 Karakteristik Sarana dan Prasarana

Identifikasi karakteristik fisik sarana digunakan untuk mengetahui pelayanan fasilitas terhadap penduduk di kawasan permukiman kumuh terhadap sarana umum yang ada.

4.2.5.1 Sarana & Prasarana Permukiman Kumuh di Wilayah Penelitian

Sarana fasilitas umum yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perdagangan jasa. Kondisi fisik sarana umum dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu :

- a. Kategori Baik: Jenis fasilitas umum telah terlayani, kondisi fisik bangunan fasilitas telah layak dan fasilitas telah memenuhi pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk
- b. Kategori Cukup: Jenis fasilitas umum telah terlayani, kondisi dari segi fisik bangunan fasilitas kurang layak dan fasilitas telah memenuhi pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.
- c. Kategori Kurang: Jenis fasilitas umum belum tersedia dan kondisi fasilitas kurang memenuhi pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.

Tabel 4. 16 Persebaran Fasilitas di Permukiman Kumuh di Wilayah Penelitian

No	Jenis Fasilitas	Keterangan Fasilitas	Lokasi	Kategori
1	Peribadatan	Musholla Nurul Jannah	Jl. Raya Tabanio	Cukup
2	Peribadatan	Musholla Ba'bussalam	Jl. H. Jahri Shaleh , Desa Tabanio	Baik
3	Pendidikan	SDN 1 Tabanio	Jl. H. Jahri Shaleh RT.09, Desa Tabanio	Baik
4	Pendidikan	TK (Madrasah Ibtidiah Nahdlatul Ulama)	Jl. H. Jahri Shaleh RT.09, Desa Tabanio	Baik

No	Jenis Fasilitas	Keterangan Fasilitas	Lokasi	Kategori
5	Pendidikan	SDN 2 Tabanio	Jl. H Boeyasin, RT 01	Cukup

Sumber: Survey Primer, 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa di RT 04,07,08,09 &10, terdapat 2 sarana peribadatan dan 3 sarana pendidikan dimana dari 2 sarana peribadatan tersebut ada yang termasuk kedalam kategori cukup dan ada yang termasuk dalam kategori baik, serta terdapat juga 3 sarana peribadatan dimana 2 sarana Pendidikan yang termasuk dalam kategori baik dan satu yang termasuk kedalam kategori cukup.

a) Sarana Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidik merupakan salah satu sarana penting dalam suatu kawasan permukiman. Kawasan permukiman akan menjadi lebih baik jika fasilitas atau tempat pendidikan lengkap mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat akhir (SLTA) dengan jumlah penduduk yang ada.

Berdasarkan hasil survey, sarana fasilitas pendidikan di Desa Tabanio terdapat 9 saran fasilitas pendidikan dimana terbagi menjadi 1 SMP/ sederajat, 4 unit SD/ sederajat, 2 unit TK dan 2 unit pondok pesantren yang dimana kondisi dari sarana fasilitas pendidikan yang berada di Desa Tabanio sudah cukup memadai.



Gambar 4. 6 Fasilitas Pendidikan SDN 1 Tabanio dan SDN 2 Tabanio

Sumber: Hasil Survei Primer, 2021

b) Sarana Fasilitas Peribadatan

Dalam identifikasi kondisi sarana fasilitas Peribadatan juga sudah dapat melayani kebutuhan penduduk di Desa Tabanio. Fasilitas peribadatan yang tersebar di di Desa Tabanio berupa 6 langgar/musholla dan 1 mesjid. Untuk kebutuhan berdasarkan penduduk sudah bias mencukupi sedangkan dari kondisi fisik fasilitas dapat dinilai layak.



Gambar 4. 7 Kondisi Fasilitas Peribadatan

Sumber: Hasil Survei Primer, 2021

c) Sarana Fasilitas Kesehatan

Kondisi sarana fasilitas kesehatan belum cukup untuk melayani kebutuhan penduduk di permukiman Desa Tabanio. Fasilitas kesehatan yang tersebar di permukiman Desa Tabanio berupa 1 unit puskesmas pembantu, 1 unit posyandu dan 1 unit rumah bersalin. Untuk kebutuhan berdasarkan penduduk masih kurang mencukupi dan kondisi fisik fasilitas dapat dinilai kurang layak.



Gambar 4. 8 Kondisi Sarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Pembantu

Sumber : Hasil Survei Primer, 2021

d) Sarana fasilitas perdagangan & Jasa

Kondisi sarana fasilitas perdagangan jasa juga sudah dapat melayani kebutuhan penduduk di kawasan permukiman Desa Tabanio dimana terdapat fasilitas perdagangan jasa berupa pasar di RT 19 yang memiliki kondisi cukup layak untuk di permukiman Desa Tabanio.



Gambar 4. 9 Kondisi Fasilitas Perjas Pasar di Desa Tabanio
Sumber : Hasil Survei Primer, 2021

4.2.5.2 Kondisi Prasarana Kualitas Jaringan Jalan

Kondisi jalan lingkungan tentu sangat mempengaruhi tingkat aksesibilitas atau kemudahan dalam mencapai lokasi lain. Adapun aksesibilitas di Desa Tabanio cukup terbatas. Hal tersebut disebabkan karena jaringan jalan yang terdapat di kawasan ini hanya berupa jalan lingkungan dan gang-gang yang lumayan sempit. Sebagian besar, jalan lingkungan yang terdapat di Desa Tabanio sudah diperkeras dengan aspal, akan tetapi ada juga sebagian jalan yang telah diperkeras oleh cor-coran semen. Dapat dilihat pada tabel dibagian bawah.

Tabel 4. 17 Kondisi Jaringan Jalan

No	RT	Nama Jalan	Perkerasan Jalan				Panjang Jalan (M)	Lebar (M)	Kondisi Jalan	
			Aspal	Beton/Semen	Tanah	Titian Kayu			Baik	Buruk
1	4	Jalan Ruas 1	✓				19	1	✓	
2	4	Jalan Ruas 1				✓	15	1		✓
3	4	Jalan Ruas 2		✓			27	1		✓
4	4	Jalan Ruas 3		✓			16	1,5		✓
5	4	Jalan Ruas 4		✓			19	1,5		✓
6	4	Jalan Ruas 5	✓				78	2	✓	
7	4	Jalan Ruas 6			✓		20	1,5	✓	
8	4	Jalan Ruas 7	✓				86	2	✓	
9	7	Jalan Ruas 1	✓				227	2	✓	
10	7	Jalan Ruas 2			✓		33	1		
11	8	Jalan Ruas 1	✓				202	2	✓	
12	8	Jalan Ruas 2	✓				168	2	✓	
13	8	Jalan Ruas 3		✓			35	1		
14	8	Jalan Ruas 4		✓			49	1		✓
15	9	Jalan Ruas 1	✓				148	2	✓	
16	9	Jalan Ruas 2			✓		19	1		✓
17	9	Jalan Ruas 2			✓		77	1		✓
18	9	Jalan Ruas 3			✓		102	1		✓
19	9	Jalan Ruas 4		✓			67	1		✓
20	9	Jalan Ruas 5		✓			123	1	✓	
21	9	Jalan Ruas 6	✓				274	1,5	✓	
22	10	Jalan Ruas 1	✓				268	2	✓	
23	10	Jalan Ruas 2	✓				267	1,5	✓	
24	10	Jalan Ruas 3		✓			150	1	✓	

Sumber: Hasil Survei Primer, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jaringan jalan di Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 dan Rt 10 memiliki perkerasan aspal, beton/ semen, tanah dan titian kayu, dimana kebanyakan kondisi jalan di Desa Tabanio memiliki kondisi yang cukup baik hanya sebagian ruas yang mempunyai kondisi rusak atau buruk dengan rata-rata jalan di daerah penelitian mempunyai lebar 1-2 meter. Contohnya kondisi jalan d RT 04 dimana kondisi perkerasan di RT tersebut yaitu beton/semen dan mempunyai lebar kurang

4.2.4.3 Kondisi Prasarana Kualitas Drainase

Jaringan drainase yaitu jaringan yang berfungsi sebagai tempat aliran air baik alami maupun yang buatan. Kondisi drainase ditentukan dengan melihat genangan pada lokasi permukiman, apakah drainase di lokasi kajian sering terjadi genangan atau tidak.

Berdasarkan pengamatan, pada umumnya jaringan drainase di Desa Tabanio tidak memiliki saluran drainase dan hanya ada sungai yang terletak di Desa Tabanio. Hasil pengamatan menyatakan hanya pada Rt 04 yang mempunyai drainase sepanjang 115 meter dan sebagian besar tidak memiliki drainase dan di permukiman yang sering terjadi genangan air atau banjir dan hanya mengandalkan drainase alam yaitu sungai.

4.2.4.4 Kondisi Prasarana Kualitas Jaringan Air

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kebanyakan masyarakat menggunakan sumber air berasal dari sumur gali, dimana pada Rt 04 sebanyak 34 unit rumah yang menggunakan sumur gali dan hanya 4 unit rumah yang sudah menggunakan pipa PDAM, sementara untuk Rt 07 sebanyak 31 unit rumah yang menggunakan sumur gali dan tidak ada yang menggunakan pipa PDAM, begitu pula dengan Rt 08 37 unit rumah yang berada di wilayah Rt tersebut semuanya menggunakan sumur gali, dan untuk Rt 09 dan Rt 10 semua masyarakatnya menggunakan sumur gali untuk kebutuhan air bersih mereka.

4.2.4.5 Kondisi Prasarana Kualitas Persampahan

Desa Tabanio memiliki 1 buah tempat pembuangan sementara (TPS) yang terletak di tanah lapang yang berada di RT 10, dimana system pembuangan sampah adalah langsung di buang ke TPS atau di buang ke sungai disebabkan tidak adanya petugas pengangkut sampah dan terkait dengan pengelolaan persampahan di Desa Tabanio tepatnya pada lokasi penelitian tidak adanya tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga dan gerobak sampah atau truk sampah pada skala lingkungan. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk membung sampah pada tempatnya.

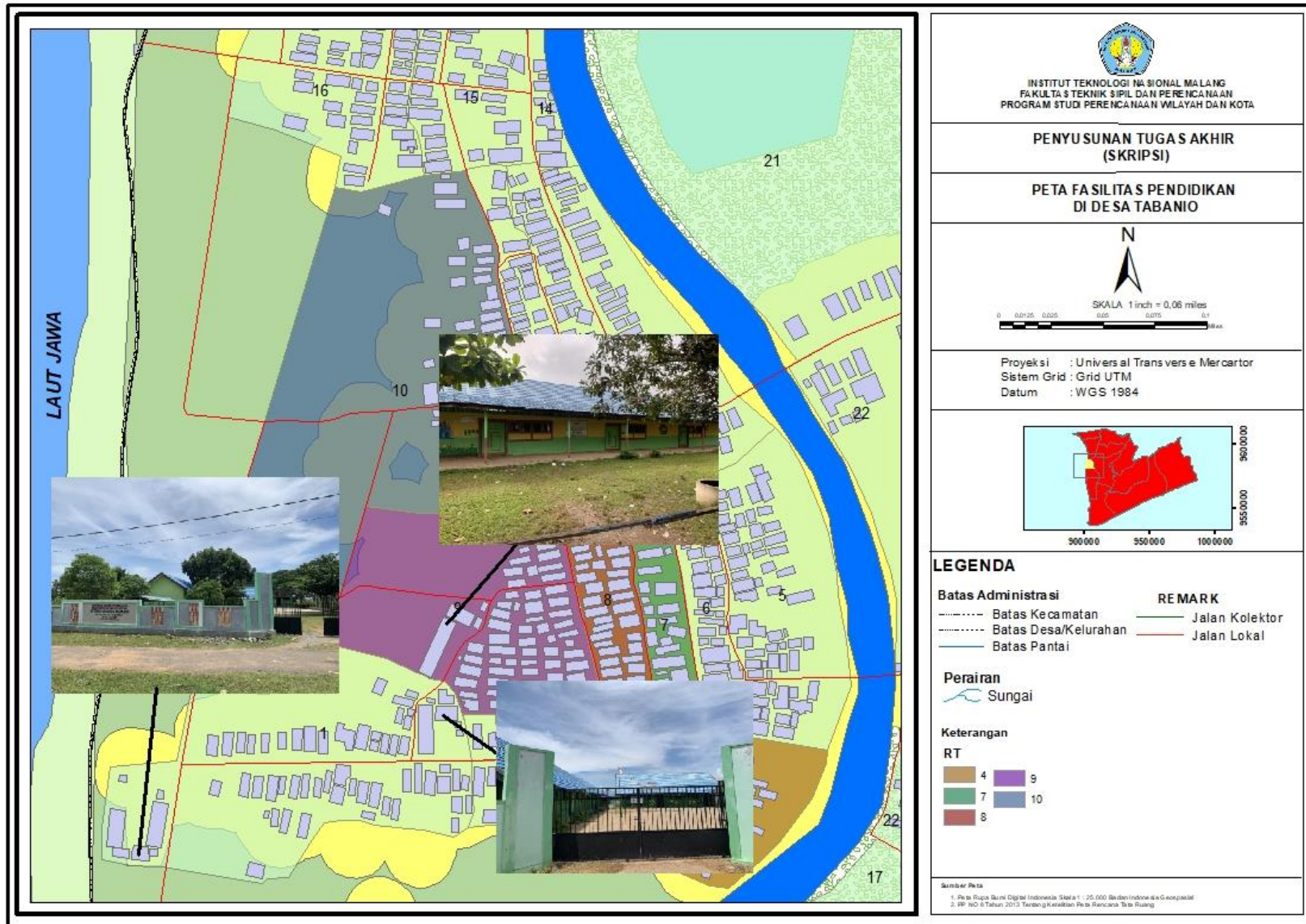


Gambar 4. 10 Kondisi Fasilitas Tempat Pembuangan Sementara

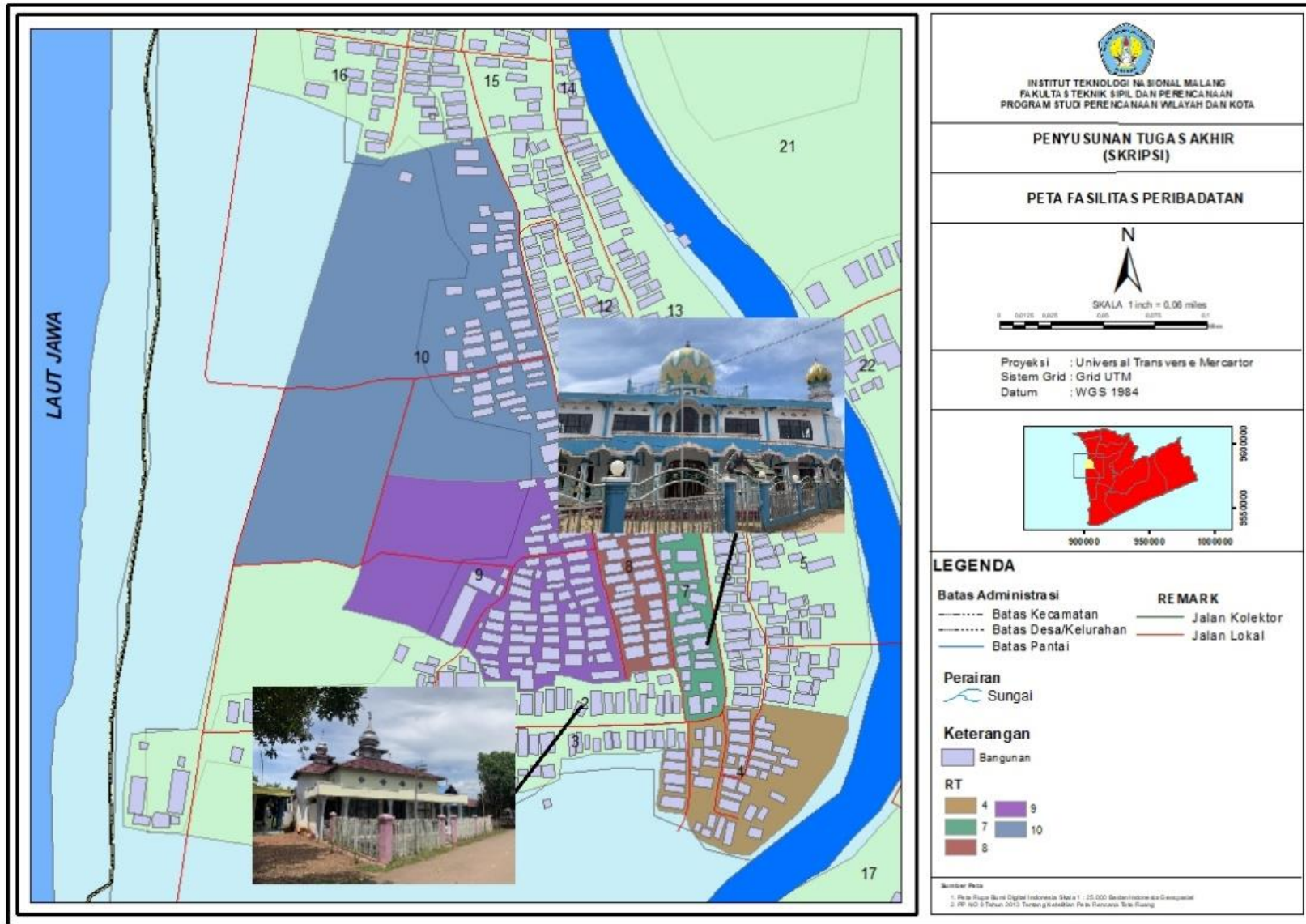
Sumber: Hasil Survei Primer, 2021

4.2.4.6 Kondisi Prasarana Kualitas Air Limbah

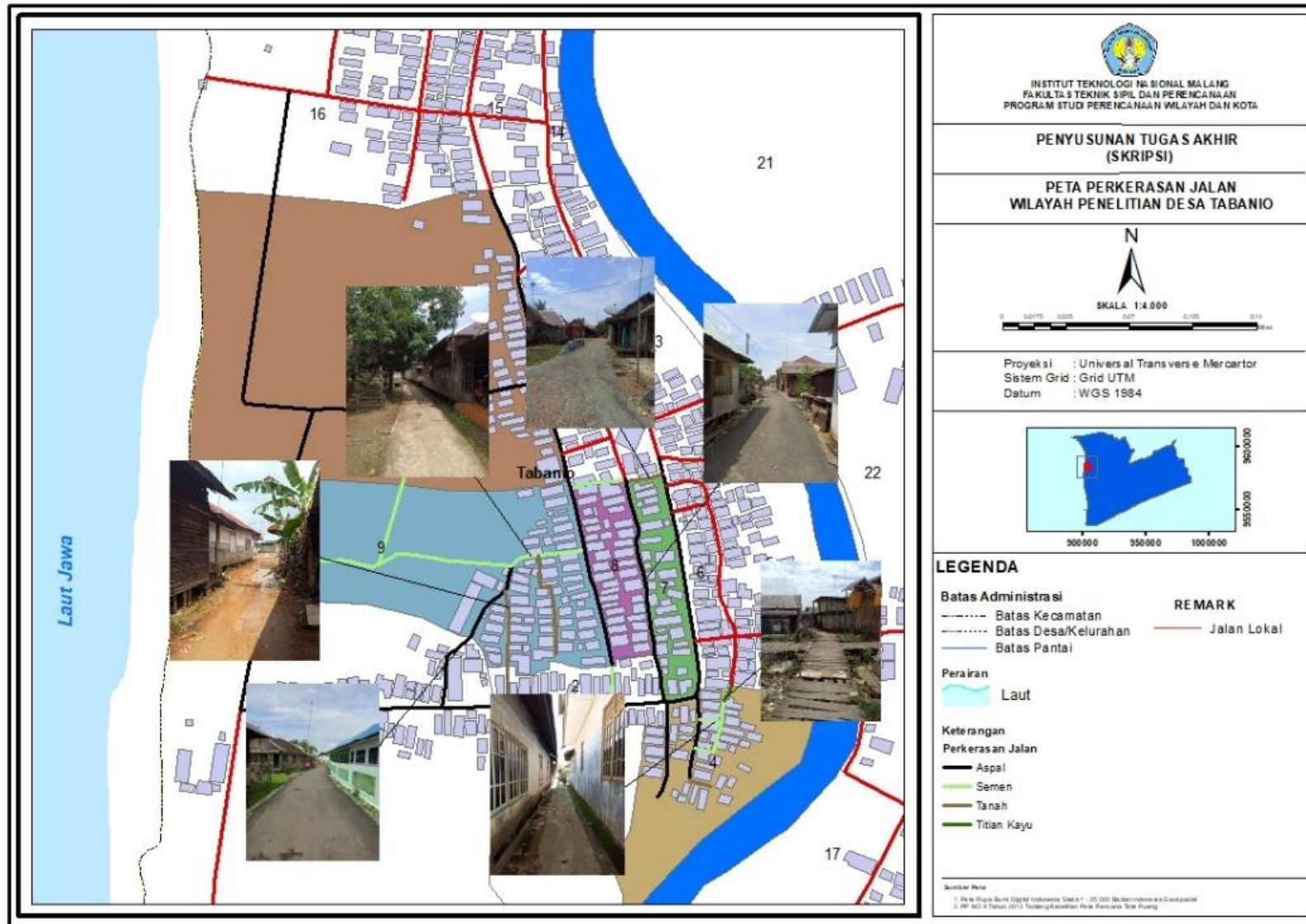
Berdasarkan hasil identifikasi observasi untuk kualitas air limbah, umumnya permukiman kumuh yang terletak di Desa Tabanio menggunakan sistem air limbah menggunakan secara individu. Untuk klasifikasi individu yaitu pembuangan limbah yang terdapat pada masing-masing rumah warga dan ada sebagian masyarakat yang mempunyai rumah di pinggir sungai menggunakan jamban dan pembuangan air limbahnya langsung ke sungai sedangkan yang tidak berada di pinggir sungai, menggunakan bak penampungan limbah atau septic tank dan pada lokasi penelitian yaitu pada Rt 04, Rtt 07, Rt 08, Rt 09 dan Rt 10 hanya ada 7 kk yang tidak memiliki sistem kloset terhubung ke septitank, hampir rata-rata masyarakat sudah tersedianya sistem pengolahan limbah. Dimana dapat disimpulkan bahwa untuk kualitas system pembuangan air limbah sudah cukup baik. Ini dapat dinilai dari penggunaan WC di setiap rumah warga.



Peta 4. 20 Fasilitas Sarana Pendidikan



Peta 4. 21 Fasilitas Sarana Peribadatan



Peta 4. 22 Kondisi Jaringan Jalan Berdasarkan Perkerasannya

4.2.6 Kepemilikan Lahan

Berdasarkan data sekunder dari Desa Tabanio, Kecamatan Takisung dilihat pada data BPN dimana legalitas tanah yang ada di Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4. 18 Kepemilikan Lahan

RT	Hak Milik Bersetifikat	Tidak Bersetifikat
4	26	12
7	27	4
8	32	5
9	49	14
10	38	12
Total	172	47

Sumber : Data BPN 2021

Dapat dilihat tabel diatas bahwa legalitas tanah yang ada diwilayah penelitian bahwa 78,5% tanah yang berada di wilayah penelitian mempunyai sertifikat hak milik dimana 172 unit rumah bersetifikat dan 47 unit rumah yang tidak bersetifikat sama sekali.

4.2.5 Kondisi Mitigasi Bencana di Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Tabanio

Berdasarkan analisa identifikasi karakteristik kondisi pemanfaatan ruang dan mitigasi bencana. Bahwa kondisi pemanfaatan ruang diukur melalui kesesuaian rencana tata ruang dengan kondisi eksisting permukiman kumuh yang telah berdiri. Untuk kondisi mitigasi bencana diidentifikasi dari jenis bencana yang terjadi, frekuensi bencana serta terdapat program mitigasi bencana di permukiman kumuh di Desa Tabanio. Menurut identifikasi untuk kebencanaan dan mitigasi bencana. Umumnya permukiman kumuh yang terletak di Desa Tabanio dihadapi oleh bencana alam seperti banjir, kebakaran dan lainnya. Untuk bencana alam yang pernah terjadi di Desa Tabanio yaitu bencana Banjir.

BAB V ANALISA

Bab ini menjelaskan analisa-analisa yang bertujuan untuk menjawab sasaran dari penelitian yang dilakukan. Bab ini memaparkan hasil analisa terkait karakteristik permukiman kumuh, tingkat kekumuhan dan analisa manajemen lahan di permukiman kumuh di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.

5.1 Analisis Identifikasi Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung

Analisis ini dilakukan untuk mencari tau karakteristik suatu wilayah permukiman kumuh di Desa Tabanio lebih tepatnya di wilayah penelitian yang berada di Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10

5.1.1 Penilaian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung

Metode yang akan digunakan untuk melakukan analisis ini merupakan analisa data deskriptif. Dimana dinilai dari berdasarkan kondisi fisik bangunan, sarana dan prasarana, legalitas tanah. Analisis ini menggunakan Pedoman Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan, oleh Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Pemberian bobot berdasarkan kondisi yang ada di lokasi penelitian. Adapun tingkat nilai adalah sebagai berikut ;

Tabel 5.1 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh

Aspek	Kriteria	Standart Kriteria		
Kondisi Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	Tinggi	Sedang	Rendah
		76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		Standart Kriteria		

Aspek	Kriteria	Standart Kriteria		
	Kepadatan Bangunan	Tinggi	Sedang	Rendah
		kawasan yang kepadatan bangunan lebih dari 100 rumah per hektar	kawasan yang kepadatannya mencapai antara 60 sampai 100 rumah per hektar	kawasan dengan kepadatan bangunannya kurang dari 60 rumah per hektar
		Standart Kriteria		
	Kualitas Bangunan	Tinggi	Sedang	Rendah
		bangunan temporer yang tinggi yaitu lebih 50%.	bangunan temporer yang sedang atau antara 25% sampai 50%.	bangunan temporer yang rendah yaitu kurang dari 25%.
		Standart Kriteria		
Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan	Tinggi	Sedang	Rendah
		76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		Standart Kriteria		
	Kualitas Permukaan	Tinggi	Sedang	Rendah

Aspek	Kriteria	Standart Kriteria		
	Jalan Lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
		Standart Kriteria		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Kondisi Penyedia Air Bersih	Pelayanan Air Bersih	kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih kurang dari 30%.	kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih antara 30% sampai 60%	kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih lebih besar dari 60%.
		Standart Kriteria		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	51% - 75% area terjadi genangan >30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	25% - 50% area terjadi genangan >30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
		Standart Kriteria		
	Ketidakterseediaan Drainase	Tinggi	Sedang	Rendah
		76% - 100%	51% - 75% area	25% - 50% area

Aspek	Kriteria	Standart Kriteria		
		area tidak tersedia drainase lingkungan	tidak tersedia drainase lingkungan	tidak tersedia drainase lingkungan
	Kualitas Konstruksi Drainase	Standart Kriteria		
		Tinggi	Sedang	Rendah
		76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Standart Kriteria		
		Tinggi	Sedang	Rendah
		76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar tekni	51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standarteknis	25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	Prasarana Dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Standart Kriteria		
		Tinggi	Sedang	Rendah
76% - 100% area memiliki	51% - 75% area memiliki sarpras air	25% - 50% area memiliki sarpras air		

Aspek	Kriteria	Standart Kriteria		
		sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	limbah tidak sesuai persyaratan teknis	limbah tidak sesuai persyaratan teknis
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	Standart Kriteria		
		Tinggi	Sedang	Rendah
		76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	Standart Kriteria		
		Tinggi	Sedang	Rendah
		76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
	Ketidakterediaan Prasarana	Standart Kriteria		
		Tinggi	Sedang	Rendah

Aspek	Kriteria	Standart Kriteria		
Kondisi Proteksi Kebakaran	Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Standart Kriteria		
		Tinggi	Sedang	Rendah
		76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Sumber : Hasil Rekapitan Permen Pu No 14 Tahun 2018

5.1.2 Hasil Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh

Penilaian karakteristik permukiman kumuh terbagi atas 5 RT yang ada di lokasi penelitian dan dilihat dari 7 aspek yaitu kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air bersih, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Berdasarkan kondisi fisik bangunan sarana dan prasarana.

5.1.2.1 Hasil Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Aspek Kondisi Bangunan

Berdasarkan penilaian terhadap kondisi permukiman di lokasi penelitian dari aspek kondisi bangunan dimana kondisi bangunan dibagi menjadi 3 kriteria yaitu ketidakteraturan bangunan, Kepadatan bangunan dan kualitas bangunan. Berikut merupakan hasil pembobotan karakteristik permukiman kumuh pada tabel 5.2 hingga tabel 5.4, dimana tabel tersebut menjelaskan tentang ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kualitas bangunan pada lokasi penelitian.

Dari tabel 5.2, tabel 5.3 dan tabel 5.4 dapat dilihat bahwa untuk aspek kondisi bangunan bahwa penilaian untuk 5 (lima) RT yang di teliti bahwa dilihat dari ketidakteraturan bangunan dan kepadatan bangunan mendapatkan nilai rendah, karena di wilayah penelitian untuk ketidakteraturan bangunan tergolong teratur dan untuk kepadatan bangunannya tergolong tidak terlalu padat untuk suatu permukiman. Sedangkan untuk kualitas bangunan lokasi penelitian termasuk kedalam kriteria tinggi, karena di wilayah penelitian mayoritas menggunakan papan kayu untuk material dinding dan seng untuk material atapnya.

Untuk aspek kondisi bangunan di lokasi penelitian dimana 5 RT yang diteliti dapat dilihat bahwa untuk ketidakteraturan dan kepadatan termasuk kedalam kriteria rendah sedangkan untuk kualitas bangunan tergolong kedalam kriteria tinggi dikarenakan kebanyakan bangunan di lokasi penelitian yaitu bangunan yang non permanen.

**Tabel 5. 2 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Ketidakaturan Bangunan**

Ketidakaturan Bangunan	RT	Bangunan (Unit)			Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
		Teratur	Sempadan Sungai	Membelakangi jalan	Tinggi	Sedang	Rendah		
Ketidakaturan Bangunan	RT 04	31	7	0	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	18,42	Rendah
	RT 07	31	0	0				0,00	Rendah
	RT 08	37	0	0				0,00	Rendah
	RT 09	63	0	0				0,00	Rendah
	RT 10	50	0	0				0,00	Rendah

Sumber :Hasil Analisa 2022

**Tabel 5. 3 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Kepadatan Bangunan**

Kepadatan Bangunan	RT	Jumlah Bangunan	Luas wilayah Terbangun	Kepadatan Unit/Ha	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
					Tinggi	Sedang	Rendah		
Kepadatan Bangunan	RT 04	38	0,9	42	kawasan yang Kepadatan bangunan lebih dari 100 rumah per hektar	kawasan yang kepadatan bangunannya mencapai antara 60 sampai 100 rumah per hektar	kawasan dengan kepadatan bangunannya kurang dari 60 rumah per hektar	42	Rendah
	RT 07	31	0,6	52				52	Rendah
	RT 08	36	0,7	51				51	Rendah
	RT 09	63	1,4	45				45	Rendah
	RT 10	50	1,5	33				33	Rendah

Sumber :Hasil Analisa 2022

**Tabel 5. 4 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Kualitas Bangunan**

Kualitas Bangunan	RT	Permanen	Non Permanen	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Tingkat Kekumuhan
				Tinggi	Sedang	Rendah		
Kualitas Bangunan	RT 04	5	33	bangunan temporeranya tinggi yaitu lebih 50%.	bangunan temporeranya sedang atau antara 25% sampai 50%.	bangunan temporeranya rendah yaitu kurang dari 25%.	86,84	Tinggi
	RT 07	5	26				83,87	Tinggi
	RT 08	11	26				70,27	Tinggi
	RT 09	9	53				85,48	Tinggi
	RT 10	5	45				90,00	Tinggi

Sumber :Hasil Analisa 2022

5.1.2.2 Hasil Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Aspek Jalan Lingkungan

Berdasarkan penilaian terhadap kondisi permukiman kumuh di lokasi penelitian dari aspek jalan lingkungan dimana dibagi menjadi 2 kriteria yaitu cakupan pelayanan dan kualitas permukaan jalan lingkungan. Berikut merupakan hasil pembobotan karakteristik permukiman kumuh pada tabel 5.5 dan tabel 5.4, dimana tabel tersebut menjelaskan tentang cakupan pelayanan jalan dilokasi penelitian dan kualitas permukaan jalan lingkungan.

Pada RT 04 mempunyai Panjang jalan eksisting yaitu 280 meter dan panjang jalan ideal 300 meter, serta pada RT 09 mempunyai jalan eksisting 810 meter dan jalan idealnya 908 meter, dimana jalan ideal yang dimaksud yaitu panjang jalan seharusnya ada di perumahan atau permukiman agar semuanya terhubung.

Dapat dilihat pada tabel 5.5 menjelaskan bahwa cakupan jalan lingkungan yang berada di RT 04,RT 07,RT 08,RT 09 & RT 10, rata-rata semua telah terhubung dalam satu permukiman dan di RT 04 hanya 6,7 % area yang tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan serta pada rt 09 hanya 10,8% dimana itu termasuk kedalam kategori rendah

Untuk tabel 5.6 menjelaskan tentang kualitas jalan lingkungan yang berada di RT 04,RT 07,RT 08,RT 09 & RT 10, dimana dari 5 RT tersebut hanya ada tiga RT yang mempunyai kualitas permukaan jalan yang rusak yaitu pada RT 04, RT 08 dan RT 09. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan RT 04 hanya 25,7 % yang mempunyai permukaan jalan rusak sedangkan RT 08 hanya 10,8% dan RT 09 yaitu 29,2% dimana 5 (kelima) RT tersebut termasuk kedalam kategori rendah.

Dari aspek jalan lingkungan di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa pada lokasi penelitian cakupan untuk jalan lingkungan termasuk kedalam kriteria rendah, karena jalan lingkungan yang ada di lokasi permukiman telah memenuhi, sedangkan untuk kondisi jalan lingkungan yang berada di lokasi penelitian ada sebagian ruas jalan yang masih mempunyai kondisi rusak.

**Tabel 5. 5 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Cakupan Pelayanan Jalan**

	RT	Jaringan Jalan Eksisting (Meter)	Panjang Jalan Ideal (Meter)	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
				Tinggi	Sedang	Rendah		
Cakupan Pelayanan Jalan	RT 04	280	300	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	6,7	Rendah
	RT 07	260	260				0,0	Rendah
	RT 08	454	454				0,0	Rendah
	RT 09	810	908				10,8	Rendah
	RT 10	685	685				0,0	Rendah

Sumber :Hasil Analisa 2022

**Tabel 5. 6 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan**

	RT	Tidak Rusak	Rusak	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
				Tinggi	Sedang	Rendah		
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	RT 04	203	77	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	25,7	Rendah
	RT 07	260	0				0,0	Rendah
	RT 08	405	49				10,8	Rendah
	RT 09	545	265				29,2	Rendah
	RT 10	685	0				0,0	Rendah

Sumber :Hasil Analisa 2022

5.1.2.3 Hasil Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Aspek Penyediaan Air Bersih

Berdasarkan penilaian terhadap kondisi permukiman di lokasi penelitian dari aspek penyediaan air bersih, dimana pada 5 (kelima) Rt rata-rata masyarakat menggunakan sumur gali untuk mendapatkan air bersih dan hanya 4 KK di Rt 04 yang menggunakan pipa untuk memenuhi air bersih. Maka dari itu Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10 termasuk kedalam kategori tinggi dimana berada di kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih kurang dari 30% karena hanya sedikit yang menggunakan pipa PDAM dan lebih banyak menggunakan sumur gali.

5.1.2.4 Hasil Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Aspek Drainase Lingkungan

Dapat dilihat pada tabel 5.8 dimana tabel tersebut menjelaskan daerah yang terkena genangan air dengan ketentuan daerah yang menimbulkan genangan dengan tinggi 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun. Pada lokasi penelitian, setelah melakukan perhitungan bahwa tidak ada genangan air di wilayah Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10 serta termasuk kedalam kategori rendah untuk kriteria ketidakmampuan mengalirkan limpasan air.

Pada tabel 5.9 menjelaskan tersedianya drainase di lokasi penelitian, dimana dari kelima Rt yang menjadi lokasi penelitian hanya di Rt 04 yang mempunyai drainase lingkungan dengan mempunyai Panjang drainase eksisting yaitu 115 meter dan Panjang seharusnya drainase lingkungan yang harus tersedia yaitu 280 meter dan termasuk kedalam kategori rendah karena 58,9% area tidak tersedia drainase lingkungan, sedangkan untuk Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10 tidak tersedia drainase lingkungan sama sekali.

Sedangkan pada tabel 5.10 menjelaskan tentang kualitas konstruksi drainase lingkungan dimana dikarenakan hanya di Rt 04 yang mempunyai drainase lingkungan maka dari itu kualitas drainase yang berada di Rt 04 dengan Panjang 115 meter mempunyai kualitas konstruksi yang baik, dan untuk kelima Rt yang berada di lokasi penelitian termasuk kedalam kategori rendah dikarenakan 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, dikarenakan tidak memiliki jaringan drainase maka termasuk kedalam kategori rendah untuk kriteria kualitas konstruksi drainase.

Serta untuk Rt 07, Rt 08, Rt 09 dan Rt 10 sama sekali tidak memiliki jaringan drainase, sedangkan untuk kriteria kualitas konstruksi jaringan drainase dikarenakan jaringan drainase hanya ada di Rt 04..

**Tabel 5. 7 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Penyediaan Air Bersih**

	RT	PDAM	Sumur Gali	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
				Tinggi	Sedang	Rendah		
Pelayanan Air Bersih	RT 04	4	34	kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih kurang dari 30%.	kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih antara 30% sampai 60%	kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih lebih besar dari 60%.	10,5	Tinggi
	RT 07	0	31				0,0	Tinggi
	RT 08	0	37				0,0	Tinggi
	RT 09	0	63				0,0	Tinggi
	RT 10	0	50				0,0	Tinggi

Sumber :Hasil Analisa 2022

**Tabel 5. 8 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air**

	RT	Luas Kawasan yang Terkena Genangan Banjir (Ha)	Luas Kawasan yang tidak Terkena Genangan Banjir (Ha)	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
				Tinggi	Sedang	Rendah		
Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	RT 04	0	0,9	76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	0,0	Rendah
	RT 07	0	0,6				0,0	Rendah
	RT 08	0	0,7				0,0	Rendah
	RT 09	0	1,4				0,0	Rendah
	RT 10	0	1,5				0,0	Rendah

Sumber :Hasil Analisa 2022

**Tabel 5. 9 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Ketidaktersediaan Drainase**

	RT	Panjang Drainase Eksisting	Panjang Drainase Ideal	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
				Tinggi	Sedang	Rendah		
Ketidaktersediaan Drainase	RT 04	115	280	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	58,9	Sedang
	RT 07	0	260				100,0	Tinggi
	RT 08	0	454				100,0	Tinggi
	RT 09	0	810				100,0	Tinggi
	RT 10	0	685				100,0	Tinggi

Sumber :Hasil Analisa 2022

5.1.2.5 Hasil Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Aspek Drainase Lingkungan

Dapat dilihat pada tabel 5.8 dimana tabel tersebut menjelaskan daerah yang terkena genangan air dengan ketentuan daerah yang menimbulkan genangan dengan tinggi 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun. Pada lokasi penelitian, setelah melakukan perhitungan bahwa tidak ada genangan air di wilayah Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10 serta termasuk kedalam kategori rendah untuk kriteria ketidakmampuan mengalirkan limpasan air.

Pada tabel 5.9 menjelaskan tersedianya drainase di lokasi penelitian, dimana dari kelima Rt yang menjadi lokasi penelitian hanya di Rt 04 yang mempunyai drainase lingkungan dengan mempunyai Panjang drainase eksisting yaitu 115 meter dan Panjang seharusnya drainase lingkungan yang harus tersedia yaitu 280 meter dan termasuk kedalam kategori rendah karena 58,9% area tidak tersedia drainase lingkungan, sedangkan untuk Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10 tidak tersedia drainase lingkungan sama sekali.

Sedangkan pada tabel 5.10 menjelaskan tentang kualitas konstruksi drainase lingkungan dimana dikarenakan hanya di Rt 04 yang mempunyai drainase lingkungan maka dari itu kualitas drainase yang berada di Rt 04 dengan Panjang 115 meter mempunyai kualitas konstruksi yang baik, dan untuk kelima Rt yang berada di lokasi penelitian termasuk kedalam kategori rendah dikarenakan 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, dikarenakan tidak memiliki jaringan drainase maka termasuk kedalam kategori rendah untuk kriteria kualitas konstruksi drainase.

Dapat dilihat dari aspek jaringan drainase pada lokasi penelitian yang mempunyai wilayah di 5 (lima) Rt bahwa untuk ketidakmampuan mengalirkan limpasan air kelima RT tersebut mendapat penilaian rendah dikarenakan tidak adanya area yang terjadi genangan lebih dari 30 cm dan lebih dari 2 jam serta lebih dari 2 kali setahun. Untuk kriteria ketidaktersediaan drainase hanya di Rt 04 yang mempunyai jaringan drainase yaitu sepanjang 115 cm, serta untuk Rt 07, Rt 08, Rt 09 dan Rt 10 sama sekali tidak memiliki jaringan drainase, sedangkan untuk kriteria kualitas konstruksi jaringan drainase dikarenakan jaringan drainase hanya ada di Rt 04 dan untuk kualitas jaringan drainasenya sendiri termasuk kedalam penilaian rendah karena kualitas konstruksi drainasenya cukup baik.

**Tabel 5. 10 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Kualitas Konstruksi Drainase**

	RT	Panjang Drainase kondisi Buruk	Panjang Drainase Kondisi Baik	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
				Tinggi	Sedang	Rendah		
Kualitas Konstruksi Drainase	RT 04	0	115	76% - 100% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk	51% - 75% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk	25% - 50% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk	0,0	Rendah
	RT 07	0	0				0,0	Rendah
	RT 08	0	0				0,0	Rendah
	RT 09	0	0				0,0	Rendah
	RT 10	0	0				0,0	Rendah

Sumber :Hasil Analisa 2022

**Tabel 5. 11 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Sistem Pengelolaan Air Limbah**

	RT	Tidak Memiliki Sistem Kakus/Kloset Tidak Terhubung Tangki Septitank	Memiliki Sistem Kakus/Kloset Terhubung ke Tangki Septitank	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
				Tinggi	Sedang	Rendah		
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	RT 04	7	31	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standarteknis	25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	18,4	Rendah
	RT 07	0	34				0,0	Rendah
	RT 08	0	39				0,0	Rendah
	RT 09	0	50				0,0	Rendah
	RT 10	0	54				0,0	Rendah

Sumber :Hasil Analisa 2022

**Tabel 5. 12 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah**

	RT	Tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
				Tinggi	Sedang	Rendah		
Prasarana Dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	RT 04	31	7	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	18,4	Rendah
	RT 07	34	0				0,0	Rendah
	RT 08	39	0				0,0	Rendah
	RT 09	50	0				0,0	Rendah
	RT 10	54	0				0,0	Rendah

Sumber :Hasil Analisa 2022

5.1.2.6 Hasil Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Aspek Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan penilaian terhadap kondisi permukiman kumuh di Desa Tabanio lebih tepatnya berada di Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10 dilihat dari aspek pengelolaan air limbah dapat dilihat pada tabel 5.11 dimana menjelaskan tentang sistem pengelolaan air limbah pada lokasi penelitian mendapatkan bahwa hampir semua masyarakat memiliki sistem kloset terhubung ke tangki septitank individual/domestic dan hanya 7 kk yang tidak memiliki sistem kloset tidak terhubung ke septitank, dari kelima Rt yang berada dilokasi penelitian termasuk kedalam kategori rendah karena termasuk kedalam area yang memiliki sistem air limbah yang standart.

Sedangkan pada tabel 5.12 menjelaskan prasana dan sarana sistem pengelolaan air limbah dimana pada lokasi penelitian semua telah mempunyai sarana dan prasarana untuk sistem pengelolaan air limbah hanya pada Rt 04 sebanyak 7 kk yang tidak mempunyai sarana dan prasarana sistem pengeloaan air limbah, dimana untu aspek sarana dan prasaran sistem pengelolaan air limbah untuk Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10 termasuk kedalam kategori rendah.

Untuk aspek pengelolaan air limbah dan dilihat dari kedua kriteria dimana kriteria system pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis dari kelima RT yang termasuk kedalam lokasi penelitian termasuk kedalam kategori rendah, dimana 25% - 50% area memiliki sistem air limbah tidak sesuai standart teknis . Sedangkan untuk kriteria prasarana dan sarana system pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standart teknis kelima RT yang terdapat di lokasi penelitian termasuk kedalam kategori rendah dikarenakan rata – rata semua masyarakat sudah tersedianya system pengolahan limbah setempat atau terpusat.

5.1.2.6 Hasil Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan penilaian terhadap kondisi permukiman kumuh di Desa Tabanio lebih tepatnya berada di Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10 dilihat dari aspek pengelolaan persampahan dijelaskan pada tabel 5.13 dan tabel 5.14 dimana sarana dan prasarana persampahan dilokasi penelitian belum terlayani sama sekali, tidak adanya tempat pemilahan sampah atau gerobak sampah skala lingkungan hanya ada satu TPS yang tersedia di Desa Tabanio. Sedangkan untuk sistem pengelolaan persampahan dilokasi penelitian tidak adanya pengelolaan persampahan pada lingkungan permukiman

Untuk kriteria prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai standart teknis, dimana dari kelima Rt yang menjadi lokasi penelitian tidak adanya yang terlayani dengan prasarana dan sarana persampahan, beitu juga dengan kriteria sistem pengelolaan persampahannya dari kelima Rt di lokasi penelitian tidak ada yang terlayani sistem pengelolaan persampahan, dari kedua kriterian tersebut lima Rt yang menjadi lokasi penelitian mendapatkan penilaian Tinggi.

5.1.2.7 Hasil Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Aspek Proteksi Kebakaran

Dari hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap permukiman kumuh di Desa Tabanio tepatnya berada di Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10 dilihat dari aspek proteksi kebakaran dijelaskan pada tabel 5.15 ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran dimana dilokasi penelitian pada Rt 04 ada 21 bangunan yang terlayani prasarana proteksi kebakaran dimana dekat dengan pasokan air yang diperoleh dari sungai, sedangkan di empat Rt lainnya yang termasuk kedalam lokasi penelitian tidak ada sama sekali terlayani prasarana proteksi kebakaran, sedangkan untuk kriteria ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran dari lima Rt yang menjadi lokasi penelitian tidak ada satu pun bangunan yang terlayani sarana proteksi kebakaran dan dari kedua kriteria tersebut mendapatkan penilaian tinggi untuk lima Rt yang menjadi lokasi penelitian.

Tabel 5. 13 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Prasarana dan Sarana Persampahan

Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	RT	Terlayani Sarpras Persampahan	Tidak Terlayani Sarpras Persampahan	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
				Tinggi	Sedang	Rendah		
	RT 04	0	38	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	100	Tinggi
	RT 07	0	34				100	Tinggi
	RT 08	0	39				100	Tinggi
	RT 09	0	50				100	Tinggi
	RT 10	0	54				100	Tinggi

Sumber :Hasil Analisa 2022

Tabel 5. 14 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Sistem Pengelolaan Persampahan

Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	RT	Terlayani Pengelolaan Sampah	Tidak Terlayani Pengelolaan Sampah	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
				Tinggi	Sedang	Rendah		
	RT 04	0	38	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	100	Tinggi
	RT 07	0	34				100	Tinggi
	RT 08	0	39				100	Tinggi
	RT 09	0	50				100	Tinggi
	RT 10	0	54				100	Tinggi

Sumber :Hasil Analisa 2022

**Tabel 5. 15 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran**

	RT	Bangunan Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	Bangunan tidak terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
				Tinggi	Sedang	Rendah		
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	RT 04	21	17	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	44,7	Rendah
	RT 07	0	31				100	Tinggi
	RT 08	0	37				100	Tinggi
	RT 09	0	63				100	Tinggi
	RT 10	0	50				100	Tinggi

Sumber :Hasil Analisa 2022

**Tabel 5. 16 Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran**

	RT	Bangunan tidak terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	Standart Kriteria			Hasil Hitungan	Penilaian
			Tinggi	Sedang	Rendah		
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	RT 04	38	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	100	Tinggi
	RT 07	31				100	Tinggi
	RT 08	37				100	Tinggi
	RT 09	63				100	Tinggi
	RT 10	50				100	Tinggi

Sumber :Hasil Analisa 2022

Untuk hasil penilaian karakteristik permukiman kumuh di lokasi penelitian yang mencakup 5 (lima) Rt di Desa Tabanio, dimana dapat dilihat bahwa hasil penilaiannya bahwa untuk kualitas bangunannya hampir seluruhnya masih bangunan temporer sedangkan untuk kondisi jalan di lokasi penelitian mempunyai cakupan jalan lingkungan yang cukup, karena permukiman yang berada di lokasi sudah terlayani oleh jalan lingkungan. Sedangkan untuk penyediaan air bersih, dimana berada di kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih kurang dari 30% karena hanya sedikit yang menggunakan pipa PDAM dan lebih banyak menggunakan sumur gali. Untuk jaringan drainase hanya terdapat pada Rt 04 dengan Panjang drainase eksisting 115 meter, sedangkan untuk di Rt lainnya tidak memiliki jaringan drainase dan untuk pengelolaan air limbah di lokasi penelitian bahwa hampir semua masyarakat memiliki sistem kloset terhubung ke tangki septitank individual/domestic dan hanya 7 kk yang tidak memiliki sistem kloset tidak terhubung ke septitank, dari kelima Rt yang berada dilokasi penelitian termasuk kedalam kategori rendah karena termasuk kedalam area yang memiliki sistem air limbah yang standart, sedangkan untuk pengelolaan persampahan hanya ada satu TPS. Untuk kondisi proteksi kebakaran dilokasi penelitian tidak tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

Tabel 5. 17 Hasil Penilaian Karakteristik Permukiman Kumuh Desa Tabanio

Rt	Karakteris Permukiman	Rt	Karakteris Permukiman
Rt 04	Kumuh Kualitas Bangunan	Rt 09	Kumuh Kualitas Bangunan
	Kumuh Pelayanan Air bersih		Kumuh Drainase Lingkungan
	Kumuh Sarpras Persampahan		Kumuh Pelayanan Air bersih
Rt 07	Kumuh Kualitas Bangunan	Rt 10	Kumuh Sarpras Persampahan
	Kumuh Drainase Lingkungan		Kumuh Proteksi Kebakaran
	Kumuh Pelayanan Air bersih		Kumuh Kualitas Bangunan
Rt 08	Kumuh Sarpras Persampahan	Rt 10	Kumuh Drainase Lingkungan
	Kumuh Proteksi Kebakaran		Kumuh Pelayanan Air bersih
	Kumuh Kualitas Bangunan		Kumuh Sarpras Persampahan
	Kumuh Drainase Lingkungan		Kumuh Proteksi Kebakaran
	Kumuh Pelayanan Air bersih		

Sumber: Analisa 2022

Dari hasil penilain karakteristik permukiman kumuh dapat disimpulkan bahwa lokasi penelitian sangat masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk suatu permukiman, terlebih untuk aspek penyediaan air bersih, jaringan drainase, pengelolaan persampahan dan

pengelolaan proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel 5.17 menjelaskan karakteristik permukiman kumuh dari 5 Rt yang berada d wilayah penelitian.

5.2 Analisis Identifikasi Tingkat Kekumuhan di Permukiman Nelayan di Wilayah Penelitian

Berikut merupakan analisa yang digunakan untuk mengetahui tingkat kekumuhan kawasan permukiman nelayan di Desa Tabanio lebih tepatnya berada di Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10, dimana menggunakan metode skoring yang kemudian d klasifikasikan sehingga menghasilkan tingkat kekumuhan.

5.2.1 Klasifikasi Tingkat Kekumuhan

Dari hasil pengelolaan menggunakan metode skoring setiap aspek, kemudian dijumlahkan mendapatkan tingkat kekumuhan yang kemudian dibagi berdasarkan empat klasifikasi. Berikut ini hasil tingkat kekumuhan beserta tipologi permukiman kumuh. Berikut ini merupakan tabel tingkat kekumuhan dan rentang nilai, dimana rentang nilai di dapat dari nilai max dibagi dengan jumlah parameter yang digunakan

Tabel 5. 18 Tingkat Kekumuhan dan Rentang Nilai

Tingkat Kekumuhan	Rentang Nilai
Kumuh Berat	55 -75
Kumuh Sedang	54 – 33
Kumuh Ringan	32– 11
Tidak Kumuh	< 11

Sumber : Hasil Perhitungan 2022

5.2.1.1 Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Permukiman di Desa Tabanio RT 04

Dari hasil pengolahan menggunakan metode skoring setiap aspek dan dijumlahkan maka tingkat kekumuhan di Desa Tabanio lebih tepatnya berada Rt 04 dapat dilihat pada tabel 5.18, dimana Rt 04 mendapatkan total nilai 35 dan termasuk kedalam tingkat kekumuhan sedang. Dimana dari ketujuh aspek untuk menghitung tingkat kekumuhan, aspek kondisi pengelolaan persampahan yang kurang memadai dan membuat Rt 04 termasuk kedalam tingkat kekumhan sedang, karena tidak tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai, sedangkan untuk aspek kondisi bangunannya 86,8 % bangunan dilokasi tersebut masih temporer.

5.2.1.2 Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Permukiman di Desa Tabanio RT 07

Dari hasil analisis yang telah dilakukan tingkat kekumuhan yang berada di Desa Tabanio lebih tepatnya lagi berada di Rt 07 menunjukkan bahwa Rt 07 termasuk kedalam kumuh ringan dikarenakan memperoleh skor 31 dimana skor tersebut termasuk kedalam rentang nilai kumuh ringan dapat dilihat pada tabel 5.19. Dimana dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa Rt 07 mempunyai kualitas bangunan dimana 83,9% bangunan yang berada di Rt 07 merupakan bangunan temporer, serta tidak adanya saluran drainase yang tersedia di lokasi tersebut dan untuk sarana dan prasarana pengelolaan persampahannya kurang memadai.

5.2.1.3 Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Permukiman di Desa Tabanio RT 08

Hasil analisis tingkat kekumuhan yang telah dilakukan di Rt 08 memperoleh nilai skor 32, dimana skor tersebut didapatkan dari 7 aspek yang dipakai untuk menghitung tingkat kekumuhan di Rt 08, dimana wilayah ini termasuk kedalam kategori kumuh ringan dapat dilihat pada tabel 5.20. tabel tersebut menjelaskan perhitungan untuk tingkat kekumuhan di Rt 08 dimana wilayah tersebut yang sangat kurang yaitu pengelolaan persampahan dan kondisi untuk proteksi kebakarannya.

5.2.1.4 Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Permukiman di Desa Tabanio RT 09

Berdasarkan hasil analisa tingkat kekumuhan di Desa Tabanio lebih tepatnya berada di Rt 09 dapat dilihat pada tabel 5.21, dimana Rt 09 mendapatkan total nilai 33 dan termasuk kedalam tingkat kekumuhan ringan. ditabel 5.21 menjelaskan perhitungan untuk tingkat kekumuhan dimana di wilayah tersebut yang kurang yaitu tidak adanya drainase, sarana dan prasarana untuk persampahan tidak mendukung dan untuk proteksi kebakaran tidak ada.

5.2.1.5 Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Permukiman di Desa Tabanio RT 10

Hasil analisis tingkat kekumuhan yang telah dilakukan di Rt 10, setelah melakukan perhitungan tingkat kekumuhan di wilayah tersebut tidak ada drainase, sistem pengelolaan persampahan kurang memadai dan pproteksi kebakaran tidak ada dan skor yang diperoleh untuk Rt 10 yaitu 31 dimana skor tersebut termasuk kedalam kategori kumuh ringan dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.22.

Tabel 5.19 Penilaian Tingkat Kekumuhan Desa Tabanio RT 04

No	Aspek	Kriteria	Hasil Hitungan	Hasil Penilaian	Tingkat Kekumuhan	Nilai
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	18,4	18 % Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	Rendah	1
		Tingkat Kepadatan Bangunan	42	kawasan dengan kepadatan bangunannya 42 rumah per hektar	Rendah	1
		Kualitas Bangunan	86,8	bangunan temporenya tinggi yaitu 86,8%	Tinggi	5
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	6,7	6,7% Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	Rendah	1
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	25,7	25,7 % Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	Rendah	1
3	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Pelayanan Air bersih	10,5	kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih 10,5%	Tinggi	5
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Rendah	0
		Ketidaktersediaan Drainase	58,9	58 % Area tidak tersedia drainase lingkungan	Sedang	3
		Kualitas Konstruksi Drainase	0	Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan baik	Rendah	0
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	18,4	Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	Rendah	1
		Prasarana Dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	18,4	18,4% Area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Rendah	1
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	100	100% Area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Tinggi	5
		Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	100	100% Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Tinggi	5
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	44,7	44,7 % Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Rendah	1
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	100	100% Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	Tinggi	5
Total Nilai						35

Sumber : Hasil Analisa 2022

Tabel 5. 20 Penilaian Tingkat Kekumuhan Desa Tabanio RT 07

No	Aspek	Kriteria	Hasil Hitungan	Hasil Penilaian	Tingkat Kekumuhan	Nilai
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	0,00	Bangunan Teratur	Rendah	0
		Tingkat Kepadatan Bangunan	52	kawasan dengan kepadatan bangunannya 52 rumah per hektar	Rendah	1
		Kualitas Bangunan	83,9	bangunan temporealnya tinggi yaitu 83,8%	Tinggi	5
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,0	Area terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	Rendah	0
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	0,0	0% Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	Rendah	0
3	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Pelayanan Air bersih	0,0	kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih 0%	Rendah	0
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Rendah	0
		Ketidaktersediaan Drainase	100,0	100% Area tidak tersedia drainase lingkungan	Tinggi	5
		Kualitas Konstruksi Drainase	0,0	0% Area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan baik	Rendah	0
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,0	0 % Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	Rendah	0
		Prasarana Dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,0	0% Area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Rendah	0
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana Dan Pasarana Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	100	100% Area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Tinggi	5
		Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	100	100% Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Tinggi	5
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	100	100% Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Tinggi	5
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	100	100% Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	Tinggi	5
Total Nilai						31

Sumber : Hasil Analisa 2022

Tabel 5. 21 Penilaian Tingkat Kekumuhan Desa Tabanio RT 08

No	Aspek	Kriteria	Hasil Hitungan	Hasil Penilaian	Tingkat Kekumuhan	Nilai
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	0,00	Bangunan Teratur	Rendah	0
		Tingkat Kepadatan Bangunan	51	kawasan dengan kepadatan bangunannya 51 rumah per hektar	Rendah	1
		Kualitas Bangunan	70,27	bangunan temporeranya tinggi yaitu 70,2%	Tinggi	5
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,0	Area terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	Rendah	0
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	10,8	10,8 % Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	Rendah	1
3	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Pelayanan Air bersih	0,0	kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih 0%	Rendah	0
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Rendah	0
		Ketidaktersediaan Drainase	100,0	100% Area tidak tersedia drainase lingkungan	Tinggi	5
		Kualitas Konstruksi Drainase	0	0% Area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan baik	Rendah	0
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,0	0% Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	Rendah	0
		Prasarana Dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,0	0% Area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Rendah	0
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana Dan Pasarana Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	100	100% Area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Tinggi	5
		Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	100	100% Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Tinggi	5
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	100	100 % Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Tinggi	5
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	100	100% Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	Tinggi	5
Total Nilai						32

Sumber : Hasil Analisa 2022

Tabel 5. 22 Penilaian Tingkat Kekumuhan Desa Tabanio RT 09

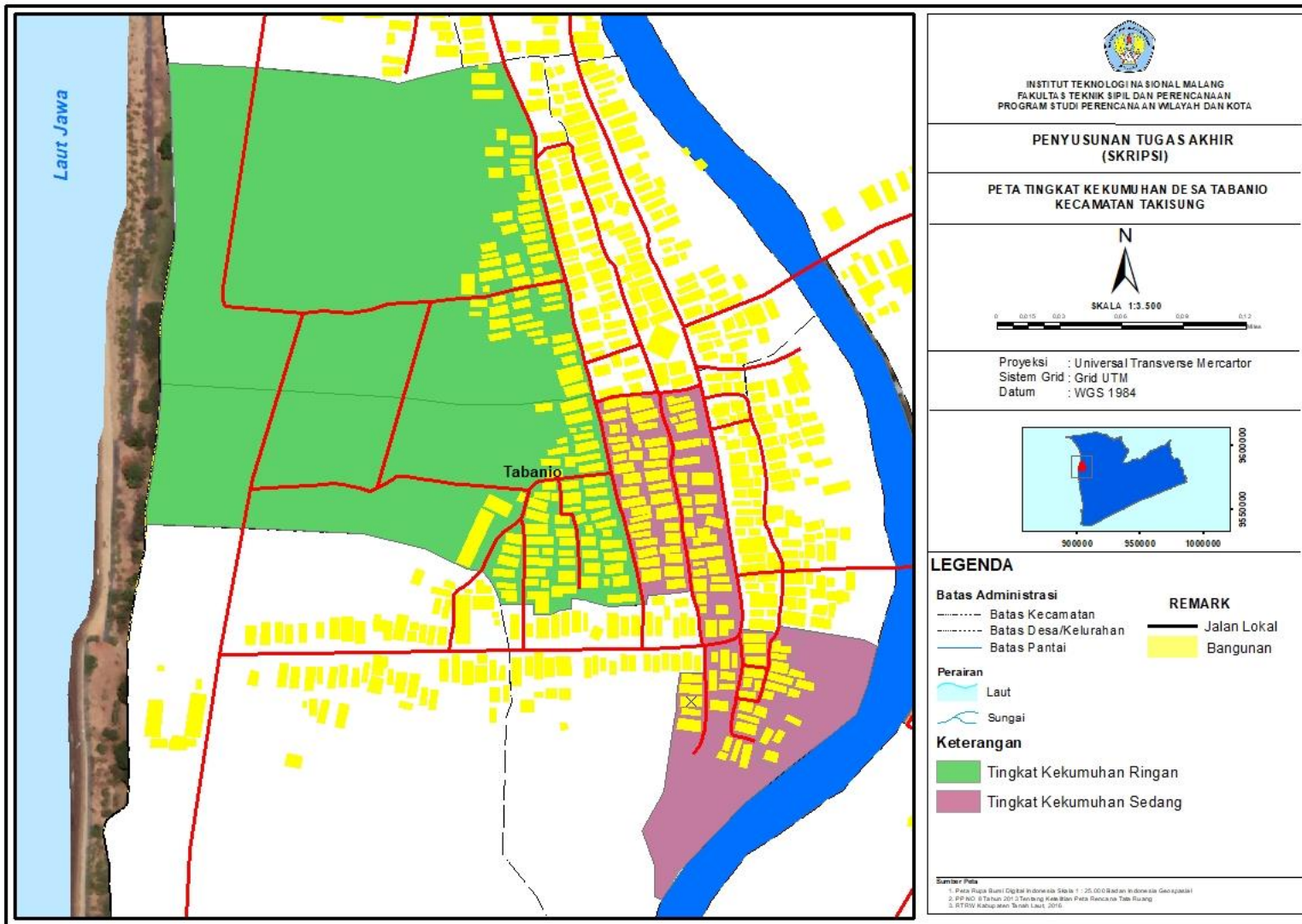
No	Aspek	Kriteria	Hasil Hitungan	Hasil Penilaian	Tingkat Kekumuhan	Nilai
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	0,00	Bangunan Teratur	Rendah	0
		Tingkat Kepadatan Bangunan	45	kawasan dengan kepadatan bangunannya 45 rumah per hektar	Rendah	1
		Kualitas Bangunan	85,48	bangunan temporenya tinggi yaitu 85,4%	Tinggi	5
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	10,8	10,8% Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	Rendah	1
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	29,2	29,5 % Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	Rendah	1
3	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Pelayanan Air bersih	0,0	kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih 0%	Rendah	0
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Rendah	0
		Ketidaktersediaan Drainase	100,0	100% Area tidak tersedia drainase lingkungan	Tinggi	5
		Kualitas Konstruksi Drainase	0	0% Area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan baik	Rendah	0
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,0	Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	Rendah	
		Prasarana Dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,0	0% Area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Rendah	0
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana Dan Pasarana Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	100	100% Area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Tinggi	5
		Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	100	100% Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Tinggi	5
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	100	100% Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Tinggi	5
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	100	100% Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	Tinggi	5
Total Nilai						33

Sumber : Hasil Analisa 2022

Tabel 5. 23 Penilaian Tingkat Kekumuhan Desa Tabanio RT 10

No	Aspek	Kriteria	Hasil Hitungan	Hasil Penilaian	Tingkat Kekumuhan	Nilai
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	0,00	Bangunan Teratur	Rendah	0
		Tingkat Kepadatan Bangunan	33	kawasan dengan kepadatan bangunannya 33 rumah per hektar	Rendah	1
		Kualitas Bangunan	90,00	bangunan temporeranya tinggi yaitu 90%	Tinggi	5
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,0	0% Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	Rendah	0
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	0,0	0 % Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	Rendah	0
3	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Pelayanan Air bersih	0,0	kawasan dengan tingkat pelayanan sistem perpipaan air bersih 0%	Rendah	0
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Rendah	0
		Ketidaktersediaan Drainase	100,0	100 % Area tidak tersedia drainase lingkungan	Tinggi	5
		Kualitas Konstruksi Drainase	0	Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan baik	Rendah	0
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,0	0% Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	Rendah	
		Prasarana Dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,0	0% Area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Rendah	0
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	100	100% Area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Tinggi	5
		Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis	100	100% Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Tinggi	5
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	100	100% Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Tinggi	5
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	100	100% Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	Tinggi	5
Total Nilai						31

Sumber : Hasil Analisa 2022



Peta 5. 1 Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh Desa Tabanio

Dari hasil analisa tingkat kekumuhan di lokasi penelitian yang berada di 5 (lima) Rt Desa Tabanio, dimana dilihat dari tujuh aspek yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran, tingkat kekumuhan di Desa Tabanio lebih khususnya yang berada di lokasi penelitian yang mencakup lima Rt terdapat satu Rt yang termasuk kedalam kumuh sedang dan empat Rt yang termasuk kedalam kumuh ringan. Rt 04 termasuk kedalam kumuh ringan sedangkan untuk Rt 07, Rt 08, Rt 09 dan Rt 10 termasuk kumuh ringan.

Dari ke 5 (lima) Rt yang berada di lokasi penelitian, hampir semua tidak mempunyai saluran drainase dan hanya Rt 04 yang mempunyai saluran drainase itu pun hanya 115 meter, dimana Panjang ideal drainase di Rt 04 yaitu 280 m. Sedangkan aspek lain yang membuat lima Rt tersebut termasuk kedalam permukiman kumuh yaitu dari aspek sistem pengelolaan persampahan dan dari aspek kondisi proteksi kebakaran.

Tabel 5. 24 Hasil Penilaian Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh Desa Tabanio

No	Rt	Tingkat Kekumuhan	Luas
1	Rt 04	Kumuh Sedang	1,86
2	Rt 07	Kumuh Ringan	0,69
3	Rt 08	Kumuh Ringan	0,72
4	Rt 09	Kumuh Ringan	4,56
5	Rt 10	Kumuh Ringan	7,58

Sumber : Hasil Analisa 2022

Dari hasil penilaian tingkat kekumuhan permukiman kumuh di Desa Tabanio di dapatkan dua tingkat kekumuhan yaitu tingkat kekumuhan sedang dan tingkat kekumuhan ringan, dimana dari kelima Rt yang menjadi wilayah penelitian terdapat 4 Rt yang termasuk kedalam tingkat kekumuhan ringan yaitu Rt 07 mempunyai luas 0,69 Ha, Rt 08 mempunyai luas 0,72 Ha, Rt 09 mempunyai luas 4,56 Ha dan Rt 10 mempunyai luas 7,58 Ha, sedangkan untuk tingkat permukiman kumuh sedang berada di Rt 04 yang mempunyai luas 1,86 Ha

5.2.3 Tipologi Permukiman Kumuh

Dari hasil klasifikasi tingkat kekumuhan di peroleh hasil yaitu, 5 lokasi di Desa Tabanio teridentifikasi termasuk kedalam permukiman kumuh

ringan dengan luas total wilayah permukiman 14,8 Ha dengan mempunyai kondisi tipologi permukiman kumuh yaitu :

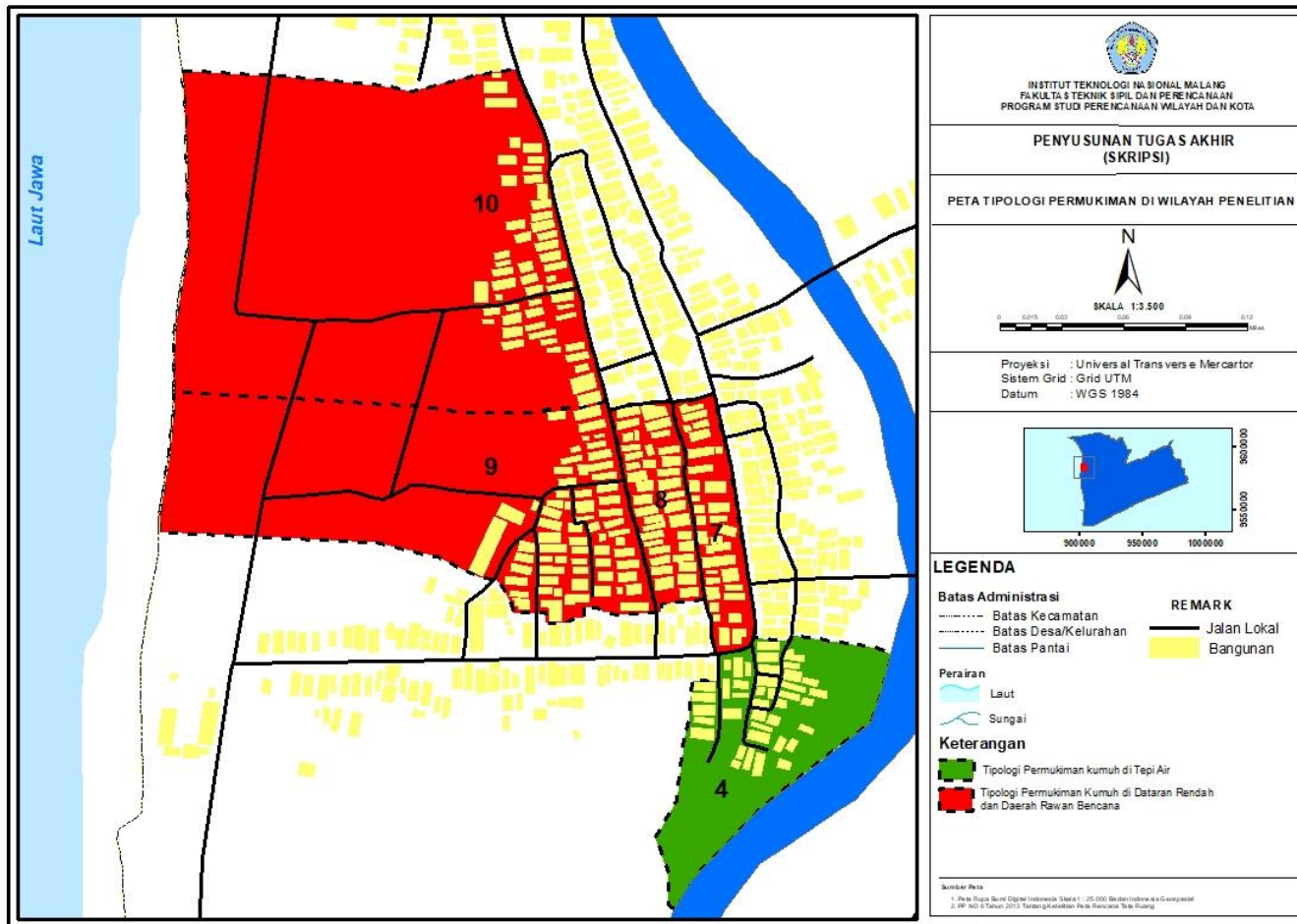
1. Kumuh di sempadan sungai Rt 04
2. Kumuh di dataran rendah dan daerah rawan banjir : Rt 07, Rt 08, Rt 09 dan Rt 10.

Tabel 5. 25 Tipologi Permukiman Kumuh

No	Rt	Tipologi	Batasan
1	4	Permukiman kumuh di Tepi Air	Berada di tepi badan air (Sungai), namun berada diluar garis sempadan badan air
2	7	Permukiman kumuh di dataran rendah dan rawan bencana	Berada didaerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10% dan berada didaerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam banjir
3	8	Permukiman kumuh di dataran rendah dan rawan bencana	Berada didaerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10% dan berada didaerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam banjir
4	9	Permukiman kumuh di dataran rendah dan rawan bencana	Berada didaerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10% dan berada didaerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam banjir
5	10	Permukiman kumuh di dataran rendah dan rawan bencana	Berada didaerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10% dan berada didaerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam banjir

Sumber : Hasil Analisa 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tipologi permukiman yang ada di diwilayah penelitian terbagi menjadi dua tipologi dimana yang pertama yaitu tipologi permukiman kumuh di tepi air dan yang kedua tipologi permukiman kumuh di daerah dataran rendah dan rawan bencana. Tipologi permukiman kumuh di tepi air yaitu Rt 04, sedangkan yang memiliki tipologi permukiman kumuh di dataran rendah dan rawan bencana yaitu Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10.



Peta 5. 2 Tipologi Permukiman Kumuh di Wilayah Penelitian

5.3 Analisis Manajemen Lahan Untuk Pengendalian Kawasan Kumuh di Desa Tabanio

Pada proses mencapai tujuan penelitian yaitu perumusan model manajemen lahan sebagai pengendalian penanganan permukiman kumuh di Desa Tabanio dengan melakukan analisa kemampuan lahan

5.3.1 Analisis Kemampuan Lahan Pada Wilayah Pesisir Desa Tabanio

Kondisi fisik alami pada wilayah pesisir Desa Tabanio dapat diukur melalui Analisis kemampuan lahan yang dibagi menjadi beberapa bagian, adalah sebagai berikut :

5.3.1.1 Satuan Kemampuan Lahan Morfologi

Kemampuan lahan berdasarkan identifikasi morfologi dimaksudkan untuk memperoleh tingkat kemampuan lahan pada suatu wilayah dengan mengidentifikasi potensi dan kendala pada suatu lahan. Untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan morfologi di Desa Tabanio dapat berorientasi pada kondisi kemiringan lereng dan jenis tanah. Dengan mengsuperimposekan peta kemiringan lereng dan jenis tanah maka diketahui bahwa tingkat kemampuan lahan morfologi pada Desa Tabanio terbagi menjadi atas 2 (dua), yaitu Kemampuan lahan dari morfologi sedang dan kemampuan lahan dari morfologi rendah, dimana kondisi kemampuan lahan tersebut tidak kompleks dan mempunyai tanah yang datar serta mudah dikembangkan sebagai tempat permukiman dan budi daya sedangkan kategori sedang biasa dikembangkan untuk kegiatan pembangunan tetapi kawasan ini memiliki batasan-batasan untuk pembangunan.

Tabel 5. 26 Satuan Kemampuan Lahan Morfologi

No	Desa	SKL Morfologi	Luas (Ha)
1	Tabanio	Kemampuan Lahan dari Morfologi Sedang	1420,60
2	Tabanio	Kemampuan Lahan dari Morfologi Rendah	2871,60

Sumber :Hasil Perhitungan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Tabanio untuk satuan kemampuan lahan morfologi terbagi menjadi dua yaitu kemampuan lahan dari morfologi sedang dengan mempunyai luasan 1.420,60 Ha dan kemampuan lahan dari morfologi rendah dengan luas 2.871,60 Ha.

5.3.1.2 Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan

Kemampuan lahan berdasarkan kemudahan untuk dikerjakan dimaksudkan untuk menganalisis tingkat kemudahan lahan di wilayah atau kawasan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diketahui bahwa kemampuan lahan kemudahan dikerjakan di Desa Tabanio terbagi menjadi dua yaitu kemudahan dikerjakan

kurang dan kemudahan dikerjakan sedang. Dapat dilihat pada tabel 5.25 merupakan hasil pembagian kategori dan luasan SKL kemudahan dikerjakan.

Tabel 5. 27 Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan

No	Desa	SKL Kemudahan Dikerjakan	Luas (Ha)
1	Tabanio	Kemudahan dikerjakan Kurang	665,13
2	Tabanio	Kemudahan dikerjakan Sedang	3624,53

Sumber :Hasil Perhitungan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Tabanio untuk SKL Kemudahan dikerjakan terbagi menjadi dua yaitu kemudahan dikerjakan kurang dengan mempunyai luas 665,13 Ha dan kemudahan dikerjakan sedang dengan luas 3.624,53 Ha.

5.3.1.3 Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng

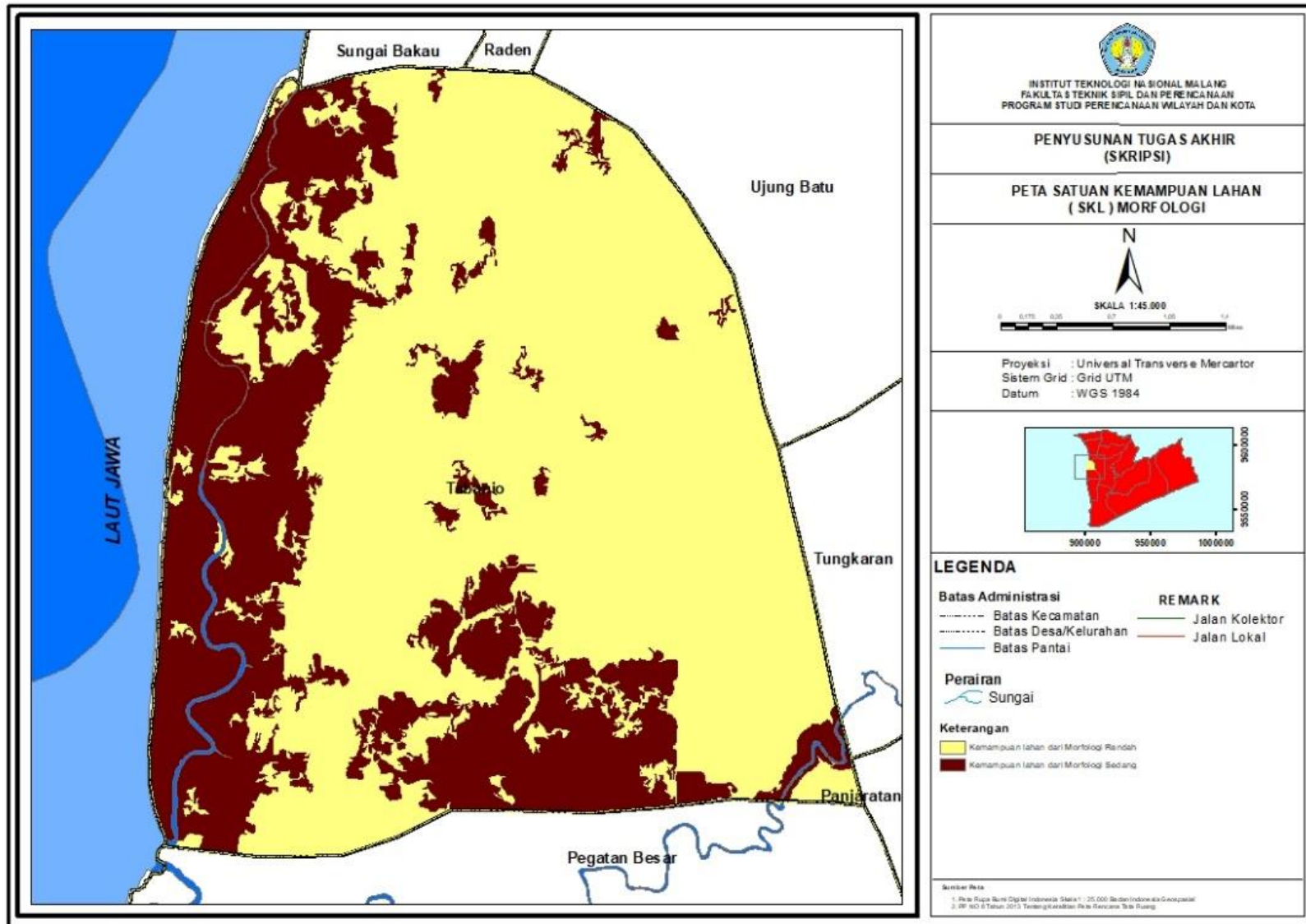
Kemampuan lahan kestabilan lereng untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan dalam menerima beban. Analisis ini menggunakan Teknik overlay dan penggunaan lahan di daerah penelitian dengan keluaran peta satuan kemampuan lahan kestabilan lereng. Dimana setelah dilakukan analisis kestabilan lereng Desa Tabanio memiliki dua ketegori yaitu, kemampuan lahan kestabilan lereng kurang dan kestabilan lereng sedang.

Tabel 5. 28 Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng

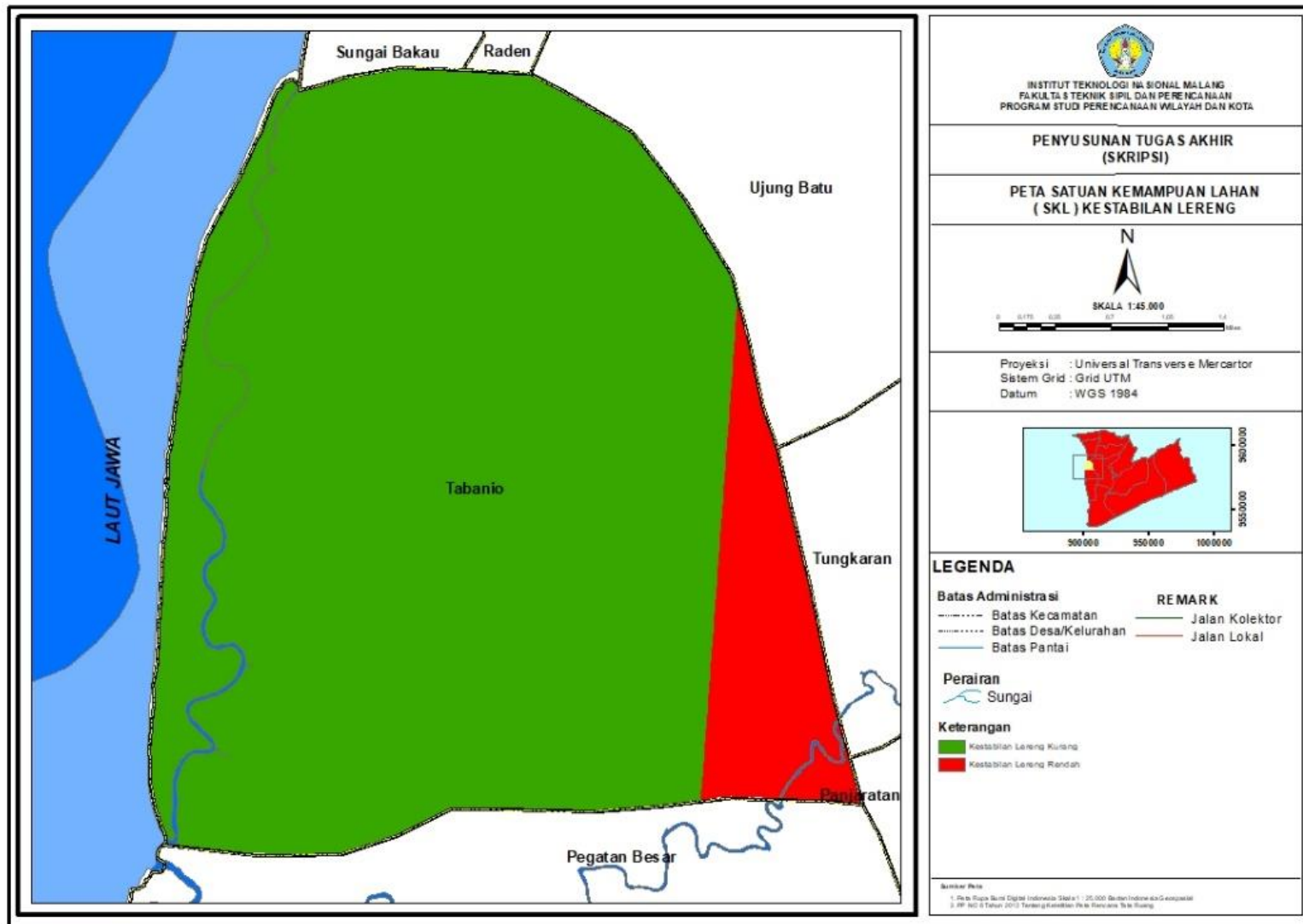
No	Desa	SKL Kemudahan Kestabilan Lereng	Luas (Ha)
1	Tabanio	Kestabilan Lereng Rendah	3896,42
2	Tabanio	Kestabilan Lereng Kurang	393,08

Sumber :Hasil Perhitungan, 2022

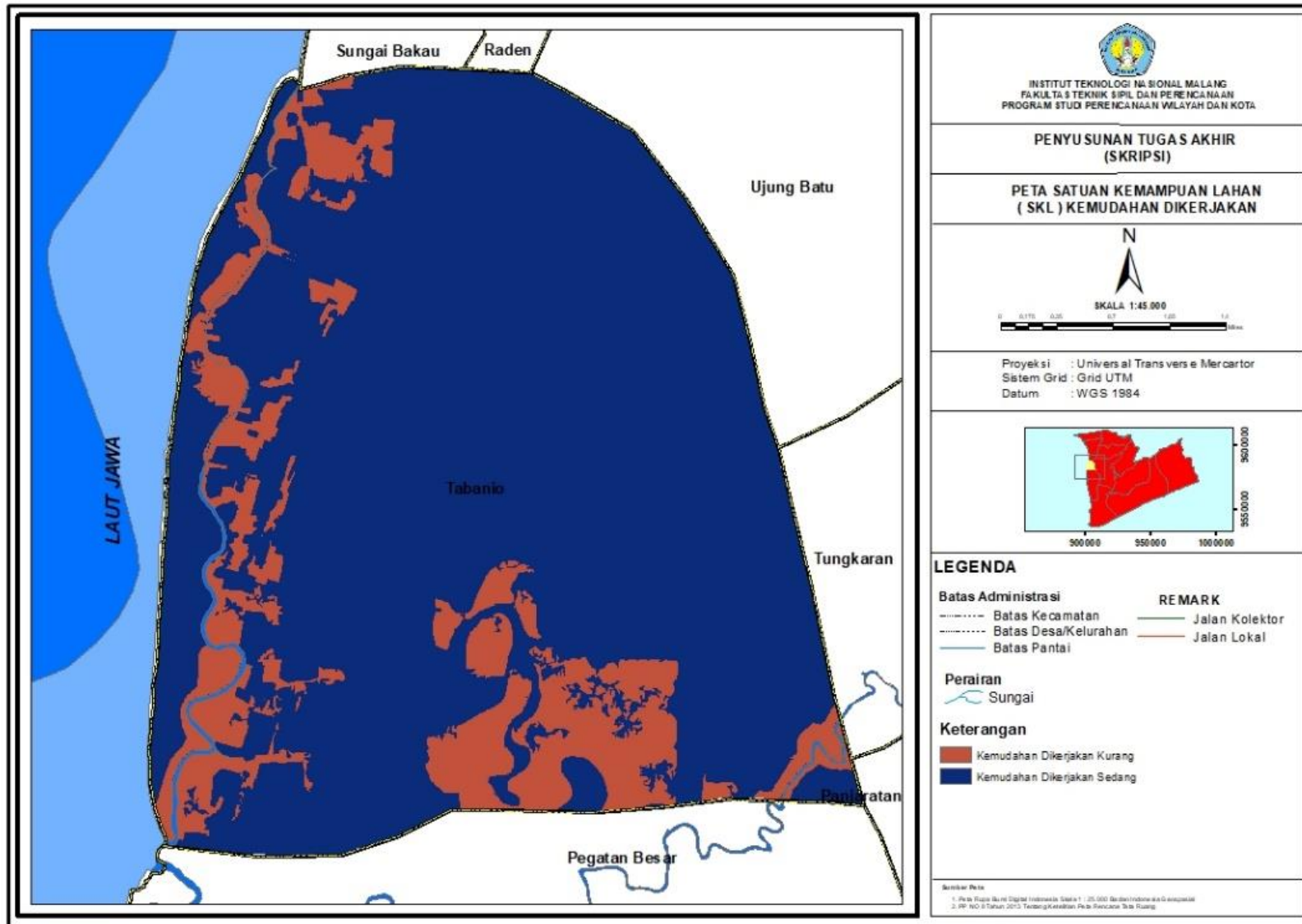
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk SKL kestabilan lereng yang ada di Desa Tabanio terbagi menjadi dua kategori yaitu kestabilan lereng rendah dengan mempunyai luas 3.896,42 Ha dan kestabilan lereng kurang dengan mempunyai luas 393,08 Ha.



Peta 5. 3 Satuan Kemampuan Lahan Morfologi



Peta 5. 4 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng



Peta 5.5 Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan

5.3.1.4 Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi

Kemampuan lahan berdasarkan kestabilan pondasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dan jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk setiap tingkatan di daerah penelitian dalam mendukung bangunan berat seperti rumah, sarana dan prasarana untuk penggunaan permukiman. Analisis ini menggunakan Teknik overlay dan penggunaan lahan di daerah penelitian dengan keluaran peta satuan kemampuan lahan kestabilan pondasi. Dimana setelah dilakukan analisis Desa Tabanio memiliki kemampuan lahan kestabilan pondasi kurang dan kestabilan pondasi rendah, dimana kestabilan pondasi rendah berarti wilayah tersebut kurang stabil untuk berbagai jenis bangunan.

5.3.1.5 Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air

Kemampuan lahan berdasarkan ketersediaan air dimaksud untuk menganalisis sumber-sumber air yang bias dimanfaatkan untuk keperluan pengembangan kawasan, dengan tidak mengganggu keseimbangan tata air. Adapun yang diperlukan untuk mengukur tingkat kemampuan lahan untuk ketersediaan air adalah orientasi data hidrologi, klimatologi, peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, peta geologi, dan penggunaan lahan saat ini dan menggunakan metode analisis superimpose. Berdasarkan hasil superimpose yang dilakukan di ketahui bahwa Desa Tabanio kemampuan lahan ketersediaan airnya terbagi menjadi dua yaitu, ketersediaan air rendah dan ketersediaan air sedang.

Tabel 5. 29 Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air

No	Desa	SKL Ketersediaan Air	Luas (Ha)
1	Tabanio	Ketersediaan Air Rendah	1169,77
2	Tabanio	Ketersediaan Air Sedang	3119,65

Sumber :Hasil Perhitungan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SKL ketersediaan air yang telah dilakukan untuk Desa Tabanio terbagi menjadi dua kategori yaitu ketersediaan air rendah dengan mempunyai luas 1.169,77 Ha dan ketersediaan air sedang dengan mempunyai luas 3.119,65 Ha.

5.3.1.6 Satuan Kemampuan Lahan Drainase

Kemampuan lahan untuk drainase dimaksudkan untuk mengetahui daerah-daerah yang cenderung tergenang di musim penghujan. Adapun yang diperlukan untuk mengukur tingkat kemampuan lahan drainase adalah data morfologi, kelerengan, curah hujan, hidrogeologi, jenis tanah dan penggunaan lahan. Didapatkan dari hasil analisis tersebut bahwa Desa Tabanio kemampuan lahan drainase kurang, dimana kemampuan drainase kurang dapat diartikan bahwa aliran air sulit dan mudah tergenang dan pada musim

puncak penghujan, kawasan ini tidak mampu untuk menampung limpahan air permukaan,

5.3.1.7 Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi

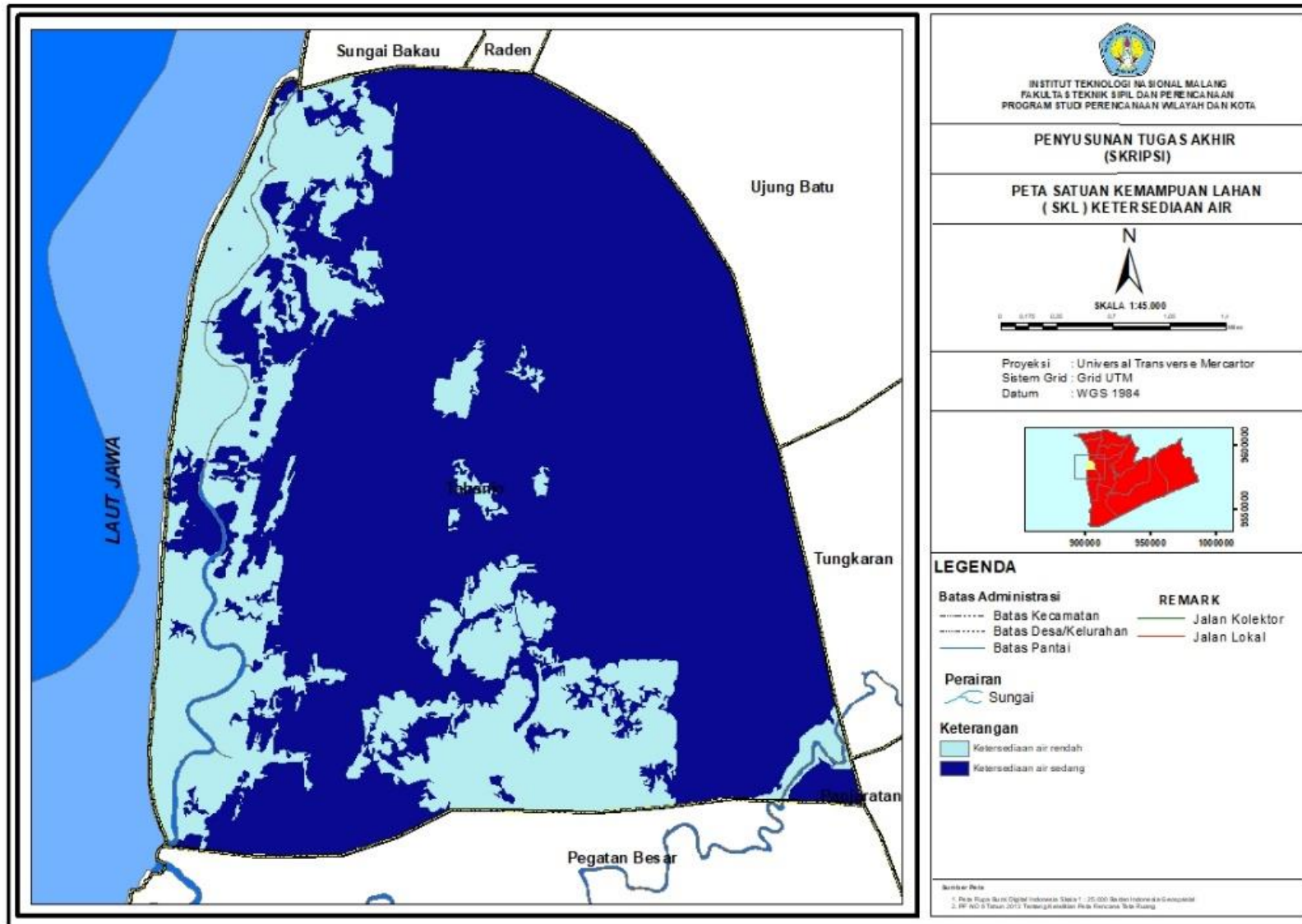
Kemampuan lahan terhadap erosi dimaksudkan untuk daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta hidrogeologi, peta tekstur tanah, peta curah hujan dan peta penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL Terhadap Erosi, dimana dari hasil analisis yang telah dilakukan, kemampuan lahan terhadap erosi Desa Tabanio mempunyai dua kategori yaitu, erosi cukup tinggi dan erosi sedang.

Tabel 5. 30 Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi

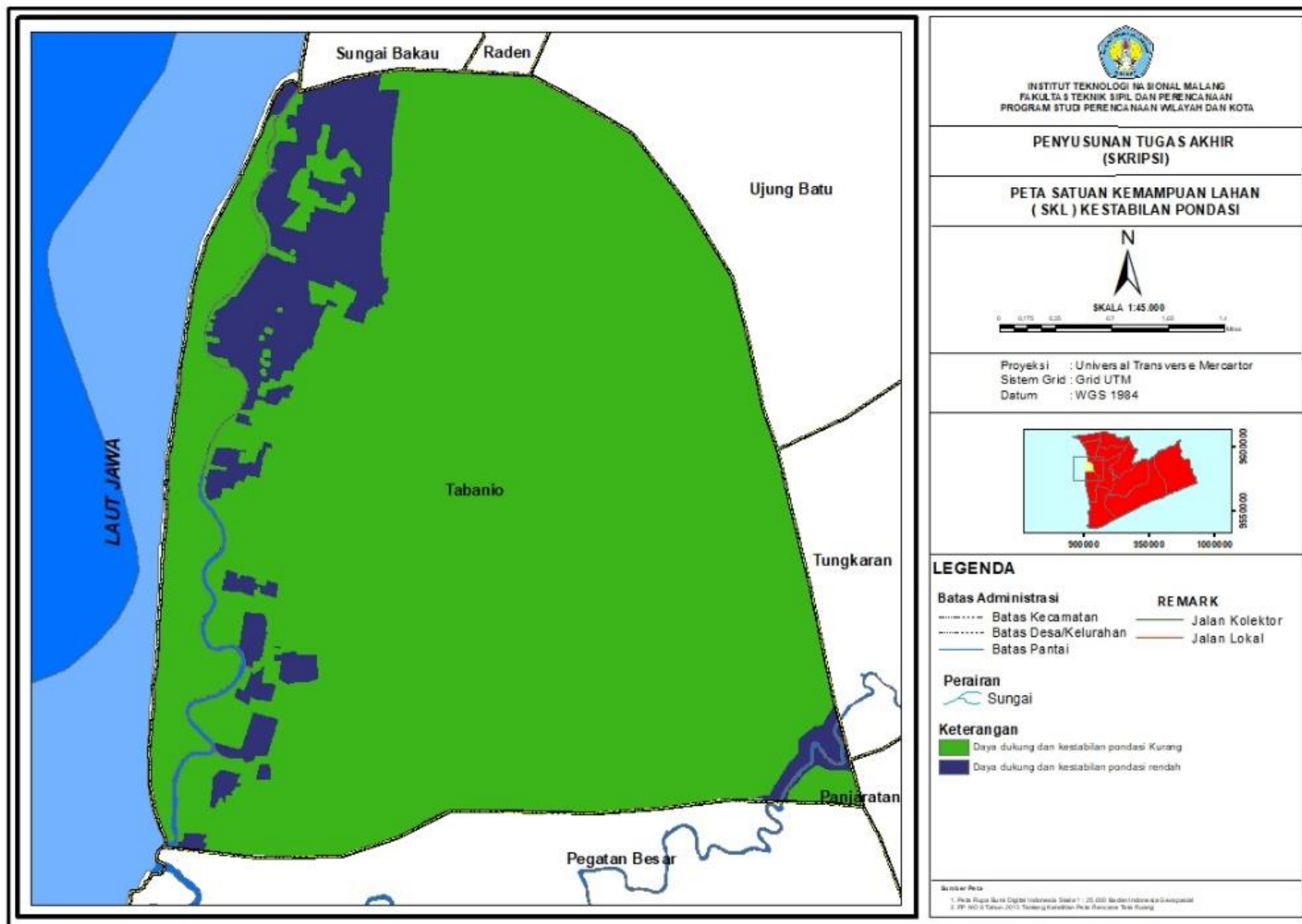
No	Desa	SKL Terhadap Erosi	Luas (Ha)
1	Tabanio	Erosi Cukup Tinggi	4180,79
2	Tabanio	Erosi Sedang	108,68

Sumber :Hasil Perhitungan, 2022

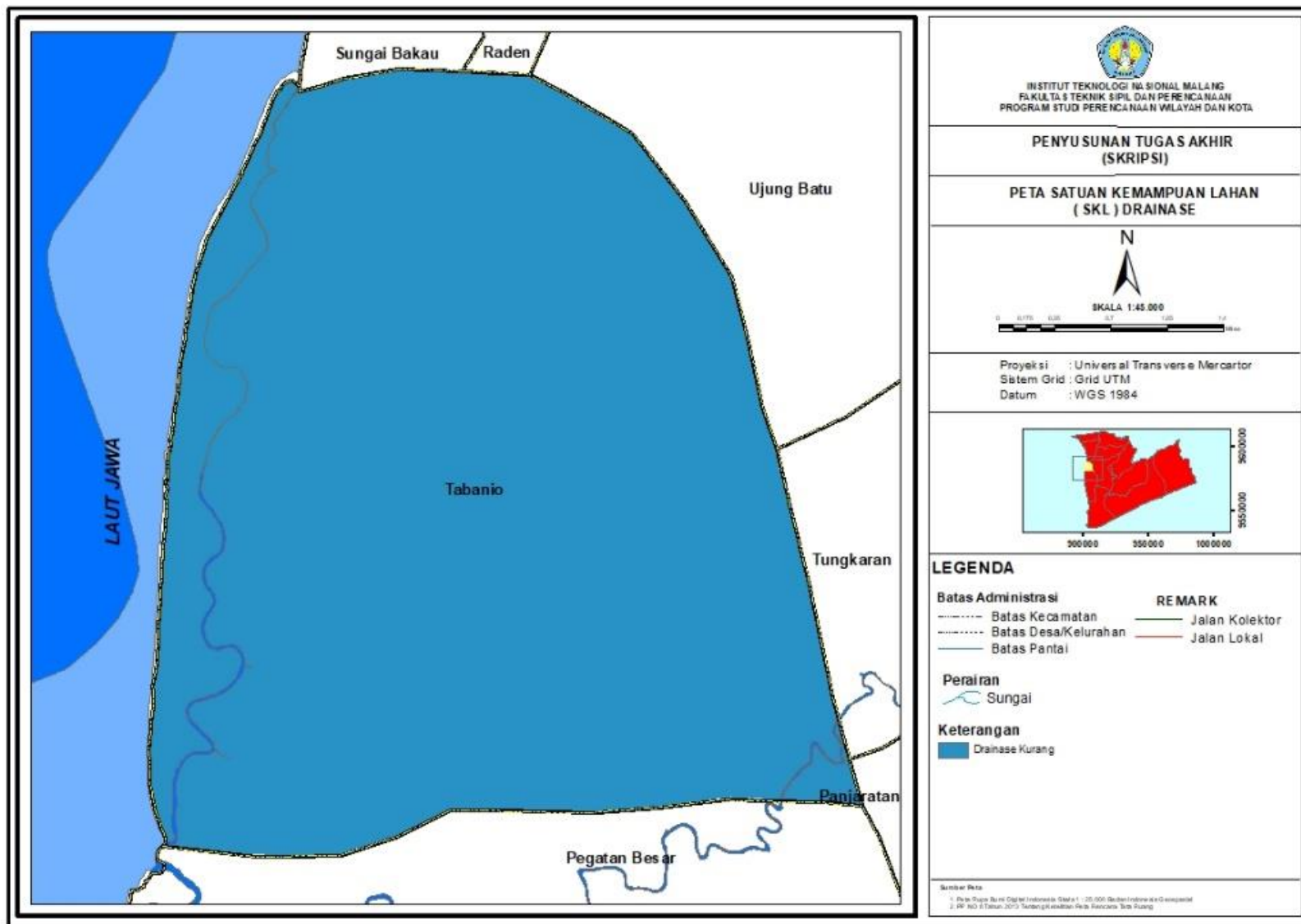
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SKL terhadap erosi yang ada di Desa Tabanio terbagi menjadi dua kategori yaitu erosi cukup tinggi dengan mempunyai luas 4.180,79 Ha dan erosi sedang dengan mempunyai luas 108,68 Ha.



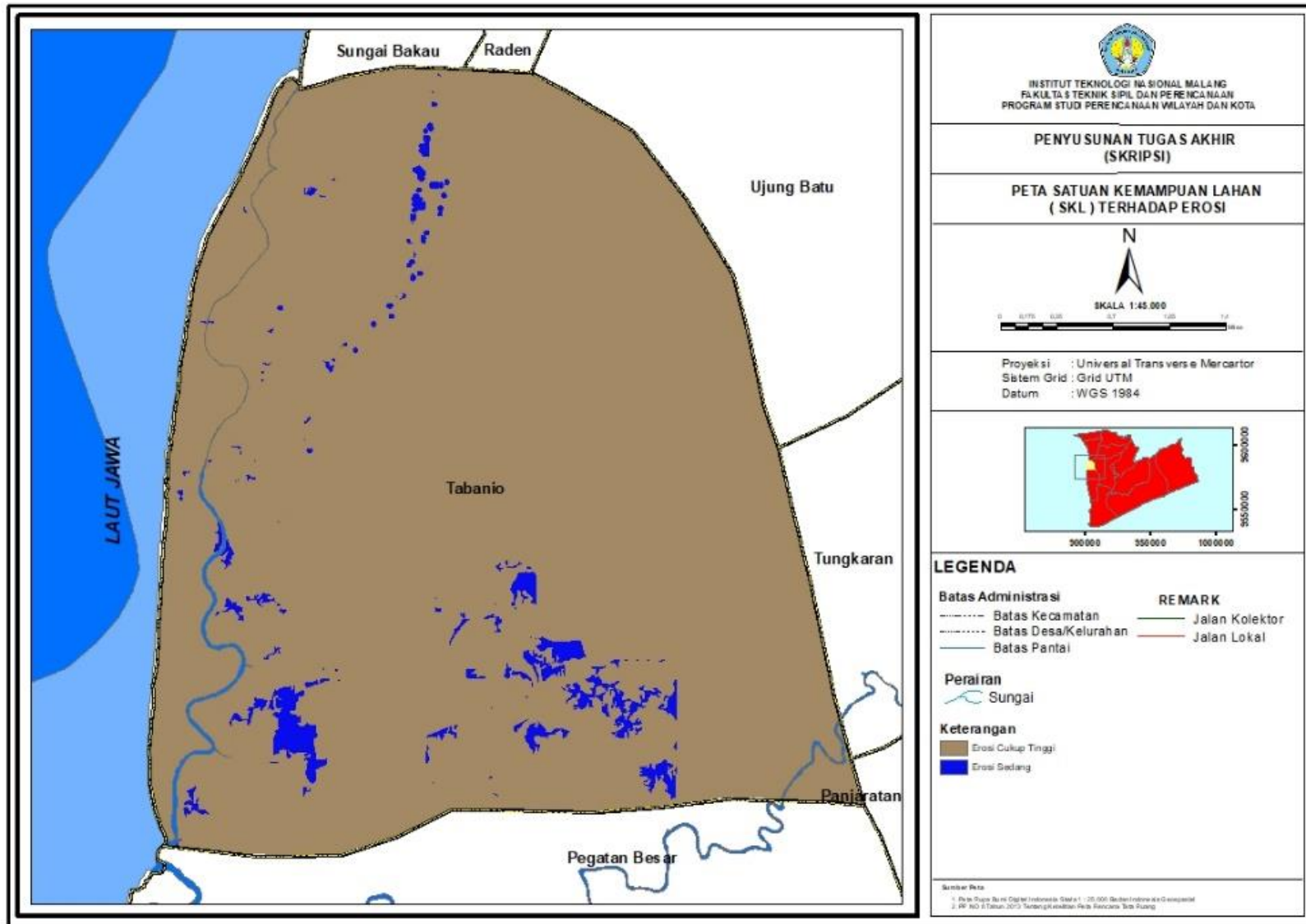
Peta 5. 6 Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air



Peta 5.7 Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi



Peta 5. 8 Satuan Kemampuan Lahan Drainase



Peta 5.9 Peta Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi

5.3.1.8 Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah

Kemampuan lahan pembuangan limbah diperuntukkan untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengeolahan limbah, baik limbah padat maupun cair. Dimana dari hasil analisis yang dilakukan di Desa Tabanio terdapat 2 (dua) kategori yaitu kemampuan lahan pembuangan limbah sedang dan kemampuan lahan pembuangan limbah sedang.

Tabel 5. 31 Satuan Kemampuan Lahan Limbah

No	Desa	SKL Pembuangan Limbah	Luas (Ha)
1	Tabanio	Kemampuan Lahan Untuk Pembuangan Limbah Sedang	1080,84
2	Tabanio	Kemampuan Lahan Untuk Pembuangan Limbah Kurang	3208,62

Sumber :Hasil Perhitungan, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa SKL pembuangan limbah di Desa Tabanio terbagi menjadi dua kategori yaitu Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah sedang dengan mempunyai 1.080, 84 Ha dan kemampuan lahan untuk pembuangan limbah kurang dengan mempunyai luas 3.208,62 Ha.

5.3.1.9 Satuan Kemampuan Lahan Kerentanan Bencana

Kemampuan lahan terhadap bencana alam dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa SKL Terhadap Bencana Alam di Desa Tabanio terdiri dari satu kategori yaitu potensi bencana alam tinggi dengan luasan mencapai 4.289,42 Ha.

5.3.1.10 Analisis Kemampuan Lahan

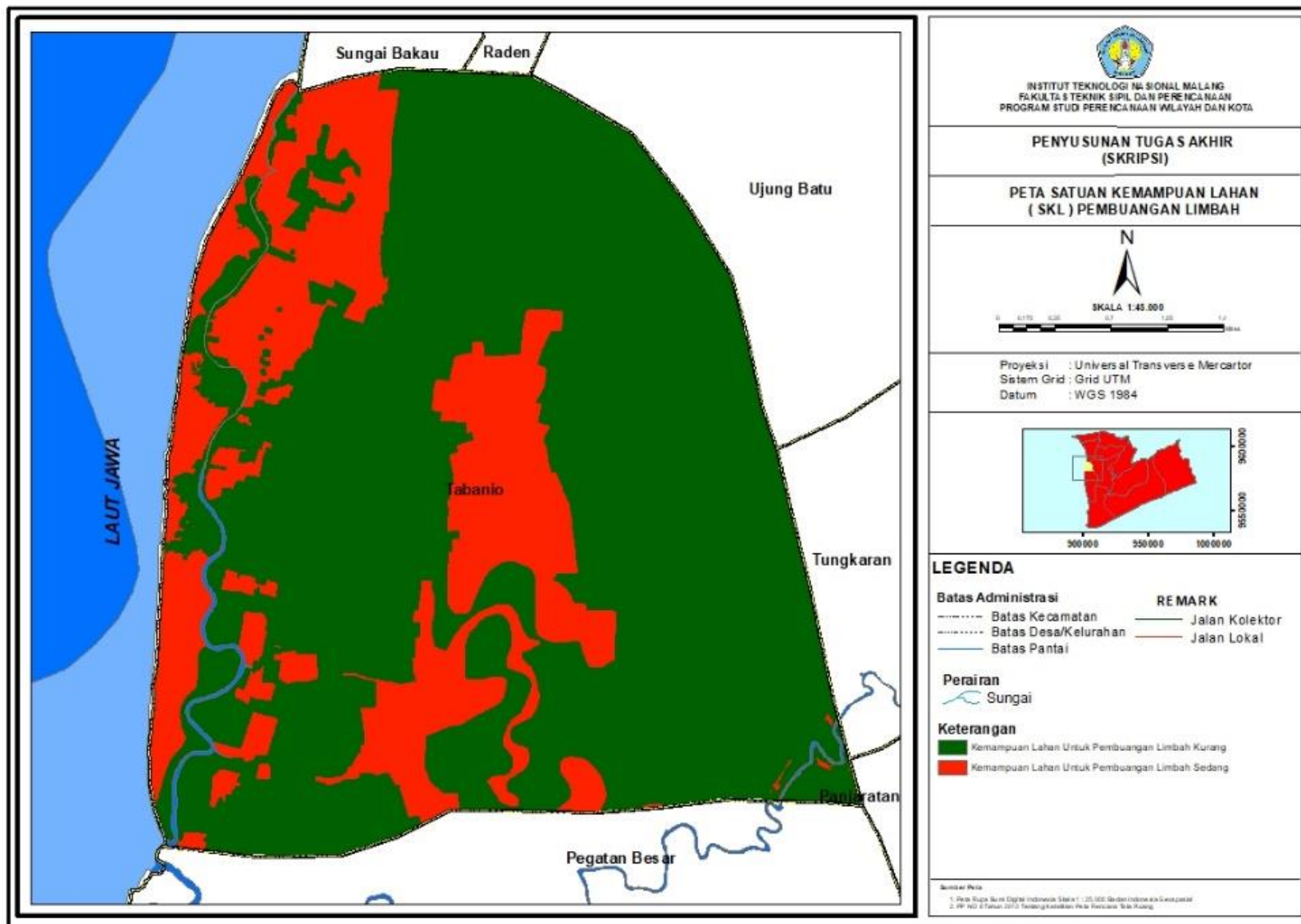
Berdasarkan hasil analisis overlay dengan menggabungkan 9 variabel Satuan Kemampuan Lahan (SKL) dan pengalihan bobot dengan nilai akhir, maka terdapat (2) dua klasifikasi kemampuan lahan di Desa tabanio yaitu, Kelas A dengan klasifikasi kemampuan pengembangan sangat rendah dan Kelas B dengan klasifikasi pengembangan rendah.

Tabel 5. 32 Klasifikasi Kemampuan Lahan Desa Tabanio

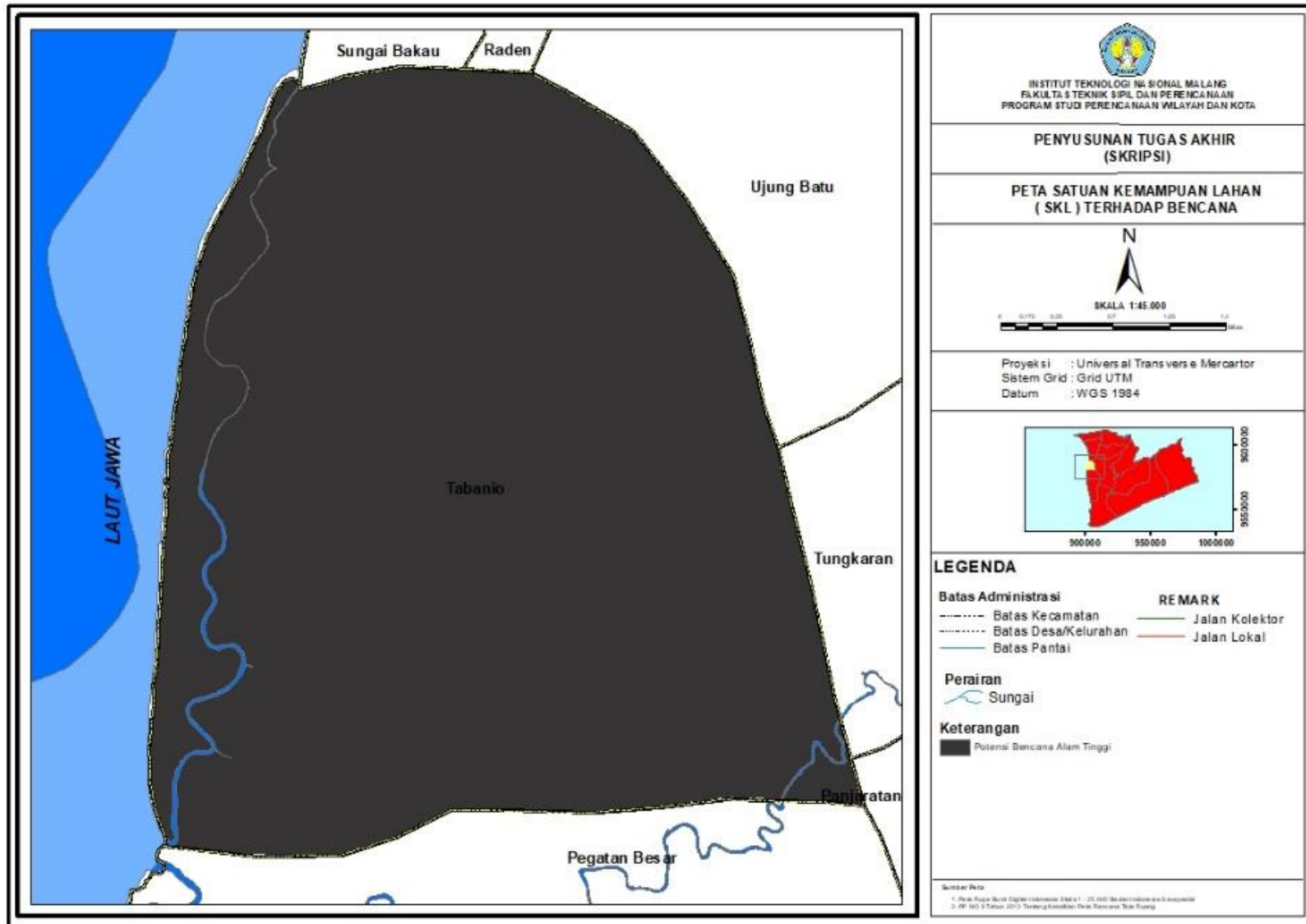
No	Total Nilai	Kelas	Klasifikasi Kemapuan Lahan
1	55-60	a	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah
2	61-80	b	Kemampuan Pengembangan Rendah

Sumber: Hasil Analisa,2021

Dapat dilihat tabel diatas dimana dari hasil analisis kemampuan lahan yang telah dilakukan. Desa Tabanio termasuk kedalam kelas a dan kelas dimana klasifikasinya termasuk kemampuan pengembangan sangat rendah dan kemampuan pengembangan rendah,dan mendapatkan total nilai kelas a yaitu 55-60, serta untuk kelas b mempunyai total nilai 61-80.



Peta 5. 10 Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah



Peta 5.11 Peta Satuan Kemampuan Lahan Rawan Bencana



Peta 5. 12 Kemampuan Lahan Desa Tabanio

5.3.2 Analisis Manajemen Penggunaan Lahan Pada Permukiman Sebagai Pengendalian Kawasan Kumuh Desa Tabanio

Pada proses mencapai tujuan penelitian yaitu perumusan model manajemen lahan sebagai upaya penanganan permukiman kumuh di Desa Tabanio, dialokasikan bentuk-bentuk manajemen lahan. Dalam model manajemen lahan memiliki skema pelaksanaan yang berbeda-beda dengan tujuan utama yaitu untuk penataan permukiman yang didukung dengan sarana prasarana melalui proses manajemen lahan. Dalam merumuskan model manajemen lahan dihimpun berdasarkan kesesuaian lahan.

Melihat kondisi saat ini pada Desa Tabanio, lebih tepatnya yang berada di Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 dan Rt 10, penggunaan lahannya untuk permukiman nelayan yang berada di pinggir sungai dan berada di daerah dataran rendah pinggir pantai. Berdasarkan hasil survey, data sekunder, dan hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan lahan sebagai permukiman nelayan yang terdapat di Desa Tabanio menyebabkan terjadinya kawasan permukiman kumuh yang termasuk kedalam tingkat permukiman kumuh ringan.

Berdasarkan pada analisis kemampuan lahan untuk permukiman nelayan di Desa Tabanio, terdapat 2 (dua) kategori kawasan, yaitu:

1. Kawasan yang tidak sesuai dengan permukiman, namun penggunaan lahannya saat ini berupa kawasan permukiman. Adapun alasan masyarakat Desa Tabanio khususnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan lebih memilih kawasan ini untuk bermukim karena kawasan ini lebih dekat dengan sungai dan laut yang merupakan tempat mereka untuk mencari nafkah. Disamping itu pula, ketidak sesuaian lahan pada kawasan ini sebagai kawasan permukiman disebabkan karena adanya kondisi fisik alami yang memiliki faktor-faktor penghambat yang bersifat permanen. Adapun faktor-faktor penghambat yaitu
 - a. Dari hasil Analisa kemampuan lahan yang telah dilakukan di Desa Tabanio merupakan termasuk kedalam kawasan rawan bencana tinggi, serta permukiman yang berada di Desa Tabanio lebih tepatnya RT 04, RT 07, RT 08, RT 09 & RT 10 termasuk kedalam kawasan potensial banjir.
 - b. Potensial ketersediaan air yang kurang di Desa Tabanio juga sangat mempengaruhi terlihat dari hasil analisa kemampuan lahan ketersediaan air.
 - c. Desa Tabanio tepatnya berada di RT04, RT 07, RT 08, RT 09, & RT 10 memiliki kemampuan lahan terhadap drainase

yang rendah mengakibatkan pada kawasan ini genangan sering terjadi walaupun bukan pada musim penghujan.

2. Kawasan yang sesuai untuk permukiman dengan penggunaan lahan saat ini berupa pertanian lahan kering campuran, ditinjau berdasarkan jarak antara kawasan ini dengan sungai dan laut memiliki jarak yang cukup jauh.

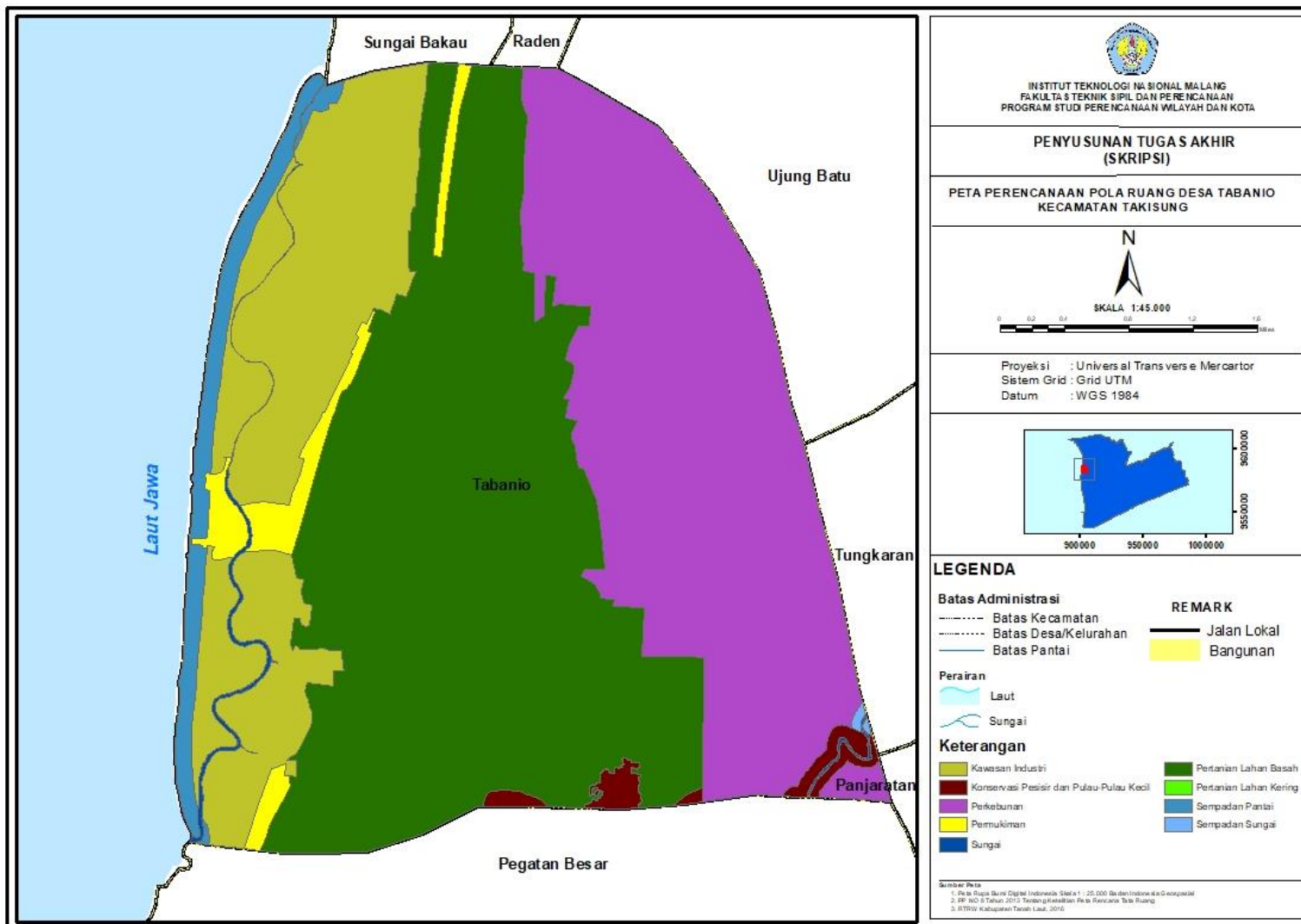
Sedangkan untuk kesesuaian dengan tata ruang dijelaskan pada Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 tahun 2016 tentang RTRW tahun 2016-2036 menjelaskan bahwa Desa Tabanio termasuk kedalam kawasan cagar budaya karena di Desa Tabanio terdapat situs bersejarah yaitu Benteng Tabanio dan Desa Tabanio tidak termasuk kedalam lokasi fungsi strategis kabupaten/kota, untuk perencanaan pola ruang di Desa Tabanio berdasarkan RTRW tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 5.25, dimana dibawah dijelaskan rencana pola ruang di Desa Tabanio, terdapat sembilan rencana penggunaan lahan yaitu, pertanian lahan kering, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, sempadan sungai, kawasan industri, sempadan pantai, permukiman, perkebunan, pertanian lahan basah dan sungai, yang paling besar yaitu untuk perkebunan dengan luas 7.461 Ha dan yang kedua untuk pertanian lahan basah dengan luas 2.716 Ha.

Tabel 5. 33 Rencana Pola Ruang di Desa Tabanio

No	Pola Ruang	Luas (Ha)
1	Pertanian Lahan Kering	232,0
2	Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	522,7
3	Sempadan Sungai	73,7
4	Kawasan Industri	945,7
5	Sempadan Pantai	270,6
6	Permukiman	142,2
7	Perkebunan	7461,8
8	Pertanian Lahan Basah	2716,3
9	Sungai	110,7

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Laut, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pola ruang yang ada di Desa Tabanio dimana yang paling mendominasi yaitu perkebunan dengan mempunyai luasan 7.461,8 Ha dan pertanian lahan basah dengan luasan 2.716 Ha sedangkan untuk permukimannya sendiri mempunyai luasan 142,2 Ha.



Peta 5.13 Pola Ruang Desa Tabanio

Manajemen lahan untuk permukiman kumuh di Desa Tabanio lebih tepatnya diwilayah penelitian disetiap RT yang mempunyai penanganan konsep manajemen yang berbeda-beda dan menyesuaikan tipologi permukiman kumuh yang ada. Pertama terdapat di Rt 04 dimana tipologi permukiman yang berada di lokasi tersebut yaitu permukiman yang berada di tepian air, serta mempunyai batasan berada di tepi badan air (Sungai), namun berada diluar garis sempadan badan air dan status kepemilikan lahan yang berada di Rt 04 yaitu sebanyak 26 unit rumah yang mempunyai sertifikat dan ada 12 unit rumah yang tidak mempunyai sertifikat, sedangkan untuk Rt 07 & Rt 08 dimana tipologi permukiman yang berada di lokasi tersebut yaitu permukiman yang berada di daerah dataran rendah dan daerah rawan bencana, dimana dataran rendah yang dimaksud mempunyai kemiringan lereng $< 10\%$ dan berada didaerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam banjir dan status kepemilikan tanah pada Rt 07 yaitu sebanyak 27 unit rumah yang mempunyai sertifikat tanah dan 4 unit rumah yang tidak bersertifikat dari 31 unit rumah yang ada di wilayah Rt 07, sedangkan untuk Rt 08 dari 37 unit rumah yang berada di Rt 08 sebanyak 32 unit rumah yang telah memiliki sertifikat dan ada 5 unit rumah yang tidak bersertifikat dimana 86,7% mempunyai sertifikat, konsep manajemen lahan yang cocok digunakan untuk lokasi ini yaitu konsolidasi tanah menggunakan model penataan kembali bidang tanah (land readjustment) dimana model ini mengumpulkan bidang tanah milik individu yang memiliki bentuk tidak beraturan dan belum terjamah prasarana, dengan menggunakan model konsolidasi land readjustmen dilakukan tindakan untuk pembangunan prasarana untuk tanah tersebut.

Kedua yaitu Rt 09 & Rt 10 dimana tipologi permukimannya sama dengan RT 04 & Rt 08 dimana mempunyai tipologi permukiman yang berada di daerah dataran rendah dan daerah rawan bencana, dimana dataran rendah yang dimaksud mempunyai kemiringan lereng $< 10\%$ dan berada didaerah rawan bencana alam dan untuk status kepemilikan lahan yang berada di RT 09 dimana 49 unit rumah yang berada di RT 09 mempunyai sertifikat dan sebanyak 14 unit rumah yang belum memiliki sertifikat, 77,8% rumah yang berada di RT 09 mempunyai sertifikat sedangkan untuk RT 10 status kepemilikan lahannya 76,0% mempunyai sertifikat maka dari itu konsep manajemen lahan yang cocok dilakukan untuk pengendalian permukiman kumuh yaitu menggunakan konsep manajemen lahan land pooling dimana konsep ini merupakan mengumpulkan bidang-bidang tanah yang sempit dalam satu areal menjadi satu bidang, dimana diatasnya akan dibangun RTH privat semi, semi public meningkat .

Tabel 5. 34 Rumusan Manajemen Lahan di Desa Tabanio

No	Lokasi Penerapan Konsep Manajemen Lahan	Status Kepemilikan lahan	Tingkat Kekumuhan	Konsep Manajemen	Pengertian Manajemen Lahan	Ketentuan Konsep Manajemen Lahan	Syarat Konsep Manajemen Lahan
1	RT 04	89,7 % Hak Milik Bersertifikat	Kumuh Sedang	Land Readjustment	Merupakan salah satu penataan lahan yang berbasis pada peningkatan nilai lahan itu sendiri. Maksudnya adalah lahan yang semula kurang di optimalkan, kemudian diadakan penataan terhadap lahan tersebut agar dapat lebih bermanfaat. Metode yang digunakan land readjustment ini adalah menata kembali batas-batas peruntukan lahan berdasarkan arahan zonasi dalam rencana tata ruang. Kemudian, dengan menyesuaikan batas-bats kepemilikan lahan tanah, maka dapat diperoleh lahan yang dapat dikontribusikan untuk ruang public atau prasarana kepentingan umum lainnya.	Metode yang digunakan dalam Land Readjustmen ini adalah menata kembali batas-batas peruntukan lahan berdasarkan arahan zonasi dalam rencana tata ruang. Maka dari itu ada 3 (Tiga) prinsip dasar metode ini adalah Penyesuaian batas lahan, Penyesuaian lokasi dan Kontribusi lahan. dimana untuk kontribusi lahan penentuan kontribusi pembagian lahan didasari atas 30% dari total lahan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan ruang publik lainnya. 10% dari total lahan digunakan untuk lahan cadangan yang nantinya bermanfaat untuk mengganti biaya relokasi sementara, rekonstruksi dan legalisasi. 60% dari total lahan dikembalikan kepada pemilik lahan. Lahan kontribusi diperoleh dari tanah masyarakat, dan bila menggunakan metode land readjustment, maka 40% lahan tersebut dapat diperoleh melalui teknik penyesuaian batas lahan dan penyesuaian lokasi	Tingkat pemilikan/penghunian secara sah (mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas,
2	RT 07	87 % Hak Milik Bersertifikat	Kumuh Ringan				Tingkat kekumuhannya sedang, dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar
3	RT 08	86,4 % Hak Milik Bersertifikat	Kumuh Ringan				Minimnya prasarana dan sarana di wilayah tersebut
							Lahan sesuai dengan peruntukannya

No	Lokasi Penerapan Konsep Manajemen Lahan	Status Kepemilikan lahan	Tingkat Kekumuhan	Konsep Manajemen	Pengertian Manajemen Lahan	Ketentuan Konsep Manajemen Lahan	Syarat Konsep Manajemen Lahan
4	RT09	77,7 % Hak Milik Bersertifikat	Kumuh Ringan	Land Pooling	Metode ini dimana kepemilikan tanah yang tersebar dan tidak beraturan dikumpulkan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur utama lainnya dengan kemudian dibagi menjadi plot yang baru, pada bentuk land pooling prinsipnya adalah penggabungan lahan sebagai bentuk penyediaan lahan untuk infrastruktur lingkungan perkotaan	Pemilik lahan umumnya memberikan sekitar 30% dari jumlah keseluruhan kepemilikan lahannya kepada penyedia ruang untuk jalan, taman dan ruang publik lainnya serta lahan cadangan. Dari jumlah tersebut, pada akhirnya pemilik lahan akan diberikan kembali 12-30% bagian tanah yang lebih kecil dengan bentuk geometris baru yang beraturan.	Tingkat pemilikan/penghunian secara sah (mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditematinya) cukup tinggi dengan luasan yang cukup
5	RT 10	76 % Hak Milik Bersertifikat	Kumuh Ringan				Tata letak bangunan tidak berpola
							Minim dengan sarana dan prasarana
6	RT 04	10,3 % Tidak Hak Milik Bersertifikat	Kumuh Sedang	Relokasi	Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1996) relokasi diartikan sebagai pemindahan tempat atau pemindahab dari suatu lokasi ke lokasi lain. Jika dikaitkan dalam konteks perumahan dan permukiman relokasi dapat diartikan pemindahan suatu lokasi permukiman kelokasi permukiman yang baru	Relokasi dilakukan terhadap permukiman dimana lokasi permukiman tersebut tidak diperuntukkan bagi perumahan atau lokasi permukiman yang rawan terhadap bencana atau bahkan yang terkena bencana dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di permukiman kumu atau status lahannya tidak legal (illegal)	Lokasi Permukiman tidak sesuai dengan peruntukannya

No	Lokasi Penerapan Konsep Manajemen Lahan	Status Kepemilikan lahan	Tingkat Kekumuhan	Konsep Manajemen	Pengertian Manajemen Lahan	Ketentuan Konsep Manajemen Lahan	Syarat Konsep Manajemen Lahan
7	RT 07	13 % Tidak Hak Milik Bersertifikat	Kumuh Ringan	Peningkatan Status Kepemilikan Lahan	Secara psikologis masyarakat akan berusaha meningkatkan hak atas tanahnya menjadi berstatus hak milik yang akan banyak memberikan kewajiban bagi pemiliknya dan memberi kemantapan akan status tanahnya karena tanah yang berstatus Hak Milik merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya (Ramli Zein S.H,1995:15)	Tujuan peningatan hak atas tanah tersebut adalah untuk memperoleh keyakinan dan kepastian hukum yang pada akhirnya terwujud suatu ketenangan dan kemungkinan kecil terjadi suatu sengketa. Hak milik merupakan hak atas tanah yang mempunyai status tinggi dibandingkan hak-hak atas tanah yang lain, karena mempunyai sifat terkuat dan terpenuh. Dengan meningkatkan status hak atas tanah dari hak-hak yang lain, misalnya dari hak guna bangunan menjadi hak milik, maka seseorang tidak perlu lagi memperpanjang haknya. Peningkatan status hak atas tanah ini memberikan kedudukan hukum yang lebih tinggi sehingga timbulnya sengketa dikemudian hari sangat kecil.	lokasi permukiman termasuk kedalam daerah rawan bencana
8	RT 08	13,6 % Tidak Hak Milik Bersertifikat	Kumuh Ringan			lokasi permukiman termasuk permukiman kumuh	
9	RT 09	22,3 % Tidak Hak Milik Bersertifikat	Kumuh Ringan			status lahan tidak legal (ilegal)	
10	RT 10	24 % Tidak Hak Milik Bersertifikat	Kumuh Ringan				

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Dari tabel diatas 5.32 menjelaskan bahwa dilokasi penelitian dimana mencakup lima Rt yaitu Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10, bahwa konsep manajemen lahan yang digunakan ada tiga yaitu, land readjustmen, land pooling dan relokasi (relocation), karena setiap Rt memiliki karakteristik lahan yang berbeda-beda, maka untuk konsep penanganannya manajemen juga berbeda. Untuk Rt 04, Rt 07 dan Rt 08 menggunakan konsep land readjustmen dikarenakan lahan yang berada di tiga Rt tersebut perlu ditata sesuai dengan konsep land readjustmen yaitu menata kembali batas-batas peruntukan lahan serta menyesuaikan batas-batas kepemilikan lahan tanah, maka dapat diperoleh lahan yang dapat dikontribusikan untuk ruang public atau prasarana kepentingan umum lainnya. Untuk tingkat kepemilikan lahan di tiga Rt tersebut lebih dari 50% hak milik bersertifikat, serta tingkat kekumuhannya termasuk kedalam kategori kumuh sedang dan minimnya sarana dan prasarana penunjang suatu permukiman, dari menggunakan konsep manajemen lahan readjustmen di tiga Rt tersebut dapat meningkatkan nilai lahan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang permukiman. Konsekuensi dari pelaksanaan konsep land readjustment hasil akhir yang didapatkan oleh pemilik lahan berupa ukuran/luas lahan yang lebih kecil dibandingkan sebelum proses land readjustment, namun dengan nilai lahan yang lebih besar. Hal tersebut terjadi karena adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada area tersebut. Bahkan dari pelaksanaan Land readjustment dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik/lahan terkait legitimasi hak kepemilikan lahan.

Untuk Rt 09 dan Rt 10 konsep manajemen lahan yang digunakan untuk kedua Rt tersebut yaitu menggunakan konsep manajemen lahan land pooling dimana metode ini merupakan kepemilikan tanah yang tersebar dan tidak beraturan dikumpulkan untuk pembangunan untuk infrastruktur lingkungan perkotaan. Pada bentuk land pooling prinsipnya adalah penggabungan lahan sebagai bentuk penyediaan lahan untuk infrastruktur lingkungan perkotaan. Untuk status kepemilikan lahan di Rt 09 dan Rt 10 lebih dari 60% yaitu mempunyai status hak milik bersertifikat, serta untuk prasarana dan sarana penunjang permukiman kurang memadai dan tingkat kekumuhan Rt 09 dan Rt 10 termasuk kedalam kategori kumuh ringan. konsekuensi dari pelaksanaan pooling yaitu pemilik lahan umumnya memberikan sekitar 30% dari jumlah keseluruhan kepemilikan lahannya kepada penyediaanruang untuk jalan, taman dan ruang publik lainnya serta lahan cadangan

Sedangkan untuk status tanah yang tidak legal (illegal) yang berada di Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 dan Rt 10 konsep manajemen lahan yang cocok digunakan yaitu menggunakan konsep relokasi dan peningkatan status kepemilikan lahan, dimana lokasi permukiman yang rawan terhadap dan permukiman kumuh atau status lahannya tidak legal (illegal), dimana dari kelima RT yang menjadi lokasi penelitian di setiap Rt ada sekitar kurang dari

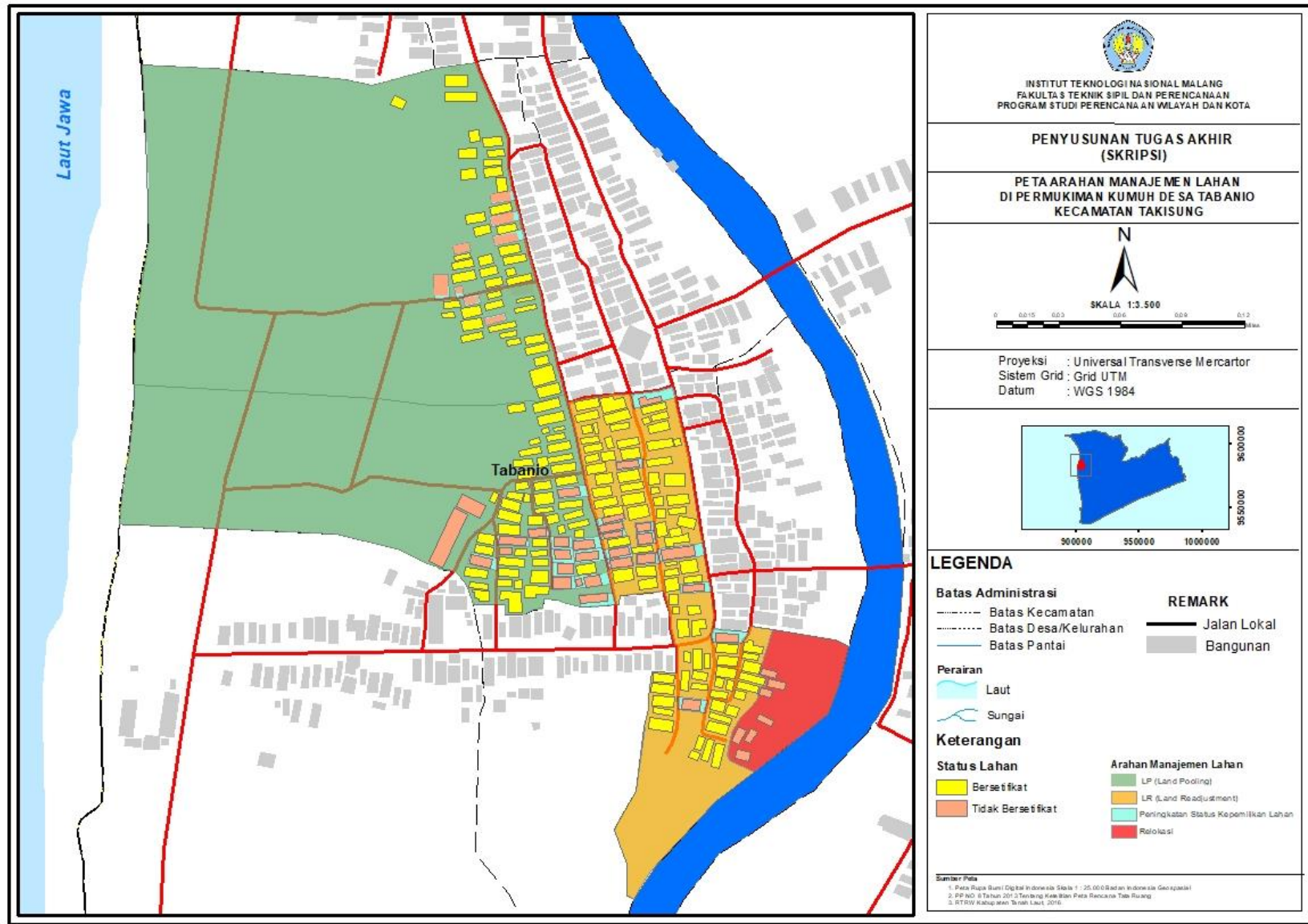
30% termasuk kedalam status tanah ilegal. Rt 04 permukiman yang berada di sempadan sungai menggunakan konsep relokasi untuk menata permukiman sedangkan untuk Rt 07, Rt 08, Rt 09 dan Rt 10 menggunakan konsep peningkatan status kepemilikan lahan.

Tabel 5.35 Arahannya Manajemen lahan permukiman kumuh Desa Tabanio

Rt	Karakteristik Permukiman	Tingkat Kekumuhan	Status Lahan	Jumlah Rumah	Manajemen Lahan
Rt 04	Kumuh Kualitas Bangunan	Kumuh Sedang	Bersertifikat Hak Milik	31	Land Readjustment
	Kumuh Pelayanan Air bersih		Tidak Bersertifikat Hak Milik	7	Relokasi
	Kumuh Sarpras Persampahan				
Rt 07	Kumuh Kualitas Bangunan	Kumuh Ringan	Bersertifikat Hak Milik	27	Land Readjustment
	Kumuh Drainase Lingkungan		Tidak Bersertifikat Hak Milik	4	Peningkatan Status Kepemilikan Lahan
	Kumuh Pelayanan Air bersih				
	Kumuh Sarpras Persampahan				
Rt 08	Kumuh Kualitas Bangunan	Kumuh Ringan	Bersertifikat Hak Milik	32	Land Readjustment
	Kumuh Drainase Lingkungan		Tidak Bersertifikat Hak Milik	5	Peningkatan Status Kepemilikan Lahan
	Kumuh Pelayanan Air bersih				
	Kumuh Sarpras Persampahan				
Rt 09	Kumuh Kualitas Bangunan	Kumuh Ringan	Bersertifikat Hak Milik	49	Land Pooling
	Kumuh Drainase Lingkungan		Tidak Bersertifikat Hak Milik	14	Peningkatan Status Kepemilikan Lahan
	Kumuh Pelayanan Air bersih				
	Kumuh Sarpras Persampahan				
Rt 10	Kumuh Kualitas Bangunan	Kumuh Ringan	Bersertifikat Hak Milik	38	Land Pooling
	Kumuh Drainase Lingkungan		Tidak Bersertifikat Hak Milik	12	Peningkatan Status Kepemilikan Lahan
	Kumuh Pelayanan Air bersih				
	Kumuh Sarpras Persampahan				
	Kumuh Sarana Proteksi Kebakaran				
	Kumuh Prasarana Proteksi Kebakaran				

Sumber : Hasil Analisa 2022

Dari tabel 5.35 diatas menjelaskan tentang arahan manajemen permukiman kumuh Desa Tabanio, dimana dari setiap Rt yang berada di wilayah penelitian, dilihat dari karakteristik perermukiman kumuh setelah itu mendapatkan tingkat kekumuhan dan status lahan dan arahan manajemen lahan permukiman yang digunakan di permukiman kumuh.



Peta 5. 14 Arahan Manajemen Lahan Permukiman Kumuh Desa Tabanio

5.3.2.1 Arahan Manajemen Lahan Permukiman Kumuh dengan konsep Land Readjustment

Arahan manajemen lahan permukiman kumuh dirumuskan berdasarkan hasil kajian Pustaka mengenai konsep land readjustment, karakteristik permukiman kumuh nelayan dan melihat dari tingkat kekumuhan yang berada di wilayah penelitian. Dalam merumuskan arahan manajemen lahan permukiman kumuh dengan konsep land readjustment di permukiman kumuh Desa Tabanio, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Perumusan arahan difokuskan pada Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 dan Rt 10.

Karakteristik permukiman kumuh di wilayah penelitian lebih tepatnya pada Rt 04, Rt 07 dan Rt 08, didominasi oleh bangunan non permanen dengan konstruksi bangunan beratap seng, ber dinding papan dan berlantai papan kayu. Mayoritas penduduk di Rt 04, Rt 07 dan Rt 08 menempati lahan dengan status kepemilikan hak milik, namun ada juga yang rumah yang belum bersertifikat, serta wilayah ini terbagi menjadi 2 (dua) tingkat kekumuhan, dimana Rt 04 termasuk kedalam tingkat kekumuhan sedang, sedangkan Rt 07 dan Rt 08 termasuk kedalam tingkat kekumuhan ringan. Dari karakteristik diatas, dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh Desa Tabanio lebih tepatnya pada Rt 04, Rt 07 dan Rt 08 menggunakan konsep land readjustment. Hal-hal yang diperhatikan dalam merumuskan arahan konsep land readjustment yaitu kejelasan status lahan dan batas-batas persil kepemilikan lahan, serta adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan pemerintah/investor mengenai pembagian presentase kontribusi lahan serta perhitungan perbedaan nilai lahan sebelum dan sesudah rekonstruksi yang nantinya akan disesuaikan melalui mekanisme perhitungan dari nilai lahan yang dikotribusikan, kenaikan nilai lahan yang masih dimiliki pemilik lahan serta biaya sertifikasi/legalitas, relokasi sementara dan rekonstruksi. Hal itu berkaitan dengan kompensasi yang menjunjung asas keadilan dalam penerapan Land Readjustment sendiri

Salah satu utama dalam perumusan arahan manajemen lahan dengan konsep land readjustment yaitu terjadinya kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak pemerintah/investor proyek mengenai pembagian presentasi kontribusi lahan, dimana untuk permukiman komposisi untuk fasilitas umum 40% dan untuk rumah 60%. Sementara untuk di wilayah penelitian ada penambahan fasilitas umum guna menunjang permukiman, seperti tempat penjemuran ikan, RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara), Pembangunan PSP baru, Pembangunan SPAM unit baru, pembangunan pengamanan kebakaran sederhana.

Tabel 5.36 Arahan Konsep Penanganan Permukiman kumuh Rt 04

RT	Komponen Permukiman Kumuh	Penilaian Kekumuhan	Manajemen Lahan	Konsep Penanganan
4	Kondisi Bangunan Gedung	Tinggi	Land Readjustment	Rehabilitasi Bangunan
	Kondisi Jalan Lingkungan	Rendah		
	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Tinggi		Pembangunan SPAM unit baru
	Kondisi Drainase Lingkungan	Rendah		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Rendah		
	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Tinggi		Pembangunan PSP baru
	Kondisi Proteksi Kebakaran	Sedang		

Sumber : Hasil Analisa,2022

Dari tabel 5.36 dijelaskan bahwa arahan konsep penanganan permukiman kumuh di Rt 04 yang mempunyai tujuh komponen permukiman yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dari ketujuh komponen tersebut ada tiga yang mendapatkan penilaian kekumuhan tinggi yaitu kondisi bangunan, kondisi penyediaan air bersih dan kondisi pengelolaan persampahan, sedangkan ada tiga yang mendapatkan penilaian kekumuhan rendah yaitu kondisi jalan lingkungan, drainase lingkungan dan pengelolaan air limbah, untuk proteksi kebakaran mendapatkan penilaian kekumuhan sedang serta untuk manajemen lahan yang digunakan yaitu konsep Land Readjustment dan untuk konsep penanganannya ada 3 (tiga) yaitu, rehabilitasi bangunan, penambahan SPAM unit baru dan pembangunan PSP baru pada wilayah Rt 04.

Tabel 5. 37 Arahan Konsep Penanganan Permukiman kumuh Rt 07

RT	Komponen Permukiman Kumuh	Penilaian Kekumuhan	Manajemen Lahan	Konsep Penanganan
7	Kondisi Bangunan Gedung	Rendah	Land Readjustment	Pembangunan SPAM unit baru
	Kondisi Jalan Lingkungan	Rendah		
	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Tinggi		Pembangunan unit sistem drainase baru
	Kondisi Drainase Lingkungan	Tinggi		Pembangunan PSP baru
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Rendah		
	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Tinggi		
	Kondisi Proteksi Kebakaran	Tinggi		Pembangunan pengamanan kebakaran sederhana

Sumber : Hasil Analisa,2022

Dari tabel 5.37 diatas ,menjelaskan arahan konsep penanganan permukiman kumuh pada Rt 07, dimana dari 7 (tujuh) komponen permukiman kumuh terdapat empat yang mendapatkan penilaian kekumuhan tinggi dan ada 3 yang mendapatkan penilaian kekumuhan rendah, serta untuk Rt 07 manajemen lahan menggunakan konsep Land Readjustment dan konsep penanganannya ada penambahan infrastruktur penunjang permukiman yaitu pembangunan SPAM unit baru, pembangunan unit sistem drainase baru, pembangunan PSP baru dan pembangunan pengamanan kebakaran sederhana.

Tabel 5. 38 Arahan Konsep Penanganan Permukiman kumuh Rt 08

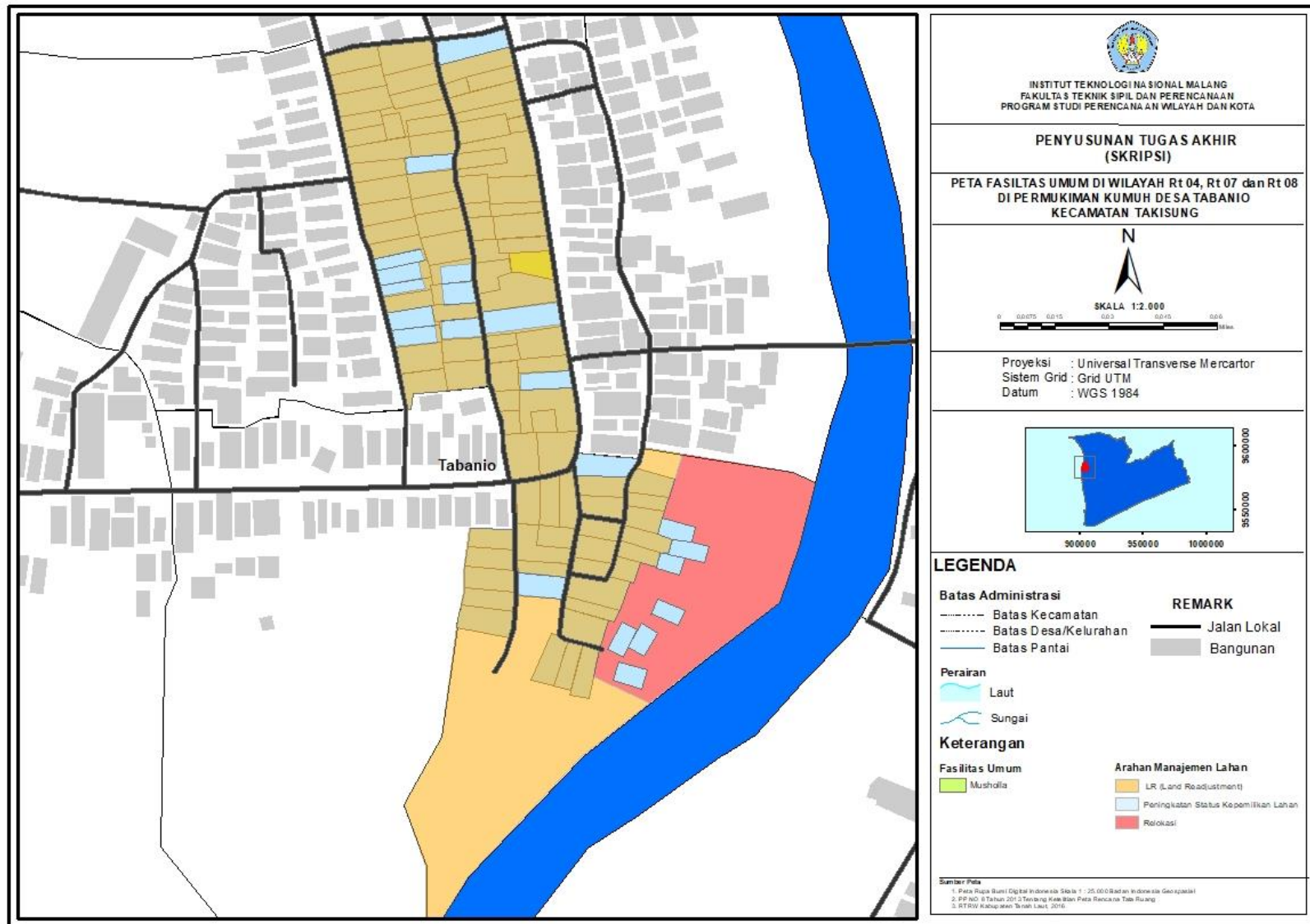
RT	Komponen Permukiman Kumuh	Penilaian Kekumuhan	Manajemen Lahan	Konsep Penanganan
8	Kondisi Bangunan Gedung	Rendah	Land Readjustment	Pembangunan SPAM unit baru

RT	Komponen Permukiman Kumuh	Penilaian Kekumuhan	Manajemen Lahan	Konsep Penanganan
	Kondisi Jalan Lingkungan	Rendah		Pembangunan unit sistem drainase baru
	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Tinggi		
	Kondisi Drainase Lingkungan	Tinggi		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Rendah		Pembangunan PSP baru
	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Tinggi		Pembangunan pengamanan kebakaran sederhana
	Kondisi Proteksi Kebakaran	Tinggi		

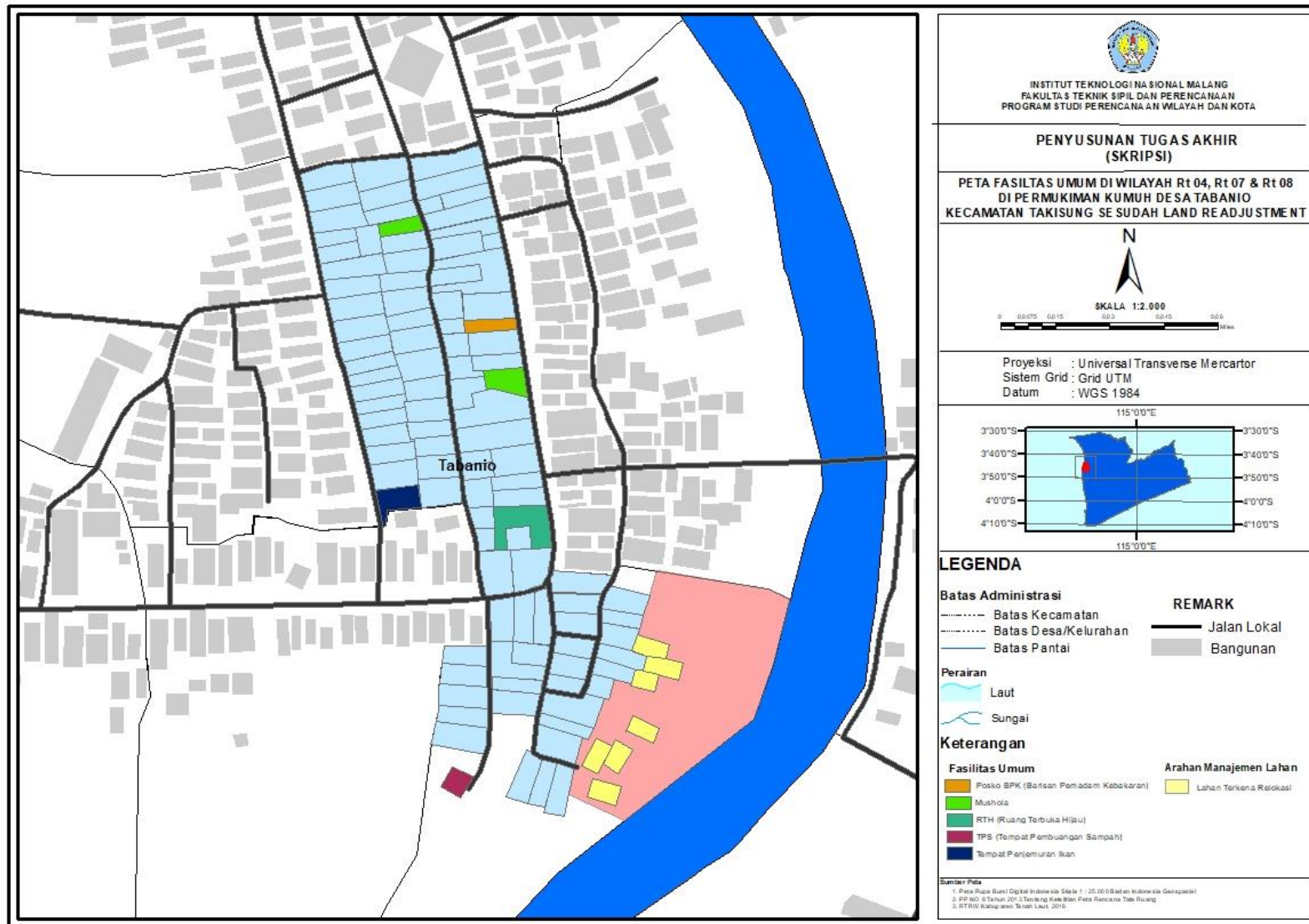
Sumber : Hasil Analisa, 2022

Dari tabel diatas 5.38 yang menjelaskan arahan konsep penanganan permukiman kumuh di Rt 08, dimana dari 7 (tujuh) komponen permukiman kumuh terdapat empat yang mendapatkan penilaian kekumuhan tinggi dan ada 3 yang mendapatkan penilaian kekumuhan rendah, serta untuk Rt 07 manajemen lahan menggunakan konsep Land Readjustment dan konsep penanganannya ada penambahan infrastruktur penunjang permukiman yaitu pembangunan SPAM unit baru, pembangunan unit sistem drainase baru, pembangunan PSP baru dan pembangunan pengamanan kebakaran sederhana.

Dari pembahasan diatas dimana bahwa untuk penanganan permukiman kumuh di Desa Tabanio pada Rt 04 , Rt 07 dan Rt 08 dilihat dari karakteristik permukiman kumuhnya dan dari tingkat kekumuhan yaitu tingkat kekumuhan sedang dan tingkat kekumuhan ringan, konsep manajemen lahan yang cocok menggunakan konsep land readjustment dari konsep land readjustment tersebut muncul beberapa perubahan yaitu ada wilayah yang harus direlokasi pada Rt 04 dimana Sebagian wilayah Rt 04 tersebut berada pada sempadan sungai maka konsep yang dilakukan yaitu rehabilitas bangunan, pembangunan unit sistem drianse, pembangunan SPAM unit baru, pembangunan PSP baru dan pembangunan pengamanan kebakaran sederhana.



Peta 5. 15 Fasilitas Umum Pada Rt 04, Rt 07 dan Rt 08 Sebelum Land Readjustment



Peta 5. 16 Fasilitas Umum Rt 04, Rt 07 dan Rt 08 Sesudah Land Readjustment

5.3.2.2 Arahan Manajemen Lahan Permukiman Kumuh dengan Konsep Land Pooling

Arahan manajemen lahan permukiman kumuh dengan konsep land pooling dirumuskan berdasarkan hasil dari Pustaka mengenai konsep land pooling, karakteristik permukiman kumuh yang berada di wilayah penelitian dan tingkat kekumuhan. Dalam merumuskan arahan manajemen lahan menggunakan konsep land pooling di permukiman kumuh Desa Tabanio, metode yang digunakan adalah analisa deskriptif.

Karakteristik permukiman kumuh di Desa Tabanio lebih fokusnya di Rt 09 dan Rt 10, didominasi oleh bangunan non permanen, dimana material dindingnya terbuat dari papan kayu, material atap dari seng dan untuk lantainya terbuat dari papan kayu, sementara mayoritas di Rt 09 dan Rt 10 menempati lahan yang mempunyai hak milik bersertifikat hanya beberapa saja yang tidak mempunyai sertifikat untuk lahan yang ditempati, untuk tingkat kekumuhan pada Rt 09 dan Rt 10 termasuk kedalam kumuh ringan, pada Rt 09 mempunyai karakteristik kumuh kualitas bangunan, kumuh drainase lingkungan, kumuh pelayanan air bersih, kumuh sarpras persampahan, kumuh proteksi kebakaran, untuk Rt 10 karakteristik untuk permukiman kumuhnya hamper sama dengan Rt 09, dimana Rt 10 mempunyai karakteristik kumuh kualitas bangunan, kumuh drainase lingkungan, kumuh pelayanan air bersih, kumuh sarpras persampahan dan kumuh proteksi kebakaran, serta untuk fasilitas umum penunjang permukiman pada Rt 09 dan Rt 10 sangat kurang, maka dari itu dengan manajemen lahan menggunakan konsep land pooling dapat meningkatkan fasilitas umum/infrastruktur untuk menunjang permukiman yang berada di Desa Tabanio lebih tepatnya pada Rt 09 dan Rt 10.

Hal-hal yang diperhatikan dalam merumuskan arahan manajemen lahan menggunakan konsep land pooling yaitu pemilik lahan bersedia lahannya memberikan 30% dari jumlah keseluruhan kepemilikan lahannya kepada penyediaan ruang untuk jalan, taman dan ruang publik atau fasilitas umum lainnya serta lahan cadangan. Dari jumlah tersebut, pada akhirnya pemilik lahan akan diberikan kembali 12-30% bagian tanah yang lebih kecil dengan bentuk geometris baru yang beraturan. Dimana setelah melakukan land pooling ada penambahan untuk fasilitas umum yaitu RTH (Ruang Terbuka Hijau), TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan Tempat Penjemuran ikan, Pembangunan unit sistem drainase baru, pembangunan SPAM unit baru, pembangunan PSP baru, pembangunan pengamanan kebakarn sederhana dan pembangunan hydran air.

Tabel 5. 39 Arahan Konsep Penanganan Permukiman kumuh Rt 09

RT	Komponen Permukiman Kumuh	Penilaian Kekumuhan	Manajemen Lahan	Konsep Penanganan
9	Kondisi Bangunan Gedung	Rendah	Land Pooling	Pembangunan SPAM unit baru
	Kondisi Jalan Lingkungan	Rendah		
	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Tinggi		Pembangunan unit sistem drainase baru
	Kondisi Drainase Lingkungan	Tinggi		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Rendah		Pembangunan PSP baru
	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Tinggi		
	Kondisi Proteksi Kebakaran	Tinggi		Pembangunan hydran air

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Dari tabel 5.39 diatas dijelaskan bahwa arahan konsep penanganan permukiman kumuh pada Rt 09 dimana dari tujuh komponen permukiman yang digunakan, ada tiga komponen yang mendapatkan penilaian kekumuhan rendah dan ada empat komponen permukiman kumuh yang mendapatkan penilaian kekumuhan tinggi, yaitu kondisi penyediaan air bersih, drainase lingkungan, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran, untuk manajemen lahan yang cocok digunakan untuk Rt 09 yaitu Land Pooling, serta untuk konsep penanganannya ada 4 (empat) yaitu pembangunan SPAM unit baru, pembangunan sistem drainase baru, pembangunan PSP baru dan pembangunan hydran air di wilayah penelitian.

Tabel 5. 40 Arahan Konsep Penanganan Permukiman kumuh Rt 10

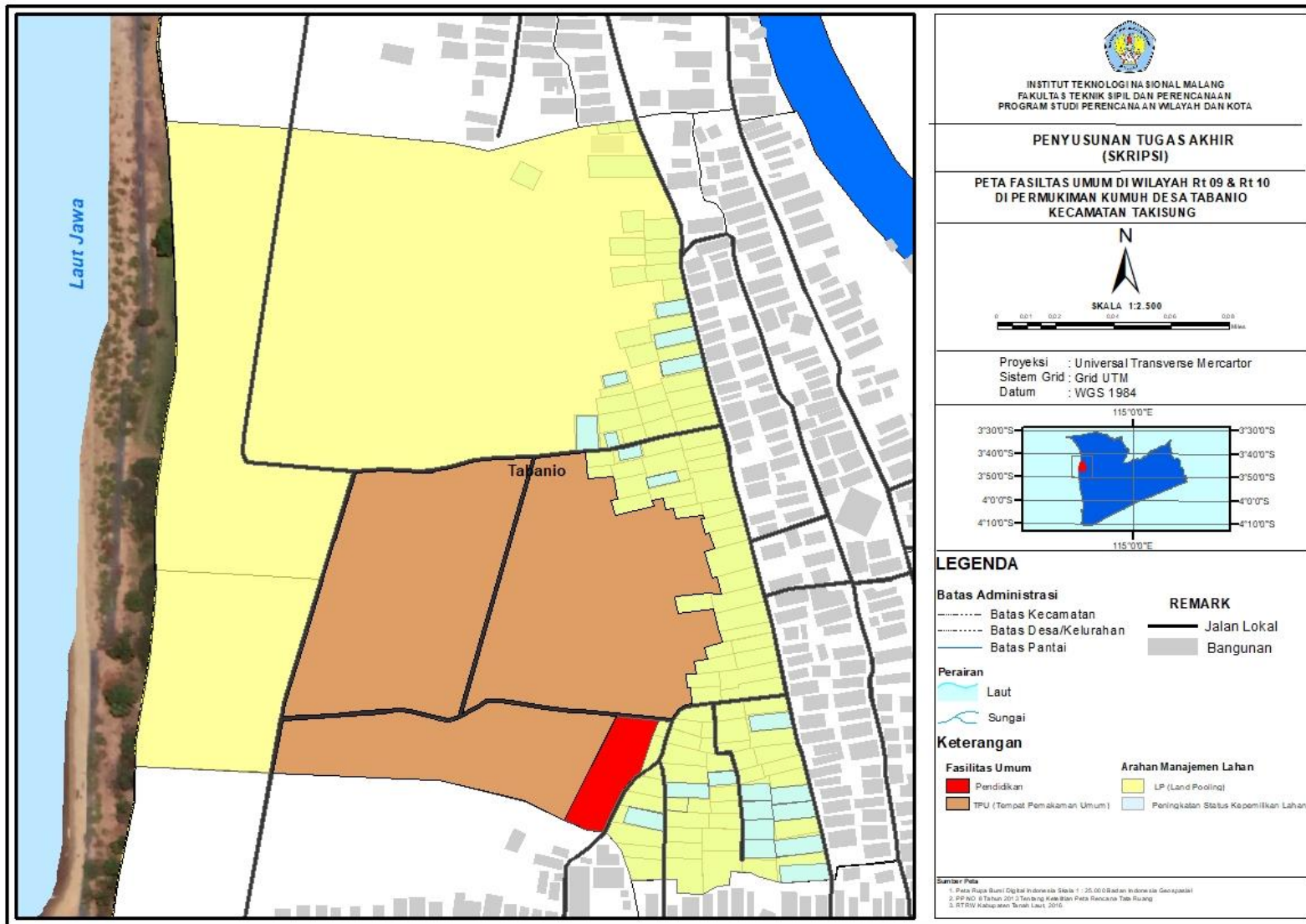
RT	Komponen Permukiman Kumuh	Penilaian Kekumuhan	Manajemen Lahan	Konsep Penanganan
10	Kondisi Bangunan Gedung	Rendah	Land Pooling	Pembangunan SPAM unit baru
	Kondisi Jalan Lingkungan	Rendah		
	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Tinggi		

RT	Komponen Permukiman Kumuh	Penilaian Kekumuhan	Manajemen Lahan	Konsep Penanganan
	Kondisi Drainase Lingkungan	Tinggi		Pembangunan unit sistem drainase baru
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Rendah		
	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Rendah		Pembangunan pengamanan kebakaran sederhana
	Kondisi Proteksi Kebakaran	Tinggi		

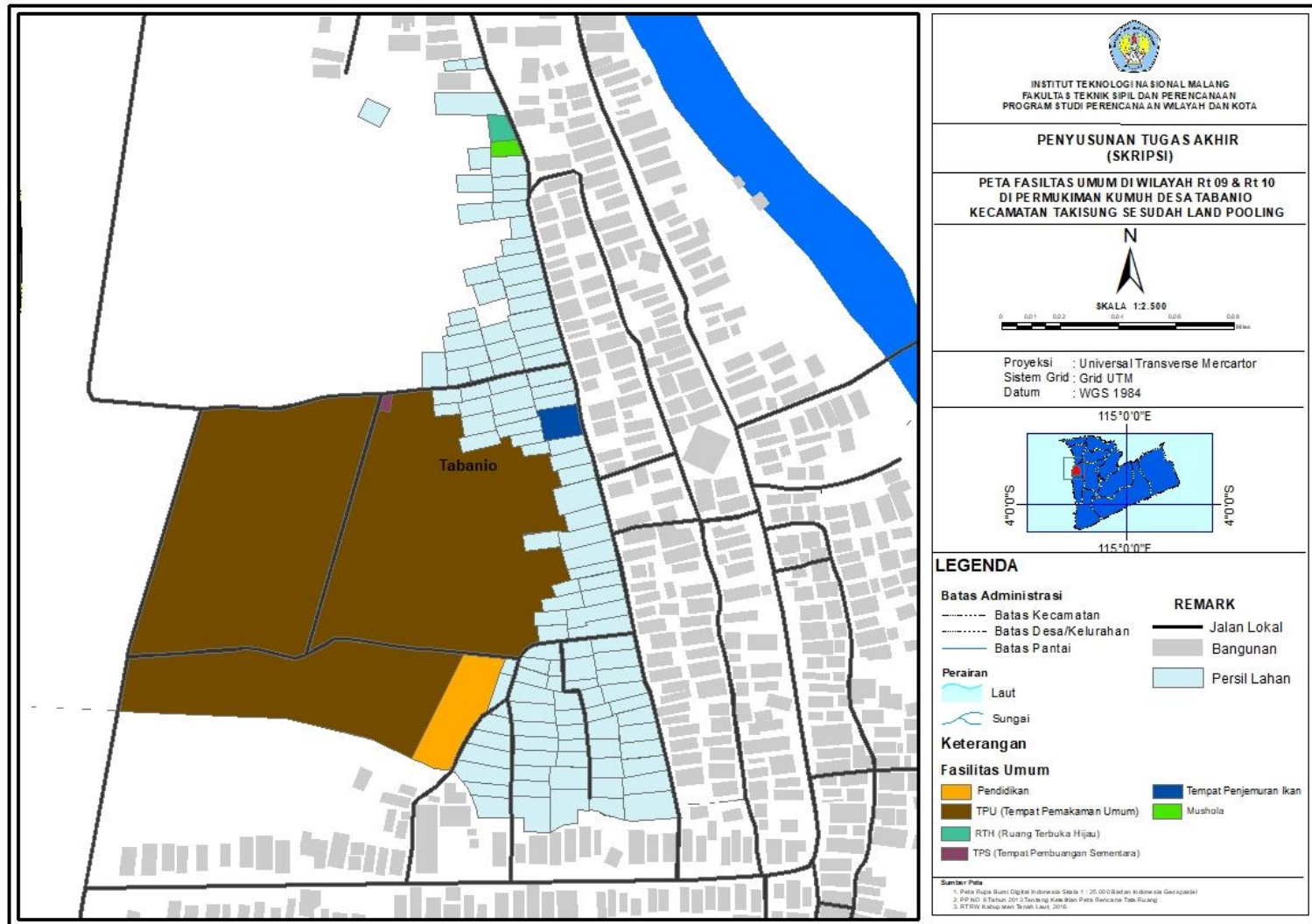
Sumber : Hasil Analisa, 2022

Dari tabel 5.40 diatas dijelaskan bahwa arahan konsep penanganan permukiman kumuh pada Rt 10 dimana dari tujuh komponen permukiman yang digunakan, ada empat komponen yang mendapatkan penilaian kekumuhan rendah dan ada tinggi komponen permukiman kumuh yang mendapatkan penilaian kekumuhan tinggi, yaitu kondisi penyediaan air bersih, drainase lingkungan dan kondisi proteksi kebakaran, untuk manajemen lahan yang cocok digunakan untuk Rt 10 yaitu Land Pooling, serta untuk konsep penanganannya ada 3 (empat) yaitu pembangunan SPAM unit baru, pembangunan sistem drainase baru, pembangunan PSP baru dan pembangunan pengaman kebakaran sederhana.

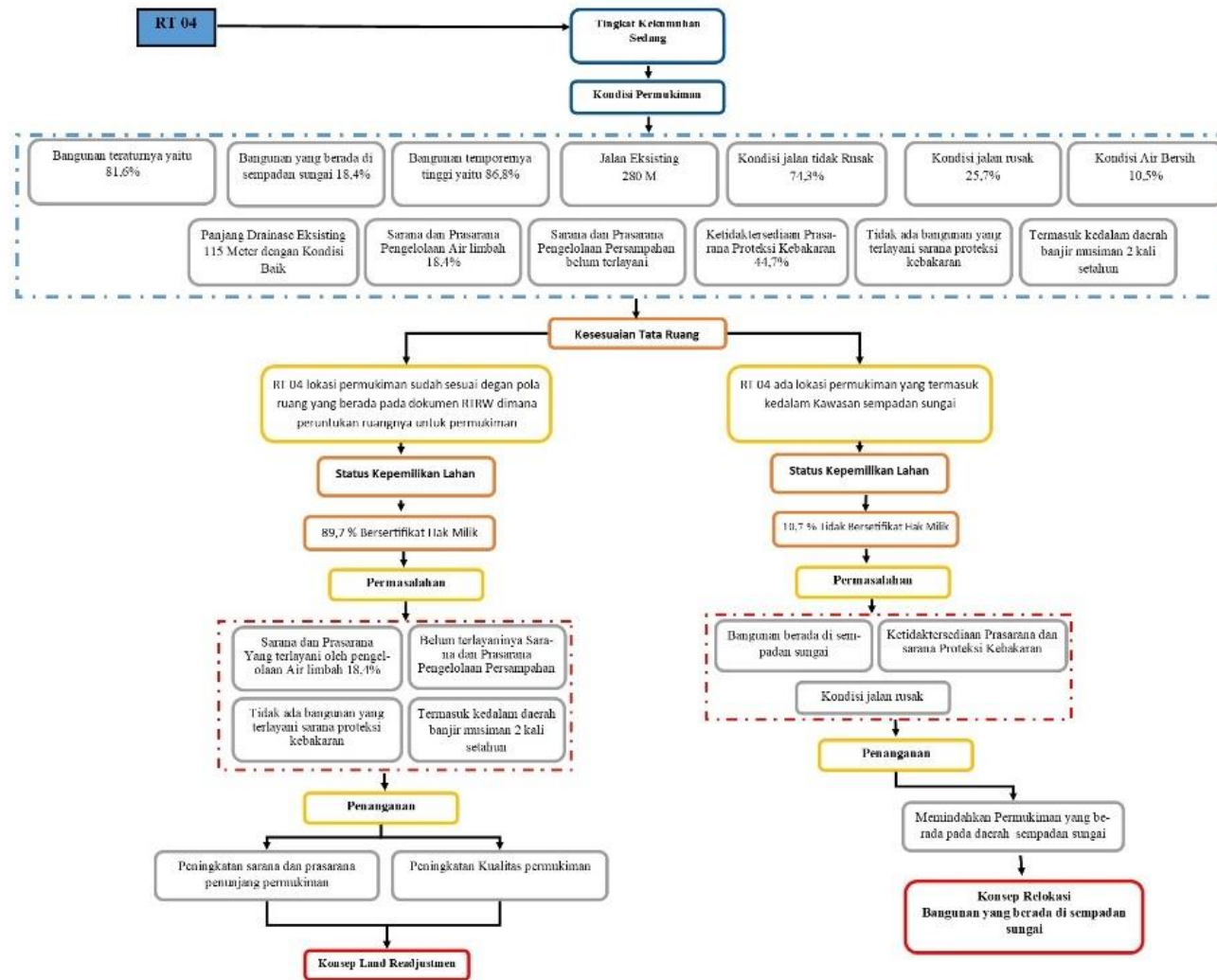
Dari tabel 5.39 dan 5.40 diatas dijelaskan arahan konsep penanganan permukiman kumuh pada Rt 09 dan Rt 10 dimana dilihat dari komponen permukiman kumuh, penilaian kekumuhan dan manajemen lahan yang digunakan. Rt 09 dan Rt 10, manajemen lahan yang digunakan yaitu Land Pooling, serta konsep penanganannya ada tiga yaitu dengan cara pembangunan SPAM unit baru, pembangunan unit sistem drainase baru, dan pembangunan pengaman kebakaran sederhana, untuk meningkatkan kualitas permukiman pada Rt 09 dan Rt 10 dengan cara menambah infrastruktur penunjang permukiman.



Peta 5. 17 Fasilitas Umum Pada Rt 09 dan Rt 10 Sebelum Land Pooling

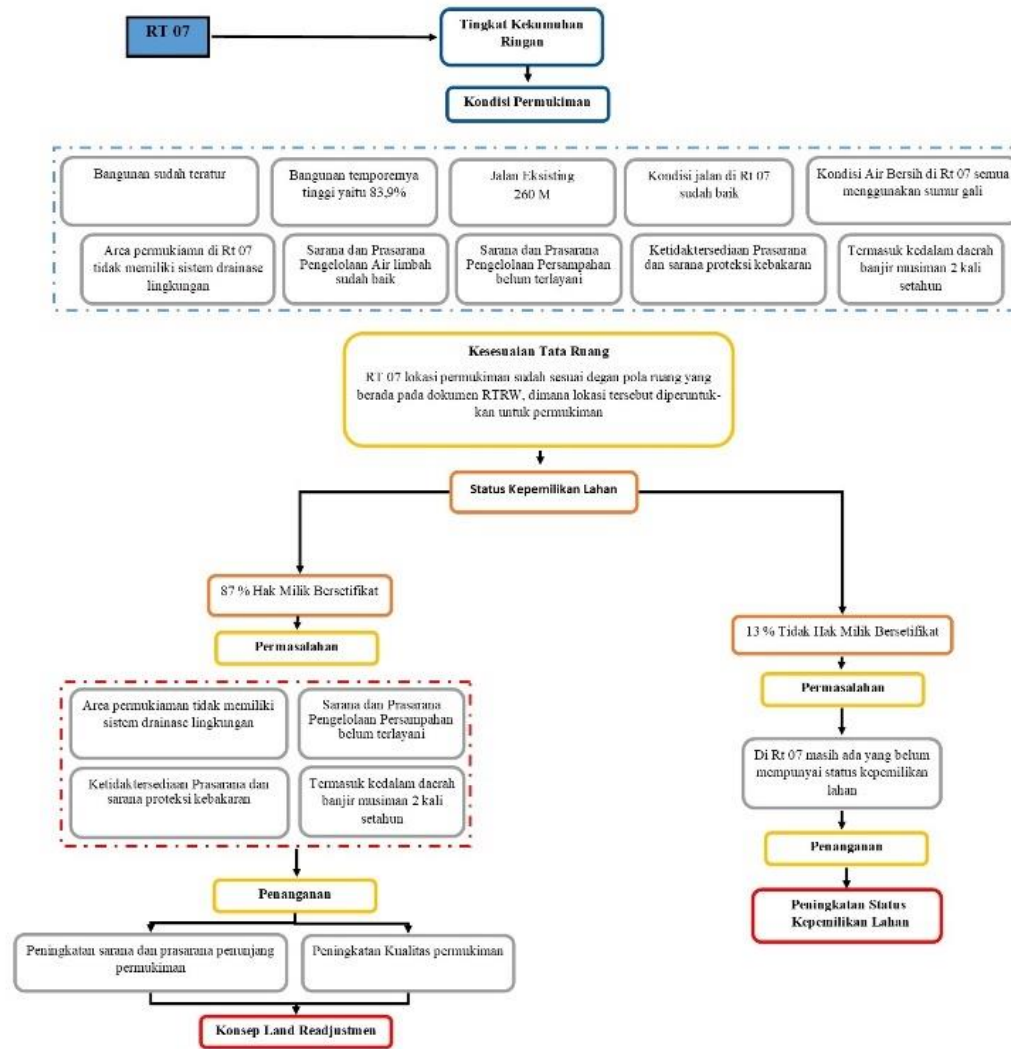


Peta 5. 18 Fasilitas Umum Pada Rt 09 dan Rt 10 Sesudah Land Pooling



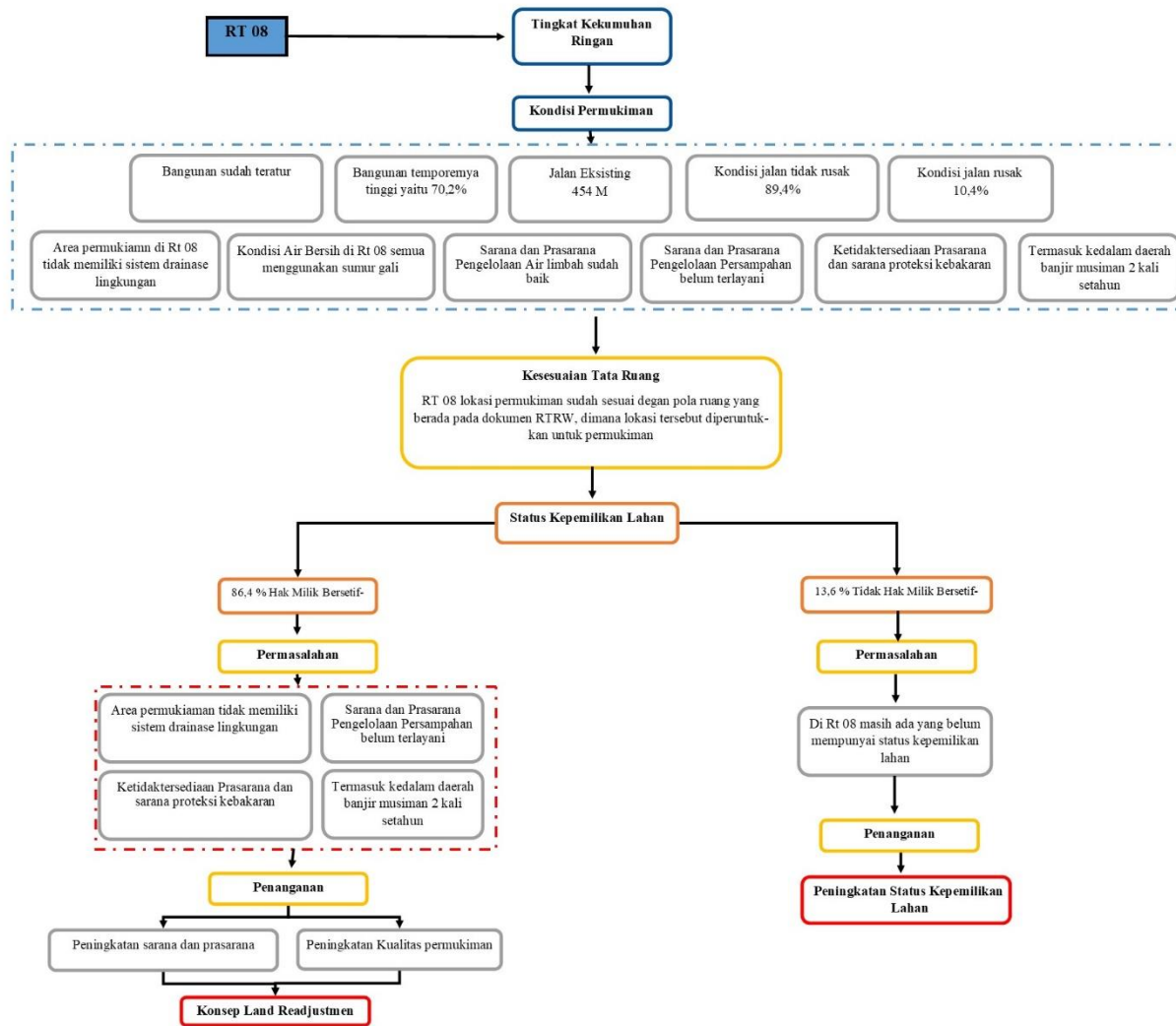
Bagan 5.1 Alur Konsep Perumusan Manajemen Lahan Permukiman Kumuh di Rt 04

Dapat dilihat pada bagan 5.1 dimana bagan tersebut menjelaskan alur konsep perumusan manajemen lahan permukiman kumuh yang berada di lokasi Rt 04 yang terdapat di Desa Tabanio. Dimana Rt 04 merupakan termasuk kedalam tingkat kekumuhan sedang dan mempunyai kondisi permukiman yang mempunyai bangunan temporeranya cukup tinggi mencapai 86,8% dan ada sebagian yang termasuk kedalam daerah sempadan sungai, serta untuk sarpras pengelolaan persampahnya tidak ada yang memenuhi standart teknis, untuk Rt 04 tidak memiliki sarana proteksi kebakaran dan termasuk kedalam daerah rawan bencana banjir musiman yang terjadi 2 kali dalam setahun. Untuk kesesuaian tata ruang Rt 04 mempunyai lokasi permukiman sudah sesuai dengan polar uang yang berada pada dokumen RTRW dimana peruntukan ruangnya untuk permukiman, tetapi ada Sebagian permukiman di Rt 04 termasuk kedalam Kawasan sempadan sungai. Status kepemilikan lahan yang ada di Rt 04 terbagi menjadi dua yaitu bersertifikat hak milik dan tidak bersertifikat hak milik dimana 89,7% bersertifikat hak milik dan 10,7% tidak bersertifikat hak milik. Penangan untuk manajemen lahan di Rt 04 ada tiga yaitu konsep land readjustmen, konsep peningkatan status kepemilikan tanah dan konsep relokasi bangunan yang berada di sempadan sungai, dimana untuk konsep land readjustmen di gunakan untuk lahan yang bersertifikat gunanya untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang permukiman serta peningkatan kualitas permukiman, untuk lahan yang tidak memiliki sertifikat menggunakan konsep relokasi digunakan untuk memindahkan permukiman yang berada pada daerah sempadan sungai



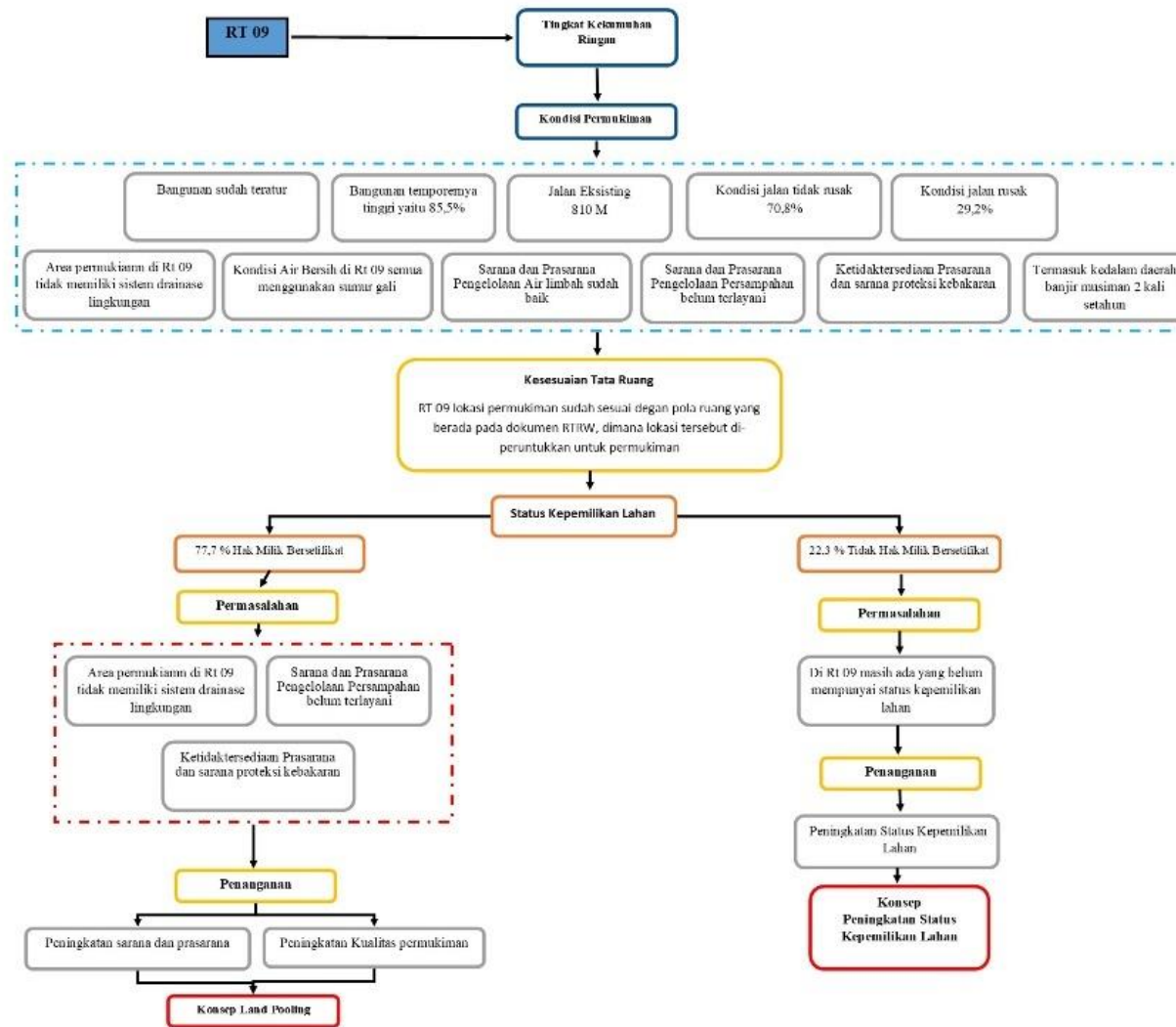
Bagan 5.2 Alur Konsep Perumusan Manajemen Lahan Permukiman Kumuh di Rt 07

Dapat dilihat pada bagan 5.2 dimana bagan tersebut menjelaskan alur konsep perumusan manajemen lahan permukiman kumuh yang berada di lokasi Rt 07 yang terdapat di Desa Tabanio. Pada Rt 07 termasuk kedalam tingkat kekumuhan ringan dengan kondisi permukiman dimana bangunan temporernya tinggi yaitu mencapai 83,8%, area tidak mempunyai drainase lingkungan, tidak terlayani pelayanan system air bersih, area tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang memenuhi persyaratan teknis, area tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan area Rt 07 termasuk kedalam daerah banjir musiman yang terjadi 2 kali dalam setahun. Untuk kesesuaian tata ruang Rt 07 mempunyai lokasi permukiman sudah sesuai dengan polar uang yang berada pada dokumen RTRW, dimana lokasi tersebut diperuntukkan untuk lokasi permukiman, sedangkan untuk status kepemilikan lahan 87% lahan yang berada di daerah Rt 07 merupakan hak milik bersertifikat sedangkan 13% tidak hak milik bersertifikat. Untuk konsep penanganannya untuk di Rt 07 terdapat dua yaitu konsep land readjustmen dan konsep peningkatan sistem kepemilikan lahan dimana konsep land readjustmen digunakan untuk lahan yang mempunyai hak milik bersertifikat dan kegunaan konsep land readjustmen yaitu peningkatan sarana dan prasarana penunjang permukiman dan peningkatan kualitas permukiman. Untuk konsep peningkatan kepemilikan lahan digunakan untuk daerah yang tidak memiliki hak milik bersertifikat.



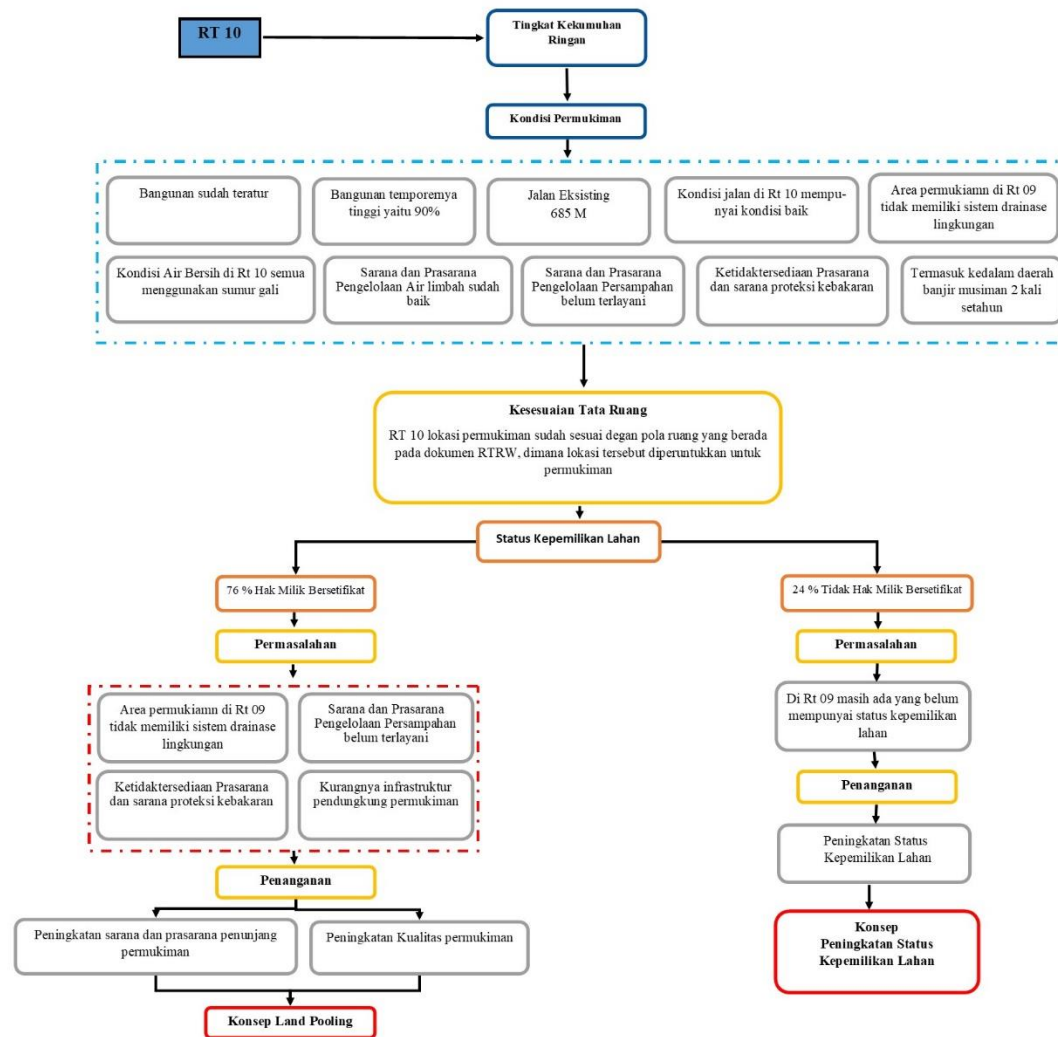
Bagan 5.3 Alur Konsep Perumusan Manajemen Lahan Permukiman Kumuh di Rt 08

Dapat dilihat pada bagan 5.3 dimana bagan tersebut menjelaskan alur konsep perumusan manajemen lahan permukiman kumuh yang berada di lokasi Rt 08 yang terdapat di Desa Tabanio. Pada Rt 08 termasuk kedalam tingkat kekumuhan ringan dengan kondisi permukiman dimana bangunan temporeranya tinggi yaitu mencapai 70,2%, area tidak mempunyai drainase lingkungan, tidak terlayani pelayanan system air bersih, area tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang memenuhi persyaratan teknis, area tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan area Rt 08 termasuk kedalam daerah banjir musiman yang terjadi 2 kali dalam setahun. Untuk kesesuaian tata ruang Rt 08 mempunyai lokasi permukiman sudah sesuai dengan polar uang yang berada pada dokumen RTRW, dimana lokasi tersebut diperuntukkan untuk lokasi permukiman, sedangkan untuk status kepemilikan lahan 86,4% lahan yang berada di daerah Rt 08 merupakan hak milik bersertifikat sedangkan 13,6% tidak hak milik bersertifikat. Untuk konsep penanganannya untuk di Rt 08 terdapat dua yaitu konsep land readjustmen dan konsep peningkatan system kepemilikan lahan dimana konsep land readjustmen digunakan untuk lahan yang mempunyai hak milik bersertifikat dan kegunaan konsep land readjustmen yaitu peningkatan sarana dan prasarana penunjang permukiman dan peningkatan kualitas permukiman. Untuk konsep peningkatan kepemilikan lahan digunakan untuk daerah yang tidak memiliki hak milik bersertifikat.



Bagan 5.4 Alur Konsep Perumusan Manajemen Lahan Permukiman Kumuh di Rt 09

Dapat dilihat pada bagan 5.4 dimana bagan tersebut menjelaskan alur konsep perumusan manajemen lahan permukiman kumuh yang berada di lokasi Rt 09 yang terdapat di Desa Tabanio. Pada Rt 09 termasuk kedalam tingkat kekumuhan ringan dengan kondisi permukiman dimana bangunan temporernya tinggi yaitu mencapai 85,4%, area tidak mempunyai drainase lingkungan, tidak terlayani pelayanan system air bersih, area tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang memenuhi persyaratan teknis, area tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan area Rt 09 termasuk kedalam daerah banjir musiman yang terjadi 2 kali dalam setahun. Untuk kesesuaian tata ruang Rt 09 mempunyai lokasi permukiman sudah sesuai dengan polar uang yang berada pada dokumen RTRW, dimana lokasi tersebut diperuntukkan untuk lokasi permukiman, sedangkan untuk status kepemilikan lahan 77,7% lahan yang berada di daerah Rt 09 merupakan hak milik bersertifikat sedangkan 22,3% tidak hak milik bersertifikat. Untuk konsep penanganannya untuk di Rt 09 terdapat dua yaitu konsep land pooling dan konsep peningkatan status kepemilikan lahan dan konsep relokasi untuk bangunan yang tidak memiliki kejelasan status lahan, dimana konsep land pooling digunakan untuk lahan yang mempunyai hak milik bersertifikat dan kegunaan konsep land pooling menggabungkan bidang tanah yang kecil/sempit milik individu untuk dialokasikan sebagai penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas permukiman. Untuk konsep peningkatan kepemilikan lahan digunakan untuk daerah yang tidak memiliki hak milik bersertifikat agar masyarakat yang bermukim di daerah tersebut mempunyai kejelasan tentang hak milik lahan yang mereka huni.



Bagan 5.5 Alur Konsep Perumusan Manajemen Lahan Permukiman Kumuh di Rt 10

Dapat dilihat pada bagan 5.5 dimana bagan tersebut menjelaskan alur konsep perumusan manajemen lahan permukiman kumuh yang berada di lokasi Rt 10 yang terdapat di Desa Tabanio. Pada Rt 10 termasuk kedalam tingkat kekumuhan ringan dengan kondisi permukiman dimana bangunan temporernya tinggi yaitu mencapai 90%, area tidak mempunyai drainase lingkungan, tidak terlayani pelayanan system air bersih, area tidak memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang memenuhi persyaratan teknis, area tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan area Rt 10 termasuk kedalam daerah banjir musiman yang terjadi 2 kali dalam setahun. Untuk kesesuaian tata ruang Rt 10 mempunyai lokasi permukiman sudah sesuai dengan polar uang yang berada pada dokumen RTRW, dimana lokasi tersebut diperuntukkan untuk lokasi permukiman, sedangkan untuk status kepemilikan lahan 76% lahan yang berada di daerah Rt 10 merupakan hak milik bersertifikat sedangkan 24% tidak hak milik bersertifikat. Untuk konsep penanganannya untuk di Rt 10 terdapat dua yaitu konsep land pooling, konsep peningkatan status kepemilikan lahan, dimana konsep land pooling digunakan untuk lahan yang mempunyai hak milik bersertifikat dan kegunaan konsep land pooling yaitu peningkatan sarana dan prasarana penunjang permukiman dan peningkatan kualitas permukiman. Untuk konsep peningkatan status kepemilikan lahan digunakan untuk daerah yang tidak memiliki hak milik bersertifikat, kegunaan konsep ini untuk meningkatkan status kepemilikan lahan agar memiliki kejelasan tanah/ lahan yang di tempati.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Masalah permukiman kumuh dikawasan pesisir menjadi ukuran tingkat kualitas hidup yang rendah yang salah satunya dapat dilihat dari bentuk fisik permukiman. Permukiman kumuh identik dengan minimnya fasilitas, sarana dan prasarana serta dapat dikategorikan dalam rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni adalah rumah atau tempat tinggal yang dibangun dari bahan material bekas (keterbatasan) dan berada pada lokasi yang tidak cocok untuk kegiatan permukiman. Menurut Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/657.KUM/2020 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Tanah laut menyatakan bahwa Desa Tabanio termasuk dalam penetapan kawasan kumuh yang memiliki luasan 1,31 Ha dari luasan keseluruhan permukiman di Desa Tabanio sekitar 674 Ha. Dimana persebaran permukiman kumuh yang berada di desa Tabanio berada di Rt 04,Rt 07, Rt 08, Rt 09 dan Rt 10.

Desa Tabanio termasuk dalam kawasan permukiman kumuh dengan keadaan bangunan yang cukup padat. Kondisi jalan terbagi menjadi atas 2 jenis jaringan akses yaitu jalan paving dengan kondisi perkerasan kurang baik dan jalan dengan perkerasan aspal yang digunakan masyarakat sebagai akses penghubung antar rumah .menurut hasil identifikasi yang telah dilakukan dimana di lokasi penelitian yaitu Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10 sebanyak 84% bangunan termasuk kedalam non permanen dan 16% bangunan permanen, masyarakat yang berada di wilayah penelitian juga mayoritas menggunakan MCK pribadi dan tidak menggunakan Air PDAM melainkan menggunakan air sumur, serta tidak tersedianya sarana persampahan dan hanya ada satu TPS yang kurang trawat di wilayah penelitian tersebut.

Berdasarkan hasil analisa tingkat kekumuhan yang telah dilakukan pada 5 Rt dimana kelima Rt tersebut kedalam kawasan permukiman kumuh menurut SK kumuh tahun 2020, Rt yang dimaksud yaitu Rt 04, Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt 10. Dimana hasil dari tingkat kekumuhan di Rt 04 termasuk kedalam kumuh sedangkan Rt 07,Rt 08,Rt 09 & Rt 10 termasuk kedalam kategori kumuh ringan, sementara terdapat dua tipologi permukiman yang berada di wilayah penelitian dimana Rt 04 termasuk kedalam tipologi permukiman kumuh tepi air (sungai) dan Rt 07, Rt 08, Rt 09 & Rt10 termasuk kedalam tipologi permukiman kumuh di daerah dataran rendah dan daerah rawan bencana alam dimana yang bencana alam yang dimaksud yaitu bencana banjir. Sedangkan kondisi kemampuan lahan saat ini untuk kawasan permukiman di Desa Tabanio berdasarkan tingkat kemampuan lahan untuk

permukiman adalah kurang baik untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman, disebabkan karena termasuk kedalam kawasan potensi rawan bencana alam tinggi dengan tingkat kemudahan untuk dikerjakan rendah, kemampuan untuk drainase rendah dan mempunyai kemampuan pengembangan rendah. Dari kondisi tersebut maka setiap Rt yang berada di wilayah penelitian mempunyai penanganan manajemen lahan yang berbeda, seperti pada Rt 04, Rt 07 dan Rt 08 dengan tipologi yang dimiliki, konsep manajemen lahan yang digunakan untuk pengendalian permukiman yang mempunyai sertifikat hak milik atau kejelasan dalam hak bidang tanah menggunakan konsep penataan kembali bidang tanah (land readjustment) dimana model ini menata kembali batas-batas peruntukan lahan berdasarkan arahan zonasi dalam rencana tata ruang. Kemudian, dengan menyesuaikan batas-batas kepemilikan lahan tanah, maka dapat diperoleh lahan yang dapat dikonstruksikan untuk ruang public atau prasarana kepentingan umum lainnya, sedangkan untuk bidang tanah yang tidak memiliki kejelasan atau tidak sesuai dengan peruntukannya mendapatkan penanganan yang berbeda seperti di Rt 04 ada rumah yang berada di sempadan sungai dan untuk penanganannya menggunakan konsep relokasi dikarenakan tidak diperbolehkan rumah atau permukiman yang berada di sempadan sungai, sedangkan untuk rumah yang tidak memiliki kejelasan atas hak milik pada Rt 07 dan Rt 08 penanganannya menggunakan konsep peningkatan status hak kepemilikan tanah agar masyarakat yang tidak memiliki kejelasan atas hak tanah bisa menjadi jelas atas hak kepemilikan tanah. Salah satu utama dalam perumusan arahan manajemen lahan dengan konsep land readjustment yaitu terjadinya kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak pemerintah/investor proyek mengenai pembagian presentasi kontribusi lahan, dimana untuk permukiman komposisi untuk fasilitas umum 40% dan untuk rumah 60%. Sementara untuk di wilayah penelitian ada penambahan fasilitas umum guna menunjang permukiman, seperti tempat penjemuran ikan, RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara), Pembangunan PSP baru, Pembangunan SPAM unit baru, pembangunan pengamanan kebakaran sederhana.

Untuk Rt 09 & Rt 10 yang mempunyai kejelasan tanah atau bersertifikat menggunakan konsep manajemen lahan land pooling dimana kepemilikan tanah yang tersebar dan tidak beraturan dikumpulkan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur utama lainnya dengan kemudian dibagi menjadi plot yang baru, pada bentuk land pooling prinsipnya adalah penggabungan lahan sebagai bentuk penyediaan lahan untuk infrastruktur lingkungan perkotaan, sedangkan untuk yang tidak memiliki kejelasan hak milik tanah menggunakan konsep peningkatan status kepemilikan lahan agar mempunyai kejelasan atas hak milik tanah, serta ada penambahan untuk fasilitas umum yaitu RTH (Ruang Terbuka Hijau), TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan Tempat Penjemuran ikan, Pembangunan unit sistem drainase baru, pembangunan

SPAM unit baru, pembangunan PSP baru, pembangunan pengaman kebakarn sederhana dan pembangunan hydran air.

6.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang didapatkan pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

Untuk arahan penangan permukiman pada wilayah penelitian yaitu dengan konsep penangan seperti penambahan RTH (Ruang Terbuka Hijau), TPS (Tempat Pembungan Sementara) dan Tempat Penjemuran ikan, Pembangunan unit sistem drainase baru, pembangunan SPAM unit baru, pembangunan PSP baru, pembangunan pengaman kebakarn sederhana dan pembangunan hydran air, agar dapat menunjang permukiman nelayan yang berada di wilayah penelitian. Untuk di Rt 04 yang berada di daerah sempadan sungai memerlukan konsep relokasi.

Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait penerapan konsep manajemen lahan menggunakan model Land Readjustmen dan Lan Pooling sebagai arahan rumusan model manajemen lahan yang sudah didapatkan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Desa Tabanio dan adanya Perlunya ada studi lanjutan terkait dengan lokasi untuk permukiman yang terkena relokasi, serta Peningkatan Prasarana permukiman nelayan, baik kualitas maupun kuantitas di Desa Tabanio, Kecamatan Tanah Laut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Budi Prayitno (2016) *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. D.I. Yogyakarta. Univ Gadjah Mada

Ir Bambang Deliyanto, Ir Adi Winata, Ir Edi Rusdiyanto, Ir Mimmim Arumi Wardiati. (2014) *Manajemen Lahan*. Tangerang Selatan. Univ. Terbuka

UNDANG-UNDANG

2018. Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 *Tentang Permukiman Kumuh*

2011. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan dan Permukiman*

2007. Undang – Undang Nomor 27 tahun 2007 *tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

2004. Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 *Tentang Penatagunaan Tanah*

1991. Peraturan KaBPN No.4 tahun 1991 *Tentang Konsolidasi Tanah*

JURNAL

Christiawan P.I & Budiarta I.G (2017) *ENTITAS PERMUKIMAN KUMUH DI WILAYAH PESISIR*. Volume. 6, No. 2, Oktober 2017 dari Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.

Departemen Kelautan dan Perikanan. *Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil*. Jakarta: DKP. 2002.

Fitria N & Setiawan R.P (2014) *Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat*. JURNAL TEKNIK POMITS Volume. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 dari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Cet. 7. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

- Karisoh,D.S dkk (2020). *PENGARUH KEKUMUHAN TERHADAP KUALITAS HDUP MASYARAKAT DI PERKAMPUNGAN KOTA MANADO*. Jurnal Spasial Volume 7. No. 1, 2020 dari 1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Maharan.H.P dan Nurlaili.(2018) *TATA KELOLA PEMUKIMAN NELAYAN DI WILAYAH PERKOTAAN PESISIR UTARA JAKARTA* dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDMKP I Lt. 4.
- Pradika, Erga (2014). *PENGARUH PEMBANGUNAN RUSUNAWA KYAI MOJO TERHADAP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PESISIR*. *Jurnal Tekno Global*. Volume. III No. 1, Desember 2014 (43-55), dari Jurusan Perencanaan Kawasan dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas IGM.
- Sandhu, K., (2006). Land sharing model; can it deliver to the poor? Global Land Tool Website, 14 Juni 2006
- Setiawan, Yudhi. 2008. Konsolidasi Tanah dari Perspektif Filsafat Ilmu. *Jurnal Ilmiah Edisi IX Nomor 1*.
- Shofiana dkk. (2013). *ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI WILAYAH PESISIR KOTA PEKALONGAN MENGGUNAKAN DATA LANDSAT 7 ETM+.**Journal Of Marine Research*. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman 35-43 dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro.
- Yosita, Lucy, et al. (2007). Strategy of Urban Kampong Development : Analysis of Prospect and Modelling, “Land Sharing”, as an Alternative Toward Conventional Approach. *Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia*.

WEBSITE

- Baskara, M. (2012, Febusari 27). Pengadaan Lahan. Retrieved April 13, 2015, from Medha Baskara: <http://medha.lecture.ub.ac.id/2012/02/pengadaan-lahan/>

LAMPIRAN




**PROGRAM STUDI PERENCANAAN
WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK
SIPIIL DAN PERENCANAAN INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Kampus I : Jl. Bendingan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145

Kampus II : Jl. Raya Karanglo, km 2 Telp. (0341) 4177636 Fax. (0341) 417634 Malang

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Ghestiar Kharisma Kusumo
NIM : 17.24.047
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Judul : Manajemen Penggunaan Lahan Pada Permukiman Nelayan Sebagai Pengendalian Kawasan Kumuh di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung Kabupaten
Tanggal : Juni 2021

Dosen Penguji	Pertanyaan/Masukan	Jawaban/Tanggapan	Tanda Tangan
Pak Hari	<p>Manajemen itu apa ? lebih di perjelas</p> <p>Pertama tentuin kriteria kumuh, bagaimana kondisi kumuh berdasarkan sasaran 1, melakukan manajemen lahan sesuai ekstrasi dari sasaran 2</p>	<p>Manajemen lahan merupakan proses pemanfaatan sumber daya lahan di suatu wilayah & desa. Sumber daya lahan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya pertanian, hutan, sumber daya air, elektrisitas, dan pemukiman. Berbagai aspek teknis menjadi pertimbangan dalam mengelola lahan. Pemanfaatan lahan harus</p> <p>Manajemen lahan merupakan proses pemanfaatan sumber daya lahan di suatu wilayah & desa. Sumber daya lahan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya pertanian, hutan, sumber daya air, elektrisitas, dan pemukiman. Berbagai aspek teknis menjadi pertimbangan dalam mengelola lahan. Pemanfaatan lahan harus</p> <p>Manajemen lahan merupakan proses pemanfaatan sumber daya lahan di suatu wilayah & desa. Sumber daya lahan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya pertanian, hutan, sumber daya air, elektrisitas, dan pemukiman. Berbagai aspek teknis menjadi pertimbangan dalam mengelola lahan. Pemanfaatan lahan harus</p>	

	? dipastikan mau yang mana		
	Buatlah judul yang simpel tapi yang mau dilakukan sesuai		

Malang, 2021

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Agung Witjaksono, ST.,MTP.



Maria C. Endarwati., ST., MIUEM



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NAGA MALANG

KUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigurgara No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Nomor : ITN.03.057/PWK.SKR/PSI.VII/2022 22 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth : **Dosen Pembimbing I (Utama)**
Dr. Agung Witjaksana, ST., MT
Dosen Perencanaan Wilayah Dan Kota
Institut Teknologi Nasional
Di -

MALANG

Dengan Hormat,

Kami dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dalam pengembangan bidang perencanaan dan semua aspek, tidak hanya dari sisi pandang teknis, tetapi juga dari aspek lain, seperti : perilaku, budaya, sejarah, ekonomi, pariwisata dan sebagainya. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk membimbing mahasiswa kami :

Nama : **Ghestiar Kharisma Kusumo**
NIM : **17.24.047**
Judul TA :

"Manajemen Penggunaan Lahan Pada Permukiman Nelayan Sebagai Pengendalian Kawasan Kumuh Di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut"

Sejak Tanggal : 22 Maret 2022 – 10 September 2022 (Maksimum 6 bulan).

Dalam masa pembimbingan tersebut, Bapak / Ibu didampingi oleh :

Dosen Pembimbing II (Pendamping) : Maria Christina Endarwati, ST., MIUM

Untuk memudahkan penyusunan persepsi dalam penyusunan materi TA tersebut.

Besar harapan, Bapak / Ibu dapat menerima permohonan kami. Atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

a.n. Dekan
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Lamp. Ketua Program Studi Perencanaan
Wilayah dan Kota

Dr. Agung Witjaksana, ST., MT
NIP. Y. 10396002





PT BNI (PERSERO) MALANG
BANK NAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Tels. (0341) 551433 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karangrejo, Km 2 Telp. (0341) 417658 Fax. (0341) 417634 Malang

Nomor : ITN.03.058/IPWK.SKRIPSI.VII/2022 22 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth : **Dosen Pembimbing II (Pendamping)**
Maria Christina Enderwati, ST., MIUM
Dosen Perencanaan Wilayah Dan Kota
Institut Teknologi Nasional
Di -

MALANG

Dengan Hormat,

Kami dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dalam pengembangan bidang perencanaan dan semua aspek, tidak hanya dari sisi pandang teknis, tetapi juga dari aspek lain, seperti : perilaku, budaya, sejarah, ekonomi, pariwisata dan sebagainya. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk membimbing mahasiswa kami :

Nama : **Ghesyar Kharisma Kusumo**
NIM : **17.24.047**
Judul TA :

"Manajemen Penggunaan Lahan Pada Permukiman Nelayan Sebagai Pengendalian Kawasan Kumuh Di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut"

Sejak Tanggal : 22 Maret 2022 – 10 September 2022 (Maksimum 6 bulan).

Dalam masa pembimbingan tersebut, Bapak / Ibu didampingi oleh :

Dosen Pembimbing I (Utama) : Dr. Agung Witjaksono, ST., MT

Untuk memudahkan penyamanan persepsi dalam penyusunan materi TA tersebut. Besar harapan, Bapak / Ibu dapat menerima permohonan kami. Atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.



a.n. Dekan
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Jl. Ketua Program Studi Perencanaan
Wilayah dan Kota

Dr. Agung Witjaksono, ST., MT
NIP.Y. 10396002






PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus I : Jl. Sepuluh Nopember No. 2 Telp. (0341) 55031 (Surabaya), Fax. (0341) 550317 Malang 65131
Kampus II : Jl. Raya Klaten, Km 2 Telp. (0341) 417936 Fax. (0341) 417934 Malang

LEMBAR ASISTENSI
TUGAS AKHIR (ASISTENSI)

Nama : Ghestiar Kharisma Kusumo
Nim : 1724047
Dosen Pembimbing : Dr. Agung Wijaksana, ST.,MTP

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	15-11-2011	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Pesisir lebih di detailkan - Rencana di stansi - Peta orientasi lingkungan - Foto. Lingkar Et desa - Peta batas administratif - Peta batas RT desa/lingkar - batas desa - foto lingkar lokasi hasil wawancara - Peta batas RT - Peta jalan basis - Data jalan - Peta jalan - foto rencana bangunan di lokasi lapangan/lingkar - Jarak jalan di pertanahan - bentuk data kriteria - kegiatan pembangunan - foto area lokasi/lingkar rumah - dan lokasi lokasi rumah - Peta Perumahan 	






PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Kampus I - Jl. Darmasari Sepura-pura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Pusat), Fax. (0341) 553015 Malang 65145

Kampus II - Jl. Raya Karangas, Arah 2 Telp. (0341) 4177836 Fax. (0341) 417634 Malang


LEMBAR ASISTENSI
TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

Nama : Ghestiar Kharisma Kusumo
Nim : 1724047
Dosen Pembimbing : Dr. Agung Wijaksono, ST.,MTP

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1	Selasa 21-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Foto rumah Jabon - Data Semua di lampirkan Semua di Jember dan Unsur - Judul awal Jember Perencanaan - Judul wicara Pesair di katur dan - Cet media Analisa yang di foto - Cet secara manajemen lahan - Lingkup materi lebih di Jabon dan lingkup wilayah Perencanaan. - Foto lebih di perbesar 	
	- 06-01-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Abstrak di buat - Di capitan lagi - di Jember Perencanaan - di munculkan data Kiprostat Kesukmahan - Sasaran Saha lebih di Jabarkan. <p>ACC Seminar Husi</p>	 

Dosen Pembimbing 2

Ibu Maria C. Endarwati., ST., MIUEM

Signature	
Added Time	28-Dec-2021 03:27:04
Referrer Name	
Task Owner	ghestiark@gmail.com

Berita Acara Seminar Hasil



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Kampus 1 : Jl. Brawijaya Sigiro-pada No. 2 Telp. (0341) 553411 (uangin) Fax. (0341) 553013 Malang 65147
Kampus II : B. Raya Karanglo, Km.2 Telp. (0341) 4177036 Fax. (0341) 417614 Malang

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Nama : Ghestiar Kharisma Kusumo
NIM : 1724047
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Judul : Manajemen Penggunaan Lahan Pada Permukiman Nelayan Sebagai Pengendalian Kawasan Kumuh di Desa Tabanio, Kecamatan Takisong, Kabupaten Tanah Laut
Hari/Tanggal : 12 Januari 2022

Dosen Penguji	Pertanyaan/Saran	Jawaban/Tanggapan	Tanda Tangan
Widyanoto Hari S.W.,ST.,MSc	1. Kriteria kumuh harus didetailkan justifikasi teknik secara akademik, serta menambahkan data status tanah	Sudah dibenarkan dan di tambahkan pada : <ul style="list-style-type: none"> Bab IV (Gambaran Umum) Sub bab 4.2 identifikasi karakteristik permukiman kumuh 	
	2. Clusterkan dari sudut pandang tipologi kumuh, jelaskan dalam bentuk peta	Sudah ditambahkan pada <ul style="list-style-type: none"> Bab V (Analisa) Sub bab 5.2.3 Tipologi Permukiman 	
Mohammad Reza, ST., MURP	1. Perbaiki proses analisa	Sudah di perbaiki pada BAB V (Analisa)	
	2. Cek lagi hasil analisa	Sudah di perbaiki pada BAB V (Analisa)	

Malang, Januari 2022

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Dr. Agung Witjaksono, ST., MT

Maria C. Enderwari., ST., MIUEM

Dosen Penguji Seminar Hasil

BERITA ACARA SEMINAR HASIL Report

Form: BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Mohammad Reza, ST., MURP	
Signature	
Added Time	02-Feb-2022 11:49:54
Referrer Name	
Task Owner	kusumo1812@gmail.com

 Forms


Dosen Penguji Seminar Hasil

Widiyanto Hari Subagyo Widodo, ST., MSc

Form: LEMBAR ACC BERITA ACARA SEMINAR HASIL




Signature	
Added Time	21-Jun-2022 02:03:35
Referrer Name	
Task Owner	ghestiark@gmail.com
Comments	No Comments

Dosen Pembimbing 1 (Satu)


PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)
 Kampus I - Jl. Dendang: Sigaragata No. 7 Telp. (0341) 551431 (hunting), Fax. (0341) 550015 Malang 65145
 Kampus II - Jl. Raya Karang: km 7 Telp. (0341) 417936 Fax. (0341) 417934 Malang

LEMBAR ASISTENSI
TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

Nama : Ghestiar Kharisma Kusumo
 Nim : 1724047
 Dosen Pembimbing : Dr. Agung Witjaksono, ST.,MTP

No.	Tanggal	Isi	Initial Pembimbing
1.	16-06-2022	bagaimana data per Person kesediaan foto ruang foto kotanya telah besar status permissible lahan lahan yang memiliki kawasan Industri Sisa Industri Relokasi kualitas sumber lahan di perjalan	
2.	20-08-2022	buat tabel konsep buat tabel anggaran ACE Seminar ITS Sidang ITS	 


Dosen Pembimbing 2 (dua)

6/24/22, 3:19 PM

Zoho Forms

BERITA ACARA SEMINAR HASIL Report

Form: BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Maria C. Endarwati., ST., MIUEM	
Signature	
Added Time	02-Feb-2022 18:32:44
Referrer Name	
Task Owner	ghestiark@gmail.com

 Zoho Forms

Slip Seminar Proposal

Beneficiary		Transaction Type		Date / Time		
Name	PTM	Transfer / Sendir	Transfer / Sendir	Date	Time	Branch / Office
Account Number	1700001799000	Transfer / Sendir	Transfer / Sendir			
Bank Name		Branch / Office		City		
Address		Phone		Amount		
				Rp. 75.000		
Status		Type		Remarks		
Penyaliran / Payment		Transfer / Sendir		Transfer to CIMB Niaga Customer's account		
Beneficiary Name		Beneficiary Address		Beneficiary Phone		
Beneficiary Branch		Beneficiary City		Beneficiary Account No.		
Beneficiary Phone		Beneficiary Branch		Beneficiary City		
Beneficiary Account No.		Beneficiary Branch		Beneficiary City		
Beneficiary City		Beneficiary Branch		Beneficiary Account No.		
Beneficiary Branch		Beneficiary City		Beneficiary Account No.		
Beneficiary City		Beneficiary Branch		Beneficiary Account No.		
Beneficiary Account No.		Beneficiary Branch		Beneficiary City		

PTM Niaga

PTM Niaga

Rp. 75.000

Transfer / Sendir

Penyaliran / Payment

Daftar Tanda Tangan / Signatures

Daftar Data / Data List

		Formulir Multiguna Multi Purpose Form			
Cabang / Branch :			Tanggal / Date : 19 01 2021		
Mochon kasiin / setor / Transfer / Deposit : <input type="checkbox"/> Pemindahanbuku / Overbooking <input type="checkbox"/> RTGS / RTGS <input type="checkbox"/> Kiring / Clearing <input type="checkbox"/> Wesel / Demand Draft <input type="checkbox"/> Transfer Dana / Fund Transfer <input type="checkbox"/> Setoran / Deposit <input type="checkbox"/> Tagihan / Bills Payment <input type="checkbox"/> KASBO / Collection <input type="checkbox"/>					
Penerima dana / Beneficiary :		Nomor rekening / Account number : CIMB NIAGA		Nama Pengirim / Sender's Name :	
Nama / Name :		Bank Penerima / Beneficiary's Bank : CIMB NIAGA		Kota / City :	
Alamat / Address :		Kota & Negara / City & Country :		Tanggal / Date :	
Status / Status :		Warga Negara / Nationality :		Jumlah / Amount :	
<input type="checkbox"/> Penduduk / Resident <input type="checkbox"/> Bukan Penduduk / Non Resident		<input type="checkbox"/> WNI / Indonesian <input type="checkbox"/> WNA / Foreigner		No Warkat / Cheque No :	
Bukti Transaksi / Validation :					
210B19 1103 0038 30000 300000TLR004 VAC virtual Account Cash 11:14:30 IDR 100.000,00 For 497900010124047 PERKUMPULAN PENGELOL GHESTIAR KHARISHA KUSUMU Remarks : SERTINAR HASIL					
Kami setuju dengan bukti transaksi di atas / We agree with the validation above		Sumber Dana Transaksi / Source of Fund :		Total jumlah dana / Total amount : 100.000	
Tujuan Transaksi / Purpose of Transaction :		Biaya & Provisi / Charge & Provision :		Terbilang / Say : Seratus Ribu Ruiah	
<input type="checkbox"/> Tabung / Savings <input type="checkbox"/> Pembayaran Pajak / Tax Payment <input type="checkbox"/> Pembayaran Asuransi / Insurance / Assurance of Life Payment <input type="checkbox"/> Lain-lain / Other, say		<input type="checkbox"/> Gaji / Penghasilan / Salary Income <input type="checkbox"/> Tabung / Hasil Investasi / Savings / Investment <input type="checkbox"/> Wadiah / inheritance <input type="checkbox"/> Hibah / Gift or GR <input type="checkbox"/> Perolehan Properti / Income from Property Sale <input type="checkbox"/> Hasil Usaha / Return of Business <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan / Other, say		Berita / Message : Seminar H&S	
Hubungai Pengirim Dana dan Penerima Dana / Sender and Beneficiary Relationship :		Pembelian Biaya Bank Korresponden / Business Correspondent Bank's Charges :		Diperiksa oleh / Verified by :	
<input type="checkbox"/> Rekening Sendiri / Own-Account <input type="checkbox"/> Rekan Bisnis / Business Partner <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan / Other, say		<input type="checkbox"/> Pemisahan / Individual <input type="checkbox"/> Pemerintah / Government <input type="checkbox"/> Perusahaan / Corporate		Nama, alamat, dan tanda tangan / Validation :	
<input type="checkbox"/> Keluarga Dekat / Immediate Family <input type="checkbox"/> Klien / Client		Tanggal / Date :		(Signature)	

CIMB NIAGA		Formulir Multiguna Multi Purpose Form		CIMB NIAGA Sinarindo	
Cabang / Branch :			Tanggal / Date : 19-06-2011		
Mohon diisi / select Please transfer / deposit : <input type="checkbox"/> Pemindahbukuan / Overbooking <input type="checkbox"/> RTGS <input type="checkbox"/> RTGS <input type="checkbox"/> Kering / Clearing <input type="checkbox"/> Wheel / Demand Draft <input type="checkbox"/> Transfer Dana / Fund Transfer <input type="checkbox"/> Setoran / Deposit <input type="checkbox"/> Tagihan / Bill Payment <input type="checkbox"/> Inkaso / Collection					
Penerima dana / Beneficiary Nama : <u>PT. JIPRI</u>		Data Pengirim Dana / Sender Data Nama Pengirim / Sender's Name :			
Nomor rekening / Account number : <u>210819 1103 0040 30000 00000TLR004</u>		Tipe Transaksi / Transaction Type :			
Bank Penerima / Beneficiary's Bank : <u>CIMB NIAGA</u>		No Warkat / Cheque No. :			
Alamat / Address :		Kota / City :			
Kota & Negara / City & Country :		Tanggal / Date :			
Status / Status : <input type="checkbox"/> Pribadi / Resident <input type="checkbox"/> Bukan Pribadi / Non-Resident		Jumlah / Amount :			
Warga Negara / Nationality : <input type="checkbox"/> wni / Indonesian <input type="checkbox"/> wna / Foreigner		Debit rekening / Debit A/C :			
Bukti Transaksi / Validation :		Total jumlah dana / Total amount :			
210819 1103 0040 30000 00000TLR004 VAC Virtual Account Cash 11:15:58 IDR 300.000,00 For 497900101724047 PERANUPULAN PENCELOL GHESTIAR KHARISMA KUSUNG Remarks : PWB310-SERIPSI		Mata / Ccy : <u>Rp</u>		Jumlah / Amount : <u>300.000</u>	
				DR	
		Terbilang / Say : <u>Tiga Ratus Ribu Ratus</u>			
		Kurs / Rate :		Berita / Message : <u>PWB310 (SERIPSI)</u>	
		Biaya / Charges :		Provisi / Provision :	
		Diperiksa oleh / Verified by :			
		Tanggal / Date :			
Kami setuju dengan bukti transaksi di atas / We agree with the validation above					
Data Transaksi / Transaction Data Tujuan Transaksi / Purpose of Transaction :		Sumber Dana Transaksi / Source of Fund :			
<input type="checkbox"/> Sewang / Sewing <input type="checkbox"/> Pembayaran Pajak / Tax Payment <input type="checkbox"/> Pembayaran Asuransi / Insurance / Reimbursement of Cost Payment		<input type="checkbox"/> Gaji / Penghasilan / Salary Income <input type="checkbox"/> Sewang / Hasil bisnis / Change / Investment <input type="checkbox"/> Wanita / Interfuran			
<input type="checkbox"/> Penghasilan / Sewing <input type="checkbox"/> Bank Business Purpose <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan / Other, say		<input type="checkbox"/> Hasil / Over or Gift <input type="checkbox"/> Perolehan Properti / Real Estate <input type="checkbox"/> Hasil Usaha / Return of Business <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan / Other, say			
Hubungan Pengirim Dana dan Penerima Dana / Sender and Beneficiary Relationship :		Biaya & Provisi / Charge & Provision :		Tipe Penerima / Beneficiary Type :	
<input type="checkbox"/> Menang / Sewing <input type="checkbox"/> Over-Amount <input type="checkbox"/> Rakan Bisnis / Business Partner <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan / Other, say		<input type="checkbox"/> Cash <input type="checkbox"/> Debit rekening / Debit A/C		<input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Government <input type="checkbox"/> Partnership / Corporate	
<input type="checkbox"/> Keluarga Dekat / Immediate Family <input type="checkbox"/> Klien / Client		Pembetulan Bank / Bank Reconciliation / Clearer Correspondent Bank's Charges :			
		<input type="checkbox"/> Perantara / Brokerage <input type="checkbox"/> Pengirim / Penjual / Selling <input type="checkbox"/> Penerima / Pembeli / Buyer			

		Formulir Multiguna Multi Purpose Form			
Cabang / Branch :			Tanggal / Date : 13 03 2013		
Mulaian kelas / notes: <input type="checkbox"/> Pemindahbukuan / Overbooking <input type="checkbox"/> RTGS <input type="checkbox"/> Kering / Clearing <input type="checkbox"/> Wesel / Demand Draft <input type="checkbox"/> Transfer Dana / Fund Transfer <input type="checkbox"/> Setoran / Deposit <input type="checkbox"/> Tagihan / Bill Payment <input type="checkbox"/> Inkaso / Collection					
Penerima dana / Beneficiary Nama / Name: <u>8230111</u>		Nomor rekening / Account number <u>417330010191234</u>		Data Pengirim Dana / Sender Data Nama Pengirim / Sender's Name:	
Bank Penerima / Beneficiary's Bank <u>CIMB NIAGA</u>		Tipe Transaksi / Transaction Type		No Warkat / Cheque No. Kota / City Tanggal / Date Jumlah / Amount	
Alamat / Address		<input type="checkbox"/> Warkat Bank / Bank Cheque <input type="checkbox"/> Warkat Bank / Bank Cheque <input type="checkbox"/> Warkat Bank / Bank Cheque <input type="checkbox"/> Warkat Bank / Bank Cheque		[Table with 4 columns: No Warkat, Kota, Tanggal, Jumlah]	
Kota & Negara / City & Country		Telepon / Phone		<input type="checkbox"/> Tunai / Cash <input type="checkbox"/> Debet rekening / Debit A/C	
Status / Status <input type="checkbox"/> Penduduk / Resident <input type="checkbox"/> Bukan Penduduk / Non Resident		Warga Negara / Nationality <input type="checkbox"/> WNI / Indonesian <input type="checkbox"/> WNA / Foreigner		<input type="checkbox"/> Bukan Pemilik Rekening CIMB Niaga, wajib mengisi Formulir CDD terpisah / Non-CIMB Niaga Customer, mandatory to complete CDD Form	
Bukti Transaksi / Validation					
210819 1103 0039 30000 3000000TLR004 VAC Virtual Account Cash 11:15:11 IDR 200.000,00 For 4979000101724047 PERKUMPULAN PENGELOL GHESTIAR KHARISMA KUSUNO Remarks : SIDANG SARIPSI			Total jumlah dana / Total amount Rp. 200.000		
Terbilang / Say Dua Ratus Ribu Rupiah					
Kurs / Rate		Berta / Message Sidang Saripsi			
Biaya / Charges		Nama, alamat, dan tanda tangan Nasabah / Customer's name, address, and signature			
Provisi / Provision		Tanggal / Date			
Kami setuju dengan bukti transaksi di atas / We agree with the validation above					
Data Transaksi / Transaction Data Tujuan Transaksi / Purpose of Transaction <input type="checkbox"/> Rekening / Savings / <input type="checkbox"/> Pembayaran Pajak / Tax Payment <input type="checkbox"/> Pembiayaan / Loan / <input type="checkbox"/> Pengiriman / Remittance / <input type="checkbox"/> Lain-lain / Other			Sumber Dana Transaksi / Source of Fund <input type="checkbox"/> Gaji / Penghasilan / Salary / Income <input type="checkbox"/> Tabungan / Hasil Investasi / Savings / Investment <input type="checkbox"/> Wadiah / Hibah / <input type="checkbox"/> Hibah / Gift or GR <input type="checkbox"/> Perolehan / <input type="checkbox"/> Lain-lain / Other		
Hubungan Pengirim Dana dan Penerima Dana / Sender and Beneficiary Relationship <input type="checkbox"/> Rekening Sendir / Own-Account <input type="checkbox"/> Pihak Beraku / Business Partner <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan / Other, say			Biaya & Provisi / Charge & Provision <input type="checkbox"/> Tunai / Cash <input type="checkbox"/> Debet rekening / Debit A/C <input type="checkbox"/> Pembebanan Biaya Bank Korresponden / <input type="checkbox"/> Biaya Bank Korresponden / <input type="checkbox"/> Lain-lain / Other		
Hubungan Pengirim Dana dan Penerima Dana / Sender and Beneficiary Relationship <input type="checkbox"/> Keluarga / Family <input type="checkbox"/> Klien / Client			Tipe Penerima / Beneficiary Type <input type="checkbox"/> Individu / Individual <input type="checkbox"/> Pemerintah / Government <input type="checkbox"/> Perusahaan / Corporate		

KELUARAN DAN MANFAAT

Keluaran Penelitian

- Terukurnya tingkat pemahaman partisipan penelitian terhadap penataan ruang sebelum bermain permainan pengenalan penataan ruang berbasis android "Q-Taru"
- Teridentifikasinya tingkat efektivitas penggunaan mobile game berbasis android dalam pengenalan penataan ruang di tingkat SMA
- Teridentifikasinya pengetahuan yang diperoleh siswa SMA setelah bermain permainan pengenalan penataan ruang berbasis android "Q-Taru"

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sumber informasi dalam menjawab permasalahan terkait proses pengenalan penataan ruang di tingkat SMA. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas instrumen dalam hal ini adalah media pembelajaran pengenalan penataan ruang.

Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah

Memberikan pengetahuan bagi pemerintah terkait media yang dapat digunakan dalam melakukan pengenalan penataan ruang pada siswa SMA sebagai bagian dari masyarakat.

Bagi Masyarakat

Manfaat yang didapat dari penelitian ini bagi masyarakat yaitu, berupa pengetahuan yang baik terkait dengan penataan ruang serta media yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran.

Bagi Peneliti

- Melatih peneliti untuk menerapkan ilmu serta metode yang selama ini didapatkan selama proses perkuliahan
- Sebagai bahan informasi bagi peneliti dalam penggunaan media permainan dalam pengenalan penataan ruang khususnya pada objek penelitian yaitu siswa SMA.

01 Pendahuluan

Tujuan dan Sasaran

Tujuan:
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi potensial untuk pemenuhan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Jambi

Sasaran:


- Menganalisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi
- Mengidentifikasi kriteria penentuan lokasi potensial ruang terbuka hijau publik aktif di Kota Jambi.
- Menentukan sebaran lokasi potensial ruang terbuka hijau publik aktif yang dibutuhkan untuk Kota Jambi.

Participants (27)

- Nur Fauzan Anany
- Prima Yuliana
- URBAN GARAGE STUDIO
- Utan Senio
- Nohanes Kusma PB
- Zakaria Stepanus - 724008

Chat

Alhamdulillah (1724034) Alhamdulillah
<https://bit.ly/Alhamdulillah1724034>
 Nuzulnuzul
<https://bit.ly/Nuzulnuzul07224034>
 Beres! Aneka
<https://bit.ly/BeresAneka1724034>


INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
 Jl. Bendungan Sigora-gora No.82
 MALANG

DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR HASIL
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA
PERIODE I 2021
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

1. Nama Mahasiswa : Nur Fauzah Amry
 2. NIM : 1724001
 3. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
 4. Waktu : 09.00 – 10.00
 5. Ruang : PWK 1
 6. Judul Tugas Akhir : **Prioritas Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Komoditas Perikanan Unggulan di Kota Tarakan**

NO	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Anela Iftitah Jaya	1724055
2	Grace Dani Diba Mung	1924099
3	Lisa Ate Ratu TL Anis	1724008
4	Angga Jovanika	1724007
5	Gresha Kharisma R.	1924042
6	Almond Razi T. W	1724091
7		
8		
9		
10		

Menggetahui
 Ketua Prodi PWK

Malang, 6 Januari 2022
 Panitia Pelaksana Tugas Akhir
 Koordinator

Dr. Aguni Wahono, ST, MT
 NIP. 103.960.0292

Arissa Hamidah I, ST, MSc
 NIP. 103.150.0520





INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Beandungan Sigera-gura No.02
MALANG

PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam Seminar Komprehensif tingkat Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 06 Juli 2022

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

Saudara : Ghestiar kharisma kusumo

NIM : 17.24.047

Perbaikan tersebut meliputi :

→ Hasil Akhir → Analisa → Data? → Hasil survey
↓
melalui ~~hasil~~ →
Tanyakan ke bab 2

Dosen Penguji


Arief Setijawan, ST., MT



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Bendungan Sigura-gura No.02
MALANG

PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam **Seminar Komprehensif** tingkat Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 06 Juli 2022

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

Saudara : Ghestiar kharisma kusumo
NIM : 17.24.047

Perbaikan tersebut meliputi :

- Rms masalah, - sasaran, - r. lingkup materi.
- Tujuan \rightarrow \neq kalimat tanya.
- Kerangka pikir, \rightarrow tujuan.
- Variabel \rightarrow land pooling, dll. ?
- Daftar pustaka.
- Redaksional. =
of. format halaman.

Dosen Penguji

Ir. Titik Poerwati, MT



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Bendungan Sigura-gura No.02
MALANG

PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam Seminar Komprehensif tingkat Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 06 Juli 2022

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

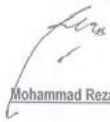
Saudara : Ghestiar kharisma kusumo

NIM : 17.24.047

Perbaikan tersebut meliputi :

1. manajemen definisinya & implementasinya tidak karatan.
2. aspek legalitas ke pola manajemen land pricing dan land readjustment perlu diteliti
3. - Kalo land pricing → konsentrasinya apa? tidak ada di analisa
- kalo land readjustment → konsentrasinya apa?
4. - banyak? apa dari manajemen yang di berikan berdasarkan potensi kawasan penelitian (pariwisata & pertanian).

Dosen Penguji


Mohammad Reza, ST., MURP

Berita Acara Sidang Komprehensif





FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
 Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
 Kampus II : Jl. Raya Karanglo, km 2. Telp. (0341) 4177636 Fax. (0341) 417634 Malang

BERITA ACARA SEMINAR KOMPREHENSIF

Nama : Ghestiar Kharisma Kusumo
 NIM : 1724047
 Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
 Judul : Manajemen Penggunaan Lahan Pada Permukiman Nelayan Sebagai Pengendalian Kawasan Kumuh di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut
 Hari/Tanggal : 6 Juli 2022

Dosen Penguji	Pertanyaan/Saran	Jawaban/Tanggapan	Tanda Tangan
Mohammad Reza, ST., MURP	<ol style="list-style-type: none"> Manajemen definisinya dan implementasinya tidak kelihatan Aspek legalitas di pola manajemen land pooling dan land readjustment perlu di tegaskan Konsekuensi dari konsep manajemen lahan yang digunakan Langkah-langkah apa dari manajemen yang dikerjakan berdasarkan potensi kawasan penelitian (pariwisata dan perikanan) 	<ol style="list-style-type: none"> Konsekuensi dari pelaksanaan konsep land readjustment hasil akhir yang didapatkan oleh pemilik lahan berupa akurasi/luas lahan yang lebih kecil dibandingkan sebelum proses land readjustment, namun dengan nilai lahan yang lebih besar. (sudah di tambahkan pada halaman 158) Pemilik lahan umumnya memberikan sekitar 30% dari jumlah keseluruhan kepemilikan lahannya kepada penyediaan ruang untuk jalan, taman dan ruang publik lainnya serta lahan cadangan (sudah di tambahkan pada halaman 158) Sudah melakukan konsep manajemen lahan pada wilayah penelitian ada penambahan fasilitas umum yaitu tempat penitisan ikan dimana di wilayah penelitian memiliki potensi perikanan (sudah ditambahkan pada halaman 158 dan 161) 	

Dosen Penguji	Pertanyaan/Saran	Jawaban/Tanggapan	Tanda Tangan
Arief Setijawan, ST., MT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil akhir belum terlihat 2. Analisa untuk manajemen lahan 3. Hasil survey dimasukkan ke bab <u>IV</u> 4. Abstrak dan kata pengantar di perbaiki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk abstrak dan kata pengantar sudah di perbaiki pada lembar abstrak dan kata pengantar 2. Analisa yang digunakan untuk manajemen lahan deskriptif dan untuk hasil akhirnya yaitu ada penambahan fasilitas umum untuk menunjang permukiman yang ada di wilayah penelitian, Sudah di perbaiki dan ditambahkan pada halaman 157 3. Untuk hasil akhir sudah ditambahkan dan diperbaiki pada halaman 158-164 	
Ir. Titik Poerwanti, MT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan Masalah, sasaran dan lingkup materi 2. Tujuan bukan kalimat tanya 3. Variabel untuk manajemen lahan 4. Daftar Pustaka 5. Redaksional dan format halaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dibenarkan pada halaman 3 dan 4 pada sub bab rumusan masalah, sasaran dan lingkup materi 2. Variabel untuk manajemen lahan sudah di perbaiki pada halaman 38 dan halaman 39 3. Untuk daftar Pustaka sudah di perbaiki pada halaman 175 	

Malang, Juli 2022

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Dr. Agung Witjaksono, ST., MT

Maria C. Endarwati., ST., MIUEM





PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Kampus I - Jl. Bendungan Sigura-gura No 2 Telp. (0341) 551431 (hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145

Kampus II - Jl. Raya Karanglo, km 2 Telp. (0341) 4177636 Fms. (0341) 417634 Malang

LEMBAR ASISTENSI
TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

Nama : Ghestiar Kharisma Kusumo
Nim : 1724047
Dosen Pembimbing : Dr. Agung Wijaksana, ST.,MTP

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1	19-08-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas umum lebih spesifik - menggunakan standar PU - Cari referensi Perambatan Fasilitas umum untuk kawasan Perumahan Kumuh - konsep Penanganan Kawasan Kumuh 	
2	27-08-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Peta lebih di paparkan dan diadakan satu - Judul Peta di kembangkan - Rekomendasi di kembangkan arah - Tabel arahan konsep Penanganan Perumahan di Perumahan <p>Sec. Bafu Hutan / cey/12</p>	



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN RDTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Kampus 1: Jl. Bojonegara Segrengi No. 2 Telp. (0341) 55101 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65143

Kampus 2: Jl. Raya Kertosolo No. 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR ASISTENSI
TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

Nama : Ghestiar Klarisma Kusumo
Nim : 1724047
Dosen Pembimbing : Marla C. Endorwati., ST., M.Eng

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1	25-08-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Redaksional di cek lagi - Dicek jarak antar judul ke paragraph bawah. 	

Test Toefl



KEMDIKBUD
NPSN: K9984387



*This certificate is valid until
June 30, 2023

TOEFL Test

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

No.: 8593/S-T/NEURO/VI/2022

This is to certify that

Ghestiar Kharisma Kusumo

Place, Date of Birth: Tanah Laut, December 18, 1998

took a TOEFL-Like Test at NEURO English Course
on Thursday, June 23, 2022

and attained the following equivalent scores:

Listening Comprehension	: 37
Structure & Written Expression	: 38
Reading Comprehension	: 42
Total Score	: 390

NEURO English Course
Jl. Raya Bandung-Sumedang No. 187,
Jatinangor, Kab. Sumedang, 45363.
Email: neuroenglish.id@gmail.com

Bandung, June 24, 2022



Ahmad Noval, S.Pd.I., M.Pd.

Director

KRS**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Kampus 1 : Jln. Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang
Kampus 2 : Jln. Raya Karanglo Km.2 Malang

KARTU RENCANA STUDI

NIM : 1724047

Nama : GHESTIAR
KHARISMA KUSUMOProgram : Perencanaan
Studi : Wilayah dan Kota
S-1Th. : 2021
Akademik : 2021

Semester : Genap

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Sks
1	PW8310	SKRIPSI	7
Total SKS Diambil			7

Dicetak Tanggal : 28-06-2022

GHESTIAR KHARISMA KUSUMO

DPA Mahasiswa



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Kampus 1 : Jln. Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang
Kampus 2 : Jln. Raya Karangie Km.2 Malang

DPA MAHASISWA

NIM : 1724047
Nama : GHESTIAR KHARISMA KUSUMO
Prodi : Perencanaan Wilayah dan Kota S-1
Th. Kurikulum : 2019

No	Kode SKS	Mata Kuliah	SKS	Grade
1	PW1101	BAHASA INGGRIS	2	B
2	PW1102	PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI	2	B+
3	PW1103	PENGANTAR LINGKUNGAN	3	A
4	PW1104	GEOLOGI LINGKUNGAN	3	B+
5	PW1105	KEPENDUDUKAN DAN SISTEM SOSIAL	3	C
6	PW1201	PENGANTAR PERENC. WILAYAH DAN KOTA	4	B+
7	PW1202	TEKNIK PRESENTASI DAN NIRMANA	3	B
8	PW2106	LINGKUNGAN BINAAN MANUSIA	3	B+
9	PW2107	STATISTIK	3	C+
10	PW2203	ANALISA SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN	3	B+
11	PW2204	PRASARANA WILAYAH DAN KOTA	3	B+
12	PW2205	EKONOMI WILAYAH DAN KOTA	3	B
13	PW2301	PENGANTAR PROSES PERENCANAAN	4	B+
14	PW3108	PANCASILA	2	B+
15	PW3206	ANALISA LOKASI DAN POLA RUANG	3	A
16	PW3207	PERENCANAAN PERDESAAN	3	B+
17	PW3208	METODE ANALISA PERENCANAAN I	3	B
18	PW3209	TATA GUNA DAN PENGEMBANGAN LAHAN	3	C+
19	PW3210	PERENCANAAN TRANSPORTASI	3	C+
20	PW3302	PERENCANAAN KOTA 1	3	B
21	PW4211	SISTEM INFORMASI PERENCANAAN I	3	B
22	PW4212	PERMUKIMAN	3	B+
23	PW4213	PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	3	B+
24	PW4214	METODE ANALISA PERENCANAAN II	3	B
25	PW4303	PERENCANAAN KOTA 2	4	B
26	PW4304	PERENCANAAN KOTA CULTURAL 1	3	C+
27	PW5109	METODE PENELITIAN	3	C+
28	PW5110	KAPITA SELEKTA	2	A
29	PW5215	PERENCANAAN TAPAK	3	B+
30	PW5216	SISTEM INFORMASI PERENCANAAN II	3	B+
31	PW5217	COMMUNITY DEVELOPMENT	3	B
32	PW5218	KEBENCANAAN	3	B
32	PW5305	PERENCANAAN WILAYAH 1	3	B
33	PW5306	PERENCANAAN KOTA CULTURAL 2	3	B+
34	PW6111	TECHNOPRENEURSHIP	2	A
35	PW6219	TEORI DAN PRAKTEK PERENCANAAN	3	B
36	PW6220	PERANCANGAN KOTA CULTURAL	3	B
37	PW6221	LANSEKAPING PERKOTAAN	3	A

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Grade
38	PW6222	PENGELDLAAN PERKOTAAN	3	
38	PW6223	PERENCANAAN WILAYAH PESISIR	3	C+
39	PW6307	PERENCANAAN WILAYAH 2	4	A
40	PW7112	BAHASA INDONESIA	3	A
41	PW7224	HKM DAN ADMINISTRASI PERENCANAAN	3	B
42	PW7226	PERENCANAAN PARIWISATA	3	B+
43	PW7308	KOLOKUM	3	B+
44	PW7309	KERJA PRAKTEK	4	B+
45	PW7725	PERENCANAAN KAWASAN	3	
45	PW8113	KEWARGANEGARAAN	2	B+
46	PW8114	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3	A
47	PW8115	PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN	3	
47	PW8116	PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK	3	
47	PW8117	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	3	
47	PW8118	PENDIDIKAN AGAMA BUDHA	3	
47	PW8310	SKRIPSI	7	-

Total SKS x Bobot : 449.00 , SKS Pembagi : 137 , IPD : 3.28

MANAJEMEN LAHAN PADA PERMUKIMAN NELAYAN SEBAGAI
PENGENDALIAN KAWASAN KUMUH DI DESA TABANIO,
KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT
KALIMANTAN SELATAN

ORIGINALITY REPORT

2 %	2 %	0 %	2 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

 repository.its.ac.id Internet Source	2 %
--	------------

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off